



PEMERINTAH PROVINSI BALI LAPORAN KEUANGAN AUDITED



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah dan telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan diharapkan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan akuntabilitas publik.



Denpasar, 21 Mei 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi Bali

Tri Arva Dhvana Kubontubuh, SE., M.Si
NIP. [REDACTED]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
NERACA	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD	
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD	
1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD	
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	5
2.1. Ekonomi Makro	
2.2. Kebijakan Keuangan	
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD.....	67
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD	
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	
Bab IV Kebijakan akuntansi	72
4.1. Entitas Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah	
4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD	
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD	
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Pada OPD	
Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan OPD.....	113
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	
5.2. Neraca	
5.3. Laporan Operasional	
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas	

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024
2. SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2024
3. Berita Acara Rekonsiliasi Pengeluaran Bulan Desember 2024
4. Berita Acara Rekonsiliasi Tahun 2024 Urusan Akuntansi dengan Pengurus Barang.
5. Rekening Koran, STS dan Penutupan Kas Bendahara bulan Desember 2024
6. Bukti Pembayaran Listrik, Telpo dan Air Bulan Desember 2024
7. Laporan Mutasi Barang Persediaan Tahun 2024
8. Berita Acara Penghapusan Aset Rusak Berat Tahun 2024



ບົລິກຊັງປາບົລິກຊັງປາບົລິກ
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ຄຳສັ່ງການກ່ຽວກັບການຈັດການ
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ຈະມາດົງ ກຳລັງ ສູນກຳລັງ ການຈັດການ ການຈັດການ - ການຈັດການ (100000000) ການຈັດການ (100000000) ການຈັດການ
Jalan WR. Supratman No. 71 Denpasar - Bali (80236), Telepon (0361) 225091
Laman : www.diskopukm.baliprov.go.id, Pos-el : diskopukm@baliprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bali terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawab kami telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Denpasar, 21 Mei 2025

Kepala Dinas,




Tri Arva Dhvana Kubontubuh, SE., M.Si
NIP. [REDACTED]

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada OPD.

Laporan keuangan OPD Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2024 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi Belanja Tahun 2024 adalah sebesar Rp 23.791.258.861,75- atau mencapai 90,63% dari anggarannya.

Realisasi belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 12.310.745.412,06 atau 93,41% dari anggarannya.

Seluruh program kegiatan Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerjanya, yaitu :

NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2024 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 11.691.562.139,69- yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 80.777.400,00- atau mencapai 0,69% dari seluruh aset, dan aset tetap sebesar Rp. 11.610.784.739,69 atau mencapai 99,30% dari seluruh aset. Sedangkan aset lain-lain jumlahnya Rp.00,00 atau mencapai 00,00% dari seluruh aset dan Jumlah ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 11.266.464.616,69

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menggambarkan realisasi Pendapatan Operasional, Beban dan Surplus (Defisit) dalam Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp 0,00.-

Realisasi Beban Tahun 2024 sebesar Rp 23.231.999.297,06

Realisasi Defisit Operasional Tahun 2024 sebesar Rp (23.231.999.297,06)



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	11.691.562.139,69	11.323.345.059,00
1.1	ASET LANCAR	80.777.400,00	2.253.800,00
	JUMLAH ASET LANCAR	80.777.400,00	2.253.800,00
1.3	ASET TETAP	11.610.784.739,69	11.321.091.259,00
	JUMLAH ASET TETAP	11.610.784.739,69	11.321.091.259,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	11.691.562.139,69	11.323.345.059,00
2	KEWAJIBAN	425.097.523,00	516.784.507,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	425.097.523,00	516.784.507,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	425.097.523,00	516.784.507,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	425.097.523,00	516.784.507,00
3	EKUITAS	11.266.464.616,69	10.806.560.552,00
3.1	EKUITAS	11.266.464.616,69	10.806.560.552,00
	JUMLAH EKUITAS	11.266.464.616,69	10.806.560.552,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	11.691.562.139,69	11.323.345.059,00

Provinsi Bali, 21 Mei 2025
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tri Arya Dhyana Kubontubuh, SE., M.Si
NIP. [REDACTED]

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	23.231.998.397,06	19.637.034.051,00	3.594.964.346,06	18,31
8.1	BEBAN OPERASI	22.966.944.736,06	19.327.283.841,00	3.639.660.895,06	18,83
8.1.01	Beban Pegawai	10.709.689.650,00	11.623.530.334,00	(913.840.684,00)	(7,86)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	12.232.255.086,06	7.628.753.507,00	4.603.501.579,06	60,34
8.1.04	Beban Subsidi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
8.1.05	Beban Hibah	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	22.966.944.736,06	19.327.283.841,00	3.639.660.895,06	18,83
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	265.053.661,00	309.750.210,00	(44.696.549,00)	(14,43)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Perlengkapan	83.877.661,00	129.127.952,00	(45.250.291,00)	(35,04)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	176.921.262,00	176.688.301,00	232.961,00	0,13
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jembatan, dan Sarana	4.254.738,00	3.933.957,00	320.781,00	8,15
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	265.053.661,00	309.750.210,00	(44.696.549,00)	(14,43)
	JUMLAH BEBAN	23.231.998.397,06	19.637.034.051,00	3.594.964.346,06	18,31
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(23.231.998.397,06)	(19.637.034.051,00)	(3.594.964.346,06)	18,31

Provinsi Bali, 21 Mei 2025
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Tri Arya Dhvana Kubontubuh SE, M Si
NIP. [REDACTED]



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	10.806.560.552,00	10.987.535.042,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(23.231.998.397,06)	(19.637.034.051,00)
RK PPKD	23.691.902.461,75	19.409.467.407,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	46.592.154,00
EKUITAS AKHIR	11.266.464.616,69	10.806.560.552,00

Provinsi Bali, 21 Mei 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

Tri Arya Dhyana Kubontubuh, SE., M.Si

NIP [REDACTED]

Ditandatangani Oleh [REDACTED] / Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	26.251.229.311,00	23.791.258.861,75	90,63	19.378.257.240,00
5.1	BELANJA OPERASI	25.490.528.961,00	23.137.155.320,06	90,77	19.329.757.240,00
5.1.01	Belanja Pegawai	12.285.642.851,00	10.801.409.908,00	87,92	11.632.298.785,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.670.926.408,00	4.455.475.657,00	95,39	4.847.922.364,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.378.259.332,00	3.240.763.431,00	95,93	3.495.982.524,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.349.630.332,00	3.212.135.331,00	95,90	3.495.982.524,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	28.629.000,00	28.628.100,00	100,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	323.000.908,00	309.166.666,00	95,72	327.173.374,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	318.992.908,00	305.158.732,00	95,66	327.173.374,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.008.000,00	4.007.934,00	100,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	188.965.000,00	171.860.000,00	90,95	195.180.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	188.965.000,00	171.860.000,00	90,95	195.180.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	139.110.000,00	137.119.900,00	98,57	173.914.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	134.400.000,00	132.409.900,00	98,52	173.914.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.710.000,00	4.710.000,00	100,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	87.060.000,00	85.120.000,00	97,77	96.070.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	87.060.000,00	85.120.000,00	97,77	96.070.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	163.855.800,00	157.296.240,00	96,00	179.022.240,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	161.248.680,00	154.689.120,00	95,93	179.022.240,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.607.120,00	2.607.120,00	100,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	48.934.398,00	47.861.619,00	97,81	30.060.089,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	48.934.398,00	47.861.619,00	97,81	30.060.089,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	54.295,00	39.131,00	72,07	41.015,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50.195,00	38.456,00	76,61	41.015,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.100,00	675,00	16,46	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	300.752.974,00	279.783.186,00	93,03	321.956.076,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	299.259.133,00	278.289.345,00	92,99	321.956.076,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.493.841,00	1.493.841,00	100,00	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.825.870,00	6.616.343,00	96,93	7.130.713,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.757.161,00	6.547.634,00	96,90	7.130.713,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	68.709,00	68.709,00	100,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.477.734,00	19.849.141,00	96,93	21.392.333,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.271.613,00	19.643.020,00	96,90	21.392.333,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	206.121,00	206.121,00	100,00	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perseorangan ASN	13.630.097,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perseorangan PNS	13.615.782,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perseorangan PPPK	14.315,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.547.216.443,00	6.278.434.251,00	83,19	6.744.301.421,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.745.026.034,00	3.916.705.838,00	82,54	4.146.437.795,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.745.026.034,00	3.916.705.838,00	82,54	4.146.437.795,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	778.685.655,00	680.126.346,00	87,34	639.294.012,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	778.685.655,00	680.126.346,00	87,34	639.294.012,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.023.504.754,00	1.681.602.067,00	83,10	1.958.569.614,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.023.504.754,00	1.681.602.067,00	83,10	1.958.569.614,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan ASN	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00	40.075.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	45.900.000,00	45.900.000,00	100,00	40.075.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengawasan ASN	45.900.000,00	45.900.000,00	100,00	40.075.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menyerah ASN	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.179.886.110,00	12.310.745.412,06	93,41	7.622.458.455,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.943.273.200,00	2.768.637.762,00	94,07	946.035.281,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.943.273.200,00	2.768.637.762,00	94,07	946.035.281,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	414.141.400,00	400.294.100,00	96,66	286.683.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.022.400,00	948.000,00	92,72	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	52.293.300,00	42.853.000,00	81,95	60.854.031,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Ker	48.217.400,00	39.519.000,00	81,96	31.433.300,00

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bah	38.142.600,00	23.088.000,00	60,53	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Ben	9.528.000,00	7.940.000,00	83,33	5.560.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bah	75.121.800,00	55.606.000,00	74,02	49.080.750,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Per	16.192.500,00	11.647.000,00	71,93	21.091.600,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	11.278.800,00	10.334.000,00	91,62	15.481.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perf	0,00	0,00	0,00	3.698.100,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	1.348.400.000,00	1.275.343.662,00	94,58	343.189.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	132.735.000,00	107.100.000,00	80,69	54.970.750,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.500.000,00	5.445.000,00	99,00	516.250,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas	770.700.000,00	768.600.000,00	99,73	73.477.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	20.000.000,00	19.920.000,00	99,60	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	8.531.193.910,00	7.991.571.174,00	93,67	5.288.582.777,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.924.238.706,00	6.468.493.044,00	93,42	5.092.002.643,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Mod	1.382.200.000,00	1.355.800.000,00	98,09	669.400.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendid	300.000.000,00	161.000.000,00	53,67	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.484.600.064,00	1.409.444.592,00	94,94	2.938.042.100,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	206.820.320,00	206.820.320,00	100,00	206.498.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.173.200.000,00	2.108.000.000,00	97,00	12.500.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	208.584.384,00	208.584.384,00	100,00	208.197.600,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	312.876.576,00	278.112.512,00	88,89	312.296.400,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	278.112.512,00	278.112.512,00	100,00	277.596.800,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.600.000,00	5.700.000,00	86,36	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	169.344.850,00	169.000.000,00	99,80	169.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotre	77.000.000,00	75.400.000,00	97,92	79.650.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	33.000.000,00	13.500.344,00	40,91	13.536.779,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	56.500.000,00	22.121.850,00	39,15	27.137.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	218.000.000,00	167.591.830,00	76,88	165.376.264,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.400.000,00	9.304.700,00	53,48	9.771.200,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	272.354.704,00	246.578.130,00	90,54	196.580.134,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	105.044.304,00	100.337.130,00	95,52	98.583.878,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi N	9.470.544,00	8.277.930,00	87,41	5.547.020,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	11.837.968,00	10.347.210,00	87,41	92.449.236,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	146.001.888,00	127.615.860,00	87,41	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	62.680.500,00	60.000.000,00	95,72	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	47.680.500,00	45.000.000,00	94,38	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.252.000.000,00	1.216.500.000,00	97,16	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Perte	20.000.000,00	19.400.000,00	97,00	0,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendit	1.232.000.000,00	1.197.100.000,00	97,17	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbinga	19.920.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	19.920.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	467.790.000,00	442.163.869,06	94,52	88.172.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	216.790.000,00	191.981.000,00	88,56	88.172.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angk	164.800.000,00	149.211.000,00	90,54	61.192.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angk	0,00	0,00	0,00	15.830.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah T	25.620.000,00	22.940.000,00	89,54	3.610.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Un	15.330.000,00	12.185.000,00	79,48	5.150.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kor	11.040.000,00	7.645.000,00	69,25	2.390.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	251.000.000,00	250.182.869,06	99,67	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bang	251.000.000,00	250.182.869,06	99,67	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.225.629.000,00	1.096.372.607,00	89,45	1.299.668.397,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.225.629.000,00	1.096.372.607,00	89,45	1.299.668.397,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	365.804.000,00	273.872.607,00	74,87	24.691.597,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	115.880.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	839.825.000,00	802.500.000,00	95,56	1.159.096.800,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan ke	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ket	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.04.04	Belanja Subsidi kepada Koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.04.04.01	Belanja Subsidi kepada Koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.04.04.01.0001	Belanja Subsidi kepada Koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organ	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	25.490.528.961,00	23.137.155.320,06	90,77	19.329.757.240,00

5.2	BELANJA MODAL	760.700.350,00	654.103.541,69	85,99	48.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	530.444.200,00	468.817.500,00	88,38	48.500.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	29.492.100,00	27.640.000,00	93,72	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	29.492.100,00	27.640.000,00	93,72	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	29.492.100,00	27.640.000,00	93,72	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	164.594.100,00	152.791.500,00	92,83	11.600.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	61.437.500,00	59.275.000,00	96,48	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	61.437.500,00	59.275.000,00	96,48	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	103.156.600,00	93.516.500,00	90,65	11.600.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	39.161.900,00	38.200.000,00	97,54	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	32.494.700,00	32.416.500,00	99,76	11.600.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Helm, Jaket, Sepatu, dll)	31.500.000,00	22.900.000,00	72,70	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Perekaman	111.821.400,00	102.421.000,00	91,59	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	111.821.400,00	102.421.000,00	91,59	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	50.500.000,00	49.800.000,00	98,61	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	61.321.400,00	52.621.000,00	85,81	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	224.536.600,00	185.965.000,00	82,82	36.900.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	193.849.300,00	157.327.000,00	81,16	30.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	193.849.300,00	157.327.000,00	81,16	30.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	30.687.300,00	28.638.000,00	93,32	6.900.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	18.138.300,00	18.138.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	12.549.000,00	10.500.000,00	83,67	6.900.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	230.256.150,00	185.286.041,69	80,47	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	230.256.150,00	185.286.041,69	80,47	0,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	155.256.150,00	115.481.041,69	74,38	0,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lain	155.256.150,00	115.481.041,69	74,38	0,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	75.000.000,00	69.805.000,00	93,07	0,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	75.000.000,00	69.805.000,00	93,07	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	760.700.350,00	654.103.541,69	85,99	48.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	26.251.229.311,00	23.791.258.861,75	90,63	19.378.257.240,00
	SURPLUS/DEFISIT	(26.251.229.311,00)	(23.791.258.861,75)	90,63	(19.378.257.240,00)

Provinsi Bali, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

I Wayan Engulita, S.E., M.Si.





ປະທັບສູງປະທັບສູງ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂົງເຂດການຄ້າຂາຍ, ການບໍລິຫານ, ການສົ່ງເສີມການຄ້າ

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ຂົງເຂດການຄ້າຂາຍ, ການບໍລິຫານ, ການສົ່ງເສີມການຄ້າ - ທີ່ (100000000) ການບໍລິຫານ (100000000) ການສົ່ງເສີມການຄ້າ

Jalan WR. Supratman No. 71 Denpasar - Bali (80236), Telepon (0361) 225091

Laman : www.diskopukm.baliprov.go.id, Pos-el : diskopukm@baliprov.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Laporan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bali disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi Keuangan, Realisasi Anggaran, hasil Operasi dan Perubahan Ekuitas suatu Entitas Pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana OPD;
- menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan OPD menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana OPD.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pelaporan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2); Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya,
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan

Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d) Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
- i) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali No 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3. INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI

1. Satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali beralamat di Jalan WR. Supratman No. 71 Denpasar;
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

Tugas Pokok :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai

dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Fungsi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakanteknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi,
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi,
 - c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,
 - d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Jumlah pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 136 orang berdasarkan pangkat, golongan, eselon dan tenaga Non ASN (kontrak) adalah :

PangkatGolongan IV/c	:	1 orang
Pangkat/Golongan IV/b	:	3 orang
Pangkat/Golongan IV/a	:	7 orang
Pangkat/Golongan III/d	:	13 orang
Pangkat/Golongan III/c	:	3 orang
Pangkat/Golongan III/b	:	13 orang
Pangkat/Golongan III/a	:	9 orang
Pangkat/Golongan II/d	:	2 orang
Pangkat/Golongan II/c	:	4 orang
Pangkat/Golongan II/b	:	5 orang
Pangkat/Golongan I/d	:	0 orang
Pegawai PPPK	:	3 orang
Pegawai Non ASN	:	69 orang
Jumlah	:	127 orang

1.4 .SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
- 3.2. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Bab V PenjelasanPos-Pos LaporanKeuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Operasional (LO)
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 *Ekonomi Makro*

Ekonomi makro mencerminkan dinamika perubahan ekonomi yang berdampak pada masyarakat, perusahaan, dan pasar. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan analisis ekonomi makro sebagai instrumen untuk merumuskan serta mengevaluasi kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan menetapkan target pembangunan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, kondisi ekonomi makro di Provinsi Bali menunjukkan perbaikan seiring dengan pemulihan sektor pariwisata. Meskipun tingkat kunjungan belum sepenuhnya kembali seperti sebelum pandemi, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, asumsi makroekonomi yang digunakan mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah tahun 2024 atau tahun sebelumnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,00%.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,79%.
- c. Gini Rasio sebesar 0,361.
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78.63.
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,48%.
- f. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 2,69%.
- g. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp298,44 triliun.

2.1.1 *Tingkat Kemiskinan*

Penduduk miskin ditentukan berdasarkan garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non-pangan agar individu dapat hidup layak. Dengan demikian, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Namun, pemetaan kemiskinan tidak cukup hanya melihat besarnya persentase penduduk miskin. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia. Kedalaman kemiskinan mengukur sejauh mana pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan mencerminkan kesenjangan pengeluaran antara individu termiskin dengan rata-rata pengeluaran kelompok miskin di suatu daerah. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin serius tingkat kemiskinan yang terjadi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada tahun 2024 tercatat mencapai 4,00%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2024)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun 2023-2024
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	4,57	4,25	4,00	Turun 0,25 persen poin
2	Jumlah penduduk miskin (Ribuan Orang)	205,68	193,78	184,43	Turun 9,35 ribu orang
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	9,54	9,36	9,03	Turun 0,33 persen poin
4	Peringkat Provinsi	3	1	1*	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024*

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2024 (keadaan Maret 2024) sebesar 4% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin tercatat 4,25%. Pada September 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 176,21 ribu orang (3,80 persen), mengalami penurunan sebesar 8,22 ribu orang atau 0,20 persen poin dibandingkan dengan Maret 2024 yang mencapai 184,43 ribu orang (4,00 persen).

Berdasarkan lokasi tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di kawasan perkotaan mengalami penurunan sebanyak 6,38 ribu orang, dari 119,31 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 112,93 ribu orang pada September 2024. Sementara itu, di wilayah perdesaan, jumlah penduduk miskin juga berkurang sebanyak 1,83 ribu orang, dari 65,12 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 63,29 ribu orang pada September 2024.

Peningkatan kinerja sektor pariwisata pada tahun 2024 disinyalir berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Meskipun persentase penduduk miskin di Bali telah berada di bawah rata-rata nasional, perencanaan anggaran pada tahun mendatang tetap perlu memprioritaskan strategi yang efektif untuk menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2024)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,625	0,553	0,499	Turun 0,054
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,586	1,528	1,461	Turun 0,067
3	Peringkat Provinsi	2	1	1*	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024*

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2024)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,129	0,102	0,090	Turun 0,012
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,395	0,377	0,347	Turun 0,03
3	Peringkat Provinsi	1	1	1*	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024*

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase individu yang tidak bekerja dibandingkan dengan total angkatan kerja. Pengangguran terbuka dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Individu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan,
2. Individu yang belum bekerja tetapi sedang dalam proses mempersiapkan usaha,
3. Individu yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan, serta
4. Individu yang telah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja.

Menurut data BPS Provinsi Bali, TPT di Provinsi Bali pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,79%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (Keadaan Agustus Tahun 2024)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	4,8	2,69	1,79	Turun 0,90 persen poin
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	5,32	4,91	Turun 0,41 persen poin
3	Peringkat Provinsi	20	3	2*	Naik 1

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024*

Pada Agustus tahun 2024, TPT di Provinsi Bali tercatat sebesar 1,79%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan TPT Agustus tahun 2023 yang mencapai 2,69%. Meskipun mengalami penurunan, TPT Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,32%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 77,11 persen, meningkat sebesar 0,03 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Dalam periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 47,60 ribu orang, sementara jumlah pengangguran mengalami penurunan sebesar 23,74 ribu orang. Dari total penduduk yang bekerja, proporsi pekerja penuh mencapai 74,48 persen, menunjukkan peningkatan dibandingkan Agustus 2023. Sebaliknya, proporsi pekerja tidak penuh mengalami penurunan, baik pada kategori setengah pengangguran maupun pekerja paruh waktu.

Mayoritas penduduk yang bekerja masih berasal dari sektor informal, dengan proporsi sebesar 50,68 persen. Namun, angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan Agustus 2023. Sementara itu, TPT di kalangan lulusan Diploma I/II/III mengalami peningkatan pada Agustus 2024, dengan angka tertinggi di antara jenjang pendidikan lainnya, yakni sebesar 3,40 persen.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Rasio)

Indeks Gini, atau yang dikenal sebagai Gini Rasio, merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan dalam suatu negara atau wilayah pada periode tertentu. Pengukuran ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu representasi grafis dari distribusi kumulatif pengeluaran yang dibandingkan dengan distribusi yang seragam, di mana setiap persentase populasi menerima proporsi pendapatan yang sama.

Gini Rasio memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1, dengan interpretasi sebagai berikut:

1. Gini Rasio sebesar 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata, di mana setiap kelompok populasi menerima bagian pendapatan yang sama.
2. Gini Rasio sebesar 1 mencerminkan ketimpangan sempurna, di mana seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu kelompok tertentu.

Semakin mendekati angka 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi. Berdasarkan kategorisasi nilai Gini Rasio, ketimpangan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Ketimpangan rendah (Gini Rasio $< 0,35$)
2. Ketimpangan sedang (Gini Rasio antara $0,35 - 0,50$)
3. Ketimpangan tinggi (Gini Rasio $> 0,50$)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, pencapaian Gini Rasio di Provinsi Bali pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,361 poin, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Gini Rasio Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2024)

No	Gini Rasio	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Provinsi	0,363	0,362	0,361	Turun 0,001 poin
2	Tingkat Nasional	0,384	0,388	0,379	Turun 0,009 poin
3	Peringkat Provinsi	21	21	25*	Turun 4

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia dan Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024*

Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Bali, yang diukur menggunakan Gini Rasio, tercatat sebesar 0,361. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 0,001 poin dibandingkan dengan Gini Rasio tahun 2023 yang sebesar 0,362, serta lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan secara nasional.

Sementara itu, pada September 2024, ketimpangan pengeluaran penduduk, berdasarkan perhitungan Gini Rasio, mencapai 0,348. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,013 poin dibandingkan dengan Maret 2024 yang mencatatkan Gini Rasio sebesar 0,361. Penurunan ketimpangan tersebut juga tercermin dari meningkatnya proporsi pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terbawah, dari 18,20 persen pada Maret 2024 menjadi 18,88 persen pada September 2024.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM menggambarkan sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam aspek pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks ini dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu harapan hidup atau kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pengetahuan (tingkat pendidikan), serta standar hidup yang layak.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), IPM dikategorikan ke dalam empat tingkatan:

1. Rendah (< 60)
2. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
3. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
4. Sangat Tinggi (> 80)

Menurut data BPS Provinsi Bali, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali pada tahun 2024 mencapai 78,63 poin. Capaian ini tergolong dalam kategori tinggi karena melebihi standar IPM Nasional yang berada pada angka 75,02. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat IPM sebesar 78,01, terjadi peningkatan sebesar 0,62%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Jembrana	74,38	74,8	75,32	Naik 0,52 poin
2	Tabanan	77,22	77,87	78,83	Naik 0,96 poin
3	Badung	82,13	83	83,73	Naik 0,73 poin
4	Gianyar	78,87	79,69	80,23	Naik 0,54 poin
5	Klungkung	73,77	74,18	75,15	Naik 0,97 poin
6	Bangli	71,47	71,99	72,51	Naik 0,52 poin
7	Karangasem	69,48	70,09	70,91	Naik 0,82 poin
8	Buleleng	74,48	74,87	75,35	Naik 0,48 poin
9	Denpasar	84,39	84,68	85,11	Naik 0,43 poin
10	Provinsi Bali	77,4	78,01	78,63	Naik 0,62 poin
11	Indonesia/Nasional	73,77	74,39	75,02	Naik 0,63 poin
12	Peringkat Provinsi	4	5	5	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Provinsi Bali 2024*

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu daerah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam periode tertentu. Aktivitas perekonomian sendiri melibatkan proses pemanfaatan faktor produksi untuk menghasilkan output, yang pada gilirannya memberikan balas jasa kepada pemilik faktor produksi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perhitungan pertumbuhan ekonomi dilakukan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan dasar harga konstan tahun 2010.

Sepanjang tahun 2024, perekonomian Provinsi Bali tetap mengalami pertumbuhan dengan laju sebesar 5,48%. Meskipun terjadi penurunan sebesar 0,23% dibandingkan tahun 2023 yang mencatat pertumbuhan 5,71%, Bali tetap mampu mempertahankan posisinya di peringkat ke-5 secara nasional, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp)			
	Jembrana	9,16	9,49	9,97
	Tabanan	14,94	15,47	16,24
	Badung	31,95	35,55	37,67
	Gianyar	17,96	18,87	19,90
	Klungkung	5,77	6,04	6,35
	Bangli	4,51	4,67	4,88
	Karangasem	10,84	11,18	11,66
	Buleleng	22,46	23,28	24,45
	Denpasar	34,07	36,00	38,00
	Provinsi Bali	150,83	159,45	168,19
	Indonesia	11.710,22	12.301,47	12.920,28
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	2,98	3,66	4,98
	Tabanan	2,93	3,56	4,94
	Badung	9,97	11,29	5,94
	Gianyar	4,04	5,06	5,47
	Klungkung	3,12	4,70	5,08

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Bangli	2,80	3,50	4,54
	Karangasem	2,58	3,10	4,33
	Buleleng	3,11	3,64	5,04
	Denpasar	5,02	5,69	5,55
	Provinsi Bali	4,84	5,71	5,48
	Indonesia	5,31	5,05	5,03
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	6	5	6
	Tabanan	7	7	7
	Badung	1	1	1
	Gianyar	3	3	3
	Klungkung	4	4	4
	Bangli	8	8	8
	Karangasem	9	9	9
	Buleleng	5	6	5
	Denpasar	2	2	2
4	Peringkat Nasional	22	5	5

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*

Pada triwulan IV-2024, perekonomian Bali yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp78,36 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB) dan Rp43,83 triliun berdasarkan harga konstan (ADHK 2010=100). Selama triwulan IV-2024, ekonomi Bali tumbuh sebesar 3,37 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan sebesar 26,47 persen.

Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali pada triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 5,19 persen. Dari aspek produksi, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,24 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, Ekspor Luar Negeri mengalami kenaikan sebesar 15,67 persen. Secara kumulatif, dari triwulan I hingga triwulan IV-2024, ekonomi Bali mencatat pertumbuhan sebesar 5,48 persen (c-to-c). Struktur ekonomi Bali pada triwulan IV-2024 masih didominasi oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan kontribusi sebesar 21,75 persen. Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga menjadi penyumbang terbesar dengan proporsi sebesar 51,54 persen.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi, kondisi perekonomian di Provinsi Bali juga dapat dianalisis melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan indikator ekonomi yang

mencerminkan perubahan harga berbagai komoditas utama yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif bagi perekonomian, namun jika dikelola dengan baik melalui kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa yang efektif, inflasi justru dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan karakteristiknya, inflasi dikategorikan ke dalam empat jenis, yaitu:

1. Inflasi Ringan (Creeping Inflation) – Ditandai dengan kenaikan harga yang relatif rendah, dengan laju inflasi kurang dari 10% per tahun.
2. Inflasi Sedang (Galloping Inflation) – Lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, dengan laju inflasi berkisar antara 10-30% per tahun.
3. Inflasi Berat (High Inflation) – Mencapai kisaran 30-100% per tahun, menyebabkan lonjakan harga yang signifikan dan sulit dikendalikan.
4. Hiperinflasi (Hyperinflation) – Inflasi yang ekstrem, dengan tingkat kenaikan harga lebih dari 100% per tahun, memberikan dampak besar terhadap perekonomian.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali, tingkat inflasi di Provinsi Bali pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,34%, yang termasuk dalam kategori inflasi ringan. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,57%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Singaraja, Kota Denpasar, dan Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan (%)	-	-	2,44	-
2	Tingkat Inflasi Kabupaten Badung (%)	-	-	1,98	-
3	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	4,63	4,31	1,93	Turun 2,38 persen poin
4	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	6,44	2,54	2,69	Naik 0,15 persen poin
5	Tingkat Inflasi Provinsi Bali (%)	-	-	2,34	-
6	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	1,57	Turun 1,04 persen poin
7	Peringkat Provinsi (Denpasar)	1	2	1*	-
8	Peringkat Nasional (Bali)	-	-	4**	-

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen 2022, 2023, dan per Desember 2024*

Pada Desember 2024, inflasi di Provinsi Bali naik sebesar 0,31% dibandingkan dengan bulan sebelumnya (M-to-M). Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2024, inflasi Bali tercatat 2,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejak 2024 terdapat penambahan 2 wilayah pemantauan inflasi yakni Kabupaten Tabanan dan Badung. Secara wilayah, inflasi tidak terjadi secara merata di seluruh Provinsi Bali. Kabupaten Tabanan mencatat inflasi bulanan tertinggi sebesar 0.49%, sedangkan Kota Denpasar mengalami inflasi terendah sebesar 0.19%. Namun, dalam perhitungan tahunan, Kota Denpasar justru mencatat inflasi tertinggi sebesar 2.69%, sementara Singaraja mengalami inflasi

terendah sebesar 1.93%. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh disparitas distribusi barang, pola konsumsi, serta struktur pasar di masing-masing wilayah.

Dari sisi komoditas, kontribusi inflasi lebih banyak didorong oleh sektor pangan, terutama bahan makanan yang memiliki tingkat volatilitas tinggi. Kenaikan harga beberapa komoditas utama seperti daging babi, beras, dan kopi bubuk menunjukkan adanya tekanan permintaan yang meningkat atau gangguan pada rantai pasok. Oleh karena itu, pemantauan serta pengendalian harga melalui kebijakan yang tepat menjadi penting untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan keseimbangan ekonomi regional.

2.1.1 Struktur Perekonomian Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali

Struktur perekonomian Provinsi/Kabupaten/kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jembrana			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.189.288,61	3.381.630,98	3.815.640,37
	2. Pertambangan dan Penggalian	123.082,36	130.296,98	134.832,81
	3. Industri Pengolahan	775.281,70	826.377,27	888.418,27
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	21.388,48	23.839,96	24.216,47
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11.085,03	11.363,43	11.894,25
	6. Konstruksi	1.560.610,00	1.590.389,71	1.623.412,95
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1.515.979,77	1.648.399,89	1.711.991,78
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.992.432,14	2.281.484,63	2.505.118,37
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.725.726,48	1.915.053,52	2.112.996,33
	10. Informasi dan Komunikasi	920.103,44	962.912,12	1.006.944,06
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	564.164,82	642.046,66	731.776,53
	12. Real Estate	686.321,83	711.528,20	724.717,33
	13. Jasa Perusahaan	121.414,09	131.173,23	142.718,57
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan. dan Jaminan Sosial Wajib	408.829,98	407.500,36	426.835,69
	15. Jasa Pendidikan	329.302,20	326.228,55	337.600,10
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	359.633,80	375.560,11	386.767,10

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	17. Jasa Lainnya	227.611,00	247.491,35	259.128,71
	PDRB ADH Berlaku	14.532.255,74	15.613.276,95	16.845.009,68
2	Tabanan			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.423.615,00	5.723.710,40	6.169.684,07
	2. Pertambangan dan Penggalan	268.642,56	280.999,77	288.304,05
	3. Industri Pengolahan	1.420.241,95	1.518.608,39	1.686.305,21
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	27.812,16	31.261,63	33.476,61
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	37.610,48	39.832,49	42.378,80
	6. Konstruksi	2.416.304,08	2.501.179,21	2.591.319,38
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	2.133.918,14	2.319.825,21	2.440.374,29
	8. Transportasi dan Pergudangan	361.380,95	424.495,67	470.216,05
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.051.051,59	4.743.839,60	5.530.900,57
	10. Informasi dan Komunikasi	1.437.157,09	1.480.998,95	1.544.631,17
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.012.001,46	1.158.586,29	1.337.744,33
	12. Real Estate	1.243.819,43	1.290.459,70	1.335.134,83
	13. Jasa Perusahaan	261.980,08	283.012,53	313.062,58
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.903.670,09	1.964.653,99	2.008.567,44
	15. Jasa Pendidikan	472.511,89	470.255,13	487.272,02
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	664.021,58	693.729,77	716.370,05
	17. Jasa Lainnya	545.559,37	606.245,20	654.056,26
	PDRB ADH Berlaku	23.681.297,92	25.531.693,95	27.649.797,72
3	Badung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.958.842,15	4.152.829,32	4.418.709,58
	2. Pertambangan dan Penggalan	173.454,78	176.424,08	175.537,09
	3. Industri Pengolahan	2.340.266,80	2.447.355,08	2.609.050,99
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	86.470,56	98.010,62	101.104,90
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	126.000,66	133.721,84	144.254,69
	6. Konstruksi	5.682.997,77	5.831.279,10	5.936.588,64
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4.320.982,49	4.740.948,09	5.023.681,41

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	8. Transportasi dan Pergudangan	11.477.866,06	19.131.742,25	21.360.511,21
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.034.218,24	16.877.404,33	19.318.413,47
	10. Informasi dan Komunikasi	4.133.369,68	4.216.549,63	4.474.419,94
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.753.186,88	2.043.883,80	2.441.594,87
	12. Real Estate	2.204.535,95	2.278.749,26	2.370.020,26
	13. Jasa Perusahaan	458.276,24	508.423,39	564.326,22
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.086.235,78	2.184.119,45	2.458.991,02
	15. Jasa Pendidikan	1.965.509,23	1.980.372,32	2.004.091,16
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	942.239,86	986.583,93	1.022.096,32
	17. Jasa Lainnya	545.547,02	611.145,40	674.808,97
	PDRB ADH Berlaku	55.290.000,16	68.399.541,91	75.098.200,74
4	Gianyar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.510.636,94	3.675.839,89	3.891.726,30
	2. Pertambangan dan Penggalian	391.638,87	400.329,48	419.974,31
	3. Industri Pengolahan	3.435.572,11	3.702.588,93	3.987.517,87
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	31.302,85	35.993,58	39.498,26
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	34.784,60	36.914,45	39.844,01
	6. Konstruksi	3.622.140,00	3.748.697,89	3.811.078,29
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	2.315.521,87	2.519.746,62	2.699.847,80
	8. Transportasi dan Pergudangan	239.273,09	278.927,26	312.035,20
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.511.589,61	6.809.142,28	7.853.299,40
	10. Informasi dan Komunikasi	1.934.235,55	2.022.467,54	2.185.675,15
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.306.803,62	1.470.144,23	1.616.080,27
	12. Real Estate	1.302.343,47	1.348.206,25	1.369.136,50
	13. Jasa Perusahaan	368.103,38	407.992,81	448.403,69
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.594.599,03	1.603.134,89	1.736.920,82
	15. Jasa Pendidikan	698.609,27	694.994,47	735.679,20
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.074.711,90	1.127.533,03	1.186.379,33
	17. Jasa Lainnya	572.339,60	646.762,67	713.502,61

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	PDRB ADH Berlaku	27.944.205,76	30.529.416,26	33.046.599,01
5	Klungkung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.026.791,81	2.184.286,74	2.429.551,82
	2. Pertambangan dan Penggalan	279.591,68	295.100,52	312.759,48
	3. Industri Pengolahan	903.301,57	951.253,24	1.024.071,76
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	10.932,89	12.862,85	14.893,69
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	17.998,95	19.316,40	20.615,55
	6. Konstruksi	979.637,48	1.007.661,23	1.050.024,51
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	804.462,79	875.010,35	917.712,34
	8. Transportasi dan Pergudangan	200.722,73	255.309,30	308.267,67
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	923.818,67	1.208.761,79	1.455.499,58
	10. Informasi dan Komunikasi	876.961,44	913.977,88	964.968,84
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	417.684,68	474.210,75	530.410,20
	12. Real Estate	223.018,95	232.428,12	244.020,72
	13. Jasa Perusahaan	94.767,58	103.802,93	117.940,92
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	527.576,47	553.753,78	587.891,46
	15. Jasa Pendidikan	229.617,29	230.940,31	243.654,61
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	458.999,65	484.075,44	501.955,32
	17. Jasa Lainnya	234.323,91	269.463,75	291.246,90
	PDRB ADH Berlaku	9.210.208,54	10.072.215,38	11.015.485,38
6	Bangli			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.035.006,00	2.159.462,75	2.305.078,49
	2. Pertambangan dan Penggalan	131.510,24	139.860,70	141.074,92
	3. Industri Pengolahan	641.512,30	681.839,42	706.341,00
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	3.059,12	3.481,68	3.643,35
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.773,48	4.879,57	4.899,17
	6. Konstruksi	654.650,77	675.513,40	685.416,40
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	738.882,07	807.988,58	831.315,69
	8. Transportasi dan Pergudangan	79.728,61	89.153,81	97.253,93

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	821.596,16	964.649,92	1.138.978,65
	10. Informasi dan Komunikasi	338.265,01	354.235,97	374.687,21
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	222.152,25	257.966,62	298.905,38
	12. Real Estate	232.396,17	241.140,91	247.720,41
	13. Jasa Perusahaan	40.360,77	42.964,87	47.956,89
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	843.307,07	895.256,27	956.295,79
	15. Jasa Pendidikan	179.632,29	181.363,75	186.771,51
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119.671,79	124.989,83	130.919,24
	17. Jasa Lainnya	251.486,23	283.561,43	308.344,91
	PDRB ADH Berlaku	7.337.990,33	7.908.309,50	8.465.602,94
7	Karangasem			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.692.140,04	4.883.332,90	5.136.046,48
	2. Pertambangan dan Penggalian	614.611,50	676.062,20	732.501,48
	3. Industri Pengolahan	740.475,76	774.052,10	812.244,50
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	17.178,66	19.350,10	19.583,50
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	22.691,01	24.557,10	26.065,36
	6. Konstruksi	1.270.811,10	1.318.015,90	1.388.940,76
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1.005.922,35	1.082.719,70	1.083.924,05
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.789.763,23	3.070.993,40	3.239.840,33
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.427.387,30	1.739.410,30	1.963.789,48
	10. Informasi dan Komunikasi	634.616,08	653.175,20	688.430,29
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	901.446,44	1.062.929,80	1.194.490,15
	12. Real Estate	721.175,79	754.932,90	796.748,39
	13. Jasa Perusahaan	142.518,15	152.030,40	166.652,96
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.365.652,50	1.365.395,50	1.470.849,27
	15. Jasa Pendidikan	464.023,50	467.122,00	505.366,70
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	420.578,37	442.879,10	472.299,19
	17. Jasa Lainnya	438.499,58	487.816,80	512.555,10
	PDRB ADH Berlaku	17.669.491,36	18.974.775,40	20.210.327,99

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
8	Buleleng			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.713.940,52	8.004.808,88	8.445.133,84
	2. Pertambangan dan Penggalian	316.017,83	327.936,72	346.694,92
	3. Industri Pengolahan	2.202.415,92	2.364.120,60	2.671.661,09
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	60.525,06	67.514,94	72.171,29
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	39.269,31	42.908,86	42.068,50
	6. Konstruksi	3.450.497,17	3.541.541,69	3.716.363,13
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4.332.078,71	4.727.916,99	5.023.231,19
	8. Transportasi dan Pergudangan	389.627,59	454.042,28	508.734,02
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.209.229,73	6.198.370,94	7.069.183,70
	10. Informasi dan Komunikasi	2.141.119,70	2.198.163,88	2.266.618,36
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.657.123,69	1.931.174,90	2.257.241,86
	12. Real Estate	1.697.749,64	1.763.266,42	1.852.223,07
	13. Jasa Perusahaan	255.125,00	281.872,31	303.807,00
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.998.931,25	2.001.994,79	2.129.695,24
	15. Jasa Pendidikan	2.741.409,33	2.726.839,41	2.849.266,95
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	888.702,34	927.592,07	972.804,27
	17. Jasa Lainnya	711.521,40	791.295,42	860.853,44
	PDRB ADH Berlaku	35.805.284,19	38.351.361,10	41.387.751,89
9	Kota Denpasar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.787.130,03	3.949.625,79	3.778.610,97
	2. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
	3. Industri Pengolahan	3.653.694,27	3.875.731,94	4.206.282,45
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	294.961,88	347.657,68	409.059,32
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	133.996,87	136.499,25	134.263,81
	6. Konstruksi	6.520.700,87	6.689.585,29	6.820.641,59
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	5.468.721,49	6.041.481,81	6.453.315,98
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.453.809,78	1.773.632,76	1.918.713,85
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan	11.432.033,63	14.328.513,00	16.682.509,16

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Minum			
	10. Informasi dan Komunikasi	2.765.656,56	2.844.638,21	2.975.124,08
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.654.675,52	4.210.391,02	5.023.714,55
	12. Real Estate	2.372.487,01	2.457.089,19	2.496.708,08
	13. Jasa Perusahaan	1.106.931,48	1.225.422,18	1.345.518,35
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.978.879,20	2.997.349,63	3.254.187,63
	15. Jasa Pendidikan	6.562.279,44	6.587.509,19	6.992.708,13
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.552.815,68	1.636.171,17	1.700.830,67
	17. Jasa Lainnya	895.053,48	999.003,56	1.108.025,10
	PDRB ADH Berlaku	54.633.827,19	60.100.301,66	65.300.213,73
10	Provinsi Bali			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36.013.894,37	37.709.948,37	40.059.242,70
	2. Pertambangan dan Penggalian	2.312.139,37	2.436.619,10	2.549.773,82
	3. Industri Pengolahan	16.142.987,88	17.102.937,17	18.637.068,95
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	553.539,86	640.751,91	717.467,90
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	421.646,34	446.944,72	458.996,26
	6. Konstruksi	26.128.699,12	26.805.931,83	27.567.304,79
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	22.550.755,72	24.591.396,32	25.933.889,82
	8. Transportasi dan Pergudangan	18.896.608,37	27.656.961,48	30.615.664,20
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	44.112.103,06	54.680.183,65	63.912.735,23
	10. Informasi dan Komunikasi	15.028.830,69	15.517.170,16	16.101.487,08
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	11.486.409,28	13.277.201,87	15.457.622,58
	12. Real Estate	10.683.388,28	11.055.527,30	11.449.017,85
	13. Jasa Perusahaan	2.866.674,70	3.164.354,38	3.455.353,28
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	13.646.457,38	13.888.797,80	14.933.540,96
	15. Jasa Pendidikan	13.614.504,84	13.669.131,84	14.228.758,62
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.485.858,10	6.805.150,01	7.066.961,92
	17. Jasa Lainnya	4.423.392,89	4.909.174,98	5.296.623,87
	PDRB ADH Berlaku	245.367.890,26	274.358.182,88	298.441.509,83

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.2 Kebijakan Keuangan

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)

2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*).

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek Retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Retribusi jasa umum;
 - 2) Retribusi jasa usaha; dan
 - 3) Retribusi perizinan tertentu.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.

2. Pendapatan Transfer terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat yang ada di diterima oleh Provinsi Bali meliputi:

- 1) Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat umum dan dana yang bersifat khusus. Dana Perimbangan terdiri atas: a) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam; b) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan merupakan Dana Transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horisontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot daerah provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi; c) Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

- 2) Insentif Fiskal.
- b. Transfer Antar Daerah
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari:
 - a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT Jasa Raharja;
 - b. Dana Darurat; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU.

Peningkatan Pendapatan Daerah diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- b. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- e. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
- f. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui *electronic commerce* (*e-commerce*);
- g. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- h. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga dalam penyediaan biaya pembangunan daerah;
- j. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - 1) Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - 2) Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, *samsat* keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
 - 3) Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui *playstore* dan informasi

perpajakan melalui *website*;

- 4) Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
- 5) Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*; dan
- 6) Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.

2. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Transfer

Transfer ke daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horisontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. Transfer ke daerah meliputi DBH, DAU, DAK dan Insentif Fiskal. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan transfer ke daerah mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi daerah. Selain itu, pengalokasian DBH memperhitungkan kinerja daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada *unit cost* dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek pengalokasian, reformulasi DAU dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, DAK lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-daerah.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada daerah tertentu, sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus merangsang kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD di luar Gaji.
3. Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai

strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek
2. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung perangkat daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset

milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah;

4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya;
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran nasional, Pemerintah Pusat sudah menetapkan 7 Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai berikut.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Guna menjaga sinergitas prioritas pembangunan dengan pemerintah pusat dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

Prioritas 1: Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata

Prioritas 2: Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan

Prioritas 3: Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial

Prioritas 4: Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya

Prioritas 5: Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Prioritas 6: Infrastruktur

Prioritas 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

2.4 Belanja Wajib (Mandatory Spending) dan Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, sebagai berikut:

2.4.1 Belanja Wajib (Mandatory Spending) Dalam Postur APBD TA 2024

Belanja wajib (*mandatory spending*) adalah kebijakan belanja yang difokuskan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja mandatory spending dalam tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Bali meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Wajib Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir E.1.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi anggaran belanja wajib fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib fungsi pendidikan TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.10 Capaian Belanja Wajib Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)

1	a.	Urusan Bidang Pendidikan :	1.951.092.197.353,00	1.813.572.701.073,43	92,95%
		1) Belanja Operasi:	1.519.093.347.148,00	1.473.206.264.353,70	96,98%
		a. belanja pegawai;	1.146.289.783.066,00	1.091.604.335.536,00	95,23%
		b. belanja barang dan jasa;	280.472.814.082,00	290.428.985.613,70	103,55%
		c. belanja hibah	92.330.750.000,00	91.172.943.204,00	98,75%
		2) Belanja Modal:	431.998.850.205,00	340.366.436.719,73	78,79%
	b.	Urusan Bidang Kebudayaan:	23.535.121.312,00	21.992.584.152,00	93,45%
		1) Belanja Operasi:	23.165.121.312,00	21.992.584.152,00	94,94%
		belanja barang dan jasa	23.165.121.312,00	21.992.584.152,00	94,94%
		2) Belanja Modal:	370.000.000,00	0,00	0,00%
	c.	Urusan Bidang Perpustakaan:	627.473.360,00	586.194.410,00	93,42%
		1) Belanja Operasi:	527.473.360,00	487.663.040,00	92,45%
		belanja barang dan jasa	527.473.360,00	487.663.040,00	92,45%
		2) Belanja Modal:	100.000.000,00	98.531.370,00	98,53%
	d.	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	66.536.664.400,00	61.936.121.240,00	93,09%
		1) Belanja Operasi:	66.536.664.400,00	61.936.121.240,00	93,09%
		a. belanja barang dan jasa;	12.586.664.400,00	8.748.328.314,00	69,50%
		b. belanja hibah	53.950.000.000,00	53.187.792.926,00	98,59%
		2) Belanja Modal:	0,00	0,00	0,00%
	e.	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	8.513.613.680,00	8.176.279.815,00	96,04%
		1) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi pada Dinas Ketenagakerjaan dan	336.350.000,00	325.631.250,00	96,81%

			Energi Sumber Daya Mineral			
		2)	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.009.040.280,00	7.688.724.592,00	96,00%
		3)	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata	168.223.400,00	161.923.973,00	96,26%
2	Anggaran Fungsi Pendidikan			2.050.305.070.105,00	1.906.263.880.690,43	92,97%
3	Total Belanja Daerah			7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
Rasio Bidang Pendidikan (2:3) x 100%				26,30%	26,14%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib fungsi pendidikan sebesar Rp2.050.305.070.105,00 atau 26,30% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp1.906.263.880.690,43 atau 26,14% dari total realisasi anggaran belanja daerah sebesar Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya. Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pemerataan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketersediaan dan sebaran fasilitas pendidikan berupa SMA, SMK, dan SLB
- b. Memperhatikan jumlah dan sebaran tenaga pendidik, yaitu guru dan PPPK
- c. Ketersediaan kurikulum lokal, antara lain:
 - 1) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Menengah (SMA/SMK)
 - 2) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Khusus (SDLB, SMPLB, SMALB)
 - 3) Inovasi Keyboard Tamiang untuk mendukung implementasi pelestarian Aksara Bali dalam media digital
 - 4) Bulan Bahasa Bali yang dilaksanakan setiap bulan Pebruari
 - 5) Pasraman Kilat (dilaksanakan pada saat jeda sekolah)
- d. Angka harapan lama sekolah (HLS)

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah

per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini

- e. Upaya optimalisasi SMK (Pendidikan Vokasi), seperti:
 - 1) Pengadaan ajang gelar karya/expo siswa SMK dengan tema “Merdeka Berkarya Vokasi Berjaya”
 - 2) Melakukan Kerjasama *link and match* antara SMK dan dunia usaha/industri
- f. Inovasi pengembangan pembelajaran berbasis TIK tahun 2024, seperti:
 - 1) Penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online
Sistem untuk memfasilitasi penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK Negeri se-Bali
 - 2) Portal bali melajah (BALI BELAJAR)
Portal yang menyediakan berbagai konten pembelajaran sehingga dapat dimanfaatkan oleh Guru dan Peserta Didik
 - 3) Aplikasi kelas virtual
Kelas Virtual Bali Melajah merupakan E-learning untuk mewujudkan SDM Bali unggul, cerdas & berkarakter dengan efisien, kapan saja dan di mana saja.

2. Belanja Wajib Kesehatan

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 409 ayat (4) dan (5) dan butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi anggaran belanja wajib kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib kesehatan TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.11 Capaian Belanja Wajib Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	a. Urusan bidang Kesehatan:	703.679.827.456,00	645.621.139.448,60	91,75%
	1) Belanja Operasi:	641.701.325.312,00	587.658.787.821,88	91,58%
	a. belanja pegawai;	357.485.933.695,00	326.552.360.072,00	91,35%
	b. belanja barang dan jasa;	283.193.056.481,00	260.212.432.893,88	91,89%
	c. belanja hibah	1.022.335.136,00	893.994.856,00	87,45%
	2) Belanja Modal:	61.978.502.144,00	57.962.351.626,72	93,52%
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan,	136.576.380.352,00	123.928.287.644,00	90,74%

	antara lain:				
	1)	Belanja Transfer:	72.991.871.228,00	66.495.840.880,00	91,10%
		Sharing PBI Daerah	72.991.871.228,00	66.495.840.880,00	91,10%
	2)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan pada Seluruh OPD di luar Dinas Kesehatan	62.983.853.524,00	56.857.122.247,00	90,27%
	3)	Belanja Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal pada Dinas PMD Dukcapil	332.121.540,00	316.199.902,00	95,21%
	4)	Belanja Sub Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan	268.534.060,00	259.124.615,00	96,50%
2	Anggaran Kesehatan (a+b)		840.256.207.808,00	769.549.427.092,60	91,59%
3	Total Belanja Daerah		7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
4	Gaji dan Tunjangan ASN		944.767.093.038,00	915.767.773.065,00	96,93%
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		6.850.914.637.766,00	6.377.284.076.933,07	93,09%
Rasio Bidang Kesehatan (2:5) x 100%			12,26%	12,07%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib kesehatan sebesar Rp840.256.207.808,00 atau 12,26% dari total anggaran belanja daerah di luar gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp6.850.914.637.766,00 dengan realisasi sebesar Rp769.549.427.092,60 atau 12,07% dari total realisasi anggaran belanja daerah di luar gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp6.377.284.076.933,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran Kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan Kesehatan daerah yang mengacu pada program Kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja, termasuk memperhatikan penyelesaian permasalahan Kesehatan berdasarkan beban penyakit atau epidemiologi. Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan layanan kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pemetaan/Pendataan permasalahan kesehatan:

- 1) Penduduk yang tidak memiliki akses layanan kesehatan,
 - 2) Sebaran Tenaga Kesehatan, dan
 - 3) Ketersediaan layanan kesehatan sampai tingkat banjar (Posyandu).
- b. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk memastikan UHC 100%
 - c. Memfasilitasi pemenuhan tenaga kesehatan pada daerah yang masih kekurangan
 - d. Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas
 - e. Mendorong peran serta swasta untuk membuka dan meningkatkan layanan kesehatan
3. Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebagaimana maksud Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022, butir E.l.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik dimaksud diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib infrastruktur pelayanan publik TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.122 Capaian Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	Total Belanja Daerah	7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
a.	Belanja Bagi Hasil	1.821.886.080.384,00	1.800.971.992.343,00	98,85%
b.	Belanja Bantuan Keuangan	366.931.922.273,00	355.860.433.998,00	96,98%
	Jumlah (a + b)	2.188.818.002.657,00	2.156.832.426.341,00	98,54%
3	Selisih (1 -2)	5.606.863.728.147,00	5.136.219.423.657,07	91,61%
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih 1-2)	2.242.745.491.258,80	2.054.487.769.462,83	91,61%
5	a. Belanja Modal	798.894.222.750,00	667.689.607.145,41	83,58%
	1) Tanah	4.410.000.000,00	3.464.184.000,00	78,55%
	2) Peralatan dan Mesin	185.033.598.328,00	130.063.180.613,50	70,29%
	3) Bangunan dan Gedung	443.866.230.954,00	407.489.294.374,22	91,80%
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	109.632.657.467,00	94.451.449.090,69	86,15%

	5) Aset tetap lainnya	55.101.736.001,00	31.382.599.067,00	56,95%
	6) Aset lainnya	850.000.000,00	838.900.000,00	98,69%
	b. Belanja pemeliharaan	50.718.097.422,00	39.402.749.121,78	77,69%
6	a. Belanja Hibah	174.576.360.572,00	166.916.244.753,00	95,61%
	b. Belanja Bantuan Sosial			
7	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (5+6)	1.024.188.680.744,00	874.008.601.020,19	85,34%
	Persentase Belanja Infrastruktur	18,27%	17,02%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp1.024.188.680.744,00 atau 18,27% dari total anggaran belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa sebesar Rp5.606.863.728.147,00 dengan realisasi sebesar Rp874.008.601.020,19 atau 17,02% dari total realisasi anggaran belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa sebesar Rp5.136.219.423.657,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik dalam RAPBD TA 2025 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2.4.2 Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2024, kebijakan tematik yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Kebijakan Tematik Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana maksud Pasal 18 dan Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2), Pemerintah Provinsi Bali dalam APBD Tahun Anggaran 2024 memedomani 6 (enam) bidang urusan meliputi:

a. Pendidikan

Urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta butir E.2.a.1) dan Tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Kesehatan

Urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan serta butir E.2.a.21 dan tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir E.2.a.3) dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 serta butir 8.2.a.41 dan Tabel E. 10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Sosial

Urusan sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.5) dan Tabel E.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat

Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:

- 1) Bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 3) Bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik SPM TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.133 Capaian Kebijakan Tematik Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5	6 = 5 : 4
A. SPM Bidang Pendidikan					
1	Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta	6.572.695.600,00	5.948.256.805,00	90,50

	Menengah	Didik Sekolah Menengah Kejuruan			
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	11.536.562.525,00	10.947.666.878,00	94,90
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	60.067.623.277,00	58.389.639.447,00	97,21
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	4.690.001.694,00	4.494.914.714,00	95,84
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	39.999.200,00	32.005.420,00	80,02
		Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	1.200.000.000,00	1.124.795.000,00	93,73
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	72.290.000,00	67.929.860,00	93,97
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.843.633.553,00	4.712.899.300,00	97,30
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	498.278.200,00	438.125.840,00	87,93
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	139.128.635.719,00	135.334.181.282,00	97,27
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	47.804.000,00	46.005.064,00	96,24
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	34.981.800,00	23.037.800,00	65,86
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	57.075.000,00	52.566.529,00	92,10
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk	101.430.000,00	100.498.000,00	99,08

	Pendidikan			
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	59.769.500,00	56.642.700,00	94,77
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.201.841.100,00	1.055.426.393,00	87,82
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	6.144.320.400,00	5.271.864.113,00	85,80
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	124.998.600,00	113.483.091,00	90,79
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	44.063.000,00	42.965.845,00	97,51
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	40.393.577.660,00	32.982.505.594,00	81,65
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	393.150.000,00	310.855.000,00	79,07
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	70.550.000,00	61.878.676,00	87,71
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	70.550.000,00	61.946.932,00	87,81
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	42.099.000,00	41.443.597,00	98,44
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	124.999.800,00	117.213.360,00	93,77

		Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	83.370.000,00	82.787.000,00	99,30
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.207.219.062,00	7.917.678.972,00	96,47
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	4.498.679.200,00	4.474.896.900,00	99,47
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10.000.000.000,00	9.794.999.372,09	97,95
		Pembangunan Ruang Praktik Siswa	10.653.500.000,00	10.358.532.360,00	97,23
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	32.226.076.940,00	19.854.709.951,00	61,61
		Sub Total	343.229.774.830,00	314.312.351.795,09	91,57
2	Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	608.648.100,00	133.884.100,00	22,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	12.935.739.900,00	0,00	0,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.081.413.200,00	4.502.890.220,00	88,61
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	16.559.300,00	16.313.220,00	98,51
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	534.645.300,00	320.054.908,00	59,86
		Sub Total	19.177.005.800,00	4.973.142.448,00	25,93
		Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan	362.406.780.630,00	319.285.494.243,09	88,10

B. SPM Bidang Kesehatan					
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencanadan/atau berpotensi bencana provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	567.961.100,00	73.458.820,00	12,93
Sub Total			567.961.100,00	73.458.820,00	12,93
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.405.881.900,00	159.783.110,00	6,64
Sub Total			2.405.881.900,00	159.783.110,00	6,64
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			2.973.843.000,00	233.241.930,00	7,84
C. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.359.184.976,00	1.175.931.822,00	86,52
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	15.081.217.100,00	10.229.408.574,00	67,83
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	40.793.745.021,00	39.336.929.714,00	96,43
Sub Total			57.234.147.097,00	50.742.270.110,00	88,66
2	Peenyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14.932.448.684,00	12.155.651.182,00	81,40
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	262.831.900,00	209.116.000,00	79,56
		Pembangunan	1.028.074.300,00	878.296.385,00	85,43

		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat			
Sub Total			16.223.354.884,00	13.243.063.567,00	81,63
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			73.457.501.981,00	63.985.333.677,00	87,11
D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	272.217.800,00	271.135.475,00	99,60
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	20.822.600,00	15.994.068,00	76,81
Sub Total			293.040.400,00	287.129.543,00	97,98
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	487.395.260,00	468.089.019,00	96,04
Sub Total			487.395.260,00	468.089.019,00	96,04
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			780.435.660,00	755.218.562,00	96,77
E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum					
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	242.712.420,00	212.556.350,00	87,58
		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	29.899.600,00	15.633.144,00	52,29

		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	18.614.874.259,00	18.588.986.968,00	99,86
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			18.887.486.279,00	18.817.176.462,00	99,63
F. SPM Bidang Sosial					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.000.000.000,00	1.844.370.363,00	92,22
Penyediaan Permakanan		28.624.600,00	28.100.000,00	98,17	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		289.939.600,00	287.533.250,00	99,17	
Sub Total			2.318.564.200,00	2.160.003.613,00	93,16
2,	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.000.000,00	6.915.000,00	69,15
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	236.941.200,00	228.196.600,00	96,31
		Penyediaan Makanan	749.452.600,00	746.995.000,00	99,67
		Penyediaan Sandang	89.750.000,00	86.763.000,00	96,67
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	74.406.700,00	59.727.800,00	80,27
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50.318.000,00	48.005.140,00	95,40
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	120.000.000,00	26.333.000,00	21,94
		Pengasuhan	71.891.500,00	68.376.000,00	95,11
Sub Total			1.402.760.000,00	1.271.311.540,00	90,63
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam	20.000.000,00	9.853.800,00	49,27

	panti	Panti Sosial			
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	24.500.800,00	14.517.650,00	59,25
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	52.170.600,00	36.276.600,00	69,53
		Pemulasaraan	158.890.100,00	121.043.150,00	76,18
		Penyediaan Permakanan	618.890.000,00	595.362.750,00	96,20
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	149.580.300,00	148.786.915,00	99,47
Sub Total			1.024.031.800,00	925.840.865,00	90,41
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Pemulangan ke Daerah Asal	122.200.000,00	109.520.000,00	89,62
		Penyediaan Permakanan	9.999.400,00	9.062.650,00	90,63
Sub Total			132.199.400,00	118.582.650,00	89,70
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.240.000,00	0,00	0,00
		Pelayanan Dukungan Psikososial	257.936.700,00	247.914.400,00	96,11
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.240.000,00	0,00	0,00
Sub Total			264.416.700,00	247.914.400,00	93,76
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			5.141.972.100,00	4.723.653.068,00	91,86
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM			463.648.019.650,00	407.800.117.942,09	87,95
Total Belanja Daerah			7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55
Persentase			5,95%	5,59%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik SPM sebesar Rp463.648.019.650,00 atau 5,95% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp407.800.117.942,09 atau 5,59% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pemenuhan SPM dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Angka Partisipasi Sekolah.
- 2) Literasi dan Numerasi.
- 3) Kekhususan SMK.
- 4) Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pelayanan kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi.

Adapun sub rincian objek belanja pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang tersusun dalam RKA, telah menunjang output Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan pada tahap Pra Krisis. Rincian belanja tersebut diperuntukkan sebagai berikut:

- a) Sosialisasi pedoman HEOC ke 9 kab/kota dengan melibatkan peserta dari rumah sakit, puskesmas, BPBD, lintas sektor kebencanaan yang terkait, aparat desa seperti pekalang dan organisasi profesi;
- b) perjalanan dinas dengan tujuan ke dinas kesehatan kab/kota untuk melakukan evaluasi pembentukan HEOC;
- c) perjalanan dinas ke rumah sakit untuk mengecek pelaksanaan hospitals disaster dan simulasi yang dilakukan dalam kesiapsiagaan krisis/bencana;
- d) berkoordinasi ke Public Safety Center (PSC) untuk monitoring kegiatan kegawatdaruratan sehari-hari ataupun bencana;
- e) Penyelenggaraan rapat persiapan dengan tim yang akan dilibatkan dan rapat evaluasi.

- 2) Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

c. SPM Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
- 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.

d. SPM Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.

e. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti.
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti.
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti.
- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan di Dalam Panti.

- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi.
 - f. SPM Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat
- Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi.

Kebijakan Tematik Pengawasan

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 butir E.2.c.3), Pemerintah Daerah mengalokasikan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

- a. Kegiatan pengawasan, yaitu:
 - 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
 - 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD;
 - 3) Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
 - 4) Reviu laporan keuangan;
 - 5) Kegiatan pengawasan lainnya meliputi probity audit, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - 6) Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - 7) Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi

korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

- b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.

- c. Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah provinsi mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi:

- a. Sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah;
- b. Diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan
- c. Diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik pengawasan TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.14 Kebijakan Tematik Pengawasan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	a Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.331.259.160,00	4.180.395.832,00	96,52%
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.971.471.860,00	2.886.704.988,00	97,15%
	2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.359.787.300,00	1.293.690.844,00	95,14%
	b Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.832.575.880,00	3.415.482.139,00	89,12%
	1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	2.142.614.260,00	1.938.489.681,00	90,47%
	2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	1.689.961.620,00	1.476.992.458,00	87,40%

	c Program Penunjang	21.061.822.079,00	18.792.978.628,00	89,23%
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.229.500,00	106.886.868,00	96,10%
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.734.195.439,00	13.080.253.108,00	88,77%
	3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.481.577.000,00	1.269.239.454,00	85,67%
	4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.409.792.300,00	1.318.976.900,00	93,56%
	5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	586.432.640,00	488.836.755,00	83,36%
	6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.738.595.200,00	2.528.785.543,00	92,34%
2	Alokasi Anggaran Pengawasan (a+b+c)	29.225.657.119,00	26.388.856.599,00	90,29%
3	Total Belanja Daerah	7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
4	Rasio Alokasi Anggaran Pengawasan Terhadap Belanja Daerah (2:3)x100%	0,37%	0,36%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik pengawasan sebesar Rp29.225.657.119,00 atau 0,37% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp26.388.856.599,00 atau 0,36% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali dapat dikategorikan pada golongan kedua dengan alokasi anggaran kebijakan tematik pengawasan paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah. Meskipun Pemerintah Provinsi Bali belum memenuhi batas minimal yang telah ditetapkan, namun Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan riil SKPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, sehingga apabila dialokasikan secara berlebihan akan berdampak pada kurang efektifnya penyerapan anggaran.

2. Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN

Dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sebagaimana maksud butir 5.2.3.a Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik pendidikan dan pelatihan bagi ASN TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.14 Kebijakan Tematik Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	a.	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35.308.226.185,00	27.991.184.408,00	79,28
	1)	Pengembangan Kompetensi ASN	3.267.065.590,00	3.028.275.205,00	92,69
	2)	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.195.592.955,00	1.095.323.636,00	91,61
	3)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	744.244.700,00	588.982.538,00	79,14
	4)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.387.000,00	63.250.000,00	80,69
	5)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.451.849.000,00	1.423.056.943,00	98,02
	6)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.171.374.800,00	1.141.675.340,00	97,46
	7)	Peningkatan Pelayanan BLUD	26.892.305.000,00	20.249.036.696,00	75,30
	8)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.094.000,00	124.390.988,00	69,07
	9)	Pengelolaan Promosi ASN (Bimbingan Teknis)	180.913.140,00	130.793.062,00	72,30
	10)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	146.400.000,00	146.400.000,00	100,00
	b.	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja	137.060.200,00	133.734.892,00	97,57
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	137.060.200,00	133.734.892,00	97,57
	c.	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Inspektorat	1.597.607.840,00	1.403.918.193,00	87,88
		Perumusan Kebijakan Teknis	1.597.607.840,00	1.403.918.193,00	87,88

		di Bidang Fasilitas Pengawasan			
	d	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	311.646.800,00	285.245.428,00	91,53
	1)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	15.547.600,00	15.126.080,00	97,29
	2)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	70.550.000,00	61.946.932,00	87,81
	3)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	29.999.400,00	29.080.380,00	96,94
	4)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	124.999.800,00	117.213.360,00	93,77
	5)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	70.550.000,00	61.878.676,00	87,71
	e	Kegiatan/Sub Kegiatan pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	6.906.560.040,00	4.704.084.009,00	68,11
	1)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.238.700,00	201.242.050,00	97,11
	2)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.534.046.340,00	1.102.242.583,00	71,85
	3)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.675.000,00	100.429.050,00	76,27
	4)	Peningkatan Pelayanan BLUD	5.000.000.000,00	3.266.570.326,00	65,33
	5)	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00
	f	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	31.952.000,00	10.000.000,00	31,30
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31.952.000,00	10.000.000,00	31,30

	g	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.000.000,00	0,00	0,00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	0,00	0,00
	h	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah	84.324.000,00	30.095.000,00	35,69
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	84.324.000,00	30.095.000,00	35,69
2		Anggaran Pendidikan dan Pelatihan ASN	44.397.377.065,00	34.558.261.930,00	77,84
3		Total Belanja Daerah	7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55
Rasio anggaran pendidikan dan Pelatihan (2:3) x 100%			0,57%	0,47%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebesar Rp44.397.377.065,00 atau 0,57% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp34.558.261.930,00 atau 0,47% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, rasio anggaran kebijakan tematik Pendidikan dan pelatihan bagi ASN Pemerintah Provinsi Bali mengalami penurunan. Mengingat ketentuan pada butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali akan tetap berupaya untuk memenuhi alokasi belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Kebijakan Tematik Kemiskinan Ekstrem

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana maksud butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik kemiskinan ekstrem TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.15 Kebijakan Tematik Kemiskinan Ekstrem

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
A.	Sub Kegiatan untuk Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat		412.269.065.367,00	389.303.775.145,61	94,43%
1	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		120.000.000,00	26.333.000,00	21,94%
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		5.391.800,00	5.311.300,00	98,51%
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		243.150.000,00	116.464.000,00	47,90%
4	Pelayanan Dukungan Psikososial		257.936.700,00	247.914.400,00	96,11%
5	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		74.406.700,00	59.727.800,00	80,27%
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		551.381.600,00	530.247.500,00	96,17%
7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		102.488.600,00	84.281.740,00	82,24%
8	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		28.700.000,00	26.510.000,00	92,37%
9	Pemulasaraan		158.890.100,00	121.043.150,00	76,18%
10	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		3.240.000,00	0,00	0,00%
11	Pengasuhan		71.891.500,00	68.376.000,00	95,11%
12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		178.038.979.266,00	169.535.529.091,35	95,22%
13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		174.098.930.598,00	169.434.840.376,69	97,32%
14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		11.259.085.203,00	11.140.543.936,57	98,95%
15	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		5.641.100,00	5.623.200,00	99,68%
16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		26.494.321.600,00	21.659.193.350,00	81,75%
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada		2.405.881.900,00	159.783.110,00	6,64%

		Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
	18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	567.961.100,00	73.458.820,00	12,93%
	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	158.740.000,00	153.529.000,00	96,72%
	20	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	6.144.320.400,00	5.271.864.113,00	85,80%
	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	6.572.695.600,00	5.948.256.805,00	90,50%
	22	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	9.996.400,00	9.820.000,00	98,24%
	23	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.680.000,00	7.680.000,00	100,00%
	24	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	650.619.600,00	650.572.000,00	99,99%
	25	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	706.779.000,00	639.449.890,00	90,47%
	26	Penyediaan Makanan	749.452.600,00	746.995.000,00	99,67%
	27	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.010.000.000,00	1.851.285.363,00	92,10%
	28	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	20.000.000,00	9.853.800,00	49,27%
	29	Penyediaan Permakanan	657.514.000,00	632.525.400,00	96,20%
	30	Penyediaan Sandang	89.750.000,00	86.763.000,00	96,67%
	31	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.240.000,00	0,00	0,00%
B.		Sub Kegiatan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	10.356.687.520,00	9.819.690.982,00	94,81%
	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan	939.685.130,00	875.991.259,00	93,22%

		Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			
	2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	129.246.420,00	129.006.420,00	99,81%
	3	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.218.525.640,00	4.119.415.770,00	97,65%
	4	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	486.349.340,00	441.871.762,00	90,85%
	5	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	222.152.000,00	193.614.000,00	87,15%
	6	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	514.231.800,00	444.774.250,00	86,49%
	7	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	492.722.460,00	478.150.370,00	97,04%
	8	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	55.523.800,00	53.222.150,00	95,85%
	9	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	49.999.500,00	49.688.500,00	99,38%
	10	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.423.299.391,00	1.349.088.711,00	94,79%
	11	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	45.240.000,00	44.790.000,00	99,01%
	12	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	544.310.920,00	531.876.170,00	97,72%
	13	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan	884.059.619,00	769.373.970,00	87,03%

		oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
	14	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	336.350.000,00	325.631.250,00	96,81%
	15	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	14.991.500,00	13.196.400,00	88,03%
	C. Sub Kegiatan Penurunan Jumlah Kantong-kantong Kemiskinan		100.289.979.252,00	84.743.066.990,00	84,50%
	1	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	289.177.300,00	288.208.500,00	99,66%
	2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.222.893.880,00	3.213.606.480,00	99,71%
	3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14.932.448.684,00	12.155.651.182,00	81,40%
	4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	40.793.745.021,00	39.336.929.714,00	96,43%
	5	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.028.074.300,00	878.296.385,00	85,43%
	6	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	15.081.217.100,00	10.229.408.574,00	67,83%
	7	Pembangunan Tanggul Sungai	547.820.000,00	531.169.171,00	96,96%
	8	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	272.217.800,00	271.135.475,00	99,60%
	9	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	139.567.000,00	114.541.158,00	82,07%
	10	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	498.784.500,00	490.428.850,00	98,32%
	11	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	11.018.971.867,00	5.308.318.596,00	48,17%
	12	Penyusunan, Pemutakhiran dan	162.888.060,00	162.040.010,00	99,48%

		Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota			
	13	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.073.624.460,00	1.070.038.815,00	99,67%
	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	11.228.549.280,00	10.693.294.080,00	95,23%
TOTAL ANGGARAN UNTUK PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM			522.915.732.139,00	483.866.533.117,61	92,53%
TOTAL BELANJA DAERAH			7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
PERSENTASE			6,71%	6,63%	98,91%

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp522.915.732.139,00 atau 6,71% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp483.866.533.117,61 atau 6,63% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan Verifikasi dan validasi (Verivali) Data Kemiskinan Ekstrem (*by name address*) dan menyampaikan hasilnya kepada Kementerian Koordinator PMK dan by K/L terkait, berikut upaya yang telah dilakukan:
 - 1) *Update* data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem (*by name by address*) di Kabupaten/Kota berdasarkan data terakhir dari Kemenko PMK
 - 2) Melaksanakan pemetaan penyebab kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang terjadi secara tepat sasaran untuk dilakukan intervensi
- b. Pemberian pelatihan/keterampilan dan pendampingan kepada Masyarakat Miskin Ekstrem dan Miskin agar dapat mandiri seperti Pelatihan teknis keterampilan kuliner miskin ekstrem di targetkan 14 angkatan dengan total 518 orang per tahun yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2024
- c. Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan melaksanakan program TJSL (Kolaborasi seluruh perusahaan (BUMN, BUMD, Swasta) untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem pasca ditetapkannya Keputusan Gubernur Bali tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Nomor 246/04-A/HK/2024
- d. Mengimplementasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2023 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali, berikut upaya yang telah dilakukan:
 - 1) Menyusun Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2025
 - 2) Mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
 - 3) Menyusun dan melaporkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penuntasan kemiskinan ekstrem kepada Kemenko PMK

- e. Menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial
 - f. Meningkatkan pendapatan Masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan Masyarakat
 - g. “Ngrombo”/kroyok kemiskinan ekstrem, dengan melibatkan filantropis, orang tua asuh dan stakeholder lainnya
 - h. Memperbaiki akses infrastruktur jalan dan air bersih
4. Kebijakan Tematik Stunting

Upaya percepatan penanggulangan stunting berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik stunting TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.16 Kebijakan Tematik Stunting

KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)		(2)	(3)	(4) = (3) : (2)
1. Urusan Bidang Perencanaan		1.683.897.575,00	1.297.808.617,00	77,07%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		1.683.897.575,00	1.297.808.617,00	77,07%
a.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	524.407.400,00	390.669.593,00	74,50%
b.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	516.569.760,00	431.870.127,00	83,60%
c.	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	142.122.400,00	110.364.000,00	77,65%
d.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	269.850.460,00	196.110.274,00	72,67%
e.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	230.947.555,00	168.794.623,00	73,09%
2. Urusan Bidang Keuangan		193.928.700,00	107.793.190,00	55,58%

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		193.928.700,00	107.793.190,00	55,58%
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	193.928.700,00	107.793.190,00	55,58%
3. Urusan Bidang Kesehatan		5.183.117.600,00	3.899.382.122,00	75,23%
Dinas Kesehatan		5.183.117.600,00	3.899.382.122,00	75,23%
a.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	303.043.400,00	170.969.540,00	56,42%
b.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.460.000,00	11.834.000,00	94,98%
c.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.874.149.800,00	2.855.435.222,00	73,70%
d.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	158.740.000,00	153.529.000,00	96,72%
e.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	294.669.000,00	253.948.250,00	86,18%
f.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	56.459.900,00	55.834.670,00	98,89%
h.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	26.299.500,00	24.321.200,00	92,48%
i.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	143.790.000,00	80.553.000,00	56,02%
j.	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	313.506.000,00	292.957.240,00	93,45%
4. Urusan Bidang Kelautan Perikanan		970.410.101,00	812.362.920,00	83,71%
Dinas Kelautan dan Perikanan		970.410.101,00	812.362.920,00	83,71%
a.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	930.816.101,00	779.646.352,00	83,76%
b.	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	39.594.000,00	32.716.568,00	82,63%
5. Urusan Bidang Sosial		3.721.324.200,00	3.431.315.153,00	92,21%

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		3.721.324.200,00	3.431.315.153,00	92,21%
a.	Penyediaan Permakanan (Penyandang Disabilitas)	28.624.600,00	28.100.000,00	98,17%
b.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Penyandang Disabilitas)	2.000.000.000,00	1.844.370.363,00	92,22%
c.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Penyandang Disabilitas)	289.939.600,00	287.533.250,00	99,17%
d.	Pengasuhan (Anak Terlantar)	71.891.500,00	68.376.000,00	95,11%
e.	Penyediaan Makanan (Anak Terlantar)	749.452.600,00	746.995.000,00	99,67%
f.	Penyediaan Sandang (Anak Terlantar)	89.750.000,00	86.763.000,00	96,67%
g.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Anak Terlantar)	10.000.000,00	6.915.000,00	69,15%
h.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Anak Terlantar)	236.941.200,00	228.196.600,00	96,31%
i.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Anak Terlantar)	74.406.700,00	59.727.800,00	80,27%
j.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Anak Terlantar)	120.000.000,00	26.333.000,00	21,94%
k.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Anak Terlantar)	50.318.000,00	48.005.140,00	95,40%
6. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		73.457.501.981,00	63.985.333.677,00	87,11%
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		73.457.501.981,00	63.985.333.677,00	87,11%
a.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14.932.448.684,00	12.155.651.182,00	81,40%
b.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	40.793.745.021,00	39.336.929.714,00	96,43%
c.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.028.074.300,00	878.296.385,00	85,43%
d.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	15.081.217.100,00	10.229.408.574,00	67,83%

e.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	262.831.900,00	209.116.000,00	79,56%
f.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.359.184.976,00	1.175.931.822,00	86,52%
7. Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		42.215.000,00	18.122.636,00	42,93%
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		42.215.000,00	18.122.636,00	42,93%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	42.215.000,00	18.122.636,00	42,93%
8. Urusan Bidang Pendidikan		148.618.800,00	140.885.780,00	94,80%
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		148.618.800,00	140.885.780,00	94,80%
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	148.618.800,00	140.885.780,00	94,80%
9. Urusan Bidang Pangan		6.410.759.820,00	5.337.859.070,00	83,26%
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		6.410.759.820,00	5.337.859.070,00	83,26%
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.410.759.820,00	5.337.859.070,00	83,26%
10. Urusan Bidang Perindustrian		2.317.081.720,00	2.217.166.093,00	95,69%
Dinas Perindustrian dan Perdagangan		2.317.081.720,00	2.217.166.093,00	95,69%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.317.081.720,00	2.217.166.093,00	95,69%
11. Urusan Bidang Koperasi UKM		198.408.480,00	181.032.280,00	91,24%
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		198.408.480,00	181.032.280,00	91,24%
a.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan (melalui Pendidikan dan Pelatihan)	49.999.500,00	49.688.500,00	99,38%

b.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	148.408.980,00	131.343.780,00	88,50%
12. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		5.143.092.260,00	4.608.318.801,00	89,60%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		5.143.092.260,00	4.608.318.801,00	89,60%
a.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	574.032.600,00	469.285.515,00	81,75%
b.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	489.871.360,00	392.111.771,00	80,04%
c.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4.079.188.300,00	3.746.921.515,00	91,85%
13. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika		5.424.683.440,00	3.368.645.759,00	62,10%
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		5.424.683.440,00	3.368.645.759,00	62,10%
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.424.683.440,00	3.368.645.759,00	62,10%
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENURUNAN STUNTING		104.895.039.677,00	89.406.026.098,00	85,23%
TOTAL BELANJA DAERAH		7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
PERSENTASE		1,35%	1,23%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik stunting sebesar Rp104.895.039.677,00 atau 1,35% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp89.406.026.098,00 atau 1,23% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam penurunan stunting dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pertemuan Analisa Program Gizi, untuk mengkoordinasikan kegiatan konvergensi dalam upaya percepatan penurunan stunting, dengan peserta dari Kabupaten (TPG Puskesmas)
- Monev Surveilans Gizi, dilaksanakan setiap triwulan dan evaluasi tahunan bertujuan untuk mengetahui capaian indikator kinerja gizi terkait pelayanan gizi masyarakat
- Pertemuan Koordinasi Program Gizi, upaya percepatan penurunan stunting khususnya pada upaya peningkatan kualitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal bagi balita dan ibu hamil serta Capaian Program Gizi sampai TW III

- d. Monev Pelaksanaan PMT Lokal di Kab/Kota, untuk mengetahui pelaksanaan PMT pada balita bermasalah gizi dan ibu hamil KEK
- e. Menyusun strategi 5 aksi cegah stunting, antara lain:
 - 1) Penggerakan Aksi Bergizi
 - Sasaran : Pelajar putri
 - Kegiatan : Jalan santai, senam, sarapan bersama, Skrening kesehatan pelajar putri, Minum tablet tambah darah di Sekolah setiap minggu diawasi oleh Puskesmas
 - Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Buleleng (550 siswa), Klungkung (600 siswa), Badung (650 siswa), Bangli (350 orang), Karangasem (400 orang), Tabanan (525 orang), Denpasar (400 siswa), Gianyar (350 siswa), dan Jembrana (300 orang)
 - 2) Penggerakan Bumil Sehat
 - Sasaran : Ibu hamil, kader, bidan desa, puskesmas
 - Kegiatan : Screening kesehatan ibu hamil, Minum TTD bersama, edukasi gizi seimbang, Makan buah bersama, Kelas ibu hamil, Pemberian paket PMT, dan Sosialisasi melalui media sosial
 - Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (200 orang), Bangli (220 orang), dan Jembrana (120 orang)
 - 3) Penggerakan Posyandu Aktif
 - Sasaran : Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas, Bidan desa, Kader posyandu
 - Kegiatan : Sosialisasi peran Posyandu dan Kader, Posyandu buka di hari libur, Pemberian makanan tambahan lokal tinggi protein hewani, dan Pemberian Vit A untuk bayi dan balita
 - Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (130 orang) dan kabupaten Bangli (125 orang)
 - 4) Penggerakan Cegah Stunting
 - Sasaran : Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas, Bidan desa, Kader posyandu
 - Kegiatan : Sosialisasi dan edukasi untuk pencegahan Stunting, Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita setiap bulan, Pemberian PMT lokal, tinggi protein hewani pada Balita beresiko Stunting
 - Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (150 orang)
 - 5) Jambore Kader
 - Sasaran : Kader Posyandu dan pendamping kader posyandu (desa, kabupaten, PKK, puskesmas)
 - Kegiatan : Lomba Ketrampilan Kader serta penyuluhan Kesehatan
 - Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (165 orang), Tabanan (100 orang), Buleleng (150 orang) dan kabupaten

Badung (125 orang) dan Provinsi (200 orang) 20 Agustus
2024

5. Kebijakan Tematik Inflasi

Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, salah satu sasaran strategisnya adalah inflasi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik Inflasi TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.17 Kebijakan Tematik Inflasi

No	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
A.	Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Pangan Strategis		28.915.239.925,00	26.766.085.437,00	92,57%
1.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI		544.310.920,00	531.876.170,00	97,72%
		Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	544.310.920,00	531.876.170,00	97,72%
2.	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		15.677.118.420,00	15.035.387.983,00	95,91%
	a)	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.222.893.880,00	3.213.606.480,00	99,71%
	b)	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.225.675.260,00	1.128.487.423,00	92,07%
	c)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	11.228.549.280,00	10.693.294.080,00	95,23%
3.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		12.693.810.585,00	11.198.821.284,00	88,22%
	a)	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.410.759.820,00	5.337.859.070,00	83,26%
	b)	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan,	568.756.840,00	564.108.845,00	99,18%

			Hortikultura, dan Perkebunan			
		c)	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	378.877.040,00	373.766.545,00	98,65%
		d)	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	2.476.946.220,00	2.389.814.958,00	96,48%
		e)	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.365.748.205,00	2.055.121.496,00	86,87%
		f)	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	492.722.460,00	478.150.370,00	97,04%
B. Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan				1.073.624.460,00	1.070.038.815,00	99,67%
			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.073.624.460,00	1.070.038.815,00	99,67%
			Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.073.624.460,00	1.070.038.815,00	99,67%
C. Pemberian Bantuan Sektor Pertanian yang Tepat Sasaran				10.041.297.740,00	9.825.465.023,00	97,85%
	1.		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	9.609.330.540,00	9.412.900.023,00	97,96%
		a)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	223.704.140,00	220.567.095,00	98,60%
		b)	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.218.525.640,00	4.119.415.770,00	97,65%
		c)	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	2.476.946.220,00	2.389.814.958,00	96,48%
		d)	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2.690.154.540,00	2.683.102.200,00	99,74%
	2.		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	431.967.200,00	412.565.000,00	95,51%
		a)	Penyediaan Makanan (Anak Terlantar)	349.452.600,00	347.089.000,00	99,32%
		b)	Penyediaan Permakanan (Penyandang Disabilitas dan	82.514.600,00	65.476.000,00	79,35%

		Lansia)			
D.	Penguatan Tata Kelola Logistik Daerah		97.150.551.870,00	80.620.403.890,00	82,99%
1.	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH		1.005.695.000,00	711.713.926,00	70,77%
	a)	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	574.695.000,00	355.197.126,00	61,81%
	b)	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	431.000.000,00	356.516.800,00	82,72%
2.	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		85.125.885.003,00	74.600.371.368,00	87,64%
	a)	Pemeliharaan Berkala Jalan	34.792.762.547,00	32.433.130.053,00	93,22%
	b)	Pemeliharaan Rutin Jalan	24.236.563.540,00	22.674.368.060,00	93,55%
	c)	Rehabilitasi Jalan	13.528.868.236,00	7.646.219.300,00	56,52%
	d)	Rekonstruksi Jalan	12.567.690.680,00	11.846.653.955,00	94,26%
3.	DINAS PERHUBUNGAN		11.018.971.867,00	5.308.318.596,00	48,17%
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Pembelian Layanan Angkutan Umum Denpasar - Bangli)	11.018.971.867,00	5.308.318.596,00	48,17%
E.	Pengawasan Harga dan Operasi Pasar		107.263.800,00	74.287.000,00	69,26%
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		107.263.800,00	74.287.000,00	69,26%
	a)	Pelaksanaan Pasar Murah sebanyak 1 kali	30.000.000,00	0,00	0,00%
	b)	Pelaksanaan Pasar Murah sebanyak 12 kali	49.213.800,00	46.757.000,00	95,01%
	c)	Pembinaan dan pengawasan kepada inumerator yang bertugas memantau harga di kabupaten kota	28.050.000,00	27.530.000,00	98,15%
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENGENDALIAN INFLASI			137.287.977.795,00	118.356.280.165,00	86,21%
TOTALBELANJA DAERAH			7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
PERSENTASE			1,76%	1,62%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik inflasi sebesar Rp137.287.977.795 atau 1,76% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp118.356.280.165 atau 1,62% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pengendalian inflasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Operasi Pasar /Pasar Murah secara intensif
Pasar murah dilaksanakan berkolaborasi dengan BULOG, BI, Bank BPD dan Pertamina. Total pelaksanaan Pasar Murah se-Bali thn 2024 sebanyak 253 kali
- b. Pelaksanaan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (GENTA PATEN) serentak
Program ini berdasarkan SE Pj. Gub No 6 Tahun 2024 untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Provinsi Bali. Genta Paten memerlukan partisipasi seluruh stakeholder (Pemerintah, Masyarakat, Komunitas, Badan usaha dan Media) agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan sebagai langkah nyata mewujudkan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Saat ini stakeholder yang telah berpartisipasi yaitu Perangkat Daerah, Sekolah dan Petani (Subak)
- c. Optimalisasi peran Perumda Pangan Provinsi Bali dan Paiketan Perumda Pangan se-Bali, seperti:
 - 1) Menjadi off taker pertanian khususnya beras
 - 2) Membuka pasar seluas-luasnya untuk produk lokal sehingga kompetitif dan masyarakat diuntungkan dengan banyak alternatif (Pasar ASN, Horeca, Mitra Swalayan dan Warung Rakyat, Gerai Pangan Kerta Bali Saguna).
- d. Pengembangan aplikasi SiGapura
 - 1) Penyusunan juknis harga pangan dan juknis neraca pangan sebagai standar penginputan bagi enumerator SiGapura
 - 2) Pemantauan berjenjang dalam penginputan data oleh enumerator pada 60 pasar untuk informasi harga
 - 3) Pembuatan fitur *early warning system* untuk memantau lonjakan harga pangan
 - 4) Penyebaran informasi harga aplikasi SiGapura melalui media BMC secara infografis
- e. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan
 - 1) Bantuan benih/bibit
 - 2) Pemberian subsidi pupuk organik dan non organik
 - 3) Pembinaan dan penyuluhan kepada petani dan nelayan
 - 4) Pengembangan Petani Terintegrasi Hulu-Hilir
 - 5) Penanganan kerawanan pangan
 - 6) Pengelolaan cadangan beras Pemerintah Provinsi
 - 7) Pembinaan lumbung pangan Masyarakat
 - 8) Asuransi Usaha Tani Padi (Target: 16.043,29 Ha, Realisasi: 16.036,01 Ha dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (Target: 1.325 ekor, Realisasi: 366 ekor)
 - 9) Pemeliharaan waduk, embung dan jaringan irigasi
- f. Mengoptimalkan kelancaran distribusi melalui integrasi Bersama
Pemantauan arus distribusi pangan yang keluar dan masuk wilayah Bali. Pemantauan dilaksanakan pada Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padang Bai bersama antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dan kepolisian
- g. Mereduksi biaya transportasi barang/jasa
Mendorong akselerasi pembentukan pasar induk di Bali untuk menjaga pasokan dan Kelancaran distribusi komoditas pangan (jangka menengah panjang)

- h. Memastikan Ketersediaan Bahan Pangan Terutama Dengan Kerjasama Antar Daerah, dengan cara berikut:
 - 1) Peningkatan akurasi data neraca pangan di setiap kabupaten/kota sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan untuk stabilisasi harga
 - 2) Mengimplementasikan Perda No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
 - 3) Mengimplementasikan Pergub No. 45 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
 - 4) Menghitung CBPP Provinsi Bali
- i. Memberikan Bantuan Sosial Untuk Masyarakat yang Rentan Terhadap Dampak Inflasi
 Bantuan diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti, Anak Terlantar dalam Panti, Lanjut Usia Miskin Terlantar. Bantuan yang diberikan berupa:
 - 1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 55 Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti
 - 2) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 622 Anak Terlantar dalam Panti
 - 3) Pemberian Bantuan Paket Sembako kepada 100 Lanjut Usia Miskin dan atau Terlantar
 - 4) Bantuan Keuangan kepada *Krama* Subak. Jumlah penerima BKK sebanyak 2.858 subak sebesar Rp.28.580.000.000, terealisasi sebanyak 2.157 subak sebesar Rp. 21.570.000.000, dan dalam proses pencairan sebanyak 701 subak sebesar Rp.7.010.000.000
- j. Memperkuat Koordinasi antara Tim TIPD dan Tim TPIP
 - 1) Melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, PT. Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas Bali serta Polda Bali dalam melakukan monitoring LPG 3 kg
 - 2) Mengajukan usulan kepada Menteri ESDM dan Dirut Pertamina agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dijadikan sebagai pangkalan/sub pangkalan LPG 3 kg sehingga penggunaannya bisa tepat sasaran di Provinsi Bali
 - 3) Bersinergi dengan Pemda se-Bali menyalurkan LPG 3kg melalui pasar murah khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional
- k. Kepatuhan penampaian laporan harian perkembangan bahan pokok di daerah
 - 1) Digitalisasi berupa penyampaian informasi harga dan neraca pangan pada aplikasi SiGapura (60 pasar di 9 Kabupaten/Kota)
 - 2) Publikasi harga dan neraca pangan SiGapura melalui berbagai media
 - 3) Pemantauan harga harian pada aplikasi SP2KP dari Kementerian Perdagangan

6. Kebijakan Tematik Investasi

Dalam memberikan kemudahan dalam berinvestasi kepada Masyarakat sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754), Pemerintah Provinsi Bali menetapkan beberapa peraturan sebagai berikut:

- a. Pemberian Insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanaman modal sesuai Perda 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat

dan/atau Penanaman Modal, yang saat ini sedang direvisi agar sesuai dengan UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

- b. Menyelenggarakan proses perizinan dan nonperizinan sesuai Pergub Bali No 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Melaksanakan Etika Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Keputusan Gubernur No. 703/03-S/HK/2021 tanggal 21 September 2021 (Seperti : disiplin, pasti, cepat, sopan, ramah dan simpatik, terbuka dan jujur, komunikatif, bertanggung jawab, objektif, dan adil).

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik investasi TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.18 Kebijakan Tematik Investasi

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
A.	Kemudahan Usaha dan Investasi melalui Penguatan Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS)	1.143.149.560,00	32.821.912,00	2,87
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.143.149.560,00	32.821.912,00	2,87
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.143.149.560,00	32.821.912,00	2,87
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.143.149.560,00	32.821.912,00	2,87
	a) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	545.834.000,00	5.200.000,00	0,95
	b) Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	297.725.000,00	0,00	0,00
	c) Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	299.590.560,00	27.621.912,00	9,22
B.	Memitragkan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah dengan Perusahaan Besar di Bidang Penanaman Modal	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
	a) Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74

TOTAL ANGGARAN UNTUK PENINGKATAN INVESTASI	1.624.118.120,00	60.443.824,00	3,72

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik investasi sebesar Rp1.624.118.120,00 dengan realisasi sebesar Rp60.443.824,00 atau 3,72%.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun anggaran 2024. Sementara itu dari sisi belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp. 2.459.970.449,25- yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 26.251.229.311,00- terealisasi sebesar Rp. 23.791.258.861,75- atau 90,63%. Capaian bagian belanja sebesar Rp 19.378.257.240,00- atau 89,95% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

No	PROGRAM	Anggaran (Rp.)	Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2023
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	25.251.229.311,00	23.791.258.861,75	90,63%	15.162.882.072,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.758.693.861,00	13.955.406.701,75	88,56%	13.822.138.203,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.914.420,00	121.098.720,00	98,52%	78.344.117,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.600,00	5.815.750,00	96,93%	2.249.200,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.285.642.851,00	10.801.409.908,00	87,91%	11.632.298.785,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	0	0	0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.613.000,00	9.729.000,00	91,67%	9.895.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.580.500,00	66.602.200,00	78,74%	36.622.776,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000,00	54.200.000,00	98,54%	54.400.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.576.900,00	9.734.700,00	84,08%	7.776.250,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000,00	4.500.000,00	100%	1.548.750,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.893.000,00	31.726.668,00	56,76%	25.923.410,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	721.538.480,00	615.903.541,69	85,35%	48.500.000,00

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000	1.660.000,00	83,33%	1.810.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.000.000,00	189.026.790,00	72,98%	191.707.759,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	879.916.600,00	839.177.615,00	95,37%	939.147.400,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	776.574.980,00	755.227.380,00	97,25%	611.019.572,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	40.920.000,00	81,84%	9.540.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	412.951.560,00	408.874.429,06	99,01%	171.355.184,00
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	238.410.700,00	148.079.420,00	62,11%	242.297.82500
	Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	218.410.700,00	142.787.420,00	65,37%	12.107.250,00
	Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.000.000,00	5.292.000,00	26,46%	230.190.575,00
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	150.908.620,00	127.986.135,00	84,81%	23.683.900,00
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	49.999.500,00	36.267.910,00	72,53%	11.299.750,00
	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah, Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.909.120,00	89.718.225,00	88,90%	12.384.150,00
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	198.408.880,00	175.150.930,00	88,27%	104.836.292,00
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	148.408.980,00	131.343.780,00	88,50%	104.836.292,00
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	49.999.900,00	43.807.150,00	87,61%	00
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	989.684.630,00	925.679.759,00	93,53%	672.551.385,00
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri hingga	939.685.130,00	875.991.259,00	93,22%	672.551.385,00

	dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	49.999.500,00	49.688.500,00	99,37	00
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	482.932.360,00	394.362.810,00	81,66%	00
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	219.328.560,00	218.261.060,00	99,51%	00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	263.603.800,00	176.101.750,00	66,80%	00
	UPTD DIKLAT KOPERASI UMKM	8.432.190.260,00	8.064.593.106,00	95,64%	4.215.375.168,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	423.149.980,00	375.868.514,00	88,82%	353.653.356,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	665.800,00	605.000,00	90,86%	661.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.725.900,00	2.269.000,00	83,23%	2.479.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	100%	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	650.000,00	65,00%	536.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000,00	945.000,00	94,50%	00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000,00	1.980.000,00	99,00%	00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	830.000,00	83,00%	910.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.500.000	14.187.234,00	29,25%	14.342.784,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.190.060,00	154.108.580,00	97,41%	00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.007.140,00	87.347.440,00	92,91%	71.419.196,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.990.000,00	1.850.000,00	92,96%	1.610.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.571.080,00	78.596.280,00	98,77%	75.131.792,00
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	8.009.040.280,00	7.688.724.592,00	96,00%	3.861.721.812,00

	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	8.009.040.280,00	7.688.724.592,00	96,00	3.861.721.812,00
Jumlah		21.543.645.124,00	23.791.258.861,75,00	90,63%	19.378.257.240,00

Rincian penggunaan belanja langsung untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada lampiran (LRA 64).

Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan (diisi Kegiatan yang realisasinya 80% ke bawah).

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 terdapat Kegiatan yang serapan belanjanya di bawah 80% yaitu:

Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi (%)	Hambatan dan Kendala Pencapaian Target
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	0	Tidak ada surat untuk mengikuti Diklat sesuai yang dianggarkan.
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	79,44	Efisiensi
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	100	65,38	Ada tenaga Administrasi yang mengundurkan diri dan ada beberapa belanja yang efisiensi
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang-cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	100	31,46	Kegiatan Hari Koperasi Nasional dilaksanakan di masing-masing Daerah
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	100	76,54	Perjalanan Dinas Biasa tidak terlaksana karena tidak ada agenda dari Kementerian (pusat) dan Koordinasi dilaksanakan secara daring

3.2. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan OPD merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi OPD (SA OPD) yang dilaksanakan pada masing-masing OPD dan Sistem Akuntansi OPKD (SA OPKD) yang dilaksanakan pada OPKD/PPKD (c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA OPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA OPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemda.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran OPD dan Neraca OPD telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap bulannya (lampiran 3) dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional Bendahara OPD (lampiran).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) entitas akuntansi yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) OPD yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.1.1 ENTITAS PELAPORAN

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

4.1.2. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - e. Sosial
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Perhubungan
 - d. Komunikasi dan Informatika
 - e. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - f. Penanaman Modal
 - g. Kebudayaan
 - h. Kearsipan
3. Urusan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Perindustrian
4. Urusan Pendukung
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
5. Urusan Penunjang
 - a. Perencanaan
 - b. Keuangan
 - c. Kepegawaian
 - d. Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Penelitian dan Pengembangan
 - f. Penghubung
6. Urusan Pengawasan
 - a. Inspektorat

7. Urusan Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Kebudayaan
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Pariwisata
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah
27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas pokok dan fungsi setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

4.1.3 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan

pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan.

4.1.4 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akrua untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrua mengakui pendapatan, beban, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akrua tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrua mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 RINGKASAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode:

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
 - 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;

- 8) Saldo Anggaran Lebih;
 - 9) Pendapatan-LO;
 - 10) Beban; dan
 - 11) Arus Kas.
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan :

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah;
- b. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;
- c. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan
- d. dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan

atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.

- b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - 1) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - 2) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
- c. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
- e. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
- f. Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
- g. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
- h. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
- i. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap

pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- f. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset sejenis.

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tidak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).
- b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar di muka.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- c. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh PA/KPA.
- d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadiksus Negeri yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- e. Belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.
- f. Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar, telah menimbulkan kewajiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap selain tanah, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan

disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Tertuga, dan Belanja Transfer.

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Klasifikasi dan kebijakan akuntansi transfer meliputi:

- a. Beban Transfer
 - 1) Beban Bagi Hasil : Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Beban Bantuan Keuangan
 - a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- b. Pendapatan Transfer-LO
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik-LO
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)-LO
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah
Pendapatan Transfer Antar daerah-LO berupa Bantuan Keuangan
 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Belanja Transfer
 - 1) Belanja Bagi Hasil : Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan
 - a) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- d. Pendapatan Transfer-LRA
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

- a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LRA
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik- LRA
- b) Dana Intensif Daerah (DID)- LRA
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah- LRA
 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengakuan

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening Kas Daerah.
- b. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
- c. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.
- d. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan diperhitungkan sebagai pengurang beban transfer.

Pengukuran

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
- b. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

- a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Apabila timbul selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan
 - 1) Piutang Pajak Daerah;
 - 2) Piutang Retribusi Daerah ;
 - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - 4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- b. Perikatan
 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan;
 - 4) Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Transfer Lainnya;
 - 5) Piutang Bagi Hasil;
 - 6) Piutang Transfer Antar Daerah;
 - 7) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. jumlah piutang dapat diukur;
- c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Pengakuan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, diakui dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil;
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang

berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

- b. Piutang Dana Alokasi Umum;
Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi Pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
- c. Piutang Dana Alokasi Khusus;
Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim Pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan Pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
- d. Piutang Transfer Lainnya;
 - 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh Pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan Pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- e. Piutang Bagi Hasil;
- f. Piutang Transfer Antar Daerah;
Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
- g. Piutang Kelebihan Transfer
Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya
Pengakuan Piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, adalah sebagai berikut:
 - 1) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan)
 - 2) SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

3) Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang Pakai Habis
Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.
- b. Barang Tak Habis Pakai
Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.
- c. Barang Bekas Dipakai
Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

- a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada setiap akhir periode pelaporan.

- b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

- a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang

dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengukuran

Pengukuran investasi untuk masing-masing jenis adalah sebagai berikut.

- a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:
 - 1) Investasi dalam bentuk Surat Berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - b) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
- b. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi nonpermanen:
 - a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - 3) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:
 - a) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
 - (1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana kooperatif.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat

- Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
 - (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
 - b) Dana bergulir dengan *executing agency*
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).
 - c) Dana bergulir dengan *chanelling agency*
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau

- (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).
- 4) Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
- a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- b. Metode ekuitas
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
 - 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh

yang signifikan menggunakan metode ekuitas.

- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

Berwujud;

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- e. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- f. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

- 1) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 3) Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan

dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

- 1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Tabel 4.4.10.1 Tabel Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	
1.1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat Besar	100.000.000
2.2	Alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat Pertanian	500.000
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	500.000
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000
2.8	Alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.1	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000
2.2	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.3	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.4	Alat Peraga	500.000
2.5	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.6	Rambu – Rambu	20.000.000

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
2.7	Peralatan Olah Raga	500.000
3	Gedung dan Bangunan	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000
5.4	Biota Perairan	0
5.5	Tanaman	500.000
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan.	
6.1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan	20.000.000
6.1.2	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1

- 2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.
 - 3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
- g. **Pengeluaran Setelah Perolehan Awal**
- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
- h. **Penambahan masa manfaat**
- Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa

manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah overhaul dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai overhaul dan renovasi aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat overhaul dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal
Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (appraisal), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.
- 2) Penyusutan
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 - a) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
 - b) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
 - c) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
 - d) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
 - e) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 - f) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
 - g) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

i. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

j. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

k. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Dalam hal aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dilakukan reklasifikasi ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

4.4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset

tersebut akan diperoleh;

- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan, dan irigasi; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi

dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

1. Definisi

- a. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

- 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
2. Penjelasan
 - a. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah daerah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah daerah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.
 - b. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.
 - c. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri berupa aset tetap.
 - d. Berikut adalah contoh properti investasi:
 - 1) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - 2) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
 - 3) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 4) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 5) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;
 - e. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
 - 1) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;

- 2) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - 3) properti yang digunakan sendiri (lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap), termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - 4) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - 5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - 6) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
 - 7) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- f. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan:
- 1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, dan
 - 2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- g. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
- h. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
- i. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah

lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.

- j. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan:

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengakuan:

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Penyajian:

1. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.
4. Pemberlakuan kebijakan akuntansi Properti Investasi disesuaikan dengan ketersediaan kode dan uraian rekening dalam Laporan Keuangan.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan:

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Pengukuran:

- a. Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- c. Pencairan Dana Cadangan apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

- a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian

daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Lisensi dan Francise

Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

3) Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.

4) Hak Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

5) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

6) Kajian

Kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

7) Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya

film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi

pemerintah ataupun masyarakat.

8) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

9) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

- 1) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

- 1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- 2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Pengukuran

a. Tagihan Jangka Panjang

- 1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- 1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

- 2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - 3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - 4) Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- c. Aset Tidak Berwujud
- Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
 - 4) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- d. Aset Lain-lain
- Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.
- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.
- Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

- a) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
 - b) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.
- e. Amortisasi
- Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (Goodwill) dan aset tak berwujud dalam pengerjaan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa.

4.4.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

- a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

- b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

 - 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
 - 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
 - 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
 Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)
 Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
- d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)
 Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.

Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

- a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga
 Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara

kemajuan pekerjaan.

- b. **Pengukuran Utang Transfer**
Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. **Pengukuran Utang Bunga**
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- d. **Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**
Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
- e. **Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. **Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya**
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

- a. **Utang yang tidak diperjualbelikan**
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.
- b. **Utang yang diperjualbelikan**
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

- a. Ekuitas Awal
- b. Surplus/deficit – LO pada periode bersangkutan

- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari perse yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir

Pengakuan

Ekuitas bertambah pada saat adanya:

- a. surplus-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Ekuitas berkurang pada saat adanya:

- a. defisit-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.
 - 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.
- b. Kesalahan berulang
- Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali dan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib Menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali.

Berikut penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024 terdiri dari :

5.1.1 BELANJA DAERAH

Berikut ini adalah BELANJA DAERAH yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BELANJA OPERASI	25.490.528.961,00	23.137.155.320,06	90,77	19.329.757.240,00
BELANJA MODAL	760.700.350,00	654.103.541,69	85,99	48.500.000,00
Jumlah	26.251.229.311,00	23.791.258.861,75	90,63	19.378.257.240,00

Tabel di atas menunjukkan BELANJA DAERAH TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp4.413.001.621,75 atau 22,77%,

BELANJA MODAL dengan kenaikan signifikan sebesar Rp605.603.541,69 pada TA 2024

5.1.1.1 BELANJA OPERASI

Berikut ini adalah BELANJA OPERASI yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	12.285.642.851,00	10.801.409.908,00	87,92	11.632.298.785,00
Belanja Barang dan Jasa	13.179.886.110,00	12.310.745.412,06	93,41	7.622.458.455,00
Belanja Subsidi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Jumlah	25.490.528.961,00	23.137.155.320,06	90,77	19.329.757.240,00

Tabel di atas menunjukkan BELANJA OPERASI TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp3.807.398.080,06 atau 19,70%,

Belanja Barang dan Jasa dengan kenaikan signifikan sebesar Rp4.688.286.957,06 pada TA 2024

Belanja Hibah memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp50.000.000,00) pada TA 2024 .

5.1.1.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini adalah Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.670.926.408,00	4.455.475.657,00	95,39	4.847.922.364,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.547.216.443,00	6.278.434.251,00	83,19	6.744.301.421,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00	40.075.000,00
Jumlah	12.285.642.851,00	10.801.409.908,00	87,92	11.632.298.785,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp830.888.877,00) atau (7,14%), berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp392.446.707,00) atau (8,10%)

- a) Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN Tahun 2023 disebabkan karena di tahun 2024 pegawai di Dinas Koperasi UKM banyak yang pensiun sehingga realisasi belanja Gaji Pokok ASN mengalami penurunan.

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dengan kenaikan signifikan sebesar Rp27.425.000,00 pada TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penjelasan kenaikan realisasi belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya di Tahun 2024 disebabkan karena di tahun 2023 ada rasionalisasi Anggaran sehingga Belanja tersebut tidak bisa di realisasikan.

5.1.1.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Berikut ini adalah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok	3.378.259.332,00	3.240.763.431,00	95,93	3.495.982.524,00

Uraian	Tahun 2024		Tahun 2023	
ASN				
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	323.000.908,00	309.166.666,00	95,72	327.173.374,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	188.965.000,00	171.860.000,00	90,95	195.180.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	139.110.000,00	137.119.900,00	98,57	173.914.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	87.060.000,00	85.120.000,00	97,77	96.070.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	163.855.800,00	157.296.240,00	96,00	179.022.240,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	48.934.398,00	47.861.619,00	97,81	30.060.089,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	54.295,00	39.131,00	72,07	41.015,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	300.752.974,00	279.783.186,00	93,03	321.956.076,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.825.870,00	6.616.343,00	96,93	7.130.713,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.477.734,00	19.849.141,00	96,93	21.392.333,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	13.630.097,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.670.926.408,00	4.455.475.657,00	95,39	4.847.922.364,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp392.446.707,00) atau (8,10%)

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dengan kenaikan signifikan sebesar Rp17.801.530,00 pada TA 2024

Belanja Pembulatan Gaji ASN memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 72,07% pada TA 2024 .

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2024.

5.1.1.1.1.1 Belanja Gaji Pokok ASN

Berikut ini adalah Belanja Gaji Pokok ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok PNS	3.349.630.332,00	3.212.135.331,00	95,90	3.495.982.524,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	28.629.000,00	28.628.100,00	100,00	0,00
Jumlah	3.378.259.332,00	3.240.763.431,00	95,93	3.495.982.524,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Gaji Pokok ASN TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp255.219.093,00) atau (7,30%),

Belanja Gaji Pokok PPPK dengan realisasi baru sebesar Rp28.628.100,00 pada TA 2024

5.1.1.1.1.2 Belanja Tunjangan Keluarga ASN

Berikut ini adalah Belanja Tunjangan Keluarga ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	318.992.908,00	305.158.732,00	95,66	327.173.374,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.008.000,00	4.007.934,00	100,00	0,00
Jumlah	323.000.908,00	309.166.666,00	95,72	327.173.374,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tunjangan Keluarga ASN TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp18.006.708,00) atau (5,50%),

Belanja Tunjangan Keluarga PPPK dengan realisasi baru sebesar Rp4.007.934,00 pada TA 2024

5.1.1.1.1.3 Belanja Tunjangan Jabatan ASN

Berikut ini adalah Belanja Tunjangan Jabatan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	188.965.000,00	171.860.000,00	90,95	195.180.000,00
Jumlah	188.965.000,00	171.860.000,00	90,95	195.180.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tunjangan Jabatan ASN TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp23.320.000,00) atau (11,95%),

5.1.1.1.1.4 Belanja Tunjangan Fungsional ASN

Berikut ini adalah Belanja Tunjangan Fungsional ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	134.400.000,00	132.409.900,00	98,52	173.914.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.710.000,00	4.710.000,00	100,00	0,00
Jumlah	139.110.000,00	137.119.900,00	98,57	173.914.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tunjangan Fungsional ASN TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp36.794.100,00) atau (21,16%),

Belanja Tunjangan Fungsional PPPK dengan realisasi baru sebesar Rp4.710.000,00 pada TA 2024

5.1.1.1.1.5 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

Berikut ini adalah Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	87.060.000,00	85.120.000,00	97,77	96.070.000,00
Jumlah	87.060.000,00	85.120.000,00	97,77	96.070.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp10.950.000,00) atau (11,40%),

5.1.1.1.1.6 Belanja Tunjangan Beras ASN

Berikut ini adalah Belanja Tunjangan Beras ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Beras PNS	161.248.680,00	154.689.120,00	95,93	179.022.240,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.607.120,00	2.607.120,00	100,00	0,00
Jumlah	163.855.800,00	157.296.240,00	96,00	179.022.240,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tunjangan Beras ASN TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp21.726.000,00) atau (12,14%),

Belanja Tunjangan Beras PPPK dengan realisasi baru sebesar Rp2.607.120,00 pada TA 2024 .

5.1.1.1.1.7 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

Berikut ini adalah Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	48.934.398,00	47.861.619,00	97,81	30.060.089,00
Jumlah	48.934.398,00	47.861.619,00	97,81	30.060.089,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp17.801.530,00 atau 59,22%,

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS dengan kenaikan signifikan sebesar Rp17.801.530,00 pada TA 2024.

5.1.1.1.1.8 Belanja Pembulatan Gaji ASN

Berikut ini adalah Belanja Pembulatan Gaji ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pembulatan Gaji PNS	50.195,00	38.456,00	76,61	41.015,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.100,00	675,00	16,46	0,00
Jumlah	54.295,00	39.131,00	72,07	41.015,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pembulatan Gaji ASN TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp1.884,00) atau (4,59%),

5.1.1.1.1.9 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Berikut ini adalah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	299.259.133,00	278.289.345,00	92,99	321.956.076,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.493.841,00	1.493.841,00	100,00	0,00
Jumlah	300.752.974,00	279.783.186,00	93,03	321.956.076,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp42.172.890,00) atau (13,10%),

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK dengan realisasi baru sebesar Rp1.493.841,00 pada TA 2024:

5.1.1.1.1.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

Berikut ini adalah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.757.161,00	6.547.634,00	96,90	7.130.713,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	68.709,00	68.709,00	100,00	0,00
Jumlah	6.825.870,00	6.616.343,00	96,93	7.130.713,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp514.370,00) atau (7,21%),

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK dengan realisasi baru sebesar Rp68.709,00 pada TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.1.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

Berikut ini adalah Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.271.613,00	19.643.020,00	96,90	21.392.333,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	206.121,00	206.121,00	100,00	0,00
Jumlah	20.477.734,00	19.849.141,00	96,93	21.392.333,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp1.543.192,00) atau (7,21%),

Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK dengan realisasi baru sebesar Rp206.121,00 pada TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.1.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

Berikut ini adalah Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	13.615.782,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	14.315,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	13.630.097,00	0,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%,

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penjelasan rendahnya capaian realisasi Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat tahun 2024 disebabkan karena belum ada surat edaran untuk merealisasikan belanja tersebut.

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2024

5.1.1.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Berikut ini adalah Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.745.026.034,00	3.916.705.838,00	82,54	4.146.437.795,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	778.685.655,00	680.126.346,00	87,34	639.294.012,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.023.504.754,00	1.681.602.067,00	83,10	1.958.569.614,00
Jumlah	7.547.216.443,00	6.278.434.251,00	83,19	6.744.301.421,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp465.867.170,00) atau (6,91%),

5.1.1.1.1.2.1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

Berikut ini adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.745.026.034,00	3.916.705.838,00	82,54	4.146.437.795,00
Jumlah	4.745.026.034,00	3.916.705.838,00	82,54	4.146.437.795,00

Tabel di atas menunjukkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp229.731.957,00) atau (5,54%),

5.1.1.1.1.2.2 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN

Berikut ini adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	778.685.655,00	680.126.346,00	87,34	639.294.012,00
Jumlah	778.685.655,00	680.126.346,00	87,34	639.294.012,00

Tabel di atas menunjukkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp40.832.334,00 atau 6,39%,

5.1.1.1.1.2.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN

Berikut ini adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.023.504.754,00	1.681.602.067,00	83,10	1.958.569.614,00

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
Jumlah	2.023.504.754,00	1.681.602.067,00	83,10	1.958.569.614,00

Tabel di atas menunjukkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp276.967.547,00) atau (14,14%),

5.1.1.1.1.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Berikut ini adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Honorarium	45.900.000,00	45.900.000,00	100,00	40.075.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00	0,00
Jumlah	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00	40.075.000,00

Tabel di atas menunjukkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp27.425.000,00 atau 68,43%,

Belanja Jasa Pengelolaan BMD dengan realisasi baru sebesar Rp21.600.000,00 pada TA 2024.

5.1.1.1.1.3.1 Belanja Honorarium

Berikut ini adalah Belanja Honorarium yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	45.900.000,00	45.900.000,00	100,00	40.075.000,00
Jumlah	45.900.000,00	45.900.000,00	100,00	40.075.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Honorarium TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp5.825.000,00 atau 14,54%,

5.1.1.1.1.3.2 Belanja Jasa Pengelolaan BMD

Berikut ini adalah Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00	0,00

Uraian	Tahun 2024		Tahun 2023	
Pendapatan				
Jumlah	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Jasa Pengelolaan BMD TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp21.600.000,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Jasa Pengelolaan BMD TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Belanja Jasa Pengelolaan BMD TA 2024 mengalami kenaikan karena di TA 2023 masih direkening Belanja Honorarium Pengelola Keuangan.

5.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini adalah Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	2.943.273.200,00	2.768.637.762,00	94,07	946.035.281,00
Belanja Jasa	8.531.193.910,00	7.991.571.174,00	93,67	5.288.582.777,00
Belanja Pemeliharaan	467.790.000,00	442.163.869,06	94,52	88.172.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.225.629.000,00	1.096.372.607,00	89,45	1.299.668.397,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	13.179.886.110,00	12.310.745.412,06	93,41	7.622.458.455,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp4.688.286.957,06 atau 61,51%,

Belanja Barang dengan kenaikan signifikan sebesar Rp1.822.602.481,00 pada TA 2024

Penjelasan tinggi/rendahnya capaian realisasi Belanja Barang Tahun 2024 dibandingkan TA 2023 sebagai berikut :

- a) Belanja Bahan Cetak, Belanja Bahan Komputer, Belanja Perabot Kantor, Belanja Perlengkapan Dinas memiliki persentase capaian yang belum optimal disebabkan karena adanya efesiensi (nego harga), sehingga harga perolehan lebih murah dibandingkan dengan harga pada proses perencanaan awal yang tercantum pada DPA/DPPA.
- b) Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Fasilitas Pelayanan Umum memiliki persentase capaian kenaikan signifikan disebabkan karena pada UPTD Diklat Koperasi UMKM di Tahun 2024 mendapat tambahan Anggaran dana DAK dibandingkan tahun 2023

Belanja Jasa dengan kenaikan signifikan sebesar Rp2.702.988.397,00 pada TA 2024

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, Honorarium Tenaga Ahli mengalami kenaikan disebabkan karena pada UPTD Diklat Koperasi UMKM di Tahun 2024 mendapat tambahan Anggaran dana DAK dibandingkan tahun 2023
- Honorarium Penyelenggara Diklat Tahun 2024 belum optimal karena sesuai Pergub No 58 Tahun 2022 pasal 10 huruf c berbunyi untuk Perangkat Daerah Penyelenggara kegiatan dibayarkan 50%.
- Belanja Jasa Telpn, Listrik dan Air realisasinya belum optimal karena untuk pembayaran listrik, telpn air disesuaikan dengan jumlah tagihan pembayaran.
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 53,48% pada TA 2024 disebabkan karena pengangggaran lebih untuk mengantisipasi kenaikan pajak.

Belanja Pemeliharaan dengan kenaikan signifikan sebesar Rp353.991.869,06 pada TA 2024

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan realisasi baru sebesar Rp12.000.000,00 pada TA 2024.

5.1.1.1.2.1 Belanja Barang

Berikut ini adalah Belanja Barang yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang Pakai Habis	2.943.273.200,00	2.768.637.762,00	94,07	946.035.281,00
Jumlah	2.943.273.200,00	2.768.637.762,00	94,07	946.035.281,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp1.822.602.481,00 atau 192,66%,

5.1.1.1.2.1.1 Belanja Barang Pakai Habis

Berikut ini adalah Belanja Barang Pakai Habis yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	414.141.400,00	400.294.100,00	96,66	286.683.500,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.022.400,00	948.000,00	92,72	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	52.293.300,00	42.853.000,00	81,95	60.854.031,00
Belanja Alat/Bahan	48.217.400,00	39.519.000,00	81,96	31.433.300,00

Uraian	Tahun 2024		Tahun 2023	
untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	38.142.600,00	23.088.000,00	60,53	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.528.000,00	7.940.000,00	83,33	5.560.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	75.121.800,00	55.606.000,00	74,02	49.080.750,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	16.192.500,00	11.647.000,00	71,93	21.091.600,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.278.800,00	10.334.000,00	91,62	15.481.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	3.698.100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.348.400.000,00	1.275.343.662,00	94,58	343.189.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	132.735.000,00	107.100.000,00	80,69	54.970.750,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.500.000,00	5.445.000,00	99,00	516.250,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	770.700.000,00	768.600.000,00	99,73	73.477.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	20.000.000,00	19.920.000,00	99,60	0,00
Jumlah	2.943.273.200,00	2.768.637.762,00	94,07	946.035.281,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang Pakai Habis TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp1.822.602.481,00 atau 192,66%,

Belanja Bahan-Bahan Lainnya dengan realisasi baru sebesar Rp948.000,00 pada TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 60,53% dengan realisasi baru sebesar Rp23.088.000,00 pada TA 2024

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 74,02% pada TA 2024

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 71,93% pada TA 2024.

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp3.698.100,00) pada TA 2024

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan kenaikan signifikan sebesar Rp932.154.662,00 pada TA 2024. .

Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan kenaikan signifikan sebesar Rp52.129.250,00 pada TA 2024

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dengan kenaikan signifikan sebesar Rp4.928.750,00 pada TA 2024:

Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan dengan kenaikan signifikan sebesar Rp695.123.000,00 pada TA 2024

Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dengan realisasi baru sebesar Rp19.920.000,00 pada TA 2024

5.1.1.1.2.2 Belanja Jasa

Berikut ini adalah Belanja Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Kantor	6.924.238.706,00	6.468.493.044,00	93,42	5.092.002.643,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	272.354.704,00	246.578.130,00	90,54	196.580.134,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	62.680.500,00	60.000.000,00	95,72	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.252.000.000,00	1.216.500.000,00	97,16	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	19.920.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	8.531.193.910,00	7.991.571.174,00	93,67	5.288.582.777,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Jasa TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp2.702.988.397,00 atau 51,11%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Jasa TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dengan realisasi baru sebesar Rp60.000.000,00 pada TA 2024

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dengan realisasi baru sebesar Rp1.216.500.000,00 pada TA 2024

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2024

5.1.1.1.2.2.1 Belanja Jasa Kantor

Berikut ini adalah Belanja Jasa Kantor yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.382.200.000,00	1.355.800.000,00	98,09	669.400.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	300.000.000,00	161.000.000,00	53,67	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.484.600.064,00	1.409.444.592,00	94,94	2.938.042.100,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	206.820.320,00	206.820.320,00	100,00	206.498.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.173.200.000,00	2.108.000.000,00	97,00	12.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	208.584.384,00	208.584.384,00	100,00	208.197.600,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	312.876.576,00	278.112.512,00	88,89	312.296.400,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	278.112.512,00	278.112.512,00	100,00	277.596.800,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.600.000,00	5.700.000,00	86,36	3.000.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	169.344.850,00	169.000.000,00	99,80	169.000.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	77.000.000,00	75.400.000,00	97,92	79.650.000,00
Belanja Tagihan Telepon	33.000.000,00	13.500.344,00	40,91	13.536.779,00
Belanja Tagihan Air	56.500.000,00	22.121.850,00	39,15	27.137.500,00
Belanja Tagihan Listrik	218.000.000,00	167.591.830,00	76,88	165.376.264,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.400.000,00	9.304.700,00	53,48	9.771.200,00
Jumlah	6.924.238.706,00	6.468.493.044,00	93,42	5.092.002.643,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Jasa Kantor TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp1.376.490.401,00 atau 27,03%,

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dengan kenaikan signifikan sebesar Rp686.400.000,00 pada TA 2024

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 53,67% dengan realisasi baru sebesar Rp161.000.000,00 pada TA 2024

Belanja Jasa Tenaga Administrasi dengan penurunan signifikan sebesar (Rp1.528.597.508,00) pada TA 2024

Belanja Jasa Tenaga Ahli dengan kenaikan signifikan sebesar Rp2.095.500.000,00 pada TA 2024

Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan dengan kenaikan signifikan sebesar Rp2.700.000,00 pada TA 2024 .

Belanja Tagihan Telepon memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 40,91% pada TA 2024.

Belanja Tagihan Air memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 39,15% pada TA 2024

Belanja Tagihan Listrik memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 76,88% pada TA 2024

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 53,48% pada TA 2024

5.1.1.1.2.2.2 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Berikut ini adalah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	105.044.304,00	100.337.130,00	95,52	98.583.878,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	9.470.544,00	8.277.930,00	87,41	5.547.020,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	11.837.968,00	10.347.210,00	87,41	92.449.236,00
Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	146.001.888,00	127.615.860,00	87,41	0,00
Jumlah	272.354.704,00	246.578.130,00	90,54	196.580.134,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp49.997.996,00 atau 25,43%, berikut penjelasannya:

Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN dengan penurunan signifikan sebesar (Rp82.102.026,00) pada TA 2024

Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN dengan realisasi baru sebesar Rp127.615.860,00 pada TA 2024

5.1.1.1.2.2.3 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Berikut ini adalah Belanja Sewa Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	47.680.500,00	45.000.000,00	94,38	0,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	62.680.500,00	60.000.000,00	95,72	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp60.000.000,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang dengan realisasi baru sebesar Rp45.000.000,00 pada TA 2024

Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya dengan realisasi baru sebesar Rp15.000.000,00 pada TA 2024

5.1.1.1.2.2.4 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Berikut ini adalah Belanja Sewa Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000,00	19.400.000,00	97,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.232.000.000,00	1.197.100.000,00	97,17	0,00
Jumlah	1.252.000.000,00	1.216.500.000,00	97,16	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp1.216.500.000,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dengan realisasi baru sebesar Rp19.400.000,00 pada TA 2024

Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dengan realisasi baru sebesar Rp1.197.100.000,00 pada TA 2024

5.1.1.1.2.2.5 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Berikut ini adalah Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bimbingan Teknis	19.920.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	19.920.000,00	0,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024.

- a) Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis untuk TA 2024 tidak terealisasi karena tidak ada pemanggilan diklat.

Belanja Bimbingan Teknis memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2024

5.1.1.1.2.3 Belanja Pemeliharaan

Berikut ini adalah Belanja Pemeliharaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	216.790.000,00	191.981.000,00	88,56	88.172.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	251.000.000,00	250.182.869,06	99,67	0,00
Jumlah	467.790.000,00	442.163.869,06	94,52	88.172.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pemeliharaan TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp353.991.869,06 atau 401,48%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan kenaikan signifikan sebesar Rp103.809.000,00 pada TA 2024

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan realisasi baru sebesar Rp250.182.869,06 pada TA 2024

5.1.1.1.2.3.1 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Berikut ini adalah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	164.800.000,00	149.211.000,00	90,54	61.192.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	15.830.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	25.620.000,00	22.940.000,00	89,54	3.610.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.330.000,00	12.185.000,00	79,48	5.150.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	11.040.000,00	7.645.000,00	69,25	2.390.000,00
Jumlah	216.790.000,00	191.981.000,00	88,56	88.172.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp103.809.000,00 atau 117,73%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dengan kenaikan signifikan sebesar Rp88.019.000,00 pada TA 2024

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp15.830.000,00) pada TA 2024

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin dengan kenaikan signifikan sebesar Rp19.330.000,00 pada TA 2024

Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 79,48% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp7.035.000,00 pada TA 2024

Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 69,25% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp5.255.000,00 pada TA 2024

5.1.1.1.2.3.2 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Berikut ini adalah Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	251.000.000,00	250.182.869,06	99,67	0,00
Jumlah	251.000.000,00	250.182.869,06	99,67	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp250.182.869,06 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dengan realisasi baru sebesar Rp250.182.869,06 pada TA 2024

5.1.1.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

Berikut ini adalah Belanja Perjalanan Dinas yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.225.629.000,00	1.096.372.607,00	89,45	1.299.668.397,00
Jumlah	1.225.629.000,00	1.096.372.607,00	89,45	1.299.668.397,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp203.295.790,00) atau (15,64%), berikut penjelasannya:

5.1.1.1.2.4.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Berikut ini adalah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	365.804.000,00	273.872.607,00	74,87	24.691.597,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	115.880.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	839.825.000,00	802.500.000,00	95,56	1.159.096.800,00
Jumlah	1.225.629.000,00	1.096.372.607,00	89,45	1.299.668.397,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp203.295.790,00) atau (15,64%), berikut penjelasannya:

Belanja Perjalanan Dinas Biasa memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 74,87% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp249.181.010,00 pada TA 2024

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan penurunan signifikan sebesar (Rp95.880.000,00) pada TA 2024

5.1.1.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Berikut ini adalah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp12.000.000,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan realisasi baru sebesar Rp12.000.000,00 pada TA 2024

5.1.1.1.2.5.1 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Berikut ini adalah Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp12.000.000,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan dengan realisasi baru sebesar Rp12.000.000,00 pada TA 2024

5.1.1.1.3 Belanja Subsidi

Berikut ini adalah Belanja Subsidi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Subsidi kepada Koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00
Jumlah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00

5.1.1.1.3.1 Belanja Subsidi kepada Koperasi

Berikut ini adalah Belanja Subsidi kepada Koperasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Subsidi kepada Koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00
Jumlah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Subsidi kepada Koperasi TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%,

Belanja subsidi diberikan kepada 10 Koperasi untuk pembuatan Akta Koperasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 950/03-H/HK/2024.

Nama-nama Koperasi yang mendapatkan subsidi pembuatan Akta Koperasi Tahun 2024 antara lain:

- Koperasi Jasa Djalín Sinergi Bersama
- Koperasi Konsumen Manah Tulus Ayu
- Koperasi Konsumen Penggerak Perempuan Indonesia
- Koperasi Jasa Pawikan Marga Mertha
- Koperasi Pemasaran Mustika Dana Sakti
- Koperasi Produsen Tirta Amerta Kauripan
- Koperasi Jasa Multi Pihak Bali Bamgkit Sejahtera

- h. Koperasi Jasa Bali Mesari Makmur
- i. Koperasi Produsen Alga Nusa Sejahtera
- j. Koperasi Konsumen Bali Mahottama Sedana

5.1.1.1.4 Belanja Hibah

Berikut ini adalah Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp50.000.000,00) atau (100,00%), berikut penjelasannya:

- a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp50.000.000,00) pada TA 2024 karena tidak ada anggaran dan tidak ada koperasi yang mengajukan permohonan (proposal).

5.1.1.1.4.1.1 Belanja Hibah kepada Koperasi

Berikut ini adalah Belanja Hibah kepada Koperasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah kepada Koperasi TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp50.000.000,00) atau (100,00%),

5.1.1.2 BELANJA MODAL

Berikut ini adalah BELANJA MODAL yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	530.444.200,00	468.817.500,00	88,38	48.500.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	230.256.150,00	185.286.041,69	80,47	0,00
Jumlah	760.700.350,00	654.103.541,69	85,99	48.500.000,00

Tabel di atas menunjukkan BELANJA MODAL TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp605.603.541,69 atau 1.248,67%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi BELANJA MODAL TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan kenaikan signifikan sebesar Rp420.317.500,00 pada TA 2024

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan realisasi baru sebesar Rp185.286.041,69 pada TA 2024

5.1.1.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Angkutan	29.492.100,00	27.640.000,00	93,72	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	164.594.100,00	152.791.500,00	92,83	11.600.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	111.821.400,00	102.421.000,00	91,59	0,00
Belanja Modal Komputer	224.536.600,00	185.965.000,00	82,82	36.900.000,00
Jumlah	530.444.200,00	468.817.500,00	88,38	48.500.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp420.317.500,00 atau 866,63%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024

Belanja Modal Alat Angkutan dengan realisasi baru sebesar Rp27.640.000,00 pada TA 2024

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan kenaikan signifikan sebesar Rp141.191.500,00 pada TA 2024

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dengan realisasi baru sebesar Rp102.421.000,00 pada TA 2024

Belanja Modal Komputer dengan kenaikan signifikan sebesar Rp149.065.000,00 pada TA 2024

5.1.1.2.1.1 Belanja Modal Alat Angkutan

Berikut ini adalah Belanja Modal Alat Angkutan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	29.492.100,00	27.640.000,00	93,72	0,00
Jumlah	29.492.100,00	27.640.000,00	93,72	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Alat Angkutan TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp27.640.000,00 atau 0,00%,

5.1.1.2.1.1.1 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor

Berikut ini adalah Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	29.492.100,00	27.640.000,00	93,72	0,00
Jumlah	29.492.100,00	27.640.000,00	93,72	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp27.640.000,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024

Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan realisasi baru sebesar Rp27.640.000,00 pada TA 2024

5.1.1.2.1.2 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Berikut ini adalah Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Kantor	61.437.500,00	59.275.000,00	96,48	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	103.156.600,00	93.516.500,00	90,65	11.600.000,00
Jumlah	164.594.100,00	152.791.500,00	92,83	11.600.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp141.191.500,00 atau 1.217,17%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024 .

Belanja Modal Alat Kantor dengan realisasi baru sebesar Rp59.275.000,00 pada TA 2024

Belanja Modal Alat Rumah Tangga dengan kenaikan signifikan sebesar Rp81.916.500,00 pada TA 2024

5.1.1.2.1.2.1 Belanja Modal Alat Kantor

Berikut ini adalah Belanja Modal Alat Kantor yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	61.437.500,00	59.275.000,00	96,48	0,00
Jumlah	61.437.500,00	59.275.000,00	96,48	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Alat Kantor TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp59.275.000,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Alat Kantor TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya dengan realisasi baru sebesar Rp59.275.000,00 pada TA 2024

5.1.1.2.1.2.2 Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Berikut ini adalah Belanja Modal Alat Rumah Tangga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Mebel	39.161.900,00	38.200.000,00	97,54	0,00
Belanja Modal Alat Pendingin	32.494.700,00	32.416.500,00	99,76	11.600.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	31.500.000,00	22.900.000,00	72,70	0,00
Jumlah	103.156.600,00	93.516.500,00	90,65	11.600.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Alat Rumah Tangga TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp81.916.500,00 atau 706,18%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024

Belanja Modal Mebel dengan realisasi baru sebesar Rp38.200.000,00 pada TA 2024

Belanja Modal Alat Pendingin dengan kenaikan signifikan sebesar Rp20.816.500,00 pada TA 2024

Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 72,70% dengan realisasi baru sebesar Rp22.900.000,00 pada TA 2024

5.1.1.2.1.3 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Berikut ini adalah Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Studio	111.821.400,00	102.421.000,00	91,59	0,00
Jumlah	111.821.400,00	102.421.000,00	91,59	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp102.421.000,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Modal Alat Studio dengan realisasi baru sebesar Rp102.421.000,00 pada TA

5.1.1.2.1.3.1 Belanja Modal Alat Studio

Berikut ini adalah Belanja Modal Alat Studio yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	50.500.000,00	49.800.000,00	98,61	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	61.321.400,00	52.621.000,00	85,81	0,00
Jumlah	111.821.400,00	102.421.000,00	91,59	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Alat Studio TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp102.421.000,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Alat Studio TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024

Belanja Modal Peralatan Studio Audio dengan realisasi baru sebesar Rp49.800.000,00 pada TA 2024

Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film dengan realisasi baru sebesar Rp52.621.000,00 pada TA 2024

5.1.1.2.1.4 Belanja Modal Komputer

Berikut ini adalah Belanja Modal Komputer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Komputer Unit	193.849.300,00	157.327.000,00	81,16	30.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	30.687.300,00	28.638.000,00	93,32	6.900.000,00
Jumlah	224.536.600,00	185.965.000,00	82,82	36.900.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Komputer TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp149.065.000,00 atau 403,97%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Komputer TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Modal Komputer Unit dengan kenaikan signifikan sebesar Rp127.327.000,00 pada TA 2024

Belanja Modal Peralatan Komputer dengan kenaikan signifikan sebesar Rp21.738.000,00 pada TA 2024

5.1.1.2.1.4.1 Belanja Modal Komputer Unit

Berikut ini adalah Belanja Modal Komputer Unit yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Personal Computer	193.849.300,00	157.327.000,00	81,16	30.000.000,00
Jumlah	193.849.300,00	157.327.000,00	81,16	30.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Komputer Unit TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp127.327.000,00 atau 424,42%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Komputer Unit TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024

Belanja Modal Personal Computer dengan kenaikan signifikan sebesar Rp127.327.000,00 pada TA 2024

5.1.1.2.1.4.2 Belanja Modal Peralatan Komputer

Berikut ini adalah Belanja Modal Peralatan Komputer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	18.138.300,00	18.138.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	12.549.000,00	10.500.000,00	83,67	6.900.000,00
Jumlah	30.687.300,00	28.638.000,00	93,32	6.900.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Peralatan Komputer TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp21.738.000,00 atau 315,04%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024

Belanja Modal Peralatan Personal Computer dengan realisasi baru sebesar Rp18.138.000,00 pada TA 2024

Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya dengan kenaikan signifikan sebesar Rp3.600.000,00 pada TA 2024

5.1.1.2.2 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini adalah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Instalasi	230.256.150,00	185.286.041,69	80,47	0,00
Jumlah	230.256.150,00	185.286.041,69	80,47	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp185.286.041,69 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024

Belanja Modal Instalasi dengan realisasi baru sebesar Rp185.286.041,69 pada TA 2024

5.1.1.2.2.1 Belanja Modal Instalasi

Berikut ini adalah Belanja Modal Instalasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Instalasi Air	155.256.150,00	115.481.041,69	74,38	0,00

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bersih/Air Baku				
Belanja Modal	75.000.000,00	69.805.000,00	93,07	0,00
Instalasi Lain				
Jumlah	230.256.150,00	185.286.041,69	80,47	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Instalasi TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp185.286.041,69 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Instalasi TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024

Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 74,38% dengan realisasi baru sebesar Rp115.481.041,69 pada TA 2024

Belanja Modal Instalasi Lain dengan realisasi baru sebesar Rp69.805.000,00 pada TA 2024

5.1.1.2.2.1.1 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku

Berikut ini adalah Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal				
Instalasi Air				
Bersih/Air Baku	155.256.150,00	115.481.041,69	74,38	0,00
Lainnya				
Jumlah	155.256.150,00	115.481.041,69	74,38	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp115.481.041,69 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024

Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 74,38% dengan realisasi baru sebesar Rp115.481.041,69 pada TA 2024

5.1.1.2.2.1.2 Belanja Modal Instalasi Lain

Berikut ini adalah Belanja Modal Instalasi Lain yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal				
Instalasi Lain	75.000.000,00	69.805.000,00	93,07	0,00
Jumlah	75.000.000,00	69.805.000,00	93,07	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Instalasi Lain TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp69.805.000,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Instalasi Lain TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2024

Belanja Modal Instalasi Lain dengan realisasi baru sebesar Rp69.805.000,00 pada TA 2024

5.2.1 ASET

Saldo ASET yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
ASET LANCAR	80.777.400,00	2.253.800,00	78.523.600,00	3.484,05
ASET TETAP	11.610.784.739,69	11.321.091.259,00	289.693.480,69	2,56
Jumlah	11.691.562.139,69	11.323.345.059,00	368.217.080,69	3,25

Tabel di atas menunjukkan ASET per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp368.217.080,69 atau 3,25%. Penjelasan saldo ASET beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen ASET LANCAR mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp78.523.600,00 atau 3.484,05% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1.1 ASET LANCAR

Saldo ASET LANCAR yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Persediaan	80.777.400,00	2.253.800,00	78.523.600,00	3.484,05
Jumlah	80.777.400,00	2.253.800,00	78.523.600,00	3.484,05

Tabel di atas menunjukkan ASET LANCAR per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp78.523.600,00 atau 3.484,05%.

5.2.1.1.1 Persediaan

Saldo Persediaan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Barang Pakai Habis	80.777.400,00	2.253.800,00	78.523.600,00	3.484,05

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jumlah	80.777.400,00	2.253.800,00	78.523.600,00	3.484,05

Tabel di atas menunjukkan Persediaan per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp78.523.600,00 atau 3.484,05%.

5.2.1.1.1.1 Barang Pakai Habis

Saldo Barang Pakai Habis yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bahan	80.777.400,00	704.000,00	80.073.400,00	11.374,06
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	0,00	1.549.800,00	(1.549.800,00)	(100,00)
Jumlah	80.777.400,00	2.253.800,00	78.523.600,00	3.484,05

Tabel di atas menunjukkan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp78.523.600,00 atau 3.484,05%. Penjelasan saldo Barang Pakai Habis beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Bahan Bakar mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp80.073.400,00 atau 11.374,06% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Komponen Persediaan Bahan Bakar mengalami kenaikan signifikan di tahun 2024 karena perjalanan dinas TA 2024 mengalami efisiensi (volumenya berkurang) dan persediaan tahun 2024 penggunaannya akan dioptimalkan di tahun 2025.

Komponen Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp1.549.800,00) atau (100,00%)

5.2.1.1.1.2 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Saldo Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kertas dan Cover	0,00	139.800,00	(139.800,00)	(100,00)
Benda Pos	0,00	60.000,00	(60.000,00)	(100,00)
Bahan Komputer	0,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	1.549.800,00	(1.549.800,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp1.549.800,00) atau (100,00%). Penjelasan saldo

Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Kertas dan Cover mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp139.800,00) atau (100,00%)

Komponen Benda Pos mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp60.000,00) atau (100,00%)

Komponen Bahan Komputer mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp1.350.000,00) atau (100,00%)

5.2.1.2 ASET TETAP

Saldo ASET TETAP yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penuruna n)	%
Tanah	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	5.850.583.975,00	5.311.961.475,00	538.622.500,00	10,14
Gedung dan Bangunan	8.697.575.714,00	8.697.575.714,00	0,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	264.662.691,69	149.181.650,00	115.481.041,69	77,41
Aset Tetap Lainnya	11.573.000,00	11.573.000,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	79.812.260,00	179.168.660,00	(99.356.400,00)	(55,45)
Akumulasi Penyusutan	(7.847.237.901,0 0)	(7.582.184.240,0 0)	(265.053.661,00)	3,50
Jumlah	11.610.784.739,6 9	11.321.091.259,0 0	289.693.480,69	2,56

Tabel di atas menunjukkan ASET TETAP per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp289.693.480,69 atau 2,56%. Penjelasan saldo ASET TETAP beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp115.481.041,69 atau 77,41%

Komponen Konstruksi Dalam Pengerjaan mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp99.356.400,00) atau (55,45%)

5.2.1.2.1 Tanah

Saldo Tanah yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00	0,00	0,00
Jumlah	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Tanah per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.1.1 Tanah Persil

Saldo Tanah Persil yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00	0,00	0,00
Jumlah	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Tanah Persil per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Angkutan	2.003.979.000,00	1.976.339.000,00	27.640.000,00	1,40
Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.530.378.675,00	2.377.587.175,00	152.791.500,00	6,43
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	349.204.000,00	239.283.000,00	109.921.000,00	45,94
Alat Laboratorium	11.902.000,00	11.902.000,00	0,00	0,00
Komputer	952.020.300,00	703.750.300,00	248.270.000,00	35,28
Jumlah	5.850.583.975,00	5.311.961.475,00	538.622.500,00	10,14

Tabel di atas menunjukkan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp538.622.500,00 atau 10,14%. Penjelasan saldo Peralatan dan Mesin beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal	5.311.961.475,00
Penambahan	
Belanja Modal	468.817.500,00
Reklas dari JIJ Tahun Berjalan	69.805.000,00
Saldo Akhir	5.859.583.975,00

5.2.1.2.2.1 Alat Angkutan

Saldo Alat Angkutan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Angkutan Darat Bermotor	2.003.979.000,00	1.976.339.000,00	27.640.000,00	1,40
Jumlah	2.003.979.000,00	1.976.339.000,00	27.640.000,00	1,40

Tabel di atas menunjukkan Alat Angkutan per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp27.640.000,00 atau 1,40%. Penjelasan saldo Alat Angkutan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.2.1.1 Alat Angkutan Darat Bermotor

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.099.020.000,00	1.099.020.000,00	0,00	0,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	703.450.000,00	703.450.000,00	0,00	0,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	201.509.000,00	173.869.000,00	27.640.000,00	15,90
Jumlah	2.003.979.000,00	1.976.339.000,00	27.640.000,00	1,40

Tabel di atas menunjukkan Alat Angkutan Darat Bermotor per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp27.640.000,00 atau 1,40%. Penjelasan saldo Alat Angkutan Darat Bermotor beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.2.2 Alat Bengkel dan Alat Ukur

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Ukur	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
Jumlah	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.2.2.1 Alat Ukur

Saldo Alat Ukur yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Ukur/Pembanding	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jumlah	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Ukur per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Alat Ukur beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.2.3 Alat Kantor dan Rumah Tangga

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Kantor	509.321.000,00	450.046.000,00	59.275.000,00	13,17
Alat Rumah Tangga	1.856.045.800,00	1.769.479.300,00	86.566.500,00	4,89
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	165.011.875,00	158.061.875,00	6.950.000,00	4,40
Jumlah	2.530.378.675,00	2.377.587.175,00	152.791.500,00	6,43

Tabel di atas menunjukkan Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp152.791.500,00 atau 6,43%. Penjelasan saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.2.3.1 Alat Kantor

Saldo Alat Kantor yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Mesin Ketik	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	338.041.000,00	338.041.000,00	0,00	0,00
Alat Kantor Lainnya	164.030.000,00	104.755.000,00	59.275.000,00	56,58
Jumlah	509.321.000,00	450.046.000,00	59.275.000,00	13,17

Tabel di atas menunjukkan Alat Kantor per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp59.275.000,00 atau 13,17%. Penjelasan saldo Alat Kantor beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Alat Kantor Lainnya mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp59.275.000,00 atau 56,58%

5.2.1.2.2.3.2 Alat Rumah Tangga

Saldo Alat Rumah Tangga yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Mebel	810.333.750,00	779.083.750,00	31.250.000,00	4,01
Alat Pembersih	46.270.000,00	42.170.000,00	4.100.000,00	9,72
Alat Pendingin	463.886.500,00	431.470.000,00	32.416.500,00	7,51
Alat Dapur	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	517.685.550,00	498.885.550,00	18.800.000,00	3,77
Alat Pemadam Kebakaran	16.490.000,00	16.490.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1.856.045.800,00	1.769.479.300,00	86.566.500,00	4,89

Tabel di atas menunjukkan Alat Rumah Tangga per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp86.566.500,00 atau 4,89%. Penjelasan saldo Alat Rumah Tangga beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.2.3.3 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Saldo Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Meja Kerja Pejabat	34.715.750,00	34.715.750,00	0,00	0,00
Kursi Kerja Pejabat	37.159.225,00	30.209.225,00	6.950.000,00	23,01
Kursi Rapat Pejabat	30.292.900,00	30.292.900,00	0,00	0,00
Lemari dan Arsip Pejabat	62.844.000,00	62.844.000,00	0,00	0,00
Jumlah	165.011.875,00	158.061.875,00	6.950.000,00	4,40

Tabel di atas menunjukkan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp6.950.000,00 atau 4,40%. Penjelasan saldo Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.2.4 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Studio	263.069.000,00	153.148.000,00	109.921.000,00	71,77
Alat Komunikasi	86.135.000,00	86.135.000,00	0,00	0,00
Jumlah	349.204.000,00	239.283.000,00	109.921.000,00	45,94

Tabel di atas menunjukkan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp109.921.000,00 atau 45,94%. Penjelasan saldo

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Alat Studio mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp109.921.000,00 atau 71,77% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1.2.2.4.1 Alat Studio

Saldo Alat Studio yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Peralatan Studio Audio	98.418.000,00	41.118.000,00	57.300.000,00	139,36
Peralatan Studio Video dan Film	164.651.000,00	112.030.000,00	52.621.000,00	46,97
Jumlah	263.069.000,00	153.148.000,00	109.921.000,00	71,77

Tabel di atas menunjukkan Alat Studio per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp109.921.000,00 atau 71,77%. Penjelasan saldo Alat Studio beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Peralatan Studio Audio mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp57.300.000,00 atau 139,36% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1.2.2.4.2 Alat Komunikasi

Saldo Alat Komunikasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Komunikasi Telephone	78.160.000,00	78.160.000,00	0,00	0,00
Alat Komunikasi Sosial	7.975.000,00	7.975.000,00	0,00	0,00
Jumlah	86.135.000,00	86.135.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Komunikasi per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.2.5 Alat Laboratorium

Saldo Alat Laboratorium yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Unit Alat Laboratorium	11.902.000,00	11.902.000,00	0,00	0,00
Jumlah	11.902.000,00	11.902.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Laboratorium per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.2.5.1 Unit Alat Laboratorium

Saldo Unit Alat Laboratorium yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Laboratorium Lain	11.902.000,00	11.902.000,00	0,00	0,00
Jumlah	11.902.000,00	11.902.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Unit Alat Laboratorium per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.2.6 Komputer

Saldo Komputer yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Komputer Unit	841.775.800,00	614.643.800,00	227.132.000,00	36,95
Peralatan Komputer	110.244.500,00	89.106.500,00	21.138.000,00	23,72
Jumlah	952.020.300,00	703.750.300,00	248.270.000,00	35,28

Tabel di atas menunjukkan Komputer per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp248.270.000,00 atau 35,28%. Penjelasan saldo Komputer beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.2.6.1 Komputer Unit

Saldo Komputer Unit yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Komputer Jaringan	69.805.000,00	0,00	69.805.000,00	0,00
Personal Computer	771.970.800,00	614.643.800,00	157.327.000,00	25,60
Jumlah	841.775.800,00	614.643.800,00	227.132.000,00	36,95

Tabel di atas menunjukkan Komputer Unit per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp227.132.000,00 atau 36,95%. Penjelasan saldo Komputer Unit beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Komputer Jaringan mengalami saldo baru sebesar Rp69.805.000,00 atau 0,00%

5.2.1.2.2.6.2 Peralatan Komputer

Saldo Peralatan Komputer yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Peralatan Personal Computer	107.244.500,00	89.106.500,00	18.138.000,00	20,36
Peralatan Jaringan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Jumlah	110.244.500,00	89.106.500,00	21.138.000,00	23,72

Tabel di atas menunjukkan Peralatan Komputer per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp21.138.000,00 atau 23,72%. Penjelasan saldo Peralatan Komputer beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Peralatan Jaringan mengalami saldo baru sebesar Rp3.000.000,00 atau 0,00%

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bangunan Gedung	8.697.575.714,00	8.697.575.714,00	0,00	0,00
Jumlah	8.697.575.714,00	8.697.575.714,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Gedung dan Bangunan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.3.1 Bangunan Gedung

Saldo Bangunan Gedung yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.639.015.714,00	8.639.015.714,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	58.560.000,00	58.560.000,00	0,00	0,00
Jumlah	8.697.575.714,00	8.697.575.714,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Gedung per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Bangunan Gedung beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.3.1.1 Bangunan Gedung Tempat Kerja

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bangunan Gedung Kantor	6.612.133.300,00	6.612.133.300,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.031.250.000,00	1.031.250.000,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	949.040.260,00	949.040.260,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	46.592.154,00	46.592.154,00	0,00	0,00
Jumlah	8.639.015.714,00	8.639.015.714,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Gedung Tempat Kerja per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.3.1.2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Asrama	58.560.000,00	58.560.000,00	0,00	0,00
Jumlah	58.560.000,00	58.560.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Gedung Tempat Tinggal per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bangunan Air	2.936.650,00	2.936.650,00	0,00	0,00
Instalasi	261.726.041,69	146.245.000,00	115.481.041,69	78,96
Jumlah	264.662.691,69	149.181.650,00	115.481.041,69	77,41

Tabel di atas menunjukkan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp115.481.041,69 atau 77,41%. Penjelasan saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal	149.181.650,00
Penambahan	
Belanja Modal	185.286.041,69
Pengurangan (reklas asset tahun berjalan)	69.805.000,00
Saldo Akhir	264.662.691,69

5.2.1.2.4.1 Bangunan Air

Saldo Bangunan Air yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.936.650,00	2.936.650,00	0,00	0,00
Jumlah	2.936.650,00	2.936.650,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Air per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Bangunan Air beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.4.1.1 Bangunan Air Bersih/Air Baku

Saldo Bangunan Air Bersih/Air Baku yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	2.936.650,00	2.936.650,00	0,00	0,00
Jumlah	2.936.650,00	2.936.650,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Air Bersih/Air Baku per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Bangunan Air Bersih/Air Baku beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.4.2 Instalasi

Saldo Instalasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Instalasi Air Bersih/Air Baku	115.481.041,69	0,00	115.481.041,69	0,00
Instalasi Gardu Listrik	121.715.000,00	121.715.000,00	0,00	0,00
Instalasi Pertahanan	24.530.000,00	24.530.000,00	0,00	0,00
Jumlah	261.726.041,69	146.245.000,00	115.481.041,69	78,96

Tabel di atas menunjukkan Instalasi per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp115.481.041,69 atau 78,96%. Penjelasan saldo Instalasi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Instalasi Air Bersih/Air Baku mengalami saldo baru sebesar Rp115.481.041,69 atau 0,00%

5.2.1.2.4.2.1 Instalasi Air Bersih/Air Baku

Saldo Instalasi Air Bersih/Air Baku yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	115.481.041,69	0,00	115.481.041,69	0,00
Jumlah	115.481.041,69	0,00	115.481.041,69	0,00

Tabel di atas menunjukkan Instalasi Air Bersih/Air Baku per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp115.481.041,69 atau 0,00%. Penjelasan saldo Instalasi Air Bersih/Air Baku beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya mengalami saldo baru sebesar Rp115.481.041,69 atau 0,00% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1.2.4.2.2 Instalasi Gardu Listrik

Saldo Instalasi Gardu Listrik yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Instalasi Pusat Pengatur Listrik	121.715.000,00	121.715.000,00	0,00	0,00
Jumlah	121.715.000,00	121.715.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Instalasi Gardu Listrik per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Instalasi Gardu Listrik beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.4.2.3 Instalasi Pertahanan

Saldo Instalasi Pertahanan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Instalasi Pertahanan di Darat	24.530.000,00	24.530.000,00	0,00	0,00
Jumlah	24.530.000,00	24.530.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Instalasi Pertahanan per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Instalasi Pertahanan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bahan Perpustakaan	11.573.000,00	11.573.000,00	0,00	0,00
Jumlah	11.573.000,00	11.573.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Aset Tetap Lainnya beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.5.1 Bahan Perpustakaan

Saldo Bahan Perpustakaan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bahan Perpustakaan Tercetak	10.973.000,00	10.973.000,00	0,00	0,00
Karya Grafika (Graphic Material)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Jumlah	11.573.000,00	11.573.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bahan Perpustakaan per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Bahan Perpustakaan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.5.1.1 Bahan Perpustakaan Tercetak

Saldo Bahan Perpustakaan Tercetak yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Buku Umum	9.393.000,00	9.393.000,00	0,00	0,00
Buku Ilmu Sosial	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00
Jumlah	10.973.000,00	10.973.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bahan Perpustakaan Tercetak per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Bahan Perpustakaan Tercetak beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.5.1.2 Karya Grafika (Graphic Material)

Saldo Karya Grafika (Graphic Material) yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Karya Grafika (Graphic Material)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Jumlah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Karya Grafika (Graphic Material) per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Karya Grafika (Graphic Material) beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	79.812.260,00	179.168.660,00	(99.356.400,00)	(55,45)
Jumlah	79.812.260,00	179.168.660,00	(99.356.400,00)	(55,45)

Tabel di atas menunjukkan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp99.356.400,00) atau (55,45%). Penjelasan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp99.356.400,00) atau (55,45%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Konstruksi dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan mengalami penurunan karena ada proses penghapusan barang sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor B.31.000.2.4/6362/P.BMD/BPKAD tanggal 3 Oktober 2024

5.2.1.2.6.1 Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	79.812.260,00	179.168.660,00	(99.356.400,00)	(55,45)
Jumlah	79.812.260,00	179.168.660,00	(99.356.400,00)	(55,45)

Tabel di atas menunjukkan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp99.356.400,00) atau (55,45%). Penjelasan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp99.356.400,00) atau (55,45%)

5.2.1.2.6.1.1 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	79.812.260,00	179.168.660,00	(99.356.400,00)	(55,45)
Jumlah	79.812.260,00	179.168.660,00	(99.356.400,00)	(55,45)

Tabel di atas menunjukkan Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp99.356.400,00) atau (55,45%). Penjelasan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp99.356.400,00) atau (55,45%)

5.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penuruna n)	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.275.577.080,00)	(5.191.699.419,00)	(83.877.661,00)	1,62
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.532.588.655,00)	(2.355.667.393,00)	(176.921.262,00)	7,51
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(39.072.166,00)	(34.817.428,00)	(4.254.738,00)	12,22
Jumlah	(7.847.237.901,00)	(7.582.184.240,00)	(265.053.661,00)	3,50

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp265.053.661,00 atau 3,50%. Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.7.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.976.668.048,0 0)	(1.969.144.357,0 0)	(7.523.691,00)	0,38
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(3.100.000,00)	(3.100.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(2.362.961.084,0 0)	(2.333.202.357,0 0)	(29.758.727,00)	1,28
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(241.115.016,00)	(238.923.000,00)	(2.192.016,00)	0,92
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(11.902.000,00)	(11.902.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Komputer	(679.830.932,00)	(635.427.705,00)	(44.403.227,00)	6,99
Jumlah	(5.275.577.080,0 0)	(5.191.699.419,0 0)	(83.877.661,00)	1,62

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp83.877.661,00 atau 1,62%. Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.7.1.1 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(1.099.020.000,0 0)	(1.099.020.000,0 0)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(703.450.000,00)	(696.255.357,00)	(7.194.643,00)	1,03
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(174.198.048,00)	(173.869.000,00)	(329.048,00)	0,19
Jumlah	(1.976.668.048,0 0)	(1.969.144.357,0 0)	(7.523.691,00)	0,38

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp7.523.691,00 atau 0,38%. Penjelasan saldo

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.7.1.2 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur

Saldo Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	(3.100.000,00)	(3.100.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	(3.100.000,00)	(3.100.000,00)	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.7.1.3 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Saldo Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(7.250.000,00)	(7.250.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(338.041.000,00)	(338.041.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(100.022.084,00)	(92.694.167,00)	(7.327.917,00)	7,91
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(776.102.835,00)	(761.575.000,00)	(14.527.835,00)	1,91
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(42.238.333,00)	(42.170.000,00)	(68.333,00)	0,16
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(424.276.941,00)	(418.171.665,00)	(6.105.276,00)	1,46
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(1.380.000,00)	(1.380.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat	(498.982.183,00)	(497.368.650,00)	(1.613.533,00)	0,32

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(16.490.000,00)	(16.490.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Meja Kerja Pejabat	(34.715.750,00)	(34.715.750,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Kerja Pejabat	(30.325.058,00)	(30.209.225,00)	(115.833,00)	0,38
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Rapat Pejabat	(30.292.900,00)	(30.292.900,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Lemari dan Arsip Pejabat	(62.844.000,00)	(62.844.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	(2.362.961.084,00)	(2.333.202.357,00)	(29.758.727,00)	1,28

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp29.758.727,00 atau 1,28%. Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.7.1.4 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Saldo Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(42.073.000,00)	(40.758.000,00)	(1.315.000,00)	3,23
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(112.907.016,00)	(112.030.000,00)	(877.016,00)	0,78
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(78.160.000,00)	(78.160.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(7.975.000,00)	(7.975.000,00)	0,00	0,00

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jumlah	(241.115.016,00)	(238.923.000,00)	(2.192.016,00)	0,92

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp2.192.016,00 atau 0,92%. Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.7.1.5 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium

Saldo Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Lain	(11.902.000,00)	(11.902.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	(11.902.000,00)	(11.902.000,00)	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.7.1.6 Akumulasi Penyusutan Komputer

Saldo Akumulasi Penyusutan Komputer yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit- Komputer Jaringan	(1.454.271,00)	0,00	(1.454.271,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(594.429.506,00)	(556.795.360,00)	(37.634.146,00)	6,76
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(83.884.655,00)	(78.632.345,00)	(5.252.310,00)	6,68
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(62.500,00)	0,00	(62.500,00)	0,00
Jumlah	(679.830.932,00)	(635.427.705,00)	(44.403.227,00)	6,99

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Komputer per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp44.403.227,00 atau 6,99%. Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Komputer beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.7.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penuruna n)	%
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(2.532.588.655,0 0)	(2.355.667.393,0 0)	(176.921.262,00)	7,51
Jumlah	(2.532.588.655,0 0)	(2.355.667.393,0 0)	(176.921.262,00)	7,51

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp176.921.262,00 atau 7,51%. Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.7.2.1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung

Saldo Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penuruna n)	%
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(1.646.400.248,0 0)	(1.511.854.090,0 0)	(134.546.158,00)	8,90
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(392.547.339,00)	(371.888.493,00)	(20.658.846,00)	5,56
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(467.317.541,00)	(447.704.327,00)	(19.613.214,00)	4,38
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(931.844,00)	0,00	(931.844,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(698.883,00)	(698.883,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	(24.692.800,00)	(23.521.600,00)	(1.171.200,00)	4,98

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jumlah	(2.532.588.655,00)	(2.355.667.393,00)	(176.921.262,00)	7,51

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp176.921.262,00 atau 7,51%. Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.7.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(740.279,00)	(666.863,00)	(73.416,00)	11,01
Akumulasi Penyusutan Instalasi	(38.331.887,00)	(34.150.565,00)	(4.181.322,00)	12,24
Jumlah	(39.072.166,00)	(34.817.428,00)	(4.254.738,00)	12,22

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp4.254.738,00 atau 12,22%. Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.7.3.1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air

Saldo Akumulasi Penyusutan Bangunan Air yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	(740.279,00)	(666.863,00)	(73.416,00)	11,01
Jumlah	(740.279,00)	(666.863,00)	(73.416,00)	11,01

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Bangunan Air per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp73.416,00 atau 11,01%. Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Bangunan Air beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.7.3.2 Akumulasi Penyusutan Instalasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Instalasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	(320.781,00)	0,00	(320.781,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(29.698.167,00)	(26.655.292,00)	(3.042.875,00)	11,42
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat	(8.312.939,00)	(7.495.273,00)	(817.666,00)	10,91
Jumlah	(38.331.887,00)	(34.150.565,00)	(4.181.322,00)	12,24

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Instalasi per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp4.181.322,00 atau 12,24%. Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Instalasi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.2 KEWAJIBAN

Saldo KEWAJIBAN yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	425.097.523,00	516.784.507,00	(91.686.984,00)	(17,74)
Jumlah	425.097.523,00	516.784.507,00	(91.686.984,00)	(17,74)

Tabel di atas menunjukkan KEWAJIBAN per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp91.686.984,00) atau (17,74%). Penjelasan saldo KEWAJIBAN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Saldo KEWAJIBAN JANGKA PENDEK yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja	425.097.523,00	516.784.507,00	(91.686.984,00)	(17,74)
Jumlah	425.097.523,00	516.784.507,00	(91.686.984,00)	(17,74)

Tabel di atas menunjukkan KEWAJIBAN JANGKA PENDEK per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp91.686.984,00) atau (17,74%). Penjelasan saldo KEWAJIBAN JANGKA PENDEK beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.2.1.1 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Pegawai	408.545.840,00	500.266.098,00	(91.720.258,00)	(18,33)
Utang Belanja Barang dan Jasa	16.551.683,00	16.518.409,00	33.274,00	0,20
Jumlah	425.097.523,00	516.784.507,00	(91.686.984,00)	(17,74)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp91.686.984,00) atau (17,74%). Penjelasan saldo Utang Belanja beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.2.1.1.1 Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	11.133.069,00	13.595.041,00	(2.461.972,00)	(18,11)
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	397.412.771,00	486.671.057,00	(89.258.286,00)	(18,34)
Jumlah	408.545.840,00	500.266.098,00	(91.720.258,00)	(18,33)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp91.720.258,00) atau (18,33%). Penjelasan saldo Utang Belanja Pegawai beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.2.1.1.1.1 Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.133.069,00	13.595.041,00	(2.461.972,00)	(18,11)
Jumlah	11.133.069,00	13.595.041,00	(2.461.972,00)	(18,11)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp2.461.972,00) atau (18,11%). Penjelasan saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.2.1.1.2 Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	250.298.217,00	305.722.388,00	(55.424.171,00)	(18,13)
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	41.671.715,00	51.363.878,00	(9.692.163,00)	(18,87)
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	105.442.839,00	129.584.791,00	(24.141.952,00)	(18,63)
Jumlah	397.412.771,00	486.671.057,00	(89.258.286,00)	(18,34)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp89.258.286,00) atau (18,34%). Penjelasan saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.2.1.1.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Jasa	16.551.683,00	16.518.409,00	33.274,00	0,20
Jumlah	16.551.683,00	16.518.409,00	33.274,00	0,20

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp33.274,00 atau 0,20%. Penjelasan saldo Utang Belanja Barang dan Jasa beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.2.1.1.2.1 Utang Belanja Jasa

Saldo Utang Belanja Jasa yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	1.130.658,00	1.122.610,00	8.048,00	0,72
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.318.000,00	2.013.750,00	(695.750,00)	(34,55)
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	14.103.025,00	13.382.049,00	720.976,00	5,39
Jumlah	16.551.683,00	16.518.409,00	33.274,00	0,20

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp33.274,00 atau 0,20%. Penjelasan saldo Utang Belanja Jasa beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.3 EKUITAS

Saldo EKUITAS yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penuruna n)	%
EKUITAS	11.266.464.616,6 9	10.806.560.552,0 0	459.904.064,69	4,26
Jumlah	11.266.464.616,6 9	10.806.560.552,0 0	459.904.064,69	4,26

Tabel di atas menunjukkan EKUITAS per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp459.904.064,69 atau 4,26%. Penjelasan saldo EKUITAS beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.3.1.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penuruna n)	%
Ekuitas	10.806.560.552,00	11.034.127.196,00	(227.566.644,00)	(2,06)
Surplus/Defisit-LO	(23.231.998.397,0 6)	(19.637.034.051,0 0)	(3.594.964.346,06)	18,31
Jumlah	(12.425.437.845,0 6)	(8.602.906.855,00)	(3.822.530.990,06)	44,43

Tabel di atas menunjukkan Ekuitas per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp3.822.530.990,06 atau 44,43%. Penjelasan saldo Ekuitas beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.3.1.1.1 Surplus/Defisit-LO

Saldo Surplus/Defisit-LO yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penuruna n)	%
Surplus/Defisit-LO	(23.231.998.397,0 6)	(19.637.034.051,0 0)	(3.594.964.346,06)	18,31
Jumlah	(23.231.998.397,0 6)	(19.637.034.051,0 0)	(3.594.964.346,06)	18,31

Tabel di atas menunjukkan Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp3.594.964.346,06 atau 18,31%. Penjelasan saldo Surplus/Defisit-LO beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.3.1.2 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Saldo Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penuruna n)	%
RK PPKD	23.691.902.461,7 5	19.409.467.407,0 0	4.282.435.054,75	22,06
Jumlah	23.691.902.461,7 5	19.409.467.407,0 0	4.282.435.054,75	22,06

Tabel di atas menunjukkan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp4.282.435.054,75 atau 22,06%. Penjelasan saldo Ekuitas untuk Dikonsolidasikan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.3.1.2.1 RK PPKD

Saldo RK PPKD yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penuruna n)	%
RK PPKD	23.691.902.461,7 5	19.409.467.407,0 0	4.282.435.054,75	22,06
Jumlah	23.691.902.461,7 5	19.409.467.407,0 0	4.282.435.054,75	22,06

Tabel di atas menunjukkan RK PPKD per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp4.282.435.054,75 atau 22,06%. Penjelasan saldo RK PPKD beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1 BEBAN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos BEBAN Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo BEBAN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
BEBAN OPERASI	22.966.944.736,0 6	19.327.283.841,0 0	3.639.660.895,06	18,83
Jumlah	22.966.944.736,0 6	19.327.283.841,0 0	3.639.660.895,06	18,83

Tabel di atas menunjukkan BEBAN per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp3.639.660.895,06 atau 18,83%. Penjelasan saldo BEBAN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1 BEBAN OPERASI

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos BEBAN OPERASI Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo BEBAN OPERASI yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pegawai	10.709.689.650,0 0	11.623.530.334,0 0	(913.840.684,00)	(7,86)
Beban Barang dan Jasa	12.232.255.086,0 6	7.628.753.507,00	4.603.501.579,06	60,34
Beban Subsidi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	265.053.661,00	309.750.210,00	(44.696.549,00)	(14,43)
Jumlah	23.231.998.397,0 6	19.637.034.051,0 0	3.594.964.346,06	18,31

Tabel di atas menunjukkan BEBAN OPERASI per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp3.594.964.346,06 atau 18,31%. Penjelasan saldo BEBAN OPERASI beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Barang dan Jasa mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp4.603.501.579,06 atau 60,34%

Komponen Beban Hibah mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp50.000.000,00) atau (100,00%)

5.3.1.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.453.013.685,00	4.846.373.844,00	(393.360.159,00)	(8,12)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	6.189.175.965,00	6.737.081.490,00	(547.905.525,00)	(8,13)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	67.500.000,00	40.075.000,00	27.425.000,00	68,43
Jumlah	10.709.689.650,00	11.623.530.334,00	(913.840.684,00)	(7,86)

Tabel di atas menunjukkan Beban Pegawai per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp913.840.684,00) atau (7,86%). Penjelasan saldo Beban Pegawai beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp27.425.000,00 atau 68,43%

5.3.1.1.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Gaji dan Tunjangan ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Gaji Pokok ASN	3.240.763.431,00	3.495.410.610,00	(254.647.179,00)	(7,29)
Beban Tunjangan Keluarga ASN	309.166.666,00	327.104.722,00	(17.938.056,00)	(5,48)
Beban Tunjangan Jabatan ASN	171.860.000,00	195.180.000,00	(23.320.000,00)	(11,95)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	137.119.900,00	173.914.000,00	(36.794.100,00)	(21,16)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	85.120.000,00	96.070.000,00	(10.950.000,00)	(11,40)
Beban Tunjangan Beras ASN	157.296.240,00	178.992.102,00	(21.695.862,00)	(12,12)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	47.861.619,00	30.029.690,00	17.831.929,00	59,38
Beban Pembulatan Gaji ASN	39.131,00	41.015,00	(1.884,00)	(4,59)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	277.321.214,00	321.114.149,00	(43.792.935,00)	(13,64)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.616.343,00	7.129.342,00	(512.999,00)	(7,20)
Beban Iuran Jaminan	19.849.141,00	21.388.214,00	(1.539.073,00)	(7,20)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kematian ASN				
Jumlah	4.453.013.685,00	4.846.373.844,00	(393.360.159,00)	(8,12)

Tabel di atas menunjukkan Beban Gaji dan Tunjangan ASN per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp393.360.159,00) atau (8,12%). Penjelasan saldo Beban Gaji dan Tunjangan ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp17.831.929,00 atau 59,38%

5.3.1.1.1.1.1 Beban Gaji Pokok ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Gaji Pokok ASN Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Gaji Pokok ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Gaji Pokok PNS	3.212.135.331,00	3.495.410.610,00	(283.275.279,00)	(8,10)
Beban Gaji Pokok PPPK	28.628.100,00	0,00	28.628.100,00	0,00
Jumlah	3.240.763.431,00	3.495.410.610,00	(254.647.179,00)	(7,29)

Tabel di atas menunjukkan Beban Gaji Pokok ASN per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp254.647.179,00) atau (7,29%). Penjelasan saldo Beban Gaji Pokok ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Gaji Pokok PPPK mengalami saldo baru sebesar Rp28.628.100,00 atau 0,00%

5.3.1.1.1.1.2 Beban Tunjangan Keluarga ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan Keluarga ASN Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan Keluarga ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tunjangan Keluarga PNS	305.158.732,00	327.104.722,00	(21.945.990,00)	(6,71)
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	4.007.934,00	0,00	4.007.934,00	0,00
Jumlah	309.166.666,00	327.104.722,00	(17.938.056,00)	(5,48)

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan Keluarga ASN per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp17.938.056,00) atau (5,48%). Penjelasan saldo Beban Tunjangan Keluarga ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Tunjangan Keluarga PPPK mengalami saldo baru sebesar Rp4.007.934,00 atau 0,00%

5.3.1.1.1.3 Beban Tunjangan Jabatan ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan Jabatan ASN Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan Jabatan ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tunjangan Jabatan PNS	171.860.000,00	195.180.000,00	(23.320.000,00)	(11,95)
Jumlah	171.860.000,00	195.180.000,00	(23.320.000,00)	(11,95)

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan Jabatan ASN per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp23.320.000,00) atau (11,95%). Penjelasan saldo Beban Tunjangan Jabatan ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1.1.4 Beban Tunjangan Fungsional ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan Fungsional ASN Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan Fungsional ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tunjangan Fungsional PNS	132.409.900,00	173.914.000,00	(41.504.100,00)	(23,86)
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	4.710.000,00	0,00	4.710.000,00	0,00
Jumlah	137.119.900,00	173.914.000,00	(36.794.100,00)	(21,16)

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan Fungsional ASN per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp36.794.100,00) atau (21,16%). Penjelasan saldo Beban Tunjangan Fungsional ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Tunjangan Fungsional PPPK mengalami saldo baru sebesar Rp4.710.000,00 atau 0,00%

5.3.1.1.1.5 Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tunjangan	85.120.000,00	96.070.000,00	(10.950.000,00)	(11,40)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Fungsional Umum PNS				
Jumlah	85.120.000,00	96.070.000,00	(10.950.000,00)	(11,40)

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp10.950.000,00) atau (11,40%). Penjelasan saldo Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1.1.6 Beban Tunjangan Beras ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan Beras ASN Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan Beras ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tunjangan Beras PNS	154.689.120,00	178.992.102,00	(24.302.982,00)	(13,58)
Beban Tunjangan Beras PPPK	2.607.120,00	0,00	2.607.120,00	0,00
Jumlah	157.296.240,00	178.992.102,00	(21.695.862,00)	(12,12)

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan Beras ASN per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp21.695.862,00) atau (12,12%). Penjelasan saldo Beban Tunjangan Beras ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Tunjangan Beras PPPK mengalami saldo baru sebesar Rp2.607.120,00 atau 0,00%

5.3.1.1.1.7 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	47.861.619,00	30.029.690,00	17.831.929,00	59,38
Jumlah	47.861.619,00	30.029.690,00	17.831.929,00	59,38

Tabel di atas menunjukkan Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp17.831.929,00 atau 59,38%. Penjelasan saldo Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp17.831.929,00 atau 59,38%

5.3.1.1.1.8 Beban Pembulatan Gaji ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pembulatan Gaji ASN Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pembulatan Gaji ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pembulatan Gaji PNS	38.456,00	41.015,00	(2.559,00)	(6,24)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	675,00	0,00	675,00	0,00
Jumlah	39.131,00	41.015,00	(1.884,00)	(4,59)

Tabel di atas menunjukkan Beban Pembulatan Gaji ASN per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp1.884,00) atau (4,59%). Penjelasan saldo Beban Pembulatan Gaji ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Pembulatan Gaji PPPK mengalami saldo baru sebesar Rp675,00 atau 0,00%

5.3.1.1.1.9 Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	275.827.373,00	321.114.149,00	(45.286.776,00)	(14,10)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.493.841,00	0,00	1.493.841,00	0,00
Jumlah	277.321.214,00	321.114.149,00	(43.792.935,00)	(13,64)

Tabel di atas menunjukkan Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp43.792.935,00) atau (13,64%). Penjelasan saldo Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK mengalami saldo baru sebesar Rp1.493.841,00 atau 0,00%

5.3.1.1.1.10 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Iuran

Jaminan Kecelakaan Kerja ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.547.634,00	7.129.342,00	(581.708,00)	(8,16)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	68.709,00	0,00	68.709,00	0,00
Jumlah	6.616.343,00	7.129.342,00	(512.999,00)	(7,20)

Tabel di atas menunjukkan Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp512.999,00) atau (7,20%). Penjelasan saldo Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK mengalami saldo baru sebesar Rp68.709,00 atau 0,00%

5.3.1.1.1.11 Beban Iuran Jaminan Kematian ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Iuran Jaminan Kematian ASN Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Iuran Jaminan Kematian ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	19.643.020,00	21.388.214,00	(1.745.194,00)	(8,16)
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	206.121,00	0,00	206.121,00	0,00
Jumlah	19.849.141,00	21.388.214,00	(1.539.073,00)	(7,20)

Tabel di atas menunjukkan Beban Iuran Jaminan Kematian ASN per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp1.539.073,00) atau (7,20%). Penjelasan saldo Beban Iuran Jaminan Kematian ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK mengalami saldo baru sebesar Rp206.121,00 atau 0,00%

5.3.1.1.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan	3.861.281.667,00	4.254.603.788,00	(393.322.121,00)	(9,24)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Kerja ASN				
Beban Tambahan				
Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	670.434.183,00	690.657.890,00	(20.223.707,00)	(2,93)
Beban Tambahan				
Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.657.460.115,00	1.791.819.812,00	(134.359.697,00)	(7,50)
Jumlah	6.189.175.965,00	6.737.081.490,00	(547.905.525,00)	(8,13)

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp547.905.525,00) atau (8,13%). Penjelasan saldo Beban Tambahan Penghasilan ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1.2.1 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tambahan				
Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.861.281.667,00	4.254.603.788,00	(393.322.121,00)	(9,24)
Jumlah	3.861.281.667,00	4.254.603.788,00	(393.322.121,00)	(9,24)

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp393.322.121,00) atau (9,24%). Penjelasan saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1.2.2 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tambahan				
Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	670.434.183,00	690.657.890,00	(20.223.707,00)	(2,93)
Jumlah	670.434.183,00	690.657.890,00	(20.223.707,00)	(2,93)

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp20.223.707,00) atau (2,93%). Penjelasan saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1.1.2.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.657.460.115,00	1.791.819.812,00	(134.359.697,00)	(7,50)
Jumlah	1.657.460.115,00	1.791.819.812,00	(134.359.697,00)	(7,50)

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp134.359.697,00) atau (7,50%). Penjelasan saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1.1.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Honorarium	45.900.000,00	40.075.000,00	5.825.000,00	14,54
Beban Jasa Pengelolaan BMD	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	0,00
Jumlah	67.500.000,00	40.075.000,00	27.425.000,00	68,43

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp27.425.000,00 atau 68,43%. Penjelasan saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Jasa Pengelolaan BMD mengalami saldo baru sebesar Rp21.600.000,00 atau 0,00%

5.3.1.1.1.3.1 Beban Honorarium

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Honorarium Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Honorarium yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	45.900.000,00	40.075.000,00	5.825.000,00	14,54
Jumlah	45.900.000,00	40.075.000,00	5.825.000,00	14,54

Tabel di atas menunjukkan Beban Honorarium per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp5.825.000,00 atau 14,54%. Penjelasan saldo Beban Honorarium beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1.3.2 Beban Jasa Pengelolaan BMD

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Jasa Pengelolaan BMD Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Jasa Pengelolaan BMD yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	0,00
Jumlah	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Jasa Pengelolaan BMD per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp21.600.000,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Beban Jasa Pengelolaan BMD beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan mengalami saldo baru sebesar Rp21.600.000,00 atau 0,00%

5.3.1.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penuruna n)	%
Beban Barang	2.690.114.162,00	955.177.461,00	1.734.936.701,00	181,64
Beban Jasa	7.991.604.448,00	5.285.735.649,00	2.705.868.799,00	51,19
Beban Pemeliharaan	442.163.869,06	88.172.000,00	353.991.869,06	401,48
Beban Perjalanan Dinas	1.096.372.607,00	1.299.668.397,00	(203.295.790,00)	(15,64)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
Jumlah	12.232.255.086,0 6	7.628.753.507,00	4.603.501.579,06	60,34

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp4.603.501.579,06 atau 60,34%. Penjelasan saldo Beban Barang dan Jasa beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Barang mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp1.734.936.701,00 atau 181,64%

Komponen Beban Jasa mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp2.705.868.799,00 atau 51,19%

Komponen Beban Pemeliharaan mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp353.991.869,06 atau 401,48%

Komponen Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami saldo baru sebesar Rp12.000.000,00 atau 0,00%

5.3.1.1.2.1 Beban Barang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Barang yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Barang Pakai Habis	2.690.114.162,00	955.177.461,00	1.734.936.701,00	181,64
Jumlah	2.690.114.162,00	955.177.461,00	1.734.936.701,00	181,64

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp1.734.936.701,00 atau 181,64%. Penjelasan saldo Beban Barang beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Barang Pakai Habis mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp1.734.936.701,00 atau 181,64%

5.3.1.1.2.1.1 Beban Barang Pakai Habis

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang Pakai Habis Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Barang Pakai Habis yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	320.220.700,00	297.054.500,00	23.166.200,00	7,80
Beban Bahan-Bahan Lainnya	948.000,00	0,00	948.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	42.853.000,00	60.874.271,00	(18.021.271,00)	(29,60)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	39.658.800,00	31.594.240,00	8.064.560,00	25,53
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.088.000,00	0,00	23.088.000,00	0,00

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penuruna n)	%
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.000.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	45,45
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	56.956.000,00	47.730.750,00	9.225.250,00	19,33
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.647.000,00	21.091.600,00	(9.444.600,00)	(44,78)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.334.000,00	15.481.000,00	(5.147.000,00)	(33,25)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	3.698.100,00	(3.698.100,00)	(100,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.275.343.662,00	343.189.000,00	932.154.662,00	271,62
Beban Makanan dan Minuman Rapat	107.100.000,00	54.970.750,00	52.129.250,00	94,83
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.445.000,00	516.250,00	4.928.750,00	954,72
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	768.600.000,00	73.477.000,00	695.123.000,00	946,04
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	19.920.000,00	0,00	19.920.000,00	0,00
Jumlah	2.690.114.162,00	955.177.461,00	1.734.936.701,00	181,64

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang Pakai Habis per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp1.734.936.701,00 atau 181,64%. Penjelasan saldo Beban Barang Pakai Habis beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Bahan-Bahan Lainnya mengalami saldo baru sebesar Rp948.000,00 atau 0,00%

Komponen Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak mengalami saldo baru sebesar Rp23.088.000,00 atau 0,00%

Komponen Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp3.698.100,00) atau (100,00%)

Komponen Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp932.154.662,00 atau 271,62%

Komponen Beban Makanan dan Minuman Rapat mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp52.129.250,00 atau 94,83%

Komponen Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp4.928.750,00 atau 954,72%

Komponen Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp695.123.000,00 atau 946,04%

Komponen Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) mengalami saldo baru sebesar Rp19.920.000,00 atau 0,00%

5.3.1.1.2.2 Beban Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Jasa yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Jasa Kantor	6.468.526.318,00	5.089.155.515,00	1.379.370.803,00	27,10
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	246.578.130,00	196.580.134,00	49.997.996,00	25,43
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.216.500.000,00	0,00	1.216.500.000,00	0,00
Jumlah	7.991.604.448,00	5.285.735.649,00	2.705.868.799,00	51,19

Tabel di atas menunjukkan Beban Jasa per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp2.705.868.799,00 atau 51,19%. Penjelasan saldo Beban Jasa beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Sewa Peralatan dan Mesin mengalami saldo baru sebesar Rp60.000.000,00 atau 0,00%

Komponen Beban Sewa Gedung dan Bangunan mengalami saldo baru sebesar Rp1.216.500.000,00 atau 0,00%

5.3.1.1.2.2.1 Beban Jasa Kantor

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Jasa Kantor Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Jasa Kantor yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penuruna n)	%
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.355.800.000,0 0	669.400.000,00	686.400.000,00	102,54
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	161.000.000,00	0,00	161.000.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga	1.409.444.592,0	2.938.042.100,0	(1.528.597.508,00)	(52,03)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Administrasi	0	0		
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	206.820.320,00	206.498.000,00	322.320,00	0,16
Beban Jasa Tenaga Ahli	2.108.000.000,00	12.500.000,00	2.095.500.000,00	16.764,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	208.584.384,00	208.197.600,00	386.784,00	0,19
Beban Jasa Tenaga Keamanan	278.112.512,00	312.296.400,00	(34.183.888,00)	(10,95)
Beban Jasa Tenaga Supir	278.112.512,00	277.596.800,00	515.712,00	0,19
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	5.700.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	90,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	169.000.000,00	169.000.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	75.400.000,00	79.650.000,00	(4.250.000,00)	(5,34)
Beban Tagihan Telepon	13.508.392,00	13.526.576,00	(18.184,00)	(0,13)
Beban Tagihan Air	21.426.100,00	25.984.450,00	(4.558.350,00)	(17,54)
Beban Tagihan Listrik	168.312.806,00	163.692.389,00	4.620.417,00	2,82
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.304.700,00	9.771.200,00	(466.500,00)	(4,77)
Jumlah	6.468.526.318,00	5.089.155.515,00	1.379.370.803,00	27,10

Tabel di atas menunjukkan Beban Jasa Kantor per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp1.379.370.803,00 atau 27,10%. Penjelasan saldo Beban Jasa Kantor beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp686.400.000,00 atau 102,54%

Komponen Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan mengalami saldo baru sebesar Rp161.000.000,00 atau 0,00%

Komponen Beban Jasa Tenaga Administrasi mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp1.528.597.508,00) atau (52,03%)

Komponen Beban Jasa Tenaga Ahli mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp2.095.500.000,00 atau 16.764,00%

Komponen Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp2.700.000,00 atau 90,00%

5.3.1.1.2.2.2 Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Iuran Jaminan/Asuransi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	100.337.130,00	98.583.878,00	1.753.252,00	1,78
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.277.930,00	5.547.020,00	2.730.910,00	49,23
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	10.347.210,00	92.449.236,00	(82.102.026,00)	(88,81)
Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	127.615.860,00	0,00	127.615.860,00	0,00
Jumlah	246.578.130,00	196.580.134,00	49.997.996,00	25,43

Tabel di atas menunjukkan Beban Iuran Jaminan/Asuransi per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp49.997.996,00 atau 25,43%. Penjelasan saldo Beban Iuran Jaminan/Asuransi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp82.102.026,00) atau (88,81%)

Komponen Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN mengalami saldo baru sebesar Rp127.615.860,00 atau 0,00%

5.3.1.1.2.2.3 Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Sewa Peralatan dan Mesin yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
Jumlah	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Sewa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp60.000.000,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Beban Sewa Peralatan dan Mesin beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang mengalami saldo baru sebesar Rp45.000.000,00 atau 0,00%

Komponen Beban Sewa Alat Kantor Lainnya mengalami saldo baru sebesar Rp15.000.000,00 atau 0,00%

5.3.1.1.2.2.4 Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Sewa Gedung dan Bangunan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	19.400.000,00	0,00	19.400.000,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.197.100.000,00	0,00	1.197.100.000,00	0,00
Jumlah	1.216.500.000,00	0,00	1.216.500.000,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Sewa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp1.216.500.000,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Beban Sewa Gedung dan Bangunan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan mengalami saldo baru sebesar Rp19.400.000,00 atau 0,00%

Komponen Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan mengalami saldo baru sebesar Rp1.197.100.000,00 atau 0,00%

5.3.1.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pemeliharaan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	191.981.000,00	88.172.000,00	103.809.000,00	117,73
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.182.869,06	0,00	250.182.869,06	0,00
Jumlah	442.163.869,06	88.172.000,00	353.991.869,06	401,48

Tabel di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp353.991.869,06 atau 401,48%. Penjelasan saldo Beban Pemeliharaan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp103.809.000,00 atau 117,73%

Komponen Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan mengalami saldo baru sebesar Rp250.182.869,06 atau 0,00%

5.3.1.1.2.3.1 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	149.211.000,00	61.192.000,00	88.019.000,00	143,84
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	15.830.000,00	(15.830.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	22.940.000,00	3.610.000,00	19.330.000,00	535,46
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.185.000,00	5.150.000,00	7.035.000,00	136,60
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	7.645.000,00	2.390.000,00	5.255.000,00	219,87
Jumlah	191.981.000,00	88.172.000,00	103.809.000,00	117,73

Tabel di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp103.809.000,00 atau 117,73%. Penjelasan saldo Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp88.019.000,00 atau 143,84%

Komponen Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp15.830.000,00) atau (100,00%)

Komponen Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp19.330.000,00 atau 535,46%

Komponen Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp7.035.000,00 atau 136,60%

Komponen Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp5.255.000,00 atau 219,87%

5.3.1.1.2.3.2 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	250.182.869,06	0,00	250.182.869,06	0,00
Jumlah	250.182.869,06	0,00	250.182.869,06	0,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp250.182.869,06 atau 0,00%. Penjelasan saldo Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor mengalami saldo baru sebesar Rp250.182.869,06 atau 0,00%

5.3.1.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Perjalanan Dinas yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.096.372.607,00	1.299.668.397,00	(203.295.790,00)	(15,64)
Jumlah	1.096.372.607,00	1.299.668.397,00	(203.295.790,00)	(15,64)

Tabel di atas menunjukkan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp203.295.790,00) atau (15,64%). Penjelasan saldo Beban Perjalanan Dinas beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1.2.4.1 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penuruna n)	%
Beban Perjalanan Dinas	273.872.607,00	24.691.597,00	249.181.010,00	1.009,1

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Biasa				7
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000,00	115.880.000,00	(95.880.000,00)	(82,74)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	802.500.000,00	1.159.096.800,00	(356.596.800,00)	(30,77)
Jumlah	1.096.372.607,00	1.299.668.397,00	(203.295.790,00)	(15,64)

Tabel di atas menunjukkan Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp203.295.790,00) atau (15,64%). Penjelasan saldo Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Perjalanan Dinas Biasa mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp249.181.010,00 atau 1.009,17%

Komponen Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp95.880.000,00) atau (82,74%)

5.3.1.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
Jumlah	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp12.000.000,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami saldo baru sebesar Rp12.000.000,00 atau 0,00%

5.3.1.1.2.5.1 Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian

atas saldo Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
Jumlah	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp12.000.000,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan mengalami saldo baru sebesar Rp12.000.000,00 atau 0,00%

5.3.1.1.3 Beban Subsidi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Subsidi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Subsidi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Subsidi kepada Koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Subsidi per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Beban Subsidi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1.3.1 Beban Subsidi kepada Koperasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Subsidi kepada Koperasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Subsidi kepada Koperasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Subsidi kepada Koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Subsidi kepada Koperasi per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Beban Subsidi kepada Koperasi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1.4 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penuruna n)	%
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp50.000.000,00) atau (100,00%). Penjelasan saldo Beban Hibah beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp50.000.000,00) atau (100,00%)

5.3.1.1.4.1 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penuruna n)	%
Beban Hibah kepada Koperasi	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp50.000.000,00) atau (100,00%). Penjelasan saldo Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Hibah kepada Koperasi mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp50.000.000,00) atau (100,00%)

5.3.1.1.4.1.1 Beban Hibah kepada Koperasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah kepada Koperasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah kepada Koperasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Hibah Uang kepada Koperasi	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah kepada Koperasi per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp50.000.000,00) atau (100,00%). Penjelasan saldo Beban Hibah kepada Koperasi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Hibah Uang kepada Koperasi mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp50.000.000,00) atau (100,00%)

5.3.1.1.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	83.877.661,00	129.127.952,00	(45.250.291,00)	(35,04)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	176.921.262,00	176.688.301,00	232.961,00	0,13
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.254.738,00	3.933.957,00	320.781,00	8,15
Jumlah	265.053.661,00	309.750.210,00	(44.696.549,00)	(14,43)

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp44.696.549,00) atau (14,43%). Penjelasan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1.5.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Alat Angkutan	7.523.691,00	63.368.275,00	(55.844.584,00)	(88,13)
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	29.758.727,00	27.607.866,00	2.150.861,00	7,79
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.192.016,00	1.028.000,00	1.164.016,00	113,23
Beban Penyusutan Komputer	44.403.227,00	37.123.811,00	7.279.416,00	19,61
Jumlah	83.877.661,00	129.127.952,00	(45.250.291,00)	(35,04)

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp45.250.291,00) atau (35,04%). Penjelasan saldo Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Penyusutan Alat Angkutan mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp55.844.584,00) atau (88,13%)

Komponen Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp1.164.016,00 atau 113,23%

5.3.1.1.5.1.1 Beban Penyusutan Alat Angkutan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Alat Angkutan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Alat Angkutan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penuruna n)	%
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	9.523.810,00	(9.523.810,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7.194.643,00	50.707.143,00	(43.512.500,00)	(85,81)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	329.048,00	3.137.322,00	(2.808.274,00)	(89,51)
Jumlah	7.523.691,00	63.368.275,00	(55.844.584,00)	(88,13)

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Alat Angkutan per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp55.844.584,00) atau (88,13%). Penjelasan saldo Beban

Penyusutan Alat Angkutan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp9.523.810,00) atau (100,00%)

Komponen Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp43.512.500,00) atau (85,81%)

Komponen Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp2.808.274,00) atau (89,51%)

5.3.1.1.5.1.2 Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.327.917,00	6.340.000,00	987.917,00	15,58
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	14.527.835,00	14.527.000,00	835,00	0,01
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	68.333,00	0,00	68.333,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.105.276,00	5.440.666,00	664.610,00	12,22
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.613.533,00	1.300.200,00	313.333,00	24,10
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	115.833,00	0,00	115.833,00	0,00
Jumlah	29.758.727,00	27.607.866,00	2.150.861,00	7,79

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp2.150.861,00 atau 7,79%. Penjelasan saldo Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih mengalami saldo baru sebesar Rp68.333,00 atau 0,00%

Komponen Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat mengalami saldo baru sebesar Rp115.833,00 atau 0,00%

5.3.1.1.5.1.3 Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.315.000,00	1.028.000,00	287.000,00	27,92
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	877.016,00	0,00	877.016,00	0,00
Jumlah	2.192.016,00	1.028.000,00	1.164.016,00	113,23

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp1.164.016,00 atau 113,23%. Penjelasan saldo Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film mengalami saldo baru sebesar Rp877.016,00 atau 0,00%

5.3.1.1.5.1.4 Beban Penyusutan Komputer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Komputer Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Komputer yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	1.454.271,00	0,00	1.454.271,00	0,00
Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	37.634.146,00	32.824.376,00	4.809.770,00	14,65
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.252.310,00	4.299.435,00	952.875,00	22,16
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00
Jumlah	44.403.227,00	37.123.811,00	7.279.416,00	19,61

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Komputer per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp7.279.416,00 atau 19,61%. Penjelasan saldo Beban Penyusutan Komputer beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan mengalami saldo baru sebesar Rp1.454.271,00 atau 0,00%

Komponen Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan mengalami saldo baru sebesar Rp62.500,00 atau 0,00%

5.3.1.1.5.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	176.921.262,00	176.688.301,00	232.961,00	0,13
Jumlah	176.921.262,00	176.688.301,00	232.961,00	0,13

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp232.961,00 atau 0,13%. Penjelasan saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1.5.2.1 Beban Penyusutan Bangunan Gedung

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Bangunan Gedung yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	134.546.158,00	134.546.158,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.658.846,00	20.658.846,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	19.613.214,00	19.613.214,00	0,00	0,00

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	931.844,00	698.883,00	232.961,00	33,33
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Asrama	1.171.200,00	1.171.200,00	0,00	0,00
Jumlah	176.921.262,00	176.688.301,00	232.961,00	0,13

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Bangunan Gedung per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp232.961,00 atau 0,13%. Penjelasan saldo Beban Penyusutan Bangunan Gedung beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1.5.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Bangunan Air	73.416,00	73.416,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Instalasi	4.181.322,00	3.860.541,00	320.781,00	8,31
Jumlah	4.254.738,00	3.933.957,00	320.781,00	8,15

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp320.781,00 atau 8,15%. Penjelasan saldo Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1.5.3.1 Beban Penyusutan Bangunan Air

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Bangunan Air Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Bangunan Air yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	73.416,00	73.416,00	0,00	0,00

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jumlah	73.416,00	73.416,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Bangunan Air per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Beban Penyusutan Bangunan Air beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1.5.3.2 Beban Penyusutan Instalasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Instalasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Instalasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	320.781,00	0,00	320.781,00	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik	3.042.875,00	3.042.875,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan- Instalasi Pertahanan di Darat	817.666,00	817.666,00	0,00	0,00
Jumlah	4.181.322,00	3.860.541,00	320.781,00	8,31

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Instalasi per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp320.781,00 atau 8,31%. Penjelasan saldo Beban Penyusutan Instalasi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air mengalami saldo baru sebesar Rp320.781,00 atau 0,00%

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal ekuitas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 yang menyajikan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas selama periode tahun 2024.

Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan kebijakan Kapitalisasi aset sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 101 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali juga melaksanakan Penyusutan atas aset tetap sampai dengan Tahun 2023 sehingga berpengaruh terhadap Ekuitas.

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dalam tabel berikut :

No	URAIAN	2024	2023
1	Ekuitas Awal	10.806.560.552,00	10.987.535.042,00
2	RK-PPKD	23.691.902.461,75	19.409.467.407,00
3	Surplus (Defisit-LO)	(23.231.998.397,06)	(19.637.034.051,00)
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	0,00	0,00
5	LAIN-LAIN	0,00	46.592.154,00
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		46.592.154,00
6	Ekuitas Akhir	11.266.464.616,69	10.806.560.552,00



PEMERINTAH PROVINSI BALI

SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tahun Anggaran : 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD

(SPJ FUNGSIONAL)

Bulan : Desember

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5	BELANJA DAERAH	Rp26.251.229.311,00	Rp10.041.423.488,00	Rp759.986.420,00	Rp10.801.409.908,00	Rp9.836.011.782,00	Rp2.473.482.640,75	Rp12.309.494.422,75	Rp560.960.144,00	Rp119.394.387,00	Rp680.354.531,00	Rp23.791.258.861,75	Rp2.459.970.449,25
5.1	BELANJA OPERASI	Rp25.490.528.961,00	Rp10.041.423.488,00	Rp759.986.420,00	Rp10.801.409.908,00	Rp9.799.684.782,00	Rp1.855.706.099,06	Rp11.655.390.881,06	Rp560.960.144,00	Rp119.394.387,00	Rp680.354.531,00	Rp23.137.155.320,06	Rp2.353.373.640,94
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp12.285.642.851,00	Rp10.041.423.488,00	Rp759.986.420,00	Rp10.801.409.908,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.801.409.908,00	Rp1.484.232.943,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp13.179.886.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.799.684.782,00	Rp1.830.706.099,06	Rp11.630.390.881,06	Rp560.960.144,00	Rp119.394.387,00	Rp680.354.531,00	Rp12.310.745.412,06	Rp869.140.697,94
5.1.04	Belanja Subsidi	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp760.700.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.327.000,00	Rp617.776.541,69	Rp654.103.541,69	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp654.103.541,69	Rp106.596.808,31
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp530.444.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.327.000,00	Rp432.490.500,00	Rp468.817.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp468.817.500,00	Rp61.626.700,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp230.256.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.286.041,69	Rp185.286.041,69	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.286.041,69	Rp44.970.108,31
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Rp17.819.039.051,00	Rp10.041.423.488,00	Rp759.986.420,00	Rp10.801.409.908,00	Rp2.637.512.170,00	Rp1.691.589.430,75	Rp4.329.101.600,75	Rp494.280.217,00	Rp101.874.030,00	Rp596.154.247,00	Rp15.726.665.755,75	Rp2.092.373.295,25
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp15.758.693.861,00	Rp10.041.423.488,00	Rp759.986.420,00	Rp10.801.409.908,00	Rp1.665.610.935,00	Rp1.172.038.250,75	Rp2.837.649.185,75	Rp285.139.517,00	Rp31.208.091,00	Rp316.347.608,00	Rp13.955.406.701,75	Rp1.803.287.159,25
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp128.914.020,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.795.350,00	Rp18.341.070,00	Rp118.136.420,00	Rp4.258.050,00	Rp4.320.000,00	Rp8.578.050,00	Rp126.714.470,00	Rp2.199.550,00
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp122.914.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.795.350,00	Rp18.341.070,00	Rp118.136.420,00	Rp2.962.300,00	Rp0,00	Rp2.962.300,00	Rp121.098.720,00	Rp1.815.700,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp122.914.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.795.350,00	Rp18.341.070,00	Rp118.136.420,00	Rp2.962.300,00	Rp0,00	Rp2.962.300,00	Rp121.098.720,00	Rp1.815.700,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp122.914.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.795.350,00	Rp18.341.070,00	Rp118.136.420,00	Rp2.962.300,00	Rp0,00	Rp2.962.300,00	Rp121.098.720,00	Rp1.815.700,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp9.868.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.090.000,00	Rp0,00	Rp5.090.000,00	Rp2.962.300,00	Rp0,00	Rp2.962.300,00	Rp8.052.300,00	Rp1.815.700,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp9.868.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.090.000,00	Rp0,00	Rp5.090.000,00	Rp2.962.300,00	Rp0,00	Rp2.962.300,00	Rp8.052.300,00	Rp1.815.700,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.664.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.102.300,00	Rp0,00	Rp2.102.300,00	Rp2.102.300,00	Rp562.300,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp710.000,00	Rp0,00	Rp710.000,00	Rp710.000,00	Rp178.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp30.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp6.135.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.090.000,00	Rp0,00	Rp5.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.090.000,00	Rp1.045.400,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp113.046.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.705.350,00	Rp18.341.070,00	Rp113.046.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.046.420,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp104.292.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.410.160,00	Rp16.882.032,00	Rp104.292.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.292.192,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp104.292.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.410.160,00	Rp16.882.032,00	Rp104.292.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.292.192,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp8.754.228,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.295.190,00	Rp1.459.038,00	Rp8.754.228,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.754.228,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.459.428,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.716.190,00	Rp743.238,00	Rp4.459.428,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.459.428,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp243.108,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.590,00	Rp40.518,00	Rp243.108,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp243.108,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp303.876,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp253.230,00	Rp50.646,00	Rp303.876,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp303.876,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp3.747.816,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.123.180,00	Rp624.636,00	Rp3.747.816,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.747.816,00	Rp0,00
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp5.999.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.295.750,00	Rp4.320.000,00	Rp5.615.750,00	Rp5.615.750,00	Rp383.850,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp5.999.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.295.750,00	Rp4.320.000,00	Rp5.615.750,00	Rp5.615.750,00	Rp383.850,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.999.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.295.750,00	Rp4.320.000,00	Rp5.615.750,00	Rp5.615.750,00	Rp383.850,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.679.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.295.750,00	Rp0,00	Rp1.295.750,00	Rp1.295.750,00	Rp383.850,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.679.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.295.750,00	Rp0,00	Rp1.295.750,00	Rp1.295.750,00	Rp383.850,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp353.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp176.750,00	Rp0,00	Rp176.750,00	Rp176.750,00	Rp176.750,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp585.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp469.000,00	Rp0,00	Rp469.000,00	Rp469.000,00	Rp116.600,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp740.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp650.000,00	Rp90.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp4.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.320.000,00	Rp4.320.000,00	Rp4.320.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp4.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.320.000,00	Rp4.320.000,00	Rp4.320.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.320.000,00	Rp4.320.000,00	Rp4.320.000,00	Rp0,00
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp12.285.642.851,00	Rp10.041.423.488,00	Rp759.986.420,00	Rp10.801.409.908,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.801.409.908,00	Rp1.484.232.943,00
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp12.285.642.851,00	Rp10.041.423.488,00	Rp759.986.420,00	Rp10.801.409.908,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.801.409.908,00	Rp1.484.232.943,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp12.285.642.851,00	Rp10.041.423.488,00	Rp759.986.420,00	Rp10.801.409.908,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.801.409.908,00	Rp1.484.232.943,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp12.285.642.851,00	Rp10.041.423.488,00	Rp759.986.420,00	Rp10.801.409.908,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.801.409.908,00	Rp1.484.232.943,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.670.926.408,00	Rp4.133.364.201,00	Rp322.111.456,00	Rp4.455.475.657,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.455.475.657,00	Rp215.450.751,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp3.378.259.332,00	Rp3.016.737.638,00	Rp224.025.793,00	Rp3.240.763.431,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.240.763.431,00	Rp137.495.901,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp3.349.630.332,00	Rp2.997.652.238,00	Rp214.483.093,00	Rp3.212.135.331,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.212.135.331,00	Rp137.495.001,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp28.629.000,00	Rp19.085.400,00	Rp9.542.700,00	Rp28.628.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.628.100,00	Rp900,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp323.000.908,00	Rp286.812.626,00	Rp22.354.040,00	Rp309.166.666,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp309.166.666,00	Rp13.834.242,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp318.992.908,00	Rp284.140.670,00	Rp21.018.062,00	Rp305.158.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp305.158.732,00	Rp13.834.176,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp4.008.000,00	Rp2.671.956,00	Rp1.335.978,00	Rp4.007.934,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.007.934,00	Rp66,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp188.965.000,00	Rp161.590.000,00	Rp10.270.000,00	Rp171.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp171.860.000,00	Rp17.105.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp188.965.000,00	Rp161.590.000,00	Rp10.270.000,00	Rp171.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp171.860.000,00	Rp17.105.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp139.110.000,00	Rp125.560.000,00	Rp11.559.900,00	Rp137.119.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.119.900,00	Rp1.990.100,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp134.400.000,00	Rp122.420.000,00	Rp9.989.900,00	Rp132.409.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.409.900,00	Rp1.990.100,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp4.710.000,00	Rp3.140.000,00	Rp1.570.000,00	Rp4.710.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.710.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp87.060.000,00	Rp79.410.000,00	Rp5.710.000,00	Rp85.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.120.000,00	Rp1.940.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp87.060.000,00	Rp79.410.000,00	Rp5.710.000,00	Rp85.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.120.000,00	Rp1.940.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp163.855.800,00	Rp145.926.300,00	Rp11.369.940,00	Rp157.296.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.296.240,00	Rp6.559.560,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp161.248.680,00	Rp144.188.220,00	Rp10.500.900,00	Rp154.689.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp154.689.120,00	Rp6.559.560,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp2.607.120,00	Rp1.738.080,00	Rp869.040,00	Rp2.607.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.607.120,00	Rp0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp48.934.398,00	Rp46.860.008,00	Rp1.001.611,00	Rp47.861.619,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.861.619,00	Rp1.072.779,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp48.934.398,00	Rp46.860.008,00	Rp1.001.611,00	Rp47.861.619,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.861.619,00	Rp1.072.779,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp54.295,00	Rp36.746,00	Rp2.385,00	Rp39.131,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.131,00	Rp15.164,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp50.195,00	Rp36.296,00	Rp2.160,00	Rp38.456,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.456,00	Rp11.739,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp4.100,00	Rp450,00	Rp225,00	Rp675,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp675,00	Rp3.425,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp300.752.974,00	Rp246.116.052,00	Rp33.667.134,00	Rp279.783.186,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp279.783.186,00	Rp20.969.788,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp299.259.133,00	Rp245.120.158,00	Rp33.169.187,00	Rp278.289.345,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp278.289.345,00	Rp20.969.788,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp1.493.841,00	Rp995.894,00	Rp497.947,00	Rp1.493.841,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.493.841,00	Rp0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp6.825.870,00	Rp6.078.679,00	Rp537.664,00	Rp6.616.343,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.616.343,00	Rp209.527,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp6.757.161,00	Rp6.032.873,00	Rp514.761,00	Rp6.547.634,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.547.634,00	Rp209.527,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp68.709,00	Rp45.806,00	Rp22.903,00	Rp68.709,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.709,00	Rp0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp20.477.734,00	Rp18.236.152,00	Rp1.612.989,00	Rp19.849.141,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.849.141,00	Rp628.593,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp20.271.613,00	Rp18.098.738,00	Rp1.544.282,00	Rp19.643.020,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.643.020,00	Rp628.593,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp206.121,00	Rp137.414,00	Rp68.707,00	Rp206.121,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp206.121,00	Rp0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp13.630.097,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.630.097,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp13.615.782,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.615.782,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	Rp14.315,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.315,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp7.547.216.443,00	Rp5.851.809.287,00	Rp426.624.964,00	Rp6.278.434.251,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.278.434.251,00	Rp1.268.782.192,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp4.745.026.034,00	Rp3.651.650.200,00	Rp265.055.638,00	Rp3.916.705.838,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.916.705.838,00	Rp828.320.196,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp4.745.026.034,00	Rp3.651.650.200,00	Rp265.055.638,00	Rp3.916.705.838,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.916.705.838,00	Rp828.320.196,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp778.685.655,00	Rp633.652.163,00	Rp46.474.183,00	Rp680.126.346,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.126.346,00	Rp98.559.309,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp778.685.655,00	Rp633.652.163,00	Rp46.474.183,00	Rp680.126.346,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.126.346,00	Rp98.559.309,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp2.023.504.754,00	Rp1.566.506.924,00	Rp115.095.143,00	Rp1.681.602.067,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.681.602.067,00	Rp341.902.687,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp2.023.504.754,00	Rp1.566.506.924,00	Rp115.095.143,00	Rp1.681.602.067,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.681.602.067,00	Rp341.902.687,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp67.500.000,00	Rp56.250.000,00	Rp11.250.000,00	Rp67.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.500.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp45.900.000,00	Rp38.250.000,00	Rp7.650.000,00	Rp45.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.900.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp45.900.000,00	Rp38.250.000,00	Rp7.650.000,00	Rp45.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.900.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	Rp21.600.000,00	Rp18.000.000,00	Rp3.600.000,00	Rp21.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp21.600.000,00	Rp18.000.000,00	Rp3.600.000,00	Rp21.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp0,00
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp80.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp80.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp20.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp60.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp19.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.920.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp19.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.920.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	Rp19.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.920.000,00
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp222.163.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.533.200,00	Rp67.500.000,00	Rp94.033.200,00	Rp72.609.368,00	Rp9.850.000,00	Rp82.459.368,00	Rp176.492.568,00	Rp45.670.832,00
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp10.613.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.729.000,00	Rp0,00	Rp9.729.000,00	Rp9.729.000,00	Rp884.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp10.613.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.729.000,00	Rp0,00	Rp9.729.000,00	Rp9.729.000,00	Rp884.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp10.613.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.729.000,00	Rp0,00	Rp9.729.000,00	Rp9.729.000,00	Rp884.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp10.613.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.729.000,00	Rp0,00	Rp9.729.000,00	Rp9.729.000,00	Rp884.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp10.613.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.729.000,00	Rp0,00	Rp9.729.000,00	Rp9.729.000,00	Rp884.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp10.613.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.729.000,00	Rp0,00	Rp9.729.000,00	Rp9.729.000,00	Rp884.000,00
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp84.580.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.458.200,00	Rp38.200.000,00	Rp58.658.200,00	Rp7.944.000,00	Rp0,00	Rp7.944.000,00	Rp66.602.200,00	Rp17.978.300,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp45.418.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.458.200,00	Rp0,00	Rp20.458.200,00	Rp7.944.000,00	Rp0,00	Rp7.944.000,00	Rp28.402.200,00	Rp17.016.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp45.418.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.458.200,00	Rp0,00	Rp20.458.200,00	Rp7.944.000,00	Rp0,00	Rp7.944.000,00	Rp28.402.200,00	Rp17.016.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp45.418.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.458.200,00	Rp0,00	Rp20.458.200,00	Rp7.944.000,00	Rp0,00	Rp7.944.000,00	Rp28.402.200,00	Rp17.016.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp45.418.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.458.200,00	Rp0,00	Rp20.458.200,00	Rp7.944.000,00	Rp0,00	Rp7.944.000,00	Rp28.402.200,00	Rp17.016.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp8.708.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.138.200,00	Rp0,00	Rp5.138.200,00	Rp1.139.000,00	Rp0,00	Rp1.139.000,00	Rp6.277.200,00	Rp2.431.600,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp6.631.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.305.000,00	Rp0,00	Rp5.305.000,00	Rp5.305.000,00	Rp1.326.800,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp30.078.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.320.000,00	Rp0,00	Rp15.320.000,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp16.820.000,00	Rp13.258.000,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp39.161.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.200.000,00	Rp38.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.200.000,00	Rp961.900,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp39.161.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.200.000,00	Rp38.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.200.000,00	Rp961.900,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp39.161.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.200.000,00	Rp38.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.200.000,00	Rp961.900,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp39.161.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.200.000,00	Rp38.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.200.000,00	Rp961.900,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp39.161.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.200.000,00	Rp38.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.200.000,00	Rp961.900,00
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.800.000,00	Rp24.800.000,00	Rp27.200.000,00	Rp2.200.000,00	Rp29.400.000,00	Rp54.200.000,00	Rp800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.800.000,00	Rp24.800.000,00	Rp27.200.000,00	Rp2.200.000,00	Rp29.400.000,00	Rp54.200.000,00	Rp800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.800.000,00	Rp24.800.000,00	Rp27.200.000,00	Rp2.200.000,00	Rp29.400.000,00	Rp54.200.000,00	Rp800.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.800.000,00	Rp24.800.000,00	Rp27.200.000,00	Rp2.200.000,00	Rp29.400.000,00	Rp54.200.000,00	Rp800.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.800.000,00	Rp24.800.000,00	Rp27.200.000,00	Rp2.200.000,00	Rp29.400.000,00	Rp54.200.000,00	Rp800.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.800.000,00	Rp24.800.000,00	Rp27.200.000,00	Rp2.200.000,00	Rp29.400.000,00	Rp54.200.000,00	Rp800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp11.576.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.734.700,00	Rp0,00	Rp9.734.700,00	Rp9.734.700,00	Rp1.842.200,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp11.576.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.734.700,00	Rp0,00	Rp9.734.700,00	Rp9.734.700,00	Rp1.842.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp11.576.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.734.700,00	Rp0,00	Rp9.734.700,00	Rp9.734.700,00	Rp1.842.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp11.576.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.734.700,00	Rp0,00	Rp9.734.700,00	Rp9.734.700,00	Rp1.842.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp11.576.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.734.700,00	Rp0,00	Rp9.734.700,00	Rp9.734.700,00	Rp1.842.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.216.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.064.700,00	Rp0,00	Rp1.064.700,00	Rp1.064.700,00	Rp1.152.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp5.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.320.000,00	Rp0,00	Rp5.320.000,00	Rp5.320.000,00	Rp280.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.350.000,00	Rp0,00	Rp3.350.000,00	Rp3.350.000,00	Rp410.000,00
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.050.000,00	Rp450.000,00	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.050.000,00	Rp450.000,00	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.050.000,00	Rp450.000,00	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.050.000,00	Rp450.000,00	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.050.000,00	Rp450.000,00	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.050.000,00	Rp450.000,00	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp55.893.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.075.000,00	Rp4.500.000,00	Rp10.575.000,00	Rp13.951.668,00	Rp7.200.000,00	Rp21.151.668,00	Rp31.726.668,00	Rp24.166.332,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp55.893.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.075.000,00	Rp4.500.000,00	Rp10.575.000,00	Rp13.951.668,00	Rp7.200.000,00	Rp21.151.668,00	Rp31.726.668,00	Rp24.166.332,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp55.893.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.075.000,00	Rp4.500.000,00	Rp10.575.000,00	Rp13.951.668,00	Rp7.200.000,00	Rp21.151.668,00	Rp31.726.668,00	Rp24.166.332,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp15.225.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.075.000,00	Rp4.500.000,00	Rp10.575.000,00	Rp1.125.000,00	Rp0,00	Rp1.125.000,00	Rp11.700.000,00	Rp3.525.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp15.225.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.075.000,00	Rp4.500.000,00	Rp10.575.000,00	Rp1.125.000,00	Rp0,00	Rp1.125.000,00	Rp11.700.000,00	Rp3.525.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp15.225.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.075.000,00	Rp4.500.000,00	Rp10.575.000,00	Rp1.125.000,00	Rp0,00	Rp1.125.000,00	Rp11.700.000,00	Rp3.525.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp40.668.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.826.668,00	Rp7.200.000,00	Rp20.026.668,00	Rp20.026.668,00	Rp20.641.332,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp40.668.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.826.668,00	Rp7.200.000,00	Rp20.026.668,00	Rp20.026.668,00	Rp20.641.332,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp40.668.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.826.668,00	Rp7.200.000,00	Rp20.026.668,00	Rp20.026.668,00	Rp20.641.332,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp721.538.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.327.000,00	Rp579.576.541,69	Rp615.903.541,69	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp615.903.541,69	Rp105.634.908,31
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp721.538.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.327.000,00	Rp579.576.541,69	Rp615.903.541,69	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp615.903.541,69	Rp105.634.908,31
5.2	BELANJA MODAL	Rp721.538.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.327.000,00	Rp579.576.541,69	Rp615.903.541,69	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp615.903.541,69	Rp105.634.908,31
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp491.282.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.327.000,00	Rp394.290.500,00	Rp430.617.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp430.617.500,00	Rp60.664.800,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	Rp29.492.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.640.000,00	Rp27.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.640.000,00	Rp1.852.100,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp29.492.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.640.000,00	Rp27.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.640.000,00	Rp1.852.100,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp29.492.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.640.000,00	Rp27.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.640.000,00	Rp1.852.100,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp125.432.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.591.500,00	Rp114.591.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.591.500,00	Rp10.840.700,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp61.437.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.275.000,00	Rp59.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.275.000,00	Rp2.162.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp61.437.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.275.000,00	Rp59.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.275.000,00	Rp2.162.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp63.994.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.316.500,00	Rp55.316.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.316.500,00	Rp8.678.200,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp32.494.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.416.500,00	Rp32.416.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.416.500,00	Rp78.200,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp31.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.900.000,00	Rp22.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.900.000,00	Rp8.600.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp111.821.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.421.000,00	Rp102.421.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.421.000,00	Rp9.400.400,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	Rp111.821.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.421.000,00	Rp102.421.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.421.000,00	Rp9.400.400,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Rp50.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.800.000,00	Rp49.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.800.000,00	Rp700.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp61.321.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.621.000,00	Rp52.621.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.621.000,00	Rp8.700.400,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp224.536.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.327.000,00	Rp149.638.000,00	Rp185.965.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.965.000,00	Rp38.571.600,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp193.849.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.327.000,00	Rp121.000.000,00	Rp157.327.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.327.000,00	Rp36.522.300,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp193.849.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.327.000,00	Rp121.000.000,00	Rp157.327.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.327.000,00	Rp36.522.300,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp30.687.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.638.000,00	Rp28.638.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.638.000,00	Rp2.049.300,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp18.138.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.138.000,00	Rp18.138.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.138.000,00	Rp300,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp12.549.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp2.049.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp230.256.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.286.041,69	Rp185.286.041,69	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.286.041,69	Rp44.970.108,31
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	Rp230.256.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.286.041,69	Rp185.286.041,69	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.286.041,69	Rp44.970.108,31
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	Rp155.256.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.481.041,69	Rp115.481.041,69	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.481.041,69	Rp39.775.108,31
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	Rp155.256.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.481.041,69	Rp115.481.041,69	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.481.041,69	Rp39.775.108,31
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.805.000,00	Rp69.805.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.805.000,00	Rp5.195.000,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.805.000,00	Rp69.805.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.805.000,00	Rp5.195.000,00
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.140.908.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp704.676.435,00	Rp134.501.180,00	Rp839.177.615,00	Rp173.903.699,00	Rp16.783.091,00	Rp190.686.790,00	Rp1.029.864.405,00	Rp111.044.195,00
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1.992.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.660.000,00	Rp0,00	Rp1.660.000,00	Rp1.660.000,00	Rp332.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.992.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.660.000,00	Rp0,00	Rp1.660.000,00	Rp1.660.000,00	Rp332.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.992.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.660.000,00	Rp0,00	Rp1.660.000,00	Rp1.660.000,00	Rp332.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.992.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.660.000,00	Rp0,00	Rp1.660.000,00	Rp1.660.000,00	Rp332.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.992.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.660.000,00	Rp0,00	Rp1.660.000,00	Rp1.660.000,00	Rp332.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.992.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.660.000,00	Rp0,00	Rp1.660.000,00	Rp1.660.000,00	Rp332.000,00
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp259.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp172.243.699,00	Rp16.783.091,00	Rp189.026.790,00	Rp189.026.790,00	Rp69.973.210,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp259.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp172.243.699,00	Rp16.783.091,00	Rp189.026.790,00	Rp189.026.790,00	Rp69.973.210,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp259.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp172.243.699,00	Rp16.783.091,00	Rp189.026.790,00	Rp189.026.790,00	Rp69.973.210,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp259.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp172.243.699,00	Rp16.783.091,00	Rp189.026.790,00	Rp189.026.790,00	Rp69.973.210,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp259.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp172.243.699,00	Rp16.783.091,00	Rp189.026.790,00	Rp189.026.790,00	Rp69.973.210,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.332.805,00	Rp670.105,00	Rp8.002.910,00	Rp8.002.910,00	Rp16.997.090,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp54.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.361.650,00	Rp1.741.400,00	Rp21.103.050,00	Rp21.103.050,00	Rp32.896.950,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp145.549.244,00	Rp14.371.586,00	Rp159.920.830,00	Rp159.920.830,00	Rp20.079.170,00
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp879.916.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp704.676.435,00	Rp134.501.180,00	Rp839.177.615,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp839.177.615,00	Rp40.738.985,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp879.916.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp704.676.435,00	Rp134.501.180,00	Rp839.177.615,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp839.177.615,00	Rp40.738.985,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp879.916.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp704.676.435,00	Rp134.501.180,00	Rp839.177.615,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp839.177.615,00	Rp40.738.985,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp879.916.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp704.676.435,00	Rp134.501.180,00	Rp839.177.615,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp839.177.615,00	Rp40.738.985,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp811.828.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.448.856,00	Rp123.801.568,00	Rp774.250.424,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp774.250.424,00	Rp37.577.736,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp464.187.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp388.218.376,00	Rp73.155.472,00	Rp461.373.848,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp461.373.848,00	Rp2.813.672,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp139.056.256,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.546.880,00	Rp22.509.376,00	Rp139.056.256,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.056.256,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp208.584.384,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp145.683.600,00	Rp28.136.720,00	Rp173.820.320,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp173.820.320,00	Rp34.764.064,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp68.088.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.227.579,00	Rp10.699.612,00	Rp64.927.191,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.927.191,00	Rp3.161.249,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp34.684.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.623.679,00	Rp5.450.412,00	Rp33.074.091,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.074.091,00	Rp1.610.349,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp1.890.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.505.919,00	Rp297.132,00	Rp1.803.051,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.803.051,00	Rp87.789,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp2.363.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.882.343,00	Rp371.404,00	Rp2.253.747,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.253.747,00	Rp109.733,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp29.149.680,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.215.638,00	Rp4.580.664,00	Rp27.796.302,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.796.302,00	Rp1.353.378,00
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.239.526.540,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp798.278.950,00	Rp372.119.459,06	Rp1.170.398.409,06	Rp34.368.400,00	Rp255.000,00	Rp34.623.400,00	Rp1.205.021.809,06	Rp34.504.730,94
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp776.574.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp646.595.150,00	Rp92.681.830,00	Rp739.276.980,00	Rp15.695.400,00	Rp255.000,00	Rp15.950.400,00	Rp755.227.380,00	Rp21.347.600,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp776.574.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp646.595.150,00	Rp92.681.830,00	Rp739.276.980,00	Rp15.695.400,00	Rp255.000,00	Rp15.950.400,00	Rp755.227.380,00	Rp21.347.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp776.574.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp646.595.150,00	Rp92.681.830,00	Rp739.276.980,00	Rp15.695.400,00	Rp255.000,00	Rp15.950.400,00	Rp755.227.380,00	Rp21.347.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp318.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp317.988.000,00	Rp0,00	Rp317.988.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp317.988.000,00	Rp12.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp318.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp317.988.000,00	Rp0,00	Rp317.988.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp317.988.000,00	Rp12.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp318.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp317.988.000,00	Rp0,00	Rp317.988.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp317.988.000,00	Rp12.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp311.774.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp248.479.150,00	Rp48.295.830,00	Rp296.774.980,00	Rp8.150.400,00	Rp0,00	Rp8.150.400,00	Rp304.925.380,00	Rp6.849.600,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp291.348.448,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.457.040,00	Rp44.891.408,00	Rp276.348.448,00	Rp8.150.400,00	Rp0,00	Rp8.150.400,00	Rp284.498.848,00	Rp6.849.600,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp33.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp33.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp243.348.448,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.957.040,00	Rp39.391.408,00	Rp243.348.448,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp243.348.448,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.150.400,00	Rp0,00	Rp8.150.400,00	Rp8.150.400,00	Rp6.849.600,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp20.426.532,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.022.110,00	Rp3.404.422,00	Rp20.426.532,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.426.532,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp10.405.332,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.671.110,00	Rp1.734.222,00	Rp10.405.332,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.405.332,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp567.252,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp472.710,00	Rp94.542,00	Rp567.252,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp567.252,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp709.044,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp590.870,00	Rp118.174,00	Rp709.044,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp709.044,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp8.744.904,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.287.420,00	Rp1.457.484,00	Rp8.744.904,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.744.904,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp146.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.128.000,00	Rp44.386.000,00	Rp124.514.000,00	Rp7.545.000,00	Rp255.000,00	Rp7.800.000,00	Rp132.314.000,00	Rp14.486.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp146.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.128.000,00	Rp44.386.000,00	Rp124.514.000,00	Rp7.545.000,00	Rp255.000,00	Rp7.800.000,00	Rp132.314.000,00	Rp14.486.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp146.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.128.000,00	Rp44.386.000,00	Rp124.514.000,00	Rp7.545.000,00	Rp255.000,00	Rp7.800.000,00	Rp132.314.000,00	Rp14.486.000,00
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.395.000,00	Rp4.800.000,00	Rp23.195.000,00	Rp17.725.000,00	Rp0,00	Rp17.725.000,00	Rp40.920.000,00	Rp9.080.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.395.000,00	Rp4.800.000,00	Rp23.195.000,00	Rp17.725.000,00	Rp0,00	Rp17.725.000,00	Rp40.920.000,00	Rp9.080.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.395.000,00	Rp4.800.000,00	Rp23.195.000,00	Rp17.725.000,00	Rp0,00	Rp17.725.000,00	Rp40.920.000,00	Rp9.080.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.395.000,00	Rp4.800.000,00	Rp23.195.000,00	Rp17.725.000,00	Rp0,00	Rp17.725.000,00	Rp40.920.000,00	Rp9.080.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.395.000,00	Rp4.800.000,00	Rp23.195.000,00	Rp17.725.000,00	Rp0,00	Rp17.725.000,00	Rp40.920.000,00	Rp9.080.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp25.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp4.800.000,00	Rp15.800.000,00	Rp6.640.000,00	Rp0,00	Rp6.640.000,00	Rp22.440.000,00	Rp2.570.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	Rp15.330.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.395.000,00	Rp0,00	Rp7.395.000,00	Rp4.790.000,00	Rp0,00	Rp4.790.000,00	Rp12.185.000,00	Rp3.145.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp9.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.295.000,00	Rp0,00	Rp6.295.000,00	Rp6.295.000,00	Rp3.365.000,00
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp412.951.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.288.800,00	Rp274.637.629,06	Rp407.926.429,06	Rp948.000,00	Rp0,00	Rp948.000,00	Rp408.874.429,06	Rp4.077.130,94
5.1	BELANJA OPERASI	Rp412.951.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.288.800,00	Rp274.637.629,06	Rp407.926.429,06	Rp948.000,00	Rp0,00	Rp948.000,00	Rp408.874.429,06	Rp4.077.130,94
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp412.951.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.288.800,00	Rp274.637.629,06	Rp407.926.429,06	Rp948.000,00	Rp0,00	Rp948.000,00	Rp408.874.429,06	Rp4.077.130,94
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp11.223.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.015.000,00	Rp0,00	Rp7.015.000,00	Rp948.000,00	Rp0,00	Rp948.000,00	Rp7.963.000,00	Rp3.260.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp11.223.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.015.000,00	Rp0,00	Rp7.015.000,00	Rp948.000,00	Rp0,00	Rp948.000,00	Rp7.963.000,00	Rp3.260.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp1.022.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp948.000,00	Rp0,00	Rp948.000,00	Rp948.000,00	Rp74.400,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp10.200.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.015.000,00	Rp0,00	Rp7.015.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.015.000,00	Rp3.185.600,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp150.728.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp126.273.800,00	Rp24.454.760,00	Rp150.728.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.728.560,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp139.056.256,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.546.880,00	Rp22.509.376,00	Rp139.056.256,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.056.256,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp139.056.256,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.546.880,00	Rp22.509.376,00	Rp139.056.256,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.056.256,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp11.672.304,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.726.920,00	Rp1.945.384,00	Rp11.672.304,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.672.304,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp5.945.904,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.954.920,00	Rp990.984,00	Rp5.945.904,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.945.904,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp324.144,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp270.120,00	Rp54.024,00	Rp324.144,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp324.144,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp405.168,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp337.640,00	Rp67.528,00	Rp405.168,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp405.168,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp4.997.088,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.164.240,00	Rp832.848,00	Rp4.997.088,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.997.088,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp251.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.182.869,06	Rp250.182.869,06	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.182.869,06	Rp817.130,94
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp251.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.182.869,06	Rp250.182.869,06	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.182.869,06	Rp817.130,94
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp251.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.182.869,06	Rp250.182.869,06	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.182.869,06	Rp817.130,94
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Rp238.410.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.905.350,00	Rp43.341.070,00	Rp141.246.420,00	Rp6.833.000,00	Rp0,00	Rp6.833.000,00	Rp148.079.420,00	Rp90.331.280,00
2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp218.410.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.705.350,00	Rp43.341.070,00	Rp138.046.420,00	Rp4.741.000,00	Rp0,00	Rp4.741.000,00	Rp142.787.420,00	Rp75.623.280,00
2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp218.410.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.705.350,00	Rp43.341.070,00	Rp138.046.420,00	Rp4.741.000,00	Rp0,00	Rp4.741.000,00	Rp142.787.420,00	Rp75.623.280,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp218.410.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.705.350,00	Rp43.341.070,00	Rp138.046.420,00	Rp4.741.000,00	Rp0,00	Rp4.741.000,00	Rp142.787.420,00	Rp75.623.280,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp193.410.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.705.350,00	Rp18.341.070,00	Rp113.046.420,00	Rp4.741.000,00	Rp0,00	Rp4.741.000,00	Rp117.787.420,00	Rp75.623.280,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp901.000,00	Rp0,00	Rp901.000,00	Rp901.000,00	Rp259.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp901.000,00	Rp0,00	Rp901.000,00	Rp901.000,00	Rp259.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp272.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp191.000,00	Rp0,00	Rp191.000,00	Rp191.000,00	Rp81.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp710.000,00	Rp0,00	Rp710.000,00	Rp710.000,00	Rp178.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp188.410.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.705.350,00	Rp18.341.070,00	Rp113.046.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.046.420,00	Rp75.364.280,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp173.820.320,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.410.160,00	Rp16.882.032,00	Rp104.292.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.292.192,00	Rp69.528.128,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp173.820.320,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.410.160,00	Rp16.882.032,00	Rp104.292.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.292.192,00	Rp69.528.128,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	Rp14.590.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.295.190,00	Rp1.459.038,00	Rp8.754.228,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.754.228,00	Rp5.836.152,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp7.432.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.716.190,00	Rp743.238,00	Rp4.459.428,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.459.428,00	Rp2.972.952,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp405.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.590,00	Rp40.518,00	Rp243.108,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp243.108,00	Rp162.072,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp506.460,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp253.230,00	Rp50.646,00	Rp303.876,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp303.876,00	Rp202.584,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp6.246.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.123.180,00	Rp624.636,00	Rp3.747.816,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.747.816,00	Rp2.498.544,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp3.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.840.000,00	Rp0,00	Rp3.840.000,00	Rp3.840.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp3.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.840.000,00	Rp0,00	Rp3.840.000,00	Rp3.840.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.840.000,00	Rp0,00	Rp3.840.000,00	Rp3.840.000,00	Rp0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00
5.1.04.04	Belanja Subsidi kepada Koperasi	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00
5.1.04.04.01	Belanja Subsidi kepada Koperasi	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00
5.1.04.04.01.0001	Belanja Subsidi kepada Koperasi	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00
2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.200.000,00	Rp0,00	Rp3.200.000,00	Rp2.092.000,00	Rp0,00	Rp2.092.000,00	Rp5.292.000,00	Rp14.708.000,00
2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.200.000,00	Rp0,00	Rp3.200.000,00	Rp2.092.000,00	Rp0,00	Rp2.092.000,00	Rp5.292.000,00	Rp14.708.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
	Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												
5.1	BELANJA OPERASI	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.200.000,00	Rp0,00	Rp3.200.000,00	Rp2.092.000,00	Rp0,00	Rp2.092.000,00	Rp5.292.000,00	Rp14.708.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.200.000,00	Rp0,00	Rp3.200.000,00	Rp2.092.000,00	Rp0,00	Rp2.092.000,00	Rp5.292.000,00	Rp14.708.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.134.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.092.000,00	Rp0,00	Rp2.092.000,00	Rp2.092.000,00	Rp42.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.134.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.092.000,00	Rp0,00	Rp2.092.000,00	Rp2.092.000,00	Rp42.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp334.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp332.000,00	Rp0,00	Rp332.000,00	Rp332.000,00	Rp2.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.760.000,00	Rp0,00	Rp1.760.000,00	Rp1.760.000,00	Rp40.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp4.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.200.000,00	Rp0,00	Rp3.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.200.000,00	Rp1.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp4.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.200.000,00	Rp0,00	Rp3.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.200.000,00	Rp1.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp4.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.200.000,00	Rp0,00	Rp3.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.200.000,00	Rp1.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp13.266.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.266.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp13.266.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.266.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp7.666.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.666.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp5.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.600.000,00
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp150.908.620,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.738.985,00	Rp6.113.690,00	Rp47.852.675,00	Rp67.417.900,00	Rp12.715.560,00	Rp80.133.460,00	Rp127.986.135,00	Rp22.922.485,00
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp49.999.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.577.350,00	Rp10.690.560,00	Rp38.267.910,00	Rp38.267.910,00	Rp11.731.590,00
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Rp49.999.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.577.350,00	Rp10.690.560,00	Rp38.267.910,00	Rp38.267.910,00	Rp11.731.590,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp49.999.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.577.350,00	Rp10.690.560,00	Rp38.267.910,00	Rp38.267.910,00	Rp11.731.590,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp49.999.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.577.350,00	Rp10.690.560,00	Rp38.267.910,00	Rp38.267.910,00	Rp11.731.590,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.129.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.657.350,00	Rp0,00	Rp1.657.350,00	Rp1.657.350,00	Rp472.150,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.129.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.657.350,00	Rp0,00	Rp1.657.350,00	Rp1.657.350,00	Rp472.150,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp264.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp166.350,00	Rp0,00	Rp166.350,00	Rp166.350,00	Rp98.350,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.864.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.491.000,00	Rp0,00	Rp1.491.000,00	Rp1.491.000,00	Rp373.800,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp47.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.920.000,00	Rp10.690.560,00	Rp36.610.560,00	Rp36.610.560,00	Rp11.259.440,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp47.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.920.000,00	Rp10.690.560,00	Rp36.610.560,00	Rp36.610.560,00	Rp11.259.440,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp47.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.920.000,00	Rp10.690.560,00	Rp36.610.560,00	Rp36.610.560,00	Rp11.259.440,00
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp100.909.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.738.985,00	Rp6.113.690,00	Rp47.852.675,00	Rp39.840.550,00	Rp2.025.000,00	Rp41.865.550,00	Rp89.718.225,00	Rp11.190.895,00
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp100.909.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.738.985,00	Rp6.113.690,00	Rp47.852.675,00	Rp39.840.550,00	Rp2.025.000,00	Rp41.865.550,00	Rp89.718.225,00	Rp11.190.895,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp100.909.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.738.985,00	Rp6.113.690,00	Rp47.852.675,00	Rp39.840.550,00	Rp2.025.000,00	Rp41.865.550,00	Rp89.718.225,00	Rp11.190.895,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp100.909.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.738.985,00	Rp6.113.690,00	Rp47.852.675,00	Rp39.840.550,00	Rp2.025.000,00	Rp41.865.550,00	Rp89.718.225,00	Rp11.190.895,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.893.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.550,00	Rp2.025.000,00	Rp4.425.550,00	Rp4.425.550,00	Rp468.050,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.893.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.550,00	Rp2.025.000,00	Rp4.425.550,00	Rp4.425.550,00	Rp468.050,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp331.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.550,00	Rp0,00	Rp165.550,00	Rp165.550,00	Rp165.550,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.332.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.065.000,00	Rp0,00	Rp1.065.000,00	Rp1.065.000,00	Rp267.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp30.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.025.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.020.000,00	Rp0,00	Rp1.020.000,00	Rp1.020.000,00	Rp5.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.025.000,00	Rp2.025.000,00	Rp2.025.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp50.909.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.738.985,00	Rp6.113.690,00	Rp47.852.675,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.852.675,00	Rp3.056.845,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp47.018.752,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.577.736,00	Rp5.627.344,00	Rp44.205.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.205.080,00	Rp2.813.672,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp47.018.752,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.577.736,00	Rp5.627.344,00	Rp44.205.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.205.080,00	Rp2.813.672,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp3.890.768,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.161.249,00	Rp486.346,00	Rp3.647.595,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.647.595,00	Rp243.173,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp1.981.968,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.610.349,00	Rp247.746,00	Rp1.858.095,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.858.095,00	Rp123.873,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp108.048,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.789,00	Rp13.506,00	Rp101.295,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.295,00	Rp6.753,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp135.056,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.733,00	Rp16.882,00	Rp126.615,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp126.615,00	Rp8.441,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp1.665.696,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.353.378,00	Rp208.212,00	Rp1.561.590,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.561.590,00	Rp104.106,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp45.106.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.440.000,00	Rp0,00	Rp37.440.000,00	Rp37.440.000,00	Rp7.666.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp45.106.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.440.000,00	Rp0,00	Rp37.440.000,00	Rp37.440.000,00	Rp7.666.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp45.106.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.440.000,00	Rp0,00	Rp37.440.000,00	Rp37.440.000,00	Rp7.666.000,00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp198.408.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.136.900,00	Rp12.227.380,00	Rp75.364.280,00	Rp51.786.650,00	Rp48.000.000,00	Rp99.786.650,00	Rp175.150.930,00	Rp23.257.950,00
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp198.408.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.136.900,00	Rp12.227.380,00	Rp75.364.280,00	Rp51.786.650,00	Rp48.000.000,00	Rp99.786.650,00	Rp175.150.930,00	Rp23.257.950,00
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Rp148.408.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.136.900,00	Rp12.227.380,00	Rp75.364.280,00	Rp32.939.500,00	Rp23.040.000,00	Rp55.979.500,00	Rp131.343.780,00	Rp17.065.200,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp148.408.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.136.900,00	Rp12.227.380,00	Rp75.364.280,00	Rp32.939.500,00	Rp23.040.000,00	Rp55.979.500,00	Rp131.343.780,00	Rp17.065.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp148.408.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.136.900,00	Rp12.227.380,00	Rp75.364.280,00	Rp32.939.500,00	Rp23.040.000,00	Rp55.979.500,00	Rp131.343.780,00	Rp17.065.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp9.276.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.459.500,00	Rp0,00	Rp8.459.500,00	Rp8.459.500,00	Rp817.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp9.276.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.459.500,00	Rp0,00	Rp8.459.500,00	Rp8.459.500,00	Rp817.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp823.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp409.500,00	Rp0,00	Rp409.500,00	Rp409.500,00	Rp414.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.243.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp994.000,00	Rp0,00	Rp994.000,00	Rp994.000,00	Rp249.200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp459.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp456.000,00	Rp0,00	Rp456.000,00	Rp456.000,00	Rp3.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp6.600.000,00	Rp6.600.000,00	Rp150.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp75.364.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.136.900,00	Rp12.227.380,00	Rp75.364.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.364.280,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp69.528.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.273.440,00	Rp11.254.688,00	Rp69.528.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.528.128,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp69.528.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.273.440,00	Rp11.254.688,00	Rp69.528.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.528.128,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp5.836.152,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.863.460,00	Rp972.692,00	Rp5.836.152,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.836.152,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.972.952,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.477.460,00	Rp495.492,00	Rp2.972.952,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.972.952,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp162.072,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.060,00	Rp27.012,00	Rp162.072,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp162.072,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp202.584,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.820,00	Rp33.764,00	Rp202.584,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.584,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp2.498.544,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.082.120,00	Rp416.424,00	Rp2.498.544,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.498.544,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp63.768.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.480.000,00	Rp23.040.000,00	Rp47.520.000,00	Rp47.520.000,00	Rp16.248.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp63.768.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.480.000,00	Rp23.040.000,00	Rp47.520.000,00	Rp47.520.000,00	Rp16.248.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp63.768.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.480.000,00	Rp23.040.000,00	Rp47.520.000,00	Rp47.520.000,00	Rp16.248.000,00
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp49.999.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.847.150,00	Rp24.960.000,00	Rp43.807.150,00	Rp43.807.150,00	Rp6.192.750,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp49.999.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.847.150,00	Rp24.960.000,00	Rp43.807.150,00	Rp43.807.150,00	Rp6.192.750,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp49.999.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.847.150,00	Rp24.960.000,00	Rp43.807.150,00	Rp43.807.150,00	Rp6.192.750,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.919.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.487.150,00	Rp0,00	Rp3.487.150,00	Rp3.487.150,00	Rp432.750,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.919.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.487.150,00	Rp0,00	Rp3.487.150,00	Rp3.487.150,00	Rp432.750,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp160.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.150,00	Rp0,00	Rp80.150,00	Rp80.150,00	Rp80.150,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.509.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.207.000,00	Rp0,00	Rp1.207.000,00	Rp1.207.000,00	Rp302.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.200.000,00	Rp0,00	Rp2.200.000,00	Rp2.200.000,00	Rp50.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp46.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.360.000,00	Rp24.960.000,00	Rp40.320.000,00	Rp40.320.000,00	Rp5.760.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp46.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.360.000,00	Rp24.960.000,00	Rp40.320.000,00	Rp40.320.000,00	Rp5.760.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp46.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.360.000,00	Rp24.960.000,00	Rp40.320.000,00	Rp40.320.000,00	Rp5.760.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp989.684.630,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.196.200,00	Rp361.964.280,00	Rp862.160.480,00	Rp53.568.900,00	Rp9.950.379,00	Rp63.519.279,00	Rp925.679.759,00	Rp64.004.871,00
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp989.684.630,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.196.200,00	Rp361.964.280,00	Rp862.160.480,00	Rp53.568.900,00	Rp9.950.379,00	Rp63.519.279,00	Rp925.679.759,00	Rp64.004.871,00
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Rp939.685.130,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp481.896.200,00	Rp361.964.280,00	Rp843.860.480,00	Rp22.180.400,00	Rp9.950.379,00	Rp32.130.779,00	Rp875.991.259,00	Rp63.693.871,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp939.685.130,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp481.896.200,00	Rp361.964.280,00	Rp843.860.480,00	Rp22.180.400,00	Rp9.950.379,00	Rp32.130.779,00	Rp875.991.259,00	Rp63.693.871,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp939.685.130,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp481.896.200,00	Rp361.964.280,00	Rp843.860.480,00	Rp22.180.400,00	Rp9.950.379,00	Rp32.130.779,00	Rp875.991.259,00	Rp63.693.871,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp101.265.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.374.800,00	Rp26.100.000,00	Rp75.474.800,00	Rp12.100.400,00	Rp475.000,00	Rp12.575.400,00	Rp88.050.200,00	Rp13.215.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp101.265.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.374.800,00	Rp26.100.000,00	Rp75.474.800,00	Rp12.100.400,00	Rp475.000,00	Rp12.575.400,00	Rp88.050.200,00	Rp13.215.400,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp24.780.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.897.800,00	Rp0,00	Rp20.897.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.897.800,00	Rp3.882.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.785.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.740.400,00	Rp0,00	Rp2.740.400,00	Rp2.740.400,00	Rp1.044.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp6.393.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.112.000,00	Rp0,00	Rp5.112.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.112.000,00	Rp1.281.600,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp200.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp8.116.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.940.000,00	Rp0,00	Rp6.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.940.000,00	Rp1.176.800,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp6.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp475.000,00	Rp1.275.000,00	Rp1.275.000,00	Rp5.225.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp50.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.425.000,00	Rp26.100.000,00	Rp42.525.000,00	Rp7.560.000,00	Rp0,00	Rp7.560.000,00	Rp50.085.000,00	Rp405.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp752.888.530,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp423.521.400,00	Rp307.864.280,00	Rp731.385.680,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp731.385.680,00	Rp21.502.850,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp715.213.618,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp394.340.640,00	Rp302.028.128,00	Rp696.368.768,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp696.368.768,00	Rp18.844.850,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp95.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.600.000,00	Rp36.000.000,00	Rp78.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.600.000,00	Rp17.100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp417.168.768,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp349.640.640,00	Rp67.528.128,00	Rp417.168.768,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp417.168.768,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.100.000,00	Rp900.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp169.344.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.000.000,00	Rp169.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.000.000,00	Rp344.850,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.500.000,00	Rp29.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.500.000,00	Rp500.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp35.016.912,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.180.760,00	Rp5.836.152,00	Rp35.016.912,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.016.912,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp17.837.712,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.864.760,00	Rp2.972.952,00	Rp17.837.712,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.837.712,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp972.432,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp810.360,00	Rp162.072,00	Rp972.432,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp972.432,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp1.215.504,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.012.920,00	Rp202.584,00	Rp1.215.504,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.215.504,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp14.991.264,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.492.720,00	Rp2.498.544,00	Rp14.991.264,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.991.264,00	Rp0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp2.658.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.658.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp2.658.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.658.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp85.531.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp37.000.000,00	Rp10.080.000,00	Rp9.475.379,00	Rp19.555.379,00	Rp56.555.379,00	Rp28.975.621,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp85.531.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp37.000.000,00	Rp10.080.000,00	Rp9.475.379,00	Rp19.555.379,00	Rp56.555.379,00	Rp28.975.621,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp22.106.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.080.000,00	Rp9.475.379,00	Rp19.555.379,00	Rp19.555.379,00	Rp2.550.621,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp54.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp26.425.000,00
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Rp49.999.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.300.000,00	Rp0,00	Rp18.300.000,00	Rp31.388.500,00	Rp0,00	Rp31.388.500,00	Rp49.688.500,00	Rp311.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp49.999.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.300.000,00	Rp0,00	Rp18.300.000,00	Rp31.388.500,00	Rp0,00	Rp31.388.500,00	Rp49.688.500,00	Rp311.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp49.999.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.300.000,00	Rp0,00	Rp18.300.000,00	Rp31.388.500,00	Rp0,00	Rp31.388.500,00	Rp49.688.500,00	Rp311.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.339.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.028.500,00	Rp0,00	Rp4.028.500,00	Rp4.028.500,00	Rp311.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.339.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.028.500,00	Rp0,00	Rp4.028.500,00	Rp4.028.500,00	Rp311.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp85.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.500,00	Rp0,00	Rp78.500,00	Rp78.500,00	Rp6.800,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.054.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp910.000,00	Rp0,00	Rp910.000,00	Rp910.000,00	Rp144.200,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp100.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.640.000,00	Rp0,00	Rp2.640.000,00	Rp2.640.000,00	Rp60.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp6.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.300.000,00	Rp0,00	Rp6.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp6.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.300.000,00	Rp0,00	Rp6.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.700.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp27.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.360.000,00	Rp0,00	Rp27.360.000,00	Rp27.360.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp27.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.360.000,00	Rp0,00	Rp27.360.000,00	Rp27.360.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp27.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.360.000,00	Rp0,00	Rp27.360.000,00	Rp27.360.000,00	Rp0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp482.932.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp268.923.800,00	Rp95.904.760,00	Rp364.828.560,00	Rp29.534.250,00	Rp0,00	Rp29.534.250,00	Rp394.362.810,00	Rp88.569.550,00
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Rp482.932.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp268.923.800,00	Rp95.904.760,00	Rp364.828.560,00	Rp29.534.250,00	Rp0,00	Rp29.534.250,00	Rp394.362.810,00	Rp88.569.550,00
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Rp219.328.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.073.800,00	Rp24.454.760,00	Rp204.528.560,00	Rp13.732.500,00	Rp0,00	Rp13.732.500,00	Rp218.261.060,00	Rp1.067.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp219.328.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.073.800,00	Rp24.454.760,00	Rp204.528.560,00	Rp13.732.500,00	Rp0,00	Rp13.732.500,00	Rp218.261.060,00	Rp1.067.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp219.328.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.073.800,00	Rp24.454.760,00	Rp204.528.560,00	Rp13.732.500,00	Rp0,00	Rp13.732.500,00	Rp218.261.060,00	Rp1.067.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp9.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.832.500,00	Rp0,00	Rp8.832.500,00	Rp8.832.500,00	Rp967.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp9.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.832.500,00	Rp0,00	Rp8.832.500,00	Rp8.832.500,00	Rp967.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp126.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.500,00	Rp0,00	Rp80.500,00	Rp80.500,00	Rp45.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp177.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.000,00	Rp0,00	Rp142.000,00	Rp142.000,00	Rp35.600,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp168.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.000,00	Rp0,00	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp28.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.578.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.870.000,00	Rp0,00	Rp1.870.000,00	Rp1.870.000,00	Rp708.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp6.600.000,00	Rp6.600.000,00	Rp150.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp199.528.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.073.800,00	Rp24.454.760,00	Rp194.528.560,00	Rp4.900.000,00	Rp0,00	Rp4.900.000,00	Rp199.428.560,00	Rp100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp172.856.256,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp145.346.880,00	Rp22.509.376,00	Rp167.856.256,00	Rp4.900.000,00	Rp0,00	Rp4.900.000,00	Rp172.756.256,00	Rp100.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp28.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.800.000,00	Rp0,00	Rp28.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp139.056.256,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.546.880,00	Rp22.509.376,00	Rp139.056.256,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.056.256,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.900.000,00	Rp0,00	Rp4.900.000,00	Rp4.900.000,00	Rp100.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp11.672.304,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.726.920,00	Rp1.945.384,00	Rp11.672.304,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.672.304,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp5.945.904,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.954.920,00	Rp990.984,00	Rp5.945.904,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.945.904,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp324.144,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp270.120,00	Rp54.024,00	Rp324.144,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp324.144,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp405.168,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp337.640,00	Rp67.528,00	Rp405.168,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp405.168,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp4.997.088,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.164.240,00	Rp832.848,00	Rp4.997.088,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.997.088,00	Rp0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00
2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian	Rp263.603.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.850.000,00	Rp71.450.000,00	Rp160.300.000,00	Rp15.801.750,00	Rp0,00	Rp15.801.750,00	Rp176.101.750,00	Rp87.502.050,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
	Perkara bagi Pelaku UMKM												
5.1	BELANJA OPERASI	Rp263.603.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.850.000,00	Rp71.450.000,00	Rp160.300.000,00	Rp15.801.750,00	Rp0,00	Rp15.801.750,00	Rp176.101.750,00	Rp87.502.050,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp263.603.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.850.000,00	Rp71.450.000,00	Rp160.300.000,00	Rp15.801.750,00	Rp0,00	Rp15.801.750,00	Rp176.101.750,00	Rp87.502.050,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp38.603.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp15.801.750,00	Rp0,00	Rp15.801.750,00	Rp24.801.750,00	Rp13.802.050,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp38.603.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp15.801.750,00	Rp0,00	Rp15.801.750,00	Rp24.801.750,00	Rp13.802.050,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp2.325.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.875.500,00	Rp0,00	Rp1.875.500,00	Rp1.875.500,00	Rp449.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp712.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp352.250,00	Rp0,00	Rp352.250,00	Rp352.250,00	Rp360.550,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp355.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp284.000,00	Rp0,00	Rp284.000,00	Rp284.000,00	Rp71.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.984.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp3.480.000,00	Rp504.800,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.976.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp1.350.000,00	Rp626.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp29.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp8.460.000,00	Rp0,00	Rp8.460.000,00	Rp17.460.000,00	Rp11.790.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp185.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.100.000,00	Rp66.200.000,00	Rp111.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp111.300.000,00	Rp73.700.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp165.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.600.000,00	Rp56.300.000,00	Rp91.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.900.000,00	Rp73.100.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp49.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.600.000,00	Rp6.300.000,00	Rp41.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.900.000,00	Rp7.900.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp115.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp65.200.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.500.000,00	Rp9.900.000,00	Rp19.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.400.000,00	Rp600.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.500.000,00	Rp9.900.000,00	Rp19.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.400.000,00	Rp600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.750.000,00	Rp5.250.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.750.000,00	Rp5.250.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.250.000,00	Rp1.750.000,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp29.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp29.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		Rp8.432.190.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.198.499.612,00	Rp781.893.210,00	Rp7.980.392.822,00	Rp66.679.927,00	Rp17.520.357,00	Rp84.200.284,00	Rp8.064.593.106,00	Rp367.597.154,00
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp423.149.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp292.293.150,00	Rp42.795.830,00	Rp335.088.980,00	Rp37.029.927,00	Rp3.749.607,00	Rp40.779.534,00	Rp375.868.514,00	Rp47.281.466,00
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp39.891.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp11.344.000,00	Rp2.605.000,00	Rp13.949.000,00	Rp38.949.000,00	Rp942.700,00
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp665.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp605.000,00	Rp0,00	Rp605.000,00	Rp605.000,00	Rp60.800,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp665.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp605.000,00	Rp0,00	Rp605.000,00	Rp605.000,00	Rp60.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp665.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp605.000,00	Rp0,00	Rp605.000,00	Rp605.000,00	Rp60.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp665.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp605.000,00	Rp0,00	Rp605.000,00	Rp605.000,00	Rp60.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp665.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp605.000,00	Rp0,00	Rp605.000,00	Rp605.000,00	Rp60.800,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp665.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp605.000,00	Rp0,00	Rp605.000,00	Rp605.000,00	Rp60.800,00
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp2.725.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.269.000,00	Rp0,00	Rp2.269.000,00	Rp2.269.000,00	Rp456.900,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.725.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.269.000,00	Rp0,00	Rp2.269.000,00	Rp2.269.000,00	Rp456.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.725.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.269.000,00	Rp0,00	Rp2.269.000,00	Rp2.269.000,00	Rp456.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.725.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.269.000,00	Rp0,00	Rp2.269.000,00	Rp2.269.000,00	Rp456.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.725.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.269.000,00	Rp0,00	Rp2.269.000,00	Rp2.269.000,00	Rp456.900,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp70.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.000,00	Rp0,00	Rp59.000,00	Rp59.000,00	Rp11.900,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp710.000,00	Rp0,00	Rp710.000,00	Rp710.000,00	Rp178.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.767.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp267.000,00
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp6.875.000,00	Rp625.000,00	Rp7.500.000,00	Rp32.500.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp6.875.000,00	Rp625.000,00	Rp7.500.000,00	Rp32.500.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp6.875.000,00	Rp625.000,00	Rp7.500.000,00	Rp32.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp6.875.000,00	Rp625.000,00	Rp7.500.000,00	Rp32.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp6.875.000,00	Rp625.000,00	Rp7.500.000,00	Rp32.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp6.875.000,00	Rp625.000,00	Rp7.500.000,00	Rp32.500.000,00	Rp0,00
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp650.000,00	Rp350.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp650.000,00	Rp350.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp650.000,00	Rp350.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp650.000,00	Rp350.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp650.000,00	Rp350.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp650.000,00	Rp350.000,00
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp945.000,00	Rp0,00	Rp945.000,00	Rp945.000,00	Rp55.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp945.000,00	Rp0,00	Rp945.000,00	Rp945.000,00	Rp55.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp945.000,00	Rp0,00	Rp945.000,00	Rp945.000,00	Rp55.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp945.000,00	Rp0,00	Rp945.000,00	Rp945.000,00	Rp55.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp945.000,00	Rp0,00	Rp945.000,00	Rp945.000,00	Rp55.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp945.000,00	Rp0,00	Rp945.000,00	Rp945.000,00	Rp55.000,00
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.980.000,00	Rp1.980.000,00	Rp1.980.000,00	Rp20.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.980.000,00	Rp1.980.000,00	Rp1.980.000,00	Rp20.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.980.000,00	Rp1.980.000,00	Rp1.980.000,00	Rp20.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.980.000,00	Rp1.980.000,00	Rp1.980.000,00	Rp20.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.980.000,00	Rp1.980.000,00	Rp1.980.000,00	Rp20.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp5.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.995.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.980.000,00	Rp1.980.000,00	Rp1.980.000,00	Rp15.000,00
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp207.690.060,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp126.273.800,00	Rp24.454.760,00	Rp150.728.560,00	Rp17.252.627,00	Rp1.144.607,00	Rp18.397.234,00	Rp169.125.794,00	Rp38.564.266,00
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp830.000,00	Rp0,00	Rp830.000,00	Rp830.000,00	Rp170.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp830.000,00	Rp0,00	Rp830.000,00	Rp830.000,00	Rp170.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp830.000,00	Rp0,00	Rp830.000,00	Rp830.000,00	Rp170.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp830.000,00	Rp0,00	Rp830.000,00	Rp830.000,00	Rp170.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp830.000,00	Rp0,00	Rp830.000,00	Rp830.000,00	Rp170.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp996.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp830.000,00	Rp0,00	Rp830.000,00	Rp830.000,00	Rp166.000,00
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp48.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.042.627,00	Rp1.144.607,00	Rp14.187.234,00	Rp14.187.234,00	Rp34.312.766,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp48.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.042.627,00	Rp1.144.607,00	Rp14.187.234,00	Rp14.187.234,00	Rp34.312.766,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp48.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.042.627,00	Rp1.144.607,00	Rp14.187.234,00	Rp14.187.234,00	Rp34.312.766,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp48.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.042.627,00	Rp1.144.607,00	Rp14.187.234,00	Rp14.187.234,00	Rp34.312.766,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp48.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.042.627,00	Rp1.144.607,00	Rp14.187.234,00	Rp14.187.234,00	Rp34.312.766,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.034.227,00	Rp463.207,00	Rp5.497.434,00	Rp5.497.434,00	Rp2.502.566,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp933.900,00	Rp84.900,00	Rp1.018.800,00	Rp1.018.800,00	Rp1.481.200,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp38.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.074.500,00	Rp596.500,00	Rp7.671.000,00	Rp7.671.000,00	Rp30.329.000,00
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp158.190.060,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp126.273.800,00	Rp24.454.760,00	Rp150.728.560,00	Rp3.380.000,00	Rp0,00	Rp3.380.000,00	Rp154.108.560,00	Rp4.081.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp158.190.060,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp126.273.800,00	Rp24.454.760,00	Rp150.728.560,00	Rp3.380.000,00	Rp0,00	Rp3.380.000,00	Rp154.108.560,00	Rp4.081.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp158.190.060,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp126.273.800,00	Rp24.454.760,00	Rp150.728.560,00	Rp3.380.000,00	Rp0,00	Rp3.380.000,00	Rp154.108.560,00	Rp4.081.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp7.461.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.380.000,00	Rp0,00	Rp3.380.000,00	Rp3.380.000,00	Rp4.081.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp7.461.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.380.000,00	Rp0,00	Rp3.380.000,00	Rp3.380.000,00	Rp4.081.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp2.976.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp1.400.000,00	Rp1.576.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp580.000,00	Rp0,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00	Rp2.120.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp1.785.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp1.400.000,00	Rp385.100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp150.728.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp126.273.800,00	Rp24.454.760,00	Rp150.728.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.728.560,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp139.056.256,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.546.880,00	Rp22.509.376,00	Rp139.056.256,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.056.256,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp34.764.064,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.136.720,00	Rp5.627.344,00	Rp34.764.064,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.764.064,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp104.292.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.410.160,00	Rp16.882.032,00	Rp104.292.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.292.192,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp11.672.304,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.726.920,00	Rp1.945.384,00	Rp11.672.304,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.672.304,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp5.945.904,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.954.920,00	Rp990.984,00	Rp5.945.904,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.945.904,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp324.144,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp270.120,00	Rp54.024,00	Rp324.144,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp324.144,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp405.168,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp337.640,00	Rp67.528,00	Rp405.168,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp405.168,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp4.997.088,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.164.240,00	Rp832.848,00	Rp4.997.088,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.997.088,00	Rp0,00
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp175.568.220,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.019.350,00	Rp18.341.070,00	Rp159.360.420,00	Rp8.433.300,00	Rp0,00	Rp8.433.300,00	Rp167.793.720,00	Rp7.774.500,00
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp94.007.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.882.450,00	Rp6.113.690,00	Rp83.996.140,00	Rp3.351.300,00	Rp0,00	Rp3.351.300,00	Rp87.347.440,00	Rp6.659.700,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp94.007.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.882.450,00	Rp6.113.690,00	Rp83.996.140,00	Rp3.351.300,00	Rp0,00	Rp3.351.300,00	Rp87.347.440,00	Rp6.659.700,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp94.007.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.882.450,00	Rp6.113.690,00	Rp83.996.140,00	Rp3.351.300,00	Rp0,00	Rp3.351.300,00	Rp87.347.440,00	Rp6.659.700,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp35.925.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.614.000,00	Rp0,00	Rp31.614.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.614.000,00	Rp4.311.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp35.925.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.614.000,00	Rp0,00	Rp31.614.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.614.000,00	Rp4.311.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp35.925.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.614.000,00	Rp0,00	Rp31.614.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.614.000,00	Rp4.311.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp40.082.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.568.450,00	Rp6.113.690,00	Rp37.682.140,00	Rp1.154.300,00	Rp0,00	Rp1.154.300,00	Rp38.836.440,00	Rp1.245.700,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp37.164.064,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.136.720,00	Rp5.627.344,00	Rp34.764.064,00	Rp1.154.300,00	Rp0,00	Rp1.154.300,00	Rp35.918.364,00	Rp1.245.700,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp34.764.064,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.136.720,00	Rp5.627.344,00	Rp34.764.064,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.764.064,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.154.300,00	Rp0,00	Rp1.154.300,00	Rp1.154.300,00	Rp1.245.700,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp2.918.076,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.431.730,00	Rp486.346,00	Rp2.918.076,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.918.076,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp1.486.476,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.238.730,00	Rp247.746,00	Rp1.486.476,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.486.476,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp81.036,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.530,00	Rp13.506,00	Rp81.036,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.036,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp101.292,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.410,00	Rp16.882,00	Rp101.292,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.292,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp1.249.272,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.041.060,00	Rp208.212,00	Rp1.249.272,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.249.272,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.700.000,00	Rp0,00	Rp14.700.000,00	Rp2.197.000,00	Rp0,00	Rp2.197.000,00	Rp16.897.000,00	Rp1.103.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.700.000,00	Rp0,00	Rp14.700.000,00	Rp2.197.000,00	Rp0,00	Rp2.197.000,00	Rp16.897.000,00	Rp1.103.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.700.000,00	Rp0,00	Rp14.700.000,00	Rp2.197.000,00	Rp0,00	Rp2.197.000,00	Rp16.897.000,00	Rp1.103.000,00
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp1.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp1.850.000,00	Rp140.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp1.850.000,00	Rp140.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp1.850.000,00	Rp140.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp1.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp1.850.000,00	Rp140.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp1.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp1.850.000,00	Rp140.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp110.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp1.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp1.350.000,00	Rp30.000,00
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp79.571.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.136.900,00	Rp12.227.380,00	Rp75.364.280,00	Rp3.232.000,00	Rp0,00	Rp3.232.000,00	Rp78.596.280,00	Rp974.800,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp79.571.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.136.900,00	Rp12.227.380,00	Rp75.364.280,00	Rp3.232.000,00	Rp0,00	Rp3.232.000,00	Rp78.596.280,00	Rp974.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp79.571.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.136.900,00	Rp12.227.380,00	Rp75.364.280,00	Rp3.232.000,00	Rp0,00	Rp3.232.000,00	Rp78.596.280,00	Rp974.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.206.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.232.000,00	Rp0,00	Rp3.232.000,00	Rp3.232.000,00	Rp974.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.206.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.232.000,00	Rp0,00	Rp3.232.000,00	Rp3.232.000,00	Rp974.800,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp4.206.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.232.000,00	Rp0,00	Rp3.232.000,00	Rp3.232.000,00	Rp974.800,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp75.364.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.136.900,00	Rp12.227.380,00	Rp75.364.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.364.280,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp69.528.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.273.440,00	Rp11.254.688,00	Rp69.528.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.528.128,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp69.528.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.273.440,00	Rp11.254.688,00	Rp69.528.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.528.128,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp5.836.152,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.863.460,00	Rp972.692,00	Rp5.836.152,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.836.152,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.972.952,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.477.460,00	Rp495.492,00	Rp2.972.952,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.972.952,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp162.072,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.060,00	Rp27.012,00	Rp162.072,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp162.072,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp202.584,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.820,00	Rp33.764,00	Rp202.584,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.584,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp2.498.544,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.082.120,00	Rp416.424,00	Rp2.498.544,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.498.544,00	Rp0,00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp8.009.040.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.906.206.462,00	Rp739.097.380,00	Rp7.645.303.842,00	Rp29.650.000,00	Rp13.770.750,00	Rp43.420.750,00	Rp7.688.724.592,00	Rp320.315.688,00
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp8.009.040.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.906.206.462,00	Rp739.097.380,00	Rp7.645.303.842,00	Rp29.650.000,00	Rp13.770.750,00	Rp43.420.750,00	Rp7.688.724.592,00	Rp320.315.688,00
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp8.009.040.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.906.206.462,00	Rp739.097.380,00	Rp7.645.303.842,00	Rp29.650.000,00	Rp13.770.750,00	Rp43.420.750,00	Rp7.688.724.592,00	Rp320.315.688,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp8.009.040.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.906.206.462,00	Rp739.097.380,00	Rp7.645.303.842,00	Rp29.650.000,00	Rp13.770.750,00	Rp43.420.750,00	Rp7.688.724.592,00	Rp320.315.688,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.009.040.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.906.206.462,00	Rp739.097.380,00	Rp7.645.303.842,00	Rp29.650.000,00	Rp13.770.750,00	Rp43.420.750,00	Rp7.688.724.592,00	Rp320.315.688,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.192.089.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.989.685.562,00	Rp92.446.000,00	Rp2.082.131.562,00	Rp6.210.000,00	Rp330.750,00	Rp6.540.750,00	Rp2.088.672.312,00	Rp103.417.188,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.192.089.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.989.685.562,00	Rp92.446.000,00	Rp2.082.131.562,00	Rp6.210.000,00	Rp330.750,00	Rp6.540.750,00	Rp2.088.672.312,00	Rp103.417.188,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp30.135.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.518.800,00	Rp0,00	Rp26.518.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.518.800,00	Rp3.616.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp30.354.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.596.100,00	Rp0,00	Rp27.596.100,00	Rp0,00	Rp330.750,00	Rp330.750,00	Rp27.926.850,00	Rp2.427.450,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp19.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.000.000,00	Rp0,00	Rp16.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.000.000,00	Rp3.800.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp27.697.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.678.000,00	Rp0,00	Rp15.678.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.678.000,00	Rp12.019.800,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp4.812.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.010.000,00	Rp0,00	Rp4.010.000,00	Rp4.010.000,00	Rp802.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp21.190.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.000.000,00	Rp0,00	Rp19.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.000.000,00	Rp2.190.400,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp1.253.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.165.762.662,00	Rp19.006.000,00	Rp1.184.768.662,00	Rp2.200.000,00	Rp0,00	Rp2.200.000,00	Rp1.186.968.662,00	Rp66.931.338,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.050.000,00	Rp0,00	Rp4.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.050.000,00	Rp9.450.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	Rp770.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp695.160.000,00	Rp73.440.000,00	Rp768.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp768.600.000,00	Rp2.100.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.920.000,00	Rp0,00	Rp19.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.920.000,00	Rp80.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp5.019.130.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.244.620.900,00	Rp583.051.380,00	Rp4.827.672.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.827.672.280,00	Rp191.458.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp3.670.128.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.083.473.440,00	Rp446.654.688,00	Rp3.530.128.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.530.128.128,00	Rp140.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp1.200.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.159.200.000,00	Rp41.400.000,00	Rp1.200.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp156.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp161.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.000.000,00	Rp139.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp69.528.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.273.440,00	Rp11.254.688,00	Rp69.528.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.528.128,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp2.058.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.688.000.000,00	Rp370.000.000,00	Rp2.058.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.058.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp42.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.000.000,00	Rp19.000.000,00	Rp41.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.000.000,00	Rp1.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp71.980.152,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.447.460,00	Rp11.996.692,00	Rp55.444.152,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.444.152,00	Rp16.536.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.972.952,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.477.460,00	Rp495.492,00	Rp2.972.952,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.972.952,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp3.906.072,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.319.060,00	Rp651.012,00	Rp2.970.072,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.970.072,00	Rp936.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp4.882.584,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.898.820,00	Rp813.764,00	Rp3.712.584,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.712.584,00	Rp1.170.000,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp60.218.544,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.752.120,00	Rp10.036.424,00	Rp45.788.544,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.788.544,00	Rp14.430.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp45.022.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.400.000,00	Rp3.600.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp22.500,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp45.022.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.400.000,00	Rp3.600.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp22.500,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp1.232.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.076.300.000,00	Rp120.800.000,00	Rp1.197.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.197.100.000,00	Rp34.900.000,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rp1.232.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.076.300.000,00	Rp120.800.000,00	Rp1.197.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.197.100.000,00	Rp34.900.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp797.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp671.900.000,00	Rp63.600.000,00	Rp735.500.000,00	Rp23.440.000,00	Rp13.440.000,00	Rp36.880.000,00	Rp772.380.000,00	Rp25.440.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp797.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp671.900.000,00	Rp63.600.000,00	Rp735.500.000,00	Rp23.440.000,00	Rp13.440.000,00	Rp36.880.000,00	Rp772.380.000,00	Rp25.440.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp57.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.440.000,00	Rp13.440.000,00	Rp36.880.000,00	Rp36.880.000,00	Rp20.140.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp740.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp671.900.000,00	Rp63.600.000,00	Rp735.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp735.500.000,00	Rp5.300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
JUMLAH		Rp26.251.229.311,00	Rp10.041.423.488,00	Rp759.986.420,00	Rp10.801.409.908,00	Rp9.836.011.782,00	Rp2.473.482.640,75	Rp12.309.494.422,75	Rp560.960.144,00	Rp119.394.387,00	Rp680.354.531,00	Rp23.791.258.861,75	Rp2.459.970.449,25
Penerimaan :													
- SP2D:													
UP			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00	Rp0,00
GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp446.897.362,00	Rp114.062.782,00	Rp560.960.144,00	Rp560.960.144,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp10.487.676.503,00	Rp759.986.420,00	Rp11.247.662.923,00	Rp9.836.011.782,00	Rp2.473.482.640,75	Rp12.309.494.422,75	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.557.157.345,75	Rp0,00
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp111.775.655,00	Rp8.032.058,00	Rp119.807.713,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp119.807.713,00	Rp0,00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp149.075,00	Rp0,00	Rp149.075,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.075,00	Rp0,00
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp245.966.977,00	Rp33.667.134,00	Rp279.634.111,00	Rp83.738.148,00	Rp16.598.982,00	Rp100.337.130,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp379.971.241,00	Rp0,00
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp6.078.679,00	Rp537.664,00	Rp6.616.343,00	Rp6.749.028,00	Rp1.528.902,00	Rp8.277.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.894.273,00	Rp0,00
10. Iuran Jaminan Kematian			Rp18.236.152,00	Rp1.612.989,00	Rp19.849.141,00	Rp8.436.116,00	Rp1.911.094,00	Rp10.347.210,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.196.351,00	Rp0,00
11. Iuran Wajib Pegawai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp30.979.028,00	Rp2.739.200,00	Rp33.718.228,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.718.228,00	Rp0,00
13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15. Taperum			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16. Taspen			Rp109.068.127,00	Rp11.161.600,00	Rp120.229.727,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.229.727,00	Rp0,00
17. Askes			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
18. Lainnya			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
19. Sewa Rumah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20. Beras (BULOG)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21. Zakat			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Potongan			Rp522.253.693,00	Rp57.750.645,00	Rp580.004.338,00	Rp98.923.292,00	Rp20.038.978,00	Rp118.962.270,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.073.783.930,50	Rp0,00
- Pajak:													
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.767.216,00	Rp110.023.783,00	Rp257.790.999,00	Rp5.093.528,50	Rp0,00	Rp5.093.528,50	Rp262.884.527,50	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.172.593,00	Rp8.168.629,00	Rp14.341.222,00	Rp760.792,00	Rp0,00	Rp760.792,00	Rp15.102.014,00	Rp0,00
3. PPH 21			Rp560.251.209,00	Rp38.353.232,00	Rp598.604.441,00	Rp143.808.500,00	Rp8.813.000,00	Rp152.621.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp751.225.941,00	Rp0,00
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.792.088,00	Rp12.485.068,00	Rp58.277.156,00	Rp855.872,00	Rp94.200,00	Rp950.072,00	Rp59.227.228,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.944.323,00	Rp3.944.323,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.944.323,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			Rp560.251.209,00	Rp38.353.232,00	Rp598.604.441,00	Rp343.540.397,00	Rp143.434.803,00	Rp486.975.200,00	Rp6.710.192,50	Rp94.200,00	Rp6.804.392,50	Rp1.092.384.033,50	Rp0,00
JUMLAH PENERIMAAN SP2D BRUTO			Rp10.487.676.503,00	Rp759.986.420,00	Rp11.247.662.923,00	Rp9.836.011.782,00	Rp2.473.482.640,75	Rp12.309.494.422,75	Rp566.897.362,00	Rp114.062.782,00	Rp680.960.144,00	Rp24.238.117.489,75	Rp0,00
- Pengeluaran:													
- SPJ:													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp560.960.144,00	Rp119.394.387,00	Rp680.354.531,00	Rp680.354.531,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp10.487.676.503,00	Rp759.986.420,00	Rp11.247.662.923,00	Rp9.836.011.782,00	Rp2.473.482.640,75	Rp12.309.494.422,75	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.557.157.345,75	Rp0,00
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp111.775.655,00	Rp8.032.058,00	Rp119.807.713,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp119.807.713,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp149.075,00	Rp0,00	Rp149.075,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.075,00	Rp0,00
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp245.966.977,00	Rp33.667.134,00	Rp279.634.111,00	Rp83.738.148,00	Rp16.598.982,00	Rp100.337.130,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp379.971.241,00	Rp0,00
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp6.078.679,00	Rp537.664,00	Rp6.616.343,00	Rp6.749.028,00	Rp1.528.902,00	Rp8.277.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.894.273,00	Rp0,00
10. Iuran Jaminan Kematian			Rp18.236.152,00	Rp1.612.989,00	Rp19.849.141,00	Rp8.436.116,00	Rp1.911.094,00	Rp10.347.210,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.196.351,00	Rp0,00
11. Iuran Wajib Pegawai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp30.979.028,00	Rp2.739.200,00	Rp33.718.228,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.718.228,00	Rp0,00
13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15. Taperum			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16. Taspen			Rp109.068.127,00	Rp11.161.600,00	Rp120.229.727,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.229.727,00	Rp0,00
17. Askes			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
18. Lainnya			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
19. Sewa Rumah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20. Beras (BULOG)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21. Zakat			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Potongan			Rp522.253.693,00	Rp57.750.645,00	Rp580.004.338,00	Rp98.923.292,00	Rp20.038.978,00	Rp118.962.270,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.073.783.930,50	Rp0,00
- Pajak:													
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.767.216,00	Rp110.023.783,00	Rp257.790.999,00	Rp5.093.528,50	Rp0,00	Rp5.093.528,50	Rp262.884.527,50	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.172.593,00	Rp8.168.629,00	Rp14.341.222,00	Rp760.792,00	Rp0,00	Rp760.792,00	Rp15.102.014,00	Rp0,00
3. PPH 21			Rp560.251.209,00	Rp38.353.232,00	Rp598.604.441,00	Rp143.808.500,00	Rp8.813.000,00	Rp152.621.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp751.225.941,00	Rp0,00
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.792.088,00	Rp12.485.068,00	Rp58.277.156,00	Rp855.872,00	Rp94.200,00	Rp950.072,00	Rp59.227.228,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.944.323,00	Rp3.944.323,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.944.323,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			Rp560.251.209,00	Rp38.353.232,00	Rp598.604.441,00	Rp343.540.397,00	Rp143.434.803,00	Rp486.975.200,00	Rp6.710.192,50	Rp94.200,00	Rp6.804.392,50	Rp1.092.384.033,50	Rp0,00
- SPJ (Netto):													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp554.249.951,50	Rp119.300.187,00	Rp673.550.138,50	Rp673.550.138,50	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp9.405.171.601,00	Rp663.882.543,00	Rp10.069.054.144,00	Rp9.289.502.437,00	Rp2.286.438.655,75	Rp11.575.941.092,75	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.644.995.236,75	Rp0,00
Pengembalian ke Kasda (STS)			Rp446.253.015,00	Rp0,00	Rp446.253.015,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp446.253.015,00	Rp0,00
JUMLAH PENGELUARAN			Rp10.487.676.503,00	Rp759.986.420,00	Rp11.247.662.923,00	Rp9.836.011.782,00	Rp2.473.482.640,75	Rp12.309.494.422,75	Rp560.960.144,00	Rp119.394.387,00	Rp680.354.531,00	Rp24.237.511.876,75	Rp0,00
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.937.218,00	-Rp5.331.605,00	Rp605.613,00	Rp605.613,00	Rp0,00

Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN

Disiapkan oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

Dr. I Wayan Ekadina, S.E., M.Si.
NIP: 197012111998031005

FRIDOLIN RAJA SAMUEL MANURUNG, A.Md.Ak
NIP: 199908022021021001

Berita Acara Rekonsiliasi
Nomor : B.17.900/35 /SET/DISKOP.UKM

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Keuangan antara Petugas Akuntansi OPD dengan Petugas Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

Petugas Akuntansi OPD menyampaikan bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Surat Pertanggung Jawaban Fungsional Pengeluaran Bulan Desemberr Tahun 2024
2. Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desemberr Tahun 2024
3. Laporan Penutupan Kas tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2024
4. Rekening Koran tanggal 8 Bulan Januari Tahun 2024

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama yang hasilnya dituangkan kedalam *Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)* ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

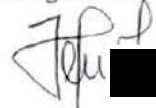
Laporan Hasil Rekonsiliasi ini, akan dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan OPD.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Petugas Akuntansi dan Pelaporan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Bali


Kadek Rosita Dewi, SE
NIP. [REDACTED]

Urusan Akuntansi
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Bali,


Ni Nyoman Teniari,SH
NIP. [REDACTED]

Mengetahui / Mengesahkan

Kepala Sub Bidang Akuntansi dan
Pelaporan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Bali,


I Putu Sudano,S.E.,M.A.P
Penata Tk. I
NIP. [REDACTED]

Pejabat Penatausahaan Keuangan
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Bali,


Ni Luh Made Mawar,S.Sos.,M.A.P
Pembina
NIP. [REDACTED]

BERITA ACARA REKONSILIASI
Nomor : B.17.900/ 27 /SET/DISKOP.UKM

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

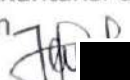
Nama : Fridolin Raja Samuel Manurung,A.Md.Ak
NIP : 19990802 202102 1 001
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama** ;
Nama : Ni Nyoman Teniari,SH
NIP : 19760403 200701 2 015
Jabatan : Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua** ;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan telah melakukan rekonsiliasi terhadap belanja dengan mencocokkan Realisasi Belanja yang disusun oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan bukti-bukti dengan Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berdasarkan SIPD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali untuk periode 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 dengan hasil sebagai berikut :

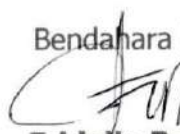
Hasil Rekonsiliasi Belanja					
No	Kode Rekening	Uraian	Menurut Bendahara Pengeluaran	Menurut Urusan Akuntansi	Keterangan
	5	BELANJA DAERAH	23.791.258.861,75	23.791.258.861,75	
	5.1	Belanja Operasi	23.137.155.320,06	23.137.155.320,06	
	5.1.01	Belanja Pegawai	10.801.409.908,00	10.801.409.908,00	
	5.1.02	Belanja Barang Jasa	12.310.745.412,06	12.310.745.412,06	
	5.1.04	Belanja Subsidi	25.000.000,00	25.000.000,00	
	5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	
	5.2.	Belanja Modal	654.103.541,69	654.103.541,69	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

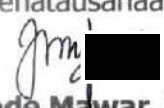
Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan


Ni Nyoman Teniari,SH
NIP.1' [REDACTED]

Bendahara Pengeluaran,


Fridolin Raja Samuel Manurung,A.Md.Ak
Nip. [REDACTED]

Mengetahui,
Pejabat Penatausahaan Keuangan


Ni Luh Made Mawar, S.Sos.,M.AP
Pembina
NIP [REDACTED]

PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN HASIL REKONSILIASI PETUGAS AKUNTANSI DENGAN BENDAHARA PENGELUARAN
DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No. urut	Kode Rekening	Nama Rekening	Akuntansi	Bendahara Pengeluaran		Keterangan
				5	6	
		Kas Bendahara	-	-		Sesuai
	5	BELANJA DAERAH	23.791.258.861,75	23.791.258.861,75		Sesuai
	5.1	BELANJA OPERASIONAL	23.137.155.320,06	23.137.155.320,06		Sesuai
	5.1.01	Belanja Pegawai	10.801.409.908,00	10.801.409.908,00		Sesuai
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.310.745.412,06	12.310.745.412,06		Sesuai
	5.1.04	Belanja Subsidi	25.000.000,00	25.000.000,00		Sesuai
	5.1.05	Belanja Hibah	0	-		Sesuai
	5.2	Belanja Modal	654.103.541,69	654.103.541,69		Sesuai
		Jumlah :	23.791.258.861,75	23.791.258.861,75		Sesuai

Denpasar, 06 Januari 2025
Petugas Akuntansi
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Bali



Ni Nyoman Teniari, SH

Bendahara Pengeluaran
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Bali



Fridolin Raja Samuel Manurung, A.Md.Ak.

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN PENUTUPAN KAS
BULAN DESEMBER

Laporan penutupan kas bulanan yang terdapat di SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sejumlah 0,00, dengan rincian sebagai berikut:

A Kas di Bendahara Pengeluaran			
A.1	Saldo awal bulan Desember	:	Rp 5.937.218,00
A.2	Jumlah Penerimaan	:	Rp 114.062.782,00
A.3	Jumlah Pengeluaran	:	Rp 120.000.000,00
A.4	Saldo akhir bulan Desember	:	Rp 0,00

Saldo akhir bulan Desember terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 0,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 0,00

B Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu			
B.1	Saldo awal bulan Desember	:	Rp 0,00
B.2	Jumlah Penerimaan	:	Rp 0,00
B.3	Jumlah Pengeluaran	:	Rp 0,00
B.4	Saldo akhir bulan Desember	:	Rp 0,00

Saldo akhir bulan Desember terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 0,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 0,00

C Rekapitulasi Posisi Saldo di Bendahara SKPD			
C.1	Saldo di Bendahara Pengeluaran	:	Rp 0,00
C.2	Saldo di Semua Bendahara Pengeluaran Pembantu	:	Rp 0,00
C.3	Saldo bank di Semua Bendahara (BKU-SKPD)	:	Rp 0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



FRIDOLIN RAJA SAMUEL MANURUNG, A.MD.AK

NIP. [REDACTED]



பெரந்தா ப்ரவின்சி பாலி
PEMERINTAH PROVINSI BALI

தொழில் நுட்ப, சிறு மற்றும் நடுத்தர
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
தொழில் நுட்ப, சிறு மற்றும் நடுத்தர - பாலி (பெரந்தா ப்ரவின்சி) / தொழில் நுட்ப
Jalan WR. Supratman No. 71 Denpasar - Bali (80236), Telepon (0361) 225091
Laman : www.diskopukm.baliprov.go.id, Pos-el : diskopukm@baliprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA
SEMESTER II

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : B.17.000.2.3.2/11/SET/DISKOP.UKM

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami telah melakukan rekonsiliasi penambahan/pengurangan Barang Milik Daerah Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Awal Januari 2024	Aset Semester II 2024	Akuntansi Semester II 2024	Selisih
I.	ASET TETAP				
1.	Tanah	4.553.815.000	4.553.815.000	4.553.815.000	
2.	Peralatan dan Mesin	5.311.961.475	5.850.583.975	5.850.583.975	
3.	Gedung dan Bangunan	8.697.575.714	8.697.575.714	8.697.575.714	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	149.181.650	264.662.691	264.662.691	
5.	Aset Tetap Lainnya	11.573.000	11.573.000	11.573.000	
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	179.168.660	79.812.260	79.812.260	
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	7.582.184.240	7.847.237.901	7.847.237.901	
	JUMLAH	11.321.091.259	11.610.784.740	11.610.784.740	
II.	ASET LAINNYA				
1.	Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	
2.	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	
3.	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	
4.	Aset lain-lain	0,00	0,00	0,00	
5.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain - lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	

I. ASET TETAP

ASET

AKUNTANSI

A. Aset Tetap Tanah

4.553.815.000,

4.553.815.000

Saldo Awal

4.553.815.000,

4.553.815.000,

Mutasi Tambah:

- Belanja Modal
- Kapitalisasi Belanja Non Modal
- Penerimaan Hibah
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah		
- Penghapusan		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	4.553.815.000	4.553.815.000

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- Mutasi Tambah:

a.

b.

- Mutasi Kurang:

a.

b.

B. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

	5.850.583.975	5.850.583.975
Saldo Awal	5.311.961.475	5.311.961.475
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	468.817.500	468.817.500
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	0,00
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	69.805.000	69.805.000
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	538.622.500	538.622.500
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Dibawah Kapitalisasi		
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	5.850.583.975	5.850.583.975

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- Mutasi Tambah:

a.

b.

- Mutasi Kurang:

a.

b.

C. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

	8.697.575.714	8.697.575.714
Saldo Awal	8.697.575.714	8.697.575.714
<i>Mutasi Tambah:</i>		

- Belanja Modal	0,00	0,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	0,00
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
- Dibawah Kapitalisasi	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	8.697.575.714	8.697.575.714

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**

a.

b.

- **Mutasi Kurang:**

a.

b.

D. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

	264.662.692	264.662.692
Saldo Awal	149.181.650	149.181.650
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	185.286.042	185.286.042
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	0,00
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	185.286.042	185.286.042
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	69.805.000	69.805.000
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Dibawah Kapitalisasi		
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	69.805.000	69.805.000
Saldo Akhir	264.662.692	264.662.692

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**

a.

b.

- **Mutasi Kurang:**

a.

b.

E. Aset Tetap Lainnya

	11.573.000	11.573.000
Saldo Awal	11.573.000	11.573.000
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	0,00	0,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	0,00
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	11.573.000	11.573.000

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**
 - a.
 - b.
- **Mutasi Kurang:**
 - a.
 - b.

F. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

	79.812.260	79.812.260
Saldo Awal	179.168.660	179.168.660
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	0,00	0,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal		
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	99.356.400	99.356.400
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	79.812.260	79.812.260

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**
 - a.
 - b.

- Mutasi Kurang:

- a. Terdapat penghapusan KDP berupa perencanaan bangunan gedung di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mengengah Provinsi Bali tidak dilanjutkan dengan SK Penghapusan No. B 31.000.2.4/6362/P.BMD/BPKAD Tanggal 3 Oktober 2024.

b.

G. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	7.847.237.901	7.847.237.901
Saldo Awal	7.582.184.240	7.582.184.240
Mutasi Tambah:		
- Beban Penyusutan	265.053.661	265.053.661
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal		
- Reklasifikasi dari Akumulasi Aset Lainnya	(0,00)	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(0,00)	(0,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(0,00)	(0,00)
Mutasi Kurang:		
- Akumulasi atas Aset Tetap yang Dihibahkan	(0,00)	(0,00)
- Akumulasi atas Aset Tetap yang Dihapuskan Langsung	(0,00)	(0,00)
- Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya	(0,00)	(0,00)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(0,00)	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(0,00)	(0,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(0,00)	(0,00)
Saldo Akhir	7.847.237.901	7.847.237.901

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- Mutasi Tambah:

a.

b.

- Mutasi Kurang:

a.

b.

II. Aset Lainnya

	0,00	0,00
A. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
B. Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
C. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
D. Aset Lain - Lain	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- Mutasi Tambah:

a.

b.

- Mutasi Kurang:

a.

b.

A. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Tanah	0,00	0,00
2. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Gedung dan Bangunan		
- Harga Perolehan	0,00	0,00
- Akm. Penyus. Aset Kemitraan Gedung dan	(0,00)	(0,00)

Bangunan

1. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Tanah:

Saldo Awal		0,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang		0,00
Saldo Akhir		0,00

2. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Gedung dan Bangunan

Saldo Awal		
- Gedung dan Bangunan		0,00
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(0,00)
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	
- Reklasifikasi dari Akm. Peny. Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan	(0,00)	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal		
✓ Gedung dan Bangunan	0,00	
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(0,00)	
Jumlah Mutasi Tambah		0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Penghapusan		
✓ Gedung dan Bangunan	0,00	
✓ Akm. Peny. Gedung dan Bangunan	(0,00)	
- Dibawah Kapitalisasi	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang		0,00
Saldo Akhir		0,00
- Harga Perolehan		0,00
- Akumulasi Penyusutan		(0,00)

B. Aset Tidak Berwujud

	0,00	0,00
Saldo Awal	0,00	0,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	0,00	0,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	0,00
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Aset Tetap	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Non Modal)	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00

Saldo Akhir	0,00	0,00

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- Mutasi Tambah:

a.

b.

- Mutasi Kurang:

a.

b.

C. Amortisasi Aset Tidak Berwujud

	(0,00)	(0,00)
Saldo Awal	(0,00)	(0,00)
Mutasi Tambah:		
- Beban Amortisasi	(0,00)	(0,00)
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari Perolehan Hibah	(0,00)	(0,00)
- Reklasifikasi dari Akumulasi Aset Tetap	(0,00)	(0,00)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(0,00)	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(0,00)	(0,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(0,00)	(0,00)
Mutasi Kurang:		
- Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud yang D hibah	(0,00)	(0,00)
- Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud yang Dihapuskan Langsung	(0,00)	(0,00)
- Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Tetap	(0,00)	(0,00)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(0,00)	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(0,00)	(0,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(0,00)	(0,00)
Saldo Akhir	(0,00)	(0,00)

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- Mutasi Tambah:

a.

b.

- Mutasi Kurang:

a.

b.

D. Aset Lain - Lain

	0,00	0,00
Aset Tetap Rusak Berat	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat	(0,00)	(0,00)
Aset Tetap yang akan D hibahkan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang akan D hibahkan	0,00	0,00
Persediaan yang akan D hibahkan	0,00	0,00
Aset Lain - Lain Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Rincian mutasi Aset Lain - Lain sebagai berikut:

1. Aset Tetap Rusak Berat:

Saldo Awal	0,00	0,00
- Peralatan dan Mesin Rusak Berat	0,00	0,00
- Gedung dan Bangunan Rusak Berat	0,00	0,00

- Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	0,00	0,00
Jumlah Saldo Awal	0,00	0,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Reklasifikasi dari:		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
✓ Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Penghapusan:		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
- Koreksi pencacatan Saldo Awal	0,00	0,00
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	0,00	0,00
- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
- Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
- Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut

- Mutasi Tambah:		
a.		
b.		
- Mutasi Kurang:		
a.		
b.		
2. Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat		
Saldo Awal		
- Akm. Peny. Peralatan dan Mesin Rusak Berat	(0,00)	(0,00)
- Akm. Peny. Gedung dan Bangunan Rusak Berat	(0,00)	(0,00)
Jumlah Saldo Awal	(0,00)	(0,00)
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Reklasifikasi dari:		
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset tetap Lainnya	(0,00)	(0,00)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal:		
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Lainnya	(0,00)	(0,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(0,00)	(0,00)
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Reklasifikasi ke:		
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
- Penghapusan:		
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal:		
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	(0,00)	(0,00)
- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(0,00)	(0,00)
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(0,00)	(0,00)
- Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(0,00)	(0,00)

- Aset Tetap Lainnya	(0,00)	(0,00)

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**

- a.

- b.

- **Mutasi Kurang:**

- a.

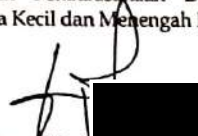
- b.

Pengurus Barang
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Bali



Sudarmin S.H.
NIP. [REDACTED] 54

Pejabat Penatausahaan Dinas Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.



Ida Bagus Made Shardita S.H.
NIP. [REDACTED]

Admin BMD



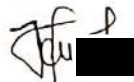
Muhammad Dasta A.M.Ak.
NIP. [REDACTED]

Kasubbid Perencanaan dan Penatausahaan
BMD



Luh Nvoman Widiatmikawati, SH., MH.
NIP. [REDACTED]

Urusan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Bali.



Ni Nvoman Teniari S.H.
NIP. [REDACTED]



Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Bali.

Dr. [REDACTED] S.
NIP. [REDACTED]

Admin Akuntansi



Kadek Rasta Dandi S.H.
NIP. [REDACTED]

Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan



I Putu Sudano, SE., MAP
NIP. [REDACTED]

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
REKENING KORAN ONLINE

Kepada Yth.
0100100018843
BEND PENG DINAS KOPERASI UKM PROV B

REKENING KORAN GIRO
Periode : 02-Dec-2024 s/d 31-Dec-2024

Di Cetak oleh :1156 - FRIDOLIN RAJA SAMUEL MANURUNG via Windows / Chrome-131.0.0.0 / 10.42.16.10 / 08-01-2025 08:07

Tgl	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi		Saldo Akhir	OP-ID	CTx
		Saldo Sebelumnya		5.937.218,00				
06/12/2024	299	51.00/04.0/000478/GU/2.17.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	O17673197	114.062.782,00	Kr	120.000.000,00	O1767	010
09/12/2024	458	TELKOM 0361237732	IBB8701980	31.857,00	Db	119.968.143,00	IBBIS	010
09/12/2024	458	F TELKOM 0361237732	IBB8701980	2.000,00	Db	119.966.143,00	IBBIS	010
09/12/2024	458	TELKOM 0361226548	IBB8701850	248.307,00	Db	119.717.836,00	IBBIS	010
09/12/2024	458	F TELKOM 0361226548	IBB8701850	2.000,00	Db	119.715.836,00	IBBIS	010
09/12/2024	458	TELKOM 0361225091	IBB8701910	37.407,00	Db	119.678.429,00	IBBIS	010
09/12/2024	458	F TELKOM 0361225091	IBB8701910	2.000,00	Db	119.676.429,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	DPS 050250005606	0008703932	131.000,00	Db	119.545.429,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	F DPS 050250005606	0008703932	2.000,00	Db	119.543.429,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	DPS 030800003008	0008703856	286.250,00	Db	119.257.179,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	F DPS 030800003008	0008703856	2.000,00	Db	119.255.179,00	IBBIS	010
09/12/2024	458	TELKOM 03614781528	IBB8702020	427.350,00	Db	118.827.829,00	IBBIS	010
09/12/2024	458	F TELKOM 03614781528	IBB8702020	2.000,00	Db	118.825.829,00	IBBIS	010
09/12/2024	458	TELKOM 0361729253	IBB8701878	341.880,00	Db	118.483.949,00	IBBIS	010
09/12/2024	458	F TELKOM 0361729253	IBB8701878	2.000,00	Db	118.481.949,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	R DPS 050250005606	0008703932	131.000,00	Kr	118.612.949,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	R F DPS 050250005606	0008703932	2.000,00	Kr	118.614.949,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	R DPS 030800003008	0008703856	286.250,00	Kr	118.901.199,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	R F DPS 030800003008	0008703856	2.000,00	Kr	118.903.199,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	DPS 050490018690	0008703785	1.071.175,00	Db	117.832.024,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	F DPS 050490018690	0008703785	2.000,00	Db	117.830.024,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	DPS 080260000152	0008704038	82.900,00	Db	117.747.124,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	F DPS 080260000152	0008704038	2.000,00	Db	117.745.124,00	IBBIS	010
09/12/2024	458	TELKOM 0361224557	IBB8701943	34.511,00	Db	117.710.613,00	IBBIS	010
09/12/2024	458	F TELKOM 0361224557	IBB8701943	2.000,00	Db	117.708.613,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	DPS 050220000148	0008703706	244.975,00	Db	117.463.638,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	F DPS 050220000148	0008703706	2.000,00	Db	117.461.638,00	IBBIS	010
09/12/2024	491	PLNPOS 551001732803	0008702427	4.942.233,00	Db	112.519.405,00	IBBIS	010
09/12/2024	491	F PLNPOS 551001732803	0008702427	2.500,00	Db	112.516.905,00	IBBIS	010
09/12/2024	491	PLNPOS 551003959410	0008702592	4.486.759,00	Db	108.030.146,00	IBBIS	010
09/12/2024	491	F PLNPOS 551003959410	0008702592	2.500,00	Db	108.027.646,00	IBBIS	010
09/12/2024	491	PLNPOS 551000688819	0008702732	2.267.173,00	Db	105.760.473,00	IBBIS	010
09/12/2024	491	F PLNPOS 551000688819	0008702732	2.500,00	Db	105.757.973,00	IBBIS	010
09/12/2024	491	PLNPOS 551004047598	0008702799	2.243.380,00	Db	103.514.593,00	IBBIS	010
09/12/2024	491	F PLNPOS 551004047598	0008702799	2.500,00	Db	103.512.093,00	IBBIS	010
09/12/2024	491	PLNPOS 551000583053	0008702875	419.541,00	Db	103.092.552,00	IBBIS	010

09/12/2024	491	F PLNPOS 551000583053	0008702875	2.500,00	Db	103.090.052,00	IBBIS	010
09/12/2024	491	PLNPOS 551000688429	0008703503	594.000,00	Db	102.496.052,00	IBBIS	010
09/12/2024	491	F PLNPOS 551000688429	0008703503	2.500,00	Db	102.493.552,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	DPS 050250005606	0008731466	131.000,00	Db	102.362.552,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	F DPS 050250005606	0008731466	2.000,00	Db	102.360.552,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	DPS 030800003008	0008731627	286.250,00	Db	102.074.302,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	F DPS 030800003008	0008731627	2.000,00	Db	102.072.302,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	R DPS 050250005606	0008731466	131.000,00	Kr	102.203.302,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	R F DPS 050250005606	0008731466	2.000,00	Kr	102.205.302,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	R DPS 030800003008	0008731627	286.250,00	Kr	102.491.552,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	R F DPS 030800003008	0008731627	2.000,00	Kr	102.493.552,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	DPS 030800003008	0008760649	286.250,00	Db	102.207.302,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	F DPS 030800003008	0008760649	2.000,00	Db	102.205.302,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100202399121 I KETUT RAUH VIA INTERNET BANKING	IBB8741725	1.100.000,00	Db	101.105.302,00	IBBIS	010
09/12/2024	471	MPN 029596786920022	IBB8761212	40.500,00	Db	101.064.802,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	R DPS 030800003008	0008760649	286.250,00	Kr	101.351.052,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	R F DPS 030800003008	0008760649	2.000,00	Kr	101.353.052,00	IBBIS	010
09/12/2024	471	MPN 029596793494117	IBB8760963	9.000,00	Db	101.344.052,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100202384084 NI KADEK NAPIANI VIA INTERNET BANKING	IBB8754056	475.000,00	Db	100.869.052,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	DPS 050250005606	0008760819	131.000,00	Db	100.738.052,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	F DPS 050250005606	0008760819	2.000,00	Db	100.736.052,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100202384084 NI KADEK NAPIANI VIA INTERNET BANKING	IBB8753561	330.750,00	Db	100.405.302,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100111025761 CV SARI YOGA VIA INTERNET BANKING	IBB8762000	1.984.500,00	Db	98.420.802,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	R DPS 050250005606	0008760819	131.000,00	Kr	98.551.802,00	IBBIS	010
09/12/2024	474	R F DPS 050250005606	0008760819	2.000,00	Kr	98.553.802,00	IBBIS	010
09/12/2024	471	MPN 029596790030004	IBB8761059	5.100,00	Db	98.548.702,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100111025761 CV SARI YOGA VIA INTERNET BANKING	IBB8761453	441.000,00	Db	98.107.702,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0370202088080 NI PUTU AYU OKA ARINI VIA INTERNET BANKING	IBB8741875	1.100.000,00	Db	97.007.702,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0450202307423 I WAYAN SIWI SUYASA VIA INTERNET BANKING	IBB8761626	249.900,00	Db	96.757.802,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215125906 NI KOMANG NINING PURWANTI VIA INTERNET BANKING	IBB8763157	960.000,00	Db	95.797.802,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215074811 I NYOMAN KARTIKA VIA INTERNET BANKING MONEV K	IBB8763164	480.000,00	Db	95.317.802,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215091076 I PUTU ANOM WIRAGUNA VIA INTERNET BANKING MC	IBB8763173	960.000,00	Db	94.357.802,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0110205345927 AGUS ARIANA PUTRA VIA INTERNET BANKING MONEV	IBB8763181	960.000,00	Db	93.397.802,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100205564893 I DEWA GEDE KAMAJAYA VIA INTERNET BANKING MC	IBB8763190	480.000,00	Db	92.917.802,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215116451 NI KADEK INDAH SANJIWANI DEWI VIA INTERNET BAN	IBB8763197	480.000,00	Db	92.437.802,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215117211 I WAYAN ASTA APRIADI VIA INTERNET BANKING JADIN	IBB8763318	5.214.280,00	Db	87.223.522,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100205078027 JEMI HERMANUS PIRI VIA INTERNET BANKING JADIN	IBB8763323	5.476.280,00	Db	81.747.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215061588 I GEDE SUKADANA VIA INTERNET BANKING MONEV R	IBB8763663	480.000,00	Db	81.267.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215125906 NI KOMANG NINING PURWANTI VIA INTERNET BANKIN	IBB8763671	480.000,00	Db	80.787.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215091076 I PUTU ANOM WIRAGUNA VIA INTERNET BANKING MC	IBB8763676	960.000,00	Db	79.827.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0110205345927 AGUS ARIANA PUTRA VIA INTERNET BANKING MONEV	IBB8763682	1.920.000,00	Db	77.907.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100205564893 I DEWA GEDE KAMAJAYA VIA INTERNET BANKING MC	IBB8763689	960.000,00	Db	76.947.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215116451 NI KADEK INDAH SANJIWANI DEWI VIA INTERNET BAN	IBB8763695	960.000,00	Db	75.987.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100205583203 I KADEK SUWANTARA VIA INTERNET BANKING 12-15,	IBB8763731	480.000,00	Db	75.507.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0110205345927 AGUS ARIANA PUTRA VIA INTERNET BANKING 12-15,	IBB8763739	480.000,00	Db	75.027.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0280202637568 NI MADE SUSIALIAWATI VIA INTERNET BANKING 12-15	IBB8763747	2.880.000,00	Db	72.147.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0370202089138 NI GUSTI AYU PUTU NITAYANTI VIA INTERNET BANKIN	IBB8763753	3.360.000,00	Db	68.787.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215091076 I PUTU ANOM WIRAGUNA VIA INTERNET BANKING 12-	IBB8763757	960.000,00	Db	67.827.242,00	IBBIS	010

09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215061588 I GEDE SUKADANA VIA INTERNET BANKING 12-15, 19, 20, 21	IBB8763762	3.360.000,00	Db	64.467.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215072068 KETUT WIDIARI VIA INTERNET BANKING 12-15, 19, 20, 21	IBB8763770	1.440.000,00	Db	63.027.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100205556925 PUTU AYUDIAS PRAMIARI VIA INTERNET BANKING 12-15, 19, 20, 21	IBB8763773	2.400.000,00	Db	60.627.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100205038687 TRI ARYA DHYANA K VIA INTERNET BANKING 12-15, 19, 20, 21	IBB8763779	1.920.000,00	Db	58.707.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215077367 I GEDE ARYA WIRAWAN VIA INTERNET BANKING 2, 3, 7, 8	IBB8764003	1.920.000,00	Db	56.787.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215091064 I KADEK ADI SANTOSA VIA INTERNET BANKING 2, 3, 7, 8	IBB8764011	1.920.000,00	Db	54.867.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215091052 I DEWA GEDE EKA DHARMA YASA VIA INTERNET BANKING 2, 3, 7, 8	IBB8764030	1.920.000,00	Db	52.947.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0360205009020 NI KOMANG YUDHA ANGGUN CANDRA VIA INTERNET BANKING 2, 3, 7, 8	IBB8764043	1.920.000,00	Db	51.027.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215020806 NI MADE ARIATI VIA INTERNET BANKING 2, 3, 7, 8 OKT	IBB8764058	1.920.000,00	Db	49.107.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100205512228 NI WAYAN SUKARINI VIA INTERNET BANKING 2, 3, 7, 8	IBB8764063	1.920.000,00	Db	47.187.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215074365 I PUTU WIRA DIRGANTARA VIA INTERNET BANKING 2, 3, 7, 8	IBB8764069	1.920.000,00	Db	45.267.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100205605427 FRIDOLIN RAJA SAMUEL MANURUNG VIA INTERNET BANKING 2, 3, 7, 8	IBB8775350	480.000,00	Db	44.787.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215056703 I WAYAN DAMAI VIA INTERNET BANKING 4-7, 12 NOV	IBB8775355	480.000,00	Db	44.307.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215056014 IBRAHIM VIA INTERNET BANKING 4-7, 12 NOV	IBB8775359	480.000,00	Db	43.827.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215068184 LURDIANI PAGAPPONG VIA INTERNET BANKING 4-7, 12 NOV	IBB8775362	480.000,00	Db	43.347.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215116383 NYOMAN BAGUS PRASETIA VIA INTERNET BANKING 4-7, 12 NOV	IBB8775366	480.000,00	Db	42.867.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215062192 I WAYAN SURAJA VIA INTERNET BANKING 4-7, 12 NOV	IBB8775369	480.000,00	Db	42.387.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215058646 NI NYOMAN TENIARI VIA INTERNET BANKING 4-7, 12 NOV	IBB8775374	480.000,00	Db	41.907.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215055891 SUDARMIN VIA INTERNET BANKING 4-7, 12 NOV	IBB8775379	480.000,00	Db	41.427.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215056698 IDA AYU GEDE SURYATHI VIA INTERNET BANKING 4-7, 12 NOV	IBB8775383	480.000,00	Db	40.947.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215122215 I PUTU FAJAR SATYA NUGRAHADI VIA INTERNET BANKING 4-7, 12 NOV	IBB8775390	480.000,00	Db	40.467.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215055943 I PUTU TISTA NEGARA VIA INTERNET BANKING 4-7, 12 NOV	IBB8775398	480.000,00	Db	39.987.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215056739 IDA BAGUS MADE SUARDITA VIA INTERNET BANKING 4-7, 12 NOV	IBB8775403	480.000,00	Db	39.507.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215070072 I GEDE WIDNYANA VIA INTERNET BANKING 4-7, 12 NOV	IBB8775407	480.000,00	Db	39.027.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215072068 KETUT WIDIARI VIA INTERNET BANKING 4-7, 12 NOV	IBB8775412	480.000,00	Db	38.547.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100205099882 I KETUT MENIARTA VIA INTERNET BANKING 4-7, 12 NOV	IBB8775415	480.000,00	Db	38.067.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100205613540 NI PUTU SHANTY SEDANAPUTRI VIA INTERNET BANKING 4-7, 12 NOV	IBB8780448	480.000,00	Db	37.587.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100205585366 NI MADE WINDA ARIESTA NATASARI VIA INTERNET BANKING 4-7, 12 NOV	IBB8780451	480.000,00	Db	37.107.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100205099882 I KETUT MENIARTA VIA INTERNET BANKING 5-7 NOVE	IBB8780457	480.000,00	Db	36.627.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100205593601 I KETUT PARTHA CAHYADI VIA INTERNET BANKING 5-7 NOVE	IBB8780464	480.000,00	Db	36.147.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0110205300575 NI LUH NYOMAN AYU TIRTA WIRATN VIA INTERNET BANKING 5-7 NOVE	IBB8780468	480.000,00	Db	35.667.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100215069334 I GUSTI AYU NGURAH DARMAWATI VIA INTERNET BANKING 5-7 NOVE	IBB8780471	480.000,00	Db	35.187.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0540202335756 I GUSTI AGUNG ANGGA NURYANA VIA INTERNET BANKING 5-7 NOVE	IBB8780474	480.000,00	Db	34.707.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100205555919 IDA BAGUS MADE PUJA SANJAYA VIA INTERNET BANKING 5-7 NOVE	IBB8780478	480.000,00	Db	34.227.242,00	IBBIS	010
09/12/2024	410	TRF KE 129 0100205038785 I MADE SUNARTA VIA INTERNET BANKING 5-7 NOVE	IBB8780481	480.000,00	Db	33.747.242,00	IBBIS	010
10/12/2024	410	TRF KE 129 0370202113824 IDA AYU MADE ARDI NINGSIH VIA INTERNET BANKING 5,5,6,6,9,9	IBB8811890	625.000,00	Db	33.122.242,00	IBBIS	010
10/12/2024	474	DPS 030800003008	0008811404	286.250,00	Db	32.835.992,00	IBBIS	010
10/12/2024	474	F DPS 030800003008	0008811404	2.000,00	Db	32.833.992,00	IBBIS	010
10/12/2024	474	DPS 050250005606	0008811484	131.000,00	Db	32.702.992,00	IBBIS	010
10/12/2024	474	F DPS 050250005606	0008811484	2.000,00	Db	32.700.992,00	IBBIS	010
12/12/2024	410	TRF KE 129 0100215074811 I NYOMAN KARTIKA VIA INTERNET BANKING 6 NOVEN	IBB9023151	480.000,00	Db	32.220.992,00	IBBIS	010
12/12/2024	410	TRF KE 129 0100215122215 I PUTU FAJAR SATYA NUGRAHADI VIA INTERNET BANKING 6 NOVEN	IBB9023159	480.000,00	Db	31.740.992,00	IBBIS	010
12/12/2024	410	TRF KE 129 0100215058646 NI NYOMAN TENIARI VIA INTERNET BANKING 6 NOVEN	IBB9023167	480.000,00	Db	31.260.992,00	IBBIS	010
12/12/2024	410	TRF KE 129 0100215074811 I NYOMAN KARTIKA VIA INTERNET BANKING 5,5,6,6,9,9	IBB9023235	480.000,00	Db	30.780.992,00	IBBIS	010
12/12/2024	410	TRF KE 129 0100205605427 FRIDOLIN RAJA SAMUEL MANURUNG VIA INTERNET BANKING 5,5,6,6,9,9	IBB9023243	480.000,00	Db	30.300.992,00	IBBIS	010
12/12/2024	410	TRF KE 129 0100215056703 I WAYAN DAMAI VIA INTERNET BANKING 5,5,6,6,9,9	IBB9023249	480.000,00	Db	29.820.992,00	IBBIS	010
12/12/2024	410	TRF KE 129 0110205300214 NYOMAN SUMA DHYANI PUTRI VIA INTERNET BANKING 5,5,6,6,9,9	IBB9023256	960.000,00	Db	28.860.992,00	IBBIS	010
12/12/2024	410	TRF KE 129 0100215070072 I GEDE WIDNYANA VIA INTERNET BANKING 5,5,6,6,9,9	IBB9023262	960.000,00	Db	27.900.992,00	IBBIS	010

12/12/2024	410	TRF KE 129 0100215122215 I PUTU FAJAR SATYA NUGRAHADI VIA INTERNET BAN	IBB9023269	1.440.000,00	Db	26.460.992,00	IBBIS	010
12/12/2024	410	TRF KE 129 0100215058646 NI NYOMAN TENIARI VIA INTERNET BANKING 5,5,6,6,9	IBB9023276	960.000,00	Db	25.500.992,00	IBBIS	010
12/12/2024	410	TRF KE 129 0100215116451 NI KADEK INDAH SANJIWANI DEWI VIA INTERNET BAN	IBB9023280	1.440.000,00	Db	24.060.992,00	IBBIS	010
12/12/2024	410	TRF KE 129 0110205345927 AGUS ARIANA PUTRA VIA INTERNET BANKING 5,5,6,6,	IBB9023288	1.440.000,00	Db	22.620.992,00	IBBIS	010
12/12/2024	410	TRF KE 129 0100205564893 I DEWA GEDE KAMAJAYA VIA INTERNET BANKING 5,5	IBB9023292	1.440.000,00	Db	21.180.992,00	IBBIS	010
12/12/2024	410	TRF KE 129 0100215061588 I GEDE SUKADANA VIA INTERNET BANKING 5,5,6,6,9,9	IBB9023297	1.440.000,00	Db	19.740.992,00	IBBIS	010
12/12/2024	410	TRF KE 129 0100215061588 I GEDE SUKADANA VIA INTERNET BANKING 5,5,6,6,9,9	IBB9176737	39.600,00	Db	19.701.392,00	IBBIS	010
13/12/2024	471	MPN 029598466049015	IBB9176650	1.940.400,00	Db	17.760.992,00	IBBIS	010
13/12/2024	410	TRF KE 129 0100111025761 CV SARI YOGA VIA INTERNET BANKING	IBB9177265	4.577.639,00	Db	13.183.353,00	IBBIS	010
13/12/2024	410	TRF KE 129 0100205608704 NELLI WIGUNTARI VIA INTERNET BANKING 5-6 DES O	IBB9177275	4.897.740,00	Db	8.285.613,00	IBBIS	010
13/12/2024	410	TRF KE 129 0100205062114 NI WAYAN MULIANINGSIH VIA INTERNET BANKING 5-6	IBB9177401	960.000,00	Db	7.325.613,00	IBBIS	010
13/12/2024	410	TRF KE 129 0100205583203 I KADEK SUWANTARA VIA INTERNET BANKING 4, 5, 6,	IBB9177404	480.000,00	Db	6.845.613,00	IBBIS	010
13/12/2024	410	TRF KE 129 0100205592709 GUSTI AYU RATNA DEWI VIA INTERNET BANKING 4, 5,	IBB9177408	480.000,00	Db	6.365.613,00	IBBIS	010
13/12/2024	410	TRF KE 129 0100205605609 I GST AGUNG AGUS RAKANDIPUTRA VIA INTERNET B	IBB9177411	960.000,00	Db	5.405.613,00	IBBIS	010
13/12/2024	410	TRF KE 129 0280202637568 NI MADE SUSIALIAWATI VIA INTERNET BANKING 4, 5, 6	IBB9177416	480.000,00	Db	4.925.613,00	IBBIS	010
13/12/2024	410	TRF KE 129 0340202166510 ANAK AGUNG ISTRI TRI JAYANTI VIA INTERNET BANK	IBB9177421	480.000,00	Db	4.445.613,00	IBBIS	010
13/12/2024	410	TRF KE 129 0110205321074 I GUSTI MADE ARI PRAMANA VIA INTERNET BANKING	IBB9177425	960.000,00	Db	3.485.613,00	IBBIS	010
13/12/2024	410	TRF KE 129 0370202089138 NI GUSTI AYU PUTU NITAYANTI VIA INTERNET BANKIN	IBB9177429	960.000,00	Db	2.525.613,00	IBBIS	010
13/12/2024	410	TRF KE 129 0100215091076 I PUTU ANOM WIRAGUNA VIA INTERNET BANKING 4, 5	IBB9177437	480.000,00	Db	2.045.613,00	IBBIS	010
13/12/2024	410	TRF KE 129 0100215072068 KETUT WIDIARI VIA INTERNET BANKING 4, 5, 6, 6 DES	IBB9177441	960.000,00	Db	1.085.613,00	IBBIS	010
13/12/2024	410	TRF KE 129 0100205556925 PUTU AYUDIAS PRAMIARI VIA INTERNET BANKING 4, 5	IBB9177447	480.000,00	Db	605.613,00	IBBIS	010
13/12/2024	410	TRF KE 129 0100205038687 TRI ARYA DHYANA K VIA INTERNET BANKING 4, 5, 6, 6	IBB9420212	605.613,00	Db	0,00	IBBIS	010
17/12/2024	410	TRF KE 129 0100100000001 RKUD PROV BALI VIA INTERNET BANKING	JAGIR-2140	9.753,49	Kr	9.753,49	O1996	010
31/12/2024	299	JAGIR Dec, 2024	AFI-2140	9.753,49	Db	0,00	O1996	010
31/12/2024	199	JAGIR --> 010-0100000001						

Total Mutasi CR
Total Mutasi DB

115.336.285,49
121.273.503,49

Bilamana selama 14 hari setelah menerima rekening koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SURAT TANDA SETORAN (STS)
TAHUN ANGGARAN 2024

Unit SKPD : 2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Nomor STS : 51.00/06.0/000001/UP-NIHIL/2.17.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024
Harap diterima uang sebesar : Rp605.613,00
(Enam ratus lima ribu enam ratus tiga belas rupiah)

Mengetahui,
PENGUNA ANGGARAN


Dr. I Wayan Ekadina, S.E., M.Si.
NIP. [REDACTED]

BENDAHARA PENGELUARAN


FRIDOLIN RAJA SAMUEL MANURUNG, A.Md.Ak
NIP. [REDACTED]



Bukti Transfer ke Rekening BPD Bali

No Referensi	: IBB9420212
Tanggal / Jam	: 17-Dec-2024 / 09:26:43 WIB
No Rekening Sumber	: 0100100018843
No Rekening Tujuan	: 0100100000001
Nama Penerima	: RKUD PROV BALI
Jumlah yang ditransfer	: Rp 605,613
Berita	: -
Jenis Transfer	: Transfer Sekarang
Status	: Sukses

TERIMA KASIH
INTERNET BANKING BPD BALI. ALL RIGHT RESERVED.

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN PENUTUPAN KAS
BULAN DESEMBER

Laporan penutupan kas bulanan yang terdapat di SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sejumlah 0,00, dengan rincian sebagai berikut:

A Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1	Saldo awal bulan Desember	:	Rp 5.937.218,00
A.2	Jumlah Penerimaan	:	Rp 114.062.782,00
A.3	Jumlah Pengeluaran	:	Rp 120.000.000,00
A.4	Saldo akhir bulan Desember	:	Rp 0,00

Saldo akhir bulan Desember terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 0,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 0,00

B Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1	Saldo awal bulan Desember	:	Rp 0,00
B.2	Jumlah Penerimaan	:	Rp 0,00
B.3	Jumlah Pengeluaran	:	Rp 0,00
B.4	Saldo akhir bulan Desember	:	Rp 0,00

Saldo akhir bulan Desember terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 0,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 0,00

C Rekapitulasi Posisi Saldo di Bendahara SKPD

C.1	Saldo di Bendahara Pengeluaran	:	Rp 0,00
C.2	Saldo di Semua Bendahara Pengeluaran Pembantu	:	Rp 0,00
C.3	Saldo bank di Semua Bendahara (BKU-SKPD)	:	Rp 0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



FRIDOLIN RAJA SAMUEL MANURUNG, A.MD,AK

NIP. [REDACTED]

Bank BPD Bali
Internet Banking
10/01/2025 08:07:49 / 000001219001

PEMBAYARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA
N.P.W.P : 01.799.721.4.904.000
PPN DIBEBASKAN, PP NO.58 TH 2021

NO KARTU	: 6220240000090529664
NO SAMBUNGAN	: 050220000148
NO REK PDAM	: 20250163990
GOL/RAYON	: D6-4/05049
NAMA	: KTR KETAHANAN PANGAN PROV BALI
BULAN/TAHUN	: 01/2025
PEMAKAIAN(M3)	: 15
JML TAGIHAN	: Rp 174.075
DENDA	: Rp 0
ADMIN BANK	: Rp 2.000
TOTAL BAYAR	: Rp 176.075

TRANSAKSI BERHASIL

RESI INI
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

\$_{footer}

Bank BPD Bali
Internet Banking
10/01/2025 08:07:44 / 000001219048

PEMBAYARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA
N.P.W.P : 01.799.721.4.904.000
PPN DIBEBASKAN, PP NO.58 TH 2021

NO KARTU	:	6220240000090529664
NO SAMBUNGAN	:	050490018690
NO REK PDAM	:	20250163797
GOL/RAYON	:	D6-4/05049
NAMA	:	DINAS PETERNAKAN PROV BALI
BULAN/TAHUN	:	01/2025
PEMAKAIAN(M3)	:	56
JML TAGIHAN	:	Rp 670.225
DENDA	:	Rp 0
ADMIN BANK	:	Rp 2.000
TOTAL BAYAR	:	Rp 672.225

TRANSAKSI BERHASIL

RESI INI
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

\$_{footer}

Bank BPD Bali
Internet Banking
10/01/2025 08:07:50 / 000001219099

PEMBAYARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA
N.P.W.P : 01.799.721.4.904.000
PPN DIBEBASKAN, PP NO.58 TH 2021

NO KARTU	:	6220240000090529664
NO SAMBUNGAN	:	030800003008
NO REK PDAM	:	20250131860
GOL/RAYON	:	D6-4/03080
NAMA	:	DINAS KOPERASI UMKM BALI
BULAN/TAHUN	:	01/2025
PEMAKAIAN(M3)	:	24
JML TAGIHAN	:	Rp 249.800
DENDA	:	Rp 0
ADMIN BANK	:	Rp 2.000
TOTAL BAYAR	:	Rp 251.800

TRANSAKSI BERHASIL

RESI INI
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

\$_{footer}

Bank BPD Bali
Internet Banking
10/01/2025 08:07:51 / 000001219117

PEMBAYARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA
N.P.W.P : 01.799.721.4.904.000
PPN DIBEBASKAN, PP NO.58 TH 2021

NO KARTU	:	6220240000090529664
NO SAMBUNGAN	:	050250005606
NO REK PDAM	:	20250144027
GOL/RAYON	:	E3-3/05004
NAMA	:	DEKOPIN WILAYAH
BULAN/TAHUN	:	01/2025
PEMAKAIAN(M3)	:	1
JML TAGIHAN	:	Rp 131.000
DENDA	:	Rp 0
ADMIN BANK	:	Rp 2.000
TOTAL BAYAR	:	Rp 133.000

TRANSAKSI BERHASIL

RESI INI
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

\$_{footer}

Bank BPD Bali
Internet Banking
10/01/2025 08:07:51 / 000001219153

PEMBAYARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA
N.P.W.P : 01.799.721.4.904.000
PPN DIBEBASKAN, PP NO.58 TH 2021

NO KARTU	:	6220240000090529664
NO SAMBUNGAN	:	080260000152
NO REK PDAM	:	20250146192
GOL/RAYON	:	D6-3/08055
NAMA	:	KEP.KTR.KOPERASI PROP.BALI
BULAN/TAHUN	:	01/2025
PEMAKAIAN(M3)	:	0
JML TAGIHAN	:	Rp 82.900
DENDA	:	Rp 0
ADMIN BANK	:	Rp 2.000
TOTAL BAYAR	:	Rp 84.900

TRANSAKSI BERHASIL

RESI INI
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

\$_{footer}

Bank BPD Bali Internet Banking
10-Jan-2025 / 08:08:33
000001218896

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

[illegible]

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK : Rp 2.500
TOTAL BAYAR : Rp 4.421.278

Terima Kasih

BANK BALI

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"
Download PLN Mobile

Bank BPD Bali Internet Banking
10-Jan-2025 / 08:09:33
000001218912

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL	: 551004047598	BL/TH	: JAN25
NAMA	: DINAS PETERNAKAN	STAND METER	: 00040642-00041143
TARIF/DAYA	: P1/33000VA		
RP TAG PLN	: Rp 2.243.380		
NO REF	: 21291400000000000000000001218912		

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK : Rp 2.500
TOTAL BAYAR : Rp 2.245.880

Terima Kasih

BANK BALI

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"
Download PLN Mobile

Bank BPD Bali Internet Banking
10-Jan-2025 / 08:13:30
000001218920

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL	: 551003959410	BL/TH	: JAN25
NAMA	: GEDUNG PLUT KUM PROF BALI	STAND METER	: 00002346-00002400
TARIF/DAYA	: P1/66000VA		
RP TAG PLN	: Rp 4.486.759		
NO REF	: 212914000000000000000000001218920		

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK : Rp 2.500
TOTAL BAYAR : Rp 4.489.259

Terima Kasih

BANK BALI

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"
Download PLN Mobile

Bank BPD Bali Internet Banking
10-Jan-2025 / 08:16:13
000001218932

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

[illegible]

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK : Rp 2.500
TOTAL BAYAR : Rp 422.041

Terima Kasih

BANK BALI

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"
Download PLN Mobile

Bank BPD Bali Internet Banking
10-Jan-2025 / 08:17:33
000001218959

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

[illegible]

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK : Rp 2.500
TOTAL BAYAR : Rp 1.928.067

Terima Kasih

BANK BALI
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"
Download PLN Mobile

Bank BPD Bali Internet Banking
10-Jan-2025 / 08:23:49
000001218980

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

[illegible]

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK : Rp 2.500
TOTAL BAYAR : Rp 596.500

Terima Kasih

BANK BALI

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"
Download PLN Mobile



Bukti Pembayaran Telkom

Nomor Referensi	:	IBB1218839
Tanggal / Jam	:	10-Jan-2025 / 08:07:58 WITA
Pembayaran	:	Telkom Bill Payment
Nomor Telepon	:	0361224557
Nama	:	KTR WILAYAH KOPERASI PROP BALI
Month/Year	:	Jan25
Biller Reference	:	501A
Bill Amount	:	Rp. 31,857
Biaya Admin	:	Rp. 2,000
Total Tagihan	:	Rp. 33,857
Jenis Transaksi	:	Transaksi Sekarang
Status	:	Sukses

TERIMA KASIH
INTERNET BANKING BPD BALI. ALL RIGHT RESERVED.



Bukti Pembayaran Telkom

Nomor Referensi	:	IBB1218832
Tanggal / Jam	:	10-Jan-2025 / 08:07:57 WITA
Pembayaran	:	Telkom Bill Payment
Nomor Telepon	:	0361225091
Nama	:	KOP PROP BALI,KANWIL DITJEN
Month/Year	:	Jan25
Biller Reference	:	501A
Bill Amount	:	Rp. 37,407
Biaya Admin	:	Rp. 2,000
Total Tagihan	:	Rp. 39,407
Jenis Transaksi	:	Transaksi Sekarang
Status	:	Sukses

TERIMA KASIH
INTERNET BANKING BPD BALI. ALL RIGHT RESERVED.



Bukti Pembayaran Telkom

Nomor Referensi	:	IBB1218826
Tanggal / Jam	:	10-Jan-2025 / 08:07:54 WITA
Pembayaran	:	Telkom Bill Payment
Nomor Telepon	:	0361729253
Nama	:	KANTOR KOPERASI USAHA KECIL _
Month/Year	:	Jan25
Biller Reference	:	501A
Bill Amount	:	Rp. 341,880
Biaya Admin	:	Rp. 2,000
Total Tagihan	:	Rp. 343,880
Jenis Transaksi	:	Transaksi Sekarang
Status	:	Sukses

TERIMA KASIH
INTERNET BANKING BPD BALI. ALL RIGHT RESERVED.



Bukti Pembayaran Telkom

Nomor Referensi	:	IBB1218820
Tanggal / Jam	:	10-Jan-2025 / 08:07:45 WITA
Pembayaran	:	Telkom Bill Payment
Nomor Telepon	:	0361226548
Nama	:	DEKOPIN BALI
Month/Year	:	Jan25
Biller Reference	:	501A
Bill Amount	:	Rp. 248,307
Biaya Admin	:	Rp. 2,000
Total Tagihan	:	Rp. 250,307
Jenis Transaksi	:	Transaksi Sekarang
Status	:	Sukses

TERIMA KASIH
INTERNET BANKING BPD BALI. ALL RIGHT RESERVED.



Bukti Pembayaran Telkom

Nomor Referensi	:	IBB1218856
Tanggal / Jam	:	10-Jan-2025 / 08:07:53 WITA
Pembayaran	:	Telkom Bill Payment
Nomor Telepon	:	03614781528
Nama	:	UPTD. DIKLAT KOPRASI & UMKM
Month/Year	:	Jan25
Biller Reference	:	501A
Bill Amount	:	Rp. 427,350
Biaya Admin	:	Rp. 2,000
Total Tagihan	:	Rp. 429,350
Jenis Transaksi	:	Transaksi Sekarang
Status	:	Sukses

TERIMA KASIH
INTERNET BANKING BPD BALI. ALL RIGHT RESERVED.



Bukti Pembayaran Telkom

Nomor Referensi	:	IBB1218846
Tanggal / Jam	:	10-Jan-2025 / 08:08:01 WITA
Pembayaran	:	Telkom Bill Payment
Nomor Telepon	:	0361237732
Nama	:	BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN
Month/Year	:	Jan25
Biller Reference	:	501A
Bill Amount	:	Rp. 31,857
Biaya Admin	:	Rp. 2,000
Total Tagihan	:	Rp. 33,857
Jenis Transaksi	:	Transaksi Sekarang
Status	:	Sukses

TERIMA KASIH
INTERNET BANKING BPD BALI. ALL RIGHT RESERVED.



ပိမိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
SEKRETARIAT DAERAH

ႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ - ၼႆႉ (ပိမိၼ်ႈႁူၺ်ႈ) ၼႆႉႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ (ပိမိၼ်ႈႁူၺ်ႈ) ၼႆႉႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
WEBSITE : www.baliprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NOMOR B.31.000.2.4/6362/P.BMD/BPKAD

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BALI PADA 3 (TIGA) OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BALI

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali telah disetujui oleh Pj. Gubernur Bali sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor:B.00.000.2.3.2/38659/Setda, tanggal 21 Agustus 2024, Hal Persetujuan pemusnahan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Bali tentang Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali pada 3 (tiga) OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2012, tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Bahan Persediaan kondisi rusak berat pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dengan nilai perolehan sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah), Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan nilai perolehan sebesar Rp83.258.967,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan nilai perolehan sebesar Rp99.356.400,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 03 Oktober 2024

	<u>Ditandatangani secara elektronik oleh :</u> SEKRETARIS DAERAH Dewa Made Indra NI XXXXXXXXXXXX

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pj. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
3. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali di Bali;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali di Bali.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Lampiran Surat Keputusan Pengelola Barang
Nomor : B.31.000.2.4/6362/P.BMD/BPKAD
Tanggal : 03 Oktober 2024

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI
PADA 3 (TIGA) OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI												
1	-	-	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2020	1	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	UPTD. KPH Bali Timur	Rusak Berat	
Jumlah 1					1	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-			
2. DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI												
1	-	-	Materai 6000	2019	591	6.000,00	3.546.000,00	-	-	UPTD. Kesehatan Pengobatan Tradisional	Rusak Berat	
2	-	-	Materai 3000	2019	258	3.000,00	774.000,00	-	-	UPTD. Kesehatan Pengobatan Tradisional	Rusak Berat	
3	-	-	CD R	2014	12	200.000,00	2.400.000,00	-	-	UPTD. Kesehatan Pengobatan Tradisional	Rusak Berat	
4	-	-	Amplop Coklat Folio	2014	28	53.500,00	1.498.000,00	-	-	UPTD. Kesehatan Pengobatan Tradisional	Rusak Berat	
5	-	-	Amplop Coklat Kecil	2014	25	25.000,00	625.000,00	-	-	UPTD. Kesehatan Pengobatan Tradisional	Rusak Berat	
6	-	-	Amplop Coklat Kecil	2014	50	13.500,00	675.000,00	-	-	UPTD. Kesehatan Pengobatan Tradisional	Rusak Berat	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	-	-	Lembar Disposisi	2016	30	30.000,00	900.000,00	-	-	UPTD. Kesehatan Pengobatan Tradisional	Rusak Berat	
8	-	-	Kertas Fax	2013	8	20.000,00	160.000,00	-	-	UPTD. Kesehatan Pengobatan Tradisional	Rusak Berat	
9	-	-	Felm Fax	2012	26	110.000,00	2.860.000,00	-	-	UPTD. Kesehatan Pengobatan Tradisional	Rusak Berat	
10	-	-	Materai 6000	2020	5.827	6.000,00	34.962.000,00	-	-	UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan	Rusak Berat	
11	-	-	Lembar Surat Keluar	2020	87	17.272,00	1.502.664,00	-	-	UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan	Rusak Berat	
12	-	-	Lembar Surat Masuk	2020	86	17.272,00	1.485.392,00	-	-	UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan	Rusak Berat	
13	-	-	Lembar Disposisi	2020	47	25.363,00	1.192.061,00	-	-	UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan	Rusak Berat	
14	-	-	Amplop Coklat Logo Dinas	2020	310	1.250,00	387.500,00	-	-	UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan	Rusak Berat	
15	-	-	Blangko Air Bersih	2020	31	109.090,00	3.381.790,00	-	-	UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan	Rusak Berat	
16	-	-	Blangko Air Kolam Renang	2020	29	104.545,00	3.031.805,00	-	-	UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan	Rusak Berat	
17	-	-	Blangko Air Laut	2020	28	104.545,00	2.927.260,00	-	-	UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan	Rusak Berat	
18	-	-	Blangko Air Limbah	2020	68	109.090,00	7.418.120,00	-	-	UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan	Rusak Berat	
19	-	-	Blangko Air Minum	2020	27	104.545,00	2.822.715,00	-	-	UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan	Rusak Berat	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	-	-	Blangko Air Sungai	2020	28	104.545,00	2.927.260,00	-	-	UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan	Rusak Berat	
21	-	-	Brosur	2020	700	7.682,00	5.377.400,00	-	-	UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan	Rusak Berat	
22	-	-	Catridge Warna Hitam 802	2021	7	185.000,00	1.295.000,00	-	-	UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan	Rusak Berat	
23	-	-	Catridge Warna 802	2021	6	185.000,00	1.110.000,00	-	-	UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan	Rusak Berat	
Jumlah 2					8.309	1.542.199,00	83.258.967,00	-	-			
3. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI												
1	-	-	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2020	1	99.356.400,00	99.356.400,00	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	Rusak Berat	
Jumlah 3					1	99.356.400,00	99.356.400,00	-	-			
Jumlah Total (1 + 2 + 3)					8.311	170.898.599,00	252.615.367,00	-	-			
						(Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)	(Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)					


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH
Dewa Made Indra
 NIP. XXXXXXXXXX



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





පළාත් පාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI

කර්මාන්ත සහ කුඩා මධ්‍යම ව්‍යාපාරික
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

කර්මාන්ත සහ කුඩා මධ්‍යම ව්‍යාපාරික - කොමිෂන් (100 කොමිෂන්) / කුඩා ව්‍යාපාරික (10 කොමිෂන්) / කුඩා ව්‍යාපාරික
Jalan WR. Supratman No. 71 Denpasar - Bali (80236), Telepon (0361) 225091
Laman : www.diskopukm.baliprov.go.id, Pos-el : diskopukm@baliprov.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 1401 Tahun 2024

Dalam upaya meningkatkan tertib administrasi Penatausahaan Barang Persediaan (Barang Pakai Habis) Tahun 2024 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, dengan ini :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : Ida Bagus Made Suardita, SH.
Pangkat /Golongan : Penata Tk I (III/d)
NIP : 19690705 2009011 009
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Untuk : Melaksanakan tugas pemeriksaan fisik (stok opname) atas persediaan barang yang berada dalam tanggung Jawab Pengurus Barang pada tanggal 31 Desember 2024

Demikian Surat Perintah Tugas ini di keluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Dikeluarkan di Bali
Pada tanggal 30 Desember 2024

a.n. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

Sekretaris

I Ketut Meniarta, SSTP., M.Si.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. [REDACTED]



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BERITA ACARA OPNAME FISIK PERSEDIAAN
NOMOR : B.17.000.2.3.2/3433/SET/DISKOP.UKM

SKPD : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
Tanggal opname fisik : 31 Desember 2024
Lokasi opname fisik : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Nomor/tanggal surat tugas : 1401 Tahun 2024/30 Desember 2024

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ida Bagus Made Suardita, SH.
Pangkat dan Golongan : Penata Tk I (III/d)
NIP. : 19690705 200901 1 009
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan Surat Perintah Tugas pelaksanaan opname fisik Nomor : 1401 tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 telah melaksanakan pemeriksaan fisik (Stok opname) atas persediaan yang berada dalam tanggung jawab.

Nama : Lurdiani Pagappong
Pangkat dan Golongan : Pengatur Tk I (II/d)
NIP. : 19740704 200901 2 003
Jabatan : Penyimpan Barang.

NO	Jenis Barang	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Jumlah Menurut Opname Fisik (Rp)	Jumlah Menurut Buku (Rp)	Keadaan 31 Desember 2024 (Rp)
1	Pertamax	704.000	400.294.100	320.220.700	80.777.400
2	Persediaan alat Tulis Kantor		42.522.250	42.522.250	-
3	Kertas dan Cover	139.800	39.519.000	39.658.800	-
4	Bahan Cetak		23.088.000	23.088.000	-
5	Benda post dan materai	60.000	7.940.000.	8.000.000.	-
6	Bahan Komputer	1.350.000	55.606.000	56.956.000	-
7	Alat bahan perabot kantor		11.647.000	11.647.000	-
8	Alat listrik		10.334.000	10.334.000	-
9	Alat/Bahan utk Kegiatan kantor		1.275.343.662	1.275.343.662	-

Demikian Berita Acara ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

Kepala Dinas Koperasi usaha Kecil dan menengah Provinsi Bali.

Sekretaris

I Ketut Menjarta, SSTP., M.Si.,
Pembina Tk I (IV/h)

NIP.

Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Ida Bagus Made Suardita, SH.
Penata (III/d)

NIP.

Penyimpan Barang

Lurdiani Pagappong.
Pengatur Tk I (II/d)

NIP.

LAPORAN MUTASI PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
JANUARI - DESEMBER TAHUN 2024

No	Kode	Uraian nama barang	Satuan (buah/lusin/ set/unit)	Kecadaan Desember 2023				Mutasi / Perubahan Januari s/d Desember 2024				Kecadaan Desember 2024		Ket
				Jml Brg	Harga Satuan (Rp)	Jml harga (Rp)	Bertambah		Berkurang		Jml Barang	Jml Harga (Rp)		
							Jml Barang	Harga satuan (Rp)	Jml Harga (Rp)	Jml Barang			Jml Harga (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persediaan												
		Barang pakai Habis												
1.	5.1.02.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas												
		Pertamax Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	liter				24.090 liter	13.200	317.988.000	19.718 liter	260.277.600	4.372 liter	57.710.400	
		Pertamax DAK Kewirausahaan Diskop dan UKM Pro Bali					826 liter	13.200	10.903.200	liter	-	826 liter	10.903.200	
		Pertamax DAK Kewirausahaan Diskop dan UKM Pro Bali					826 liter	12.100	9.994.600	liter	-	826 liter	9.994.600	
		Pertamax UPTD Diklat Koperasi (Rutin)	liter				2.395 liter	13.200	31.614.000	2.304 liter	30.390.800	146 liter	1.927.200	
		Pelumas/oil Diklat Koperasi (Rutin)		55 liter	12.800	704.000	20 liter	70.000	1.400.000	20 liter	1.400.000	- liter	-	
		Pertamax DAK Non Fisik Diklat Koperasi	liter				1.004 liter	13.200	13.252.800	1.004 liter	13.252.800	- liter	-	
		Pertamax DAK Non Fisik Diklat Koperasi	liter				1.005 liter	13.200	13.266.000	1.005 liter	13.266.000	- liter	-	
		Pertamax Sosialisasi layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum	liter				155 liter	12.100	1.875.500	135 liter	1.633.500	20 liter	242.000	
		Jumlah Belanja untuk Bahan Bakar dan Pelumas				704.000			400.294.100		320.220.700		80.777.400	
2.	5.1.02.01.01.0024	ALAT TULIS KANTOR												
		Kegiatan Penyusna Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
		Barang Cetak												
		Map Kop 24x36 cm					100 bh	9.800	980.000	100 bh	980.000	- bh	-	
		Cetak Dokumen Data Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Bali.					2 buku	195.000	390.000	2 buku	390.000	- buku	-	
		Cetak Dokumen Data SIPD Provinsi Bali					2 buku	195.000	390.000	2 buku	390.000	- buku	-	
		Foto Copy :							-					
		Dokumen DPA Induk tahun 2024					840 lbr	350	294.000	840 lbr	294.000	- lbr	-	
		SPM dan SP2D					138 lbr	350	48.300	138 lbr	48.300	- lbr	-	
		Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							2.102.300		2.102.300			
		Foto Copy												
		laporan akhir Tahun, LKJLP, LKPI, LPPD					505 lbr	350	176.750	505 lbr	176.750	- lbr	-	
		Penguatan tata kelola kelembagaan koperasi berupa :												
		Foto Copy												
		RKA 2024					4 lbr	350	1.400	4 lbr	1.400	- lbr	-	
		Form uji kelayakan dan kepatuhan pengurus dan pengawas koperasi.					90 lbr	350	31.500	90 lbr	31.500	- lbr	-	
		Form falidasi self deklare					100 lbr	350	35.000	100 lbr	35.000	- lbr	-	
		BA penguatan tata kelola kelembagaan koperasi					40 lbr	350	14.000	40 lbr	14.000	- lbr	-	
		laporan hasil pemeriksaan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi.					47 lbr	350	16.450	47 lbr	16.450	- lbr	-	
		Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi.							98.350		98.350			
		Foto Copy												
		Laporan Keuangan Bulanan					200 lbr	350	70.000	200 lbr	70.000	- lbr	-	
		RKA 2024					4 lbr	350	1.400	4 lbr	1.400	- lbr	-	
		SPT					45 lbr	350	15.750	45 lbr	15.750	- lbr	-	

	Kertas kerja dan LHP								224 lbr	350	78.400	224 lbr	78.400	- lbr	-
	Kegiatan Penyedia barang cetakan dan penggandaan pada UPTD.										165.550		165.550	- bh	-
	Map Kop 24 x 36								30 bh	9.800	294.000	30 bh	294.000	- bh	-
	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan														
	Foto copy														
	Foto copy hitam putih								3.042 lbr	350	1.064.700	3.042 lbr	1.064.700	- lbr	-
	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan														
	Foto copy														
	Foto copy hitam putih								1.000 lbr	350	350.000	1.000 lbr	350.000	- lbr	-
	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kopetensi SDN koperasi DAK.														
	Nama Tag PVC								50 bh	45.000	2.250.000	50 bh	2.250.000	- bh	-
	Kegiatan fasilitasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi.														
	Foto copy														
	Perjanjian kerjasama dengan notaris pembuat akta koperasi.								30 lbr	350	10.500	30 lbr	10.500	- lbr	-
	Lukais pemberian subsidi biaya akta koperasi								30 lbr	350	10.500	30 lbr	10.500	- lbr	-
	SPK tenaga administrasi non ASN								96 lbr	350	33.600	96 lbr	33.600	- lbr	-
	SK tenaga administrasi non ASN								44 lbr	350	15.400	44 lbr	15.400	- lbr	-
	Kegiatan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi										70.000		70.000		
	Stoppmap Blola								40 bh	1.700	68.000	40 bh	68.000	- bh	-
	Kegiatan penyediaan peralatan perlengkapan kantor berupa belanja alat tulis kantor (UPTD)										68.000		68.000		
	Trigonal klip seagull								1 box	50.000	50.000	1 box	50.000	- box	-
	Spidol marker bic twin								1 bh	9.000	9.000	1 bh	9.000	- bh	-
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor pada UPTD										59.000		59.000		
	Balpoint snowman VI/VZ snowman								6 bh	1000	6.000	6 bh	6.000	- bh	-
	Kegiatan fasilitasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu)daerah provinsi.														
	Map folio kertas								110 rim	1.100	121.000	110 bh	121.000	- rim	-
	Kegiatan Peningkatan pemahaman pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kopetensi SDN UMKM dan kewirausahaan.														
	Post it toyko index dan mark								3 pcs	11.500	34.500	3 pcs	34.500	- pcs	-
	BalpointVZ snowman								3 bh	3.000	9.000	3 bh	9.000	- bh	-
	Ist cutter besar jollo								1 pack	8.000	8.000	1 pack	8.000	- pack	-
	Spidol marker boarmarker snowman								2 pcs	13.500	27.000	2 pcs	27.000	- pcs	-
											78.500		78.500		

[illegible]



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
Aset Tetap				14,824,395,381							
2		PERALATAN DAN MESIN		5,850,583,975			5,191,699,419	39,587,088	44,290,573	5,275,577,080	575,006,895
1.3.2.2		ALAT ANGKUTAN									
1.3.2.2.1		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		2,003,979,000			1.969.144.357	7.194.643	329.048	1.976.668.048	27,310,952
1.3.2.2.1.1		KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN		1,099,020,000			1.099.020.000	0	0	1.099.020.000	0
1.3.2.2.1.1.3	2	Station Wagon	12 1991	50,000,000	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0
1.3.2.2.1.1.3	8	Station Wagon	12 1997	75,000,000	0	0	75.000.000	0	0	75.000.000	0
1.3.2.2.1.1.3	9	Station Wagon	5 2015	187,170,000	0	0	187.170.000	0	0	187.170.000	0
1.3.2.2.1.1.3	10	Station Wagon	12 2015	203,000,000	0	0	203.000.000	0	0	203.000.000	0
1.3.2.2.1.1.3	11	Station Wagon	12 2015	203,000,000	0	0	203.000.000	0	0	203.000.000	0
1.3.2.2.1.1.3	13	Station Wagon	5 2016	200,000,000	0	0	200.000.000	0	0	200.000.000	0
1.3.2.2.1.1.3	2	Station Wagon	12 2014	180,850,000	0	0	180.850.000	0	0	180.850.000	0
1.3.2.2.1.2		KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG		703,450,000			696.255.357	7.194.643	0	703.450.000	0
1.3.2.2.1.2.3	2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7 2012	195,000,000	0	0	195.000.000	0	0	195.000.000	0
1.3.2.2.1.2.3	3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7 2016	307,000,000	0	0	307.000.000	0	0	307.000.000	0
1.3.2.2.1.2.3	4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4 2017	201,450,000	0	0	194.255.357	7.194.643	0	201.450.000	0
1.3.2.2.1.4		KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA		201,509,000			173.869.000	0	329.048	174.198.048	27,310,952
1.3.2.2.1.4.1	23	Sepeda Motor	12 1995	2,600,000	0	0	2.600.000	0	0	2.600.000	0
1.3.2.2.1.4.1	42	Sepeda Motor	12 2006	9,518,000	0	0	9.518.000	0	0	9.518.000	0
1.3.2.2.1.4.1	47	Sepeda Motor	12 2005	12,116,000	0	0	12.116.000	0	0	12.116.000	0
1.3.2.2.1.4.1	48	Sepeda Motor	12 2005	12,116,000	0	0	12.116.000	0	0	12.116.000	0
1.3.2.2.1.4.1	49	Sepeda Motor	12 2005	12,116,000	0	0	12.116.000	0	0	12.116.000	0
1.3.2.2.1.4.1	50	Sepeda Motor	12 2005	12,116,000	0	0	12.116.000	0	0	12.116.000	0
1.3.2.2.1.4.1	52	Sepeda Motor	12 2005	12,116,000	0	0	12.116.000	0	0	12.116.000	0
1.3.2.2.1.4.1	53	Sepeda Motor	12 2005	12,116,000	0	0	12.116.000	0	0	12.116.000	0
1.3.2.2.1.4.1	55	Sepeda Motor	12 2005	12,116,000	0	0	12.116.000	0	0	12.116.000	0
1.3.2.2.1.4.1	56	Sepeda Motor	12 2005	12,116,000	0	0	12.116.000	0	0	12.116.000	0
1.3.2.2.1.4.1	57	Sepeda Motor	6 2016	17,569,000	0	0	17.569.000	0	0	17.569.000	0
1.3.2.2.1.4.1	58	Sepeda Motor	6 2016	17,569,000	0	0	17.569.000	0	0	17.569.000	0
1.3.2.2.1.4.1	59	Sepeda Motor	6 2016	17,569,000	0	0	17.569.000	0	0	17.569.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian
Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.2.1.4.1	60	Sepeda Motor	12 2024	27,640,000	6	11	0	0	329.048	329.048	27,310,952
1.3.2.2.1.4.1	3	Sepeda Motor	7 2012	12,116,000	0	0	12.116.000	0	0	12.116.000	0
1.3.2.3		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR									
1.3.2.3.3		ALAT UKUR		3,100,000			3.100.000	0	0	3.100.000	0
1.3.2.3.3.8		ALAT UKUR/PEMBANDING		3,100,000			3.100.000	0	0	3.100.000	0
1.3.2.3.3.8.25	1	Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar	5 2009	3,100,000	0	0	3.100.000	0	0	3.100.000	0
1.3.2.5		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA									
1.3.2.5.1		ALAT KANTOR		509,321,000			437.985.167	3.170.000	4.157.917	445.313.084	64,007,916
1.3.2.5.1.1		MESIN KETIK		7,250,000			7.250.000	0	0	7.250.000	0
1.3.2.5.1.1.2	1	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	6 2015	4,000,000	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0
1.3.2.5.1.1.1	1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	6 2009	3,250,000	0	0	3.250.000	0	0	3.250.000	0
1.3.2.5.1.4		ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR		338,041,000			338.041.000	0	0	338.041.000	0
1.3.2.5.1.4.1	2	Lemari Besi/Metal	12 2005	2,495,000	0	0	2.495.000	0	0	2.495.000	0
1.3.2.5.1.4.1	3	Lemari Besi/Metal	12 1994	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.1.4.1	6	Lemari Besi/Metal	4 2011	2,380,000	0	0	2.380.000	0	0	2.380.000	0
1.3.2.5.1.4.1	7	Lemari Besi/Metal	4 2011	2,380,000	0	0	2.380.000	0	0	2.380.000	0
1.3.2.5.1.4.1	8	Lemari Besi/Metal	3 2012	2,475,000	0	0	2.475.000	0	0	2.475.000	0
1.3.2.5.1.4.1	9	Lemari Besi/Metal	3 2012	2,475,000	0	0	2.475.000	0	0	2.475.000	0
1.3.2.5.1.4.1	10	Lemari Besi/Metal	3 2012	2,475,000	0	0	2.475.000	0	0	2.475.000	0
1.3.2.5.1.4.1	11	Lemari Besi/Metal	3 2012	2,475,000	0	0	2.475.000	0	0	2.475.000	0
1.3.2.5.1.4.1	12	Lemari Besi/Metal	3 2012	2,475,000	0	0	2.475.000	0	0	2.475.000	0
1.3.2.5.1.4.1	13	Lemari Besi/Metal	3 2012	2,475,000	0	0	2.475.000	0	0	2.475.000	0
1.3.2.5.1.4.1	14	Lemari Besi/Metal	8 2013	2,700,000	0	0	2.700.000	0	0	2.700.000	0
1.3.2.5.1.4.1	15	Lemari Besi/Metal	8 2013	2,700,000	0	0	2.700.000	0	0	2.700.000	0
1.3.2.5.1.4.1	16	Lemari Besi/Metal	12 2005	2,495,000	0	0	2.495.000	0	0	2.495.000	0
1.3.2.5.1.4.1	17	Lemari Besi/Metal	6 2014	5,400,000	0	0	5.400.000	0	0	5.400.000	0
1.3.2.5.1.4.1	18	Lemari Besi/Metal	6 2016	2,500,000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
1.3.2.5.1.4.1	19	Lemari Besi/Metal	6 2016	2,500,000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
1.3.2.5.1.4.1	20	Lemari Besi/Metal	6 2016	2,500,000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
1.3.2.5.1.4.1	21	Lemari Besi/Metal	6 2016	2,500,000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
1.3.2.5.1.4.2	3	Lemari Kayu	10 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.1.4.2	4	Lemari Kayu	10 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0
1.3.2.5.1.4.2	5	Lemari Kayu	10 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0
1.3.2.5.1.4.2	6	Lemari Kayu	10 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0
1.3.2.5.1.4.2	7	Lemari Kayu	10 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0
1.3.2.5.1.4.2	8	Lemari Kayu	10 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0
1.3.2.5.1.4.2	9	Lemari Kayu	10 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0
1.3.2.5.1.4.2	10	Lemari Kayu	10 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0
1.3.2.5.1.4.2	11	Lemari Kayu	12 2015	27,940,000	0	0	27.940.000	0	0	27.940.000	0
1.3.2.5.1.4.2	27	Lemari Kayu	12 1998	560,000	0	0	560.000	0	0	560.000	0
1.3.2.5.1.4.4	1	Rak Kayu	6 2012	4,900,000	0	0	4.900.000	0	0	4.900.000	0
1.3.2.5.1.4.4	3	Rak Kayu	6 2016	9,000,000	0	0	9.000.000	0	0	9.000.000	0
1.3.2.5.1.4.4	4	Rak Kayu	6 2016	9,000,000	0	0	9.000.000	0	0	9.000.000	0
1.3.2.5.1.4.4	5	Rak Kayu	6 2016	9,000,000	0	0	9.000.000	0	0	9.000.000	0
1.3.2.5.1.4.4	6	Rak Kayu	6 2016	9,000,000	0	0	9.000.000	0	0	9.000.000	0
1.3.2.5.1.4.4	7	Rak Kayu	6 2016	36,000,000	0	0	36.000.000	0	0	36.000.000	0
1.3.2.5.1.4.5	1	Filing Cabinet Besi	12 2005	1,975,000	0	0	1.975.000	0	0	1.975.000	0
1.3.2.5.1.4.5	2	Filing Cabinet Besi	12 2005	1,975,000	0	0	1.975.000	0	0	1.975.000	0
1.3.2.5.1.4.5	11	Filing Cabinet Besi	3 2012	2,450,000	0	0	2.450.000	0	0	2.450.000	0
1.3.2.5.1.4.5	12	Filing Cabinet Besi	3 2012	2,450,000	0	0	2.450.000	0	0	2.450.000	0
1.3.2.5.1.4.5	13	Filing Cabinet Besi	3 2012	2,450,000	0	0	2.450.000	0	0	2.450.000	0
1.3.2.5.1.4.5	14	Filing Cabinet Besi	3 2012	2,450,000	0	0	2.450.000	0	0	2.450.000	0
1.3.2.5.1.4.5	15	Filing Cabinet Besi	3 2012	2,450,000	0	0	2.450.000	0	0	2.450.000	0
1.3.2.5.1.4.5	16	Filing Cabinet Besi	3 2012	2,450,000	0	0	2.450.000	0	0	2.450.000	0
1.3.2.5.1.4.5	17	Filing Cabinet Besi	8 2013	2,425,000	0	0	2.425.000	0	0	2.425.000	0
1.3.2.5.1.4.5	18	Filing Cabinet Besi	8 2013	2,425,000	0	0	2.425.000	0	0	2.425.000	0
1.3.2.5.1.4.5	19	Filing Cabinet Besi	12 2004	1,586,000	0	0	1.586.000	0	0	1.586.000	0
1.3.2.5.1.4.5	20	Filing Cabinet Besi	4 2011	4,200,000	0	0	4.200.000	0	0	4.200.000	0
1.3.2.5.1.4.5	21	Filing Cabinet Besi	12 2013	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0
1.3.2.5.1.4.5	22	Filing Cabinet Besi	7 2014	2,425,000	0	0	2.425.000	0	0	2.425.000	0
1.3.2.5.1.4.5	23	Filing Cabinet Besi	7 2014	2,425,000	0	0	2.425.000	0	0	2.425.000	0
1.3.2.5.1.4.5	24	Filing Cabinet Besi	6 2016	3,600,000	0	0	3.600.000	0	0	3.600.000	0
1.3.2.5.1.4.5	25	Filing Cabinet Besi	6 2016	3,600,000	0	0	3.600.000	0	0	3.600.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.1.4.5	26	Filing Cabinet Besi	6 2016	3,600,000	0	0	3.600.000	0	0	3.600.000	0
1.3.2.5.1.4.5	27	Filing Cabinet Besi	6 2016	3,600,000	0	0	3.600.000	0	0	3.600.000	0
1.3.2.5.1.4.7	1	Brandkas	12 2004	700,000	0	0	700.000	0	0	700.000	0
1.3.2.5.1.4.7	2	Brandkas	12 2004	700,000	0	0	700.000	0	0	700.000	0
1.3.2.5.1.4.27	1	Lemari Kaca	12 2009	10,900,000	0	0	10.900.000	0	0	10.900.000	0
1.3.2.5.1.4.1	1	Lemari Besi/Metal	12 2005	4,990,000	0	0	4.990.000	0	0	4.990.000	0
1.3.2.5.1.4.2	1	Lemari Kayu	12 1996	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.1.4.2	1	Lemari Kayu	6 2014	14,700,000	0	0	14.700.000	0	0	14.700.000	0
1.3.2.5.1.4.2	4	Lemari Kayu	12 1996	1,780,000	0	0	1.780.000	0	0	1.780.000	0
1.3.2.5.1.4.2	7	Lemari Kayu	12 2004	28,825,000	0	0	28.825.000	0	0	28.825.000	0
1.3.2.5.1.4.2	8	Lemari Kayu	12 2004	8,010,000	0	0	8.010.000	0	0	8.010.000	0
1.3.2.5.1.4.4	1	Rak Kayu	12 1996	875,000	0	0	875.000	0	0	875.000	0
1.3.2.5.1.4.4	3	Rak Kayu	12 2005	15,950,000	0	0	15.950.000	0	0	15.950.000	0
1.3.2.5.1.4.5	2	Filing Cabinet Besi	12 1995	700,000	0	0	700.000	0	0	700.000	0
1.3.2.5.1.4.5	3	Filing Cabinet Besi	12 2005	3,950,000	0	0	3.950.000	0	0	3.950.000	0
1.3.2.5.1.4.7	1	Brandkas	12 1982	975,000	0	0	975.000	0	0	975.000	0
1.3.2.5.1.5		ALAT KANTOR LAINNYA		164,030,000			92.694.167	3.170.000	4.157.917	100.022.084	64,007,916
1.3.2.5.1.5.2	1	CCTV - Camera Control Television System	5 2021	19,850,000	1	4	10.586.667	1.985.000	1.985.000	14.556.667	5,293,333
1.3.2.5.1.5.3	1	Papan Visual/Papan Nama	9 2009	9,925,000	0	0	9.925.000	0	0	9.925.000	0
1.3.2.5.1.5.3	2	Papan Visual/Papan Nama	12 2015	7,650,000	0	0	7.650.000	0	0	7.650.000	0
1.3.2.5.1.5.3	3	Papan Visual/Papan Nama	12 2015	850,000	0	0	850.000	0	0	850.000	0
1.3.2.5.1.5.3	4	Papan Visual/Papan Nama	12 2015	4,400,000	0	0	4.400.000	0	0	4.400.000	0
1.3.2.5.1.5.3	5	Papan Visual/Papan Nama	12 2015	1,100,000	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0
1.3.2.5.1.5.24	1	Hand Metal Detector	1 2011	1,980,000	0	0	1.980.000	0	0	1.980.000	0
1.3.2.5.1.5.24	2	Hand Metal Detector	1 2011	1,980,000	0	0	1.980.000	0	0	1.980.000	0
1.3.2.5.1.5.43	1	LCD Projector/Infocus	12 2024	18,000,000	4	11	0	0	300.000	300.000	17,700,000
1.3.2.5.1.5.43	2	LCD Projector/Infocus	12 2024	18,000,000	4	11	0	0	300.000	300.000	17,700,000
1.3.2.5.1.5.43	3	LCD Projector/Infocus	12 2024	18,000,000	4	11	0	0	300.000	300.000	17,700,000
1.3.2.5.1.5.53	1	Focusing Screen/Layar LCD Projector	12 2024	5,275,000	4	11	0	0	87.917	87.917	5,187,083
1.3.2.5.1.5.76	1	Papan Nama Instansi	12 2013	5,320,000	0	0	5.320.000	0	0	5.320.000	0
1.3.2.5.1.5.76	2	Papan Nama Instansi	11 2015	4,900,000	0	0	4.900.000	0	0	4.900.000	0
1.3.2.5.1.5.77	4	Papan Pengumuman	12 2013	3,500,000	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.1.5.88	1	Alat Kantor Lainnya	10 2009	29,800,000	0	0	29.800.000	0	0	29.800.000	0
1.3.2.5.1.5.88	2	Alat Kantor Lainnya	4 2020	6,900,000	0	3	5.175.000	690.000	690.000	6.555.000	345,000
1.3.2.5.1.5.88	3	Alat Kantor Lainnya	2 2020	4,950,000	0	1	3.877.500	495.000	495.000	4.867.500	82,500
1.3.2.5.1.5.5	1	White Board	12 2005	1,650,000	0	0	1.650.000	0	0	1.650.000	0
1.3.2.5.2		ALAT RUMAH TANGGA		1,856,045,800			1.737.155.315	10.760.600	11.554.377	1.759.470.292	96,575,508
1.3.2.5.2.1		MEUBELAIR		810,333,750			761.575.000	7.003.500	7.524.335	776.102.835	34,230,915
1.3.2.5.2.1.2	26	Meja Kerja Kayu	12 1992	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.2	34	Meja Kerja Kayu	12 1994	2,500,000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
1.3.2.5.2.1.2	36	Meja Kerja Kayu	12 1998	1,400,000	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000	0
1.3.2.5.2.1.2	38	Meja Kerja Kayu	12 2001	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.2	45	Meja Kerja Kayu	12 2002	700,000	0	0	700.000	0	0	700.000	0
1.3.2.5.2.1.2	46	Meja Kerja Kayu	12 2002	8,400,000	0	0	8.400.000	0	0	8.400.000	0
1.3.2.5.2.1.2	47	Meja Kerja Kayu	12 2002	4,500,000	0	0	4.500.000	0	0	4.500.000	0
1.3.2.5.2.1.2	50	Meja Kerja Kayu	4 2012	5,720,000	0	0	5.720.000	0	0	5.720.000	0
1.3.2.5.2.1.2	51	Meja Kerja Kayu	11 2013	12,500,000	0	0	12.500.000	0	0	12.500.000	0
1.3.2.5.2.1.2	52	Meja Kerja Kayu	11 2013	11,000,000	0	0	11.000.000	0	0	11.000.000	0
1.3.2.5.2.1.2	53	Meja Kerja Kayu	11 2013	24,000,000	0	0	24.000.000	0	0	24.000.000	0
1.3.2.5.2.1.2	54	Meja Kerja Kayu	10 2014	2,200,000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
1.3.2.5.2.1.2	55	Meja Kerja Kayu	10 2014	2,200,000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
1.3.2.5.2.1.2	56	Meja Kerja Kayu	10 2014	2,200,000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
1.3.2.5.2.1.2	57	Meja Kerja Kayu	10 2014	2,200,000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
1.3.2.5.2.1.2	58	Meja Kerja Kayu	10 2014	2,200,000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
1.3.2.5.2.1.2	59	Meja Kerja Kayu	10 2014	2,200,000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
1.3.2.5.2.1.2	60	Meja Kerja Kayu	10 2014	2,200,000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
1.3.2.5.2.1.2	61	Meja Kerja Kayu	10 2014	2,200,000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
1.3.2.5.2.1.2	62	Meja Kerja Kayu	10 2014	2,200,000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
1.3.2.5.2.1.2	63	Meja Kerja Kayu	10 2014	2,200,000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
1.3.2.5.2.1.2	64	Meja Kerja Kayu	4 2012	8,580,000	0	0	8.580.000	0	0	8.580.000	0
1.3.2.5.2.1.2	65	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	66	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	67	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	68	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian
Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.2	69	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	70	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	71	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	72	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	73	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	74	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	75	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	76	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	77	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	78	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	79	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	80	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	82	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	83	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	84	Meja Kerja Kayu	4 2020	2,915,000	0	3	2.186.250	291.500	291.500	2.769.250	145,750
1.3.2.5.2.1.2	85	Meja Kerja Kayu	4 2020	2,915,000	0	3	2.186.250	291.500	291.500	2.769.250	145,750
1.3.2.5.2.1.2	86	Meja Kerja Kayu	4 2020	2,915,000	0	3	2.186.250	291.500	291.500	2.769.250	145,750
1.3.2.5.2.1.2	87	Meja Kerja Kayu	4 2020	2,915,000	0	3	2.186.250	291.500	291.500	2.769.250	145,750
1.3.2.5.2.1.2	88	Meja Kerja Kayu	4 2020	2,915,000	0	3	2.186.250	291.500	291.500	2.769.250	145,750
1.3.2.5.2.1.2	89	Meja Kerja Kayu	12 2024	4,450,000	4	11	0	0	74.167	74.167	4,375,833
1.3.2.5.2.1.2	90	Meja Kerja Kayu	12 2024	4,450,000	4	11	0	0	74.167	74.167	4,375,833
1.3.2.5.2.1.2	91	Meja Kerja Kayu	12 2024	4,450,000	4	11	0	0	74.167	74.167	4,375,833
1.3.2.5.2.1.3	7	Kursi Besi/Metal	12 1997	750,000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
1.3.2.5.2.1.3	8	Kursi Besi/Metal	12 1997	750,000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
1.3.2.5.2.1.3	9	Kursi Besi/Metal	12 2002	1,500,000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0
1.3.2.5.2.1.4	24	Kursi Kayu	12 1998	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	33	Kursi Kayu	6 2012	1,980,000	0	0	1.980.000	0	0	1.980.000	0
1.3.2.5.2.1.4	34	Kursi Kayu	11 2013	4,250,000	0	0	4.250.000	0	0	4.250.000	0
1.3.2.5.2.1.4	35	Kursi Kayu	11 2013	2,500,000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
1.3.2.5.2.1.4	36	Kursi Kayu	10 2014	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	37	Kursi Kayu	10 2014	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	38	Kursi Kayu	10 2014	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.4	39	Kursi Kayu	10 2014	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	40	Kursi Kayu	10 2014	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	41	Kursi Kayu	10 2014	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	42	Kursi Kayu	10 2014	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	43	Kursi Kayu	10 2014	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	44	Kursi Kayu	10 2014	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	45	Kursi Kayu	10 2014	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	47	Kursi Kayu	12 2002	925,000	0	0	925.000	0	0	925.000	0
1.3.2.5.2.1.4	48	Kursi Kayu	6 2012	2,970,000	0	0	2.970.000	0	0	2.970.000	0
1.3.2.5.2.1.4	60	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	61	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	62	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	63	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	64	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	65	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	66	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	67	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	68	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	69	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	70	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	71	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	73	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	74	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	75	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	76	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	77	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	78	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	79	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	80	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	81	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	82	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	83	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.4	84	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	85	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	86	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	87	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	88	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	89	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	90	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	91	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	92	Kursi Kayu	4 2020	616,000	0	3	462.000	61.600	61.600	585.200	30,800
1.3.2.5.2.1.4	93	Kursi Kayu	4 2020	616,000	0	3	462.000	61.600	61.600	585.200	30,800
1.3.2.5.2.1.4	94	Kursi Kayu	4 2020	616,000	0	3	462.000	61.600	61.600	585.200	30,800
1.3.2.5.2.1.4	95	Kursi Kayu	4 2020	616,000	0	3	462.000	61.600	61.600	585.200	30,800
1.3.2.5.2.1.4	96	Kursi Kayu	4 2020	616,000	0	3	462.000	61.600	61.600	585.200	30,800
1.3.2.5.2.1.4	97	Kursi Kayu	4 2020	616,000	0	3	462.000	61.600	61.600	585.200	30,800
1.3.2.5.2.1.4	98	Kursi Kayu	4 2020	616,000	0	3	462.000	61.600	61.600	585.200	30,800
1.3.2.5.2.1.4	99	Kursi Kayu	4 2020	616,000	0	3	462.000	61.600	61.600	585.200	30,800
1.3.2.5.2.1.4	100	Kursi Kayu	4 2020	616,000	0	3	462.000	61.600	61.600	585.200	30,800
1.3.2.5.2.1.4	101	Kursi Kayu	4 2020	616,000	0	3	462.000	61.600	61.600	585.200	30,800
1.3.2.5.2.1.5	10	Sice	12 1998	950,000	0	0	950.000	0	0	950.000	0
1.3.2.5.2.1.8	1	Meja Rapat	12 2005	78,124,200	0	0	78.124.200	0	0	78.124.200	0
1.3.2.5.2.1.8	3	Meja Rapat	11 2013	45,000,000	0	0	45.000.000	0	0	45.000.000	0
1.3.2.5.2.1.8	4	Meja Rapat	12 2009	9,762,500	0	0	9.762.500	0	0	9.762.500	0
1.3.2.5.2.1.14	2	Meja Resepsionis	12 2024	14,000,000	4	11	0	0	233.333	233.333	13,766,667
1.3.2.5.2.1.24	1	Meja 1/2 Biro	12 2002	2,250,000	0	0	2.250.000	0	0	2.250.000	0
1.3.2.5.2.1.24	2	Meja 1/2 Biro	12 2002	2,250,000	0	0	2.250.000	0	0	2.250.000	0
1.3.2.5.2.1.24	3	Meja 1/2 Biro	12 2002	2,250,000	0	0	2.250.000	0	0	2.250.000	0
1.3.2.5.2.1.24	4	Meja 1/2 Biro	12 2002	2,250,000	0	0	2.250.000	0	0	2.250.000	0
1.3.2.5.2.1.24	5	Meja 1/2 Biro	12 2002	750,000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
1.3.2.5.2.1.24	6	Meja 1/2 Biro	12 2002	750,000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
1.3.2.5.2.1.24	7	Meja 1/2 Biro	12 2002	750,000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
1.3.2.5.2.1.30	1	Kursi Rapat	12 2013	39,600,000	0	0	39.600.000	0	0	39.600.000	0
1.3.2.5.2.1.30	2	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.30	3	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	4	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	5	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	6	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	7	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	8	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	9	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	10	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	11	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	12	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	13	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	14	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	15	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	16	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	17	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	18	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	19	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	20	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	21	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	22	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	23	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	24	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	25	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	26	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.31	1	Kursi Tamu	12 2005	5,019,000	0	0	5.019.000	0	0	5.019.000	0
1.3.2.5.2.1.31	2	Kursi Tamu	12 2005	5,019,000	0	0	5.019.000	0	0	5.019.000	0
1.3.2.5.2.1.31	3	Kursi Tamu	8 2012	21,750,000	0	0	21.750.000	0	0	21.750.000	0
1.3.2.5.2.1.31	4	Kursi Tamu	11 2013	14,500,000	0	0	14.500.000	0	0	14.500.000	0
1.3.2.5.2.1.31	5	Kursi Tamu	12 2015	14,998,500	0	0	14.998.500	0	0	14.998.500	0
1.3.2.5.2.1.31	6	Kursi Tamu	12 2015	14,998,500	0	0	14.998.500	0	0	14.998.500	0
1.3.2.5.2.1.31	7	Kursi Tamu	4 2020	12,325,000	0	3	9.243.750	1.232.500	1.232.500	11.708.750	616,250
1.3.2.5.2.1.31	8	Kursi Tamu	4 2020	12,325,000	0	3	9.243.750	1.232.500	1.232.500	11.708.750	616,250



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.31	9	Kursi Tamu	4 2020	12,325,000	0	3	9.243.750	1.232.500	1.232.500	11.708.750	616,250
1.3.2.5.2.1.31	10	Kursi Tamu	4 2020	12,325,000	0	3	9.243.750	1.232.500	1.232.500	11.708.750	616,250
1.3.2.5.2.1.32	7	Kursi Putar	12 2001	700,000	0	0	700.000	0	0	700.000	0
1.3.2.5.2.1.32	9	Kursi Putar	12 2003	700,000	0	0	700.000	0	0	700.000	0
1.3.2.5.2.1.32	12	Kursi Putar	12 2024	1,300,000	4	11	0	0	21.667	21.667	1,278,333
1.3.2.5.2.1.32	13	Kursi Putar	12 2024	1,300,000	4	11	0	0	21.667	21.667	1,278,333
1.3.2.5.2.1.32	14	Kursi Putar	12 2024	1,300,000	4	11	0	0	21.667	21.667	1,278,333
1.3.2.5.2.1.36	37	Kursi Lipat	11 2013	5,150,000	0	0	5.150.000	0	0	5.150.000	0
1.3.2.5.2.1.39	1	Meja Komputer	5 2016	762,000	0	0	762.000	0	0	762.000	0
1.3.2.5.2.1.39	2	Meja Komputer	5 2016	762,000	0	0	762.000	0	0	762.000	0
1.3.2.5.2.1.39	3	Meja Komputer	5 2016	762,000	0	0	762.000	0	0	762.000	0
1.3.2.5.2.1.39	4	Meja Komputer	5 2016	762,000	0	0	762.000	0	0	762.000	0
1.3.2.5.2.1.39	5	Meja Komputer	5 2016	762,000	0	0	762.000	0	0	762.000	0
1.3.2.5.2.1.2	1	Meja Kerja Kayu	12 1982	702,000	0	0	702.000	0	0	702.000	0
1.3.2.5.2.1.2	2	Meja Kerja Kayu	12 1982	1,015,000	0	0	1.015.000	0	0	1.015.000	0
1.3.2.5.2.1.2	11	Meja Kerja Kayu	12 1996	4,080,000	0	0	4.080.000	0	0	4.080.000	0
1.3.2.5.2.1.2	12	Meja Kerja Kayu	12 2004	5,100,000	0	0	5.100.000	0	0	5.100.000	0
1.3.2.5.2.1.2	13	Meja Kerja Kayu	12 2004	19,900,000	0	0	19.900.000	0	0	19.900.000	0
1.3.2.5.2.1.2	14	Meja Kerja Kayu	12 2004	7,620,000	0	0	7.620.000	0	0	7.620.000	0
1.3.2.5.2.1.2	15	Meja Kerja Kayu	5 2009	995,000	0	0	995.000	0	0	995.000	0
1.3.2.5.2.1.4	1	Kursi Kayu	12 1984	1,200,000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0
1.3.2.5.2.1.4	9	Kursi Kayu	12 1996	700,000	0	0	700.000	0	0	700.000	0
1.3.2.5.2.1.4	10	Kursi Kayu	12 1998	1,620,500	0	0	1.620.500	0	0	1.620.500	0
1.3.2.5.2.1.4	12	Kursi Kayu	12 2004	12,500,000	0	0	12.500.000	0	0	12.500.000	0
1.3.2.5.2.1.4	13	Kursi Kayu	12 2004	5,400,000	0	0	5.400.000	0	0	5.400.000	0
1.3.2.5.2.1.5	1	Sice	12 1997	1,350,000	0	0	1.350.000	0	0	1.350.000	0
1.3.2.5.2.1.8	1	Meja Rapat	12 2005	25,111,350	0	0	25.111.350	0	0	25.111.350	0
1.3.2.5.2.1.9	1	Tempat Tidur Besi	6 2015	22,320,000	0	0	22.320.000	0	0	22.320.000	0
1.3.2.5.2.1.10	5	Tempat Tidur Kayu	12 1994	1,800,000	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000	0
1.3.2.5.2.1.10	10	Tempat Tidur Kayu	12 1996	1,200,000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0
1.3.2.5.2.1.10	12	Tempat Tidur Kayu	12 1996	1,800,000	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000	0
1.3.2.5.2.1.12	1	Meja Telepon	12 2007	1,499,850	0	0	1.499.850	0	0	1.499.850	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.12	2	Meja Telepon	12 2007	1,499,850	0	0	1.499.850	0	0	1.499.850	0
1.3.2.5.2.1.17	1	Meja Panjang	12 1989	875,000	0	0	875.000	0	0	875.000	0
1.3.2.5.2.1.24	6	Meja 1/2 Biro	12 2004	28,270,000	0	0	28.270.000	0	0	28.270.000	0
1.3.2.5.2.1.25	1	Kasur/Spring Bed	12 2003	6,675,000	0	0	6.675.000	0	0	6.675.000	0
1.3.2.5.2.1.25	2	Kasur/Spring Bed	12 2003	6,675,000	0	0	6.675.000	0	0	6.675.000	0
1.3.2.5.2.1.30	1	Kursi Rapat	12 2005	9,861,500	0	0	9.861.500	0	0	9.861.500	0
1.3.2.5.2.1.31	1	Kursi Tamu	12 2003	5,400,000	0	0	5.400.000	0	0	5.400.000	0
1.3.2.5.2.1.33	1	Kursi Biasa	12 2003	2,500,000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
1.3.2.5.2.1.33	2	Kursi Biasa	12 2004	14,910,000	0	0	14.910.000	0	0	14.910.000	0
1.3.2.5.2.1.36	1	Kursi Lipat	12 2005	12,485,000	0	0	12.485.000	0	0	12.485.000	0
1.3.2.5.2.1.48	1	Sofa	12 2009	7,425,000	0	0	7.425.000	0	0	7.425.000	0
1.3.2.5.2.1.50	1	Meubeleur lainnya	12 2003	1,500,000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0
1.3.2.5.2.1.50	2	Meubeleur lainnya	12 2003	1,500,000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0
1.3.2.5.2.1.50	3	Meubeleur lainnya	6 2014	9,450,000	0	0	9.450.000	0	0	9.450.000	0
1.3.2.5.2.1.50	11	Meubeleur lainnya	12 1996	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.3		ALAT PEMBERSIH		46,270,000			42.170.000	0	68.333	42.238.333	4,031,667
1.3.2.5.2.3.1	1	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	8 2013	17,100,000	0	0	17.100.000	0	0	17.100.000	0
1.3.2.5.2.3.3	3	Mesin Pemotong Rumput	12 2024	4,100,000	4	11	0	0	68.333	68.333	4,031,667
1.3.2.5.2.3.1	1	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	12 2005	2,475,000	0	0	2.475.000	0	0	2.475.000	0
1.3.2.5.2.3.1	2	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	5 2009	4,995,000	0	0	4.995.000	0	0	4.995.000	0
1.3.2.5.2.3.3	1	Mesin Pemotong Rumput	5 2009	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.5.2.3.3	2	Mesin Pemotong Rumput	6 2014	14,600,000	0	0	14.600.000	0	0	14.600.000	0
1.3.2.5.2.4		ALAT PENDINGIN		463,886,500			418.171.665	3.107.000	2.998.276	424.276.941	39,609,559
1.3.2.5.2.4.1	1	Lemari Es	12 1998	1,000,000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
1.3.2.5.2.4.3	8	A.C. Window	12 2004	5,390,000	0	0	5.390.000	0	0	5.390.000	0
1.3.2.5.2.4.3	12	A.C. Window	6 2009	5,465,000	0	0	5.465.000	0	0	5.465.000	0
1.3.2.5.2.4.3	13	A.C. Window	6 2009	5,465,000	0	0	5.465.000	0	0	5.465.000	0
1.3.2.5.2.4.3	15	A.C. Window	6 2009	5,465,000	0	0	5.465.000	0	0	5.465.000	0
1.3.2.5.2.4.3	16	A.C. Window	6 2009	5,465,000	0	0	5.465.000	0	0	5.465.000	0
1.3.2.5.2.4.3	17	A.C. Window	6 2009	5,465,000	0	0	5.465.000	0	0	5.465.000	0
1.3.2.5.2.4.3	21	A.C. Window	7 2013	8,950,000	0	0	8.950.000	0	0	8.950.000	0
1.3.2.5.2.4.3	22	A.C. Window	7 2013	4,875,000	0	0	4.875.000	0	0	4.875.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.4.3	23	A.C. Window	12 2004	5,390,000	0	0	5.390.000	0	0	5.390.000	0
1.3.2.5.2.4.3	24	A.C. Window	7 2013	8,950,000	0	0	8.950.000	0	0	8.950.000	0
1.3.2.5.2.4.3	26	A.C. Window	8 2017	8,350,000	0	0	8.350.000	0	0	8.350.000	0
1.3.2.5.2.4.3	27	A.C. Window	8 2017	8,350,000	0	0	8.350.000	0	0	8.350.000	0
1.3.2.5.2.4.4	1	A.C. Split	12 2005	5,610,000	0	0	5.610.000	0	0	5.610.000	0
1.3.2.5.2.4.4	4	A.C. Split	12 2014	3,950,000	0	0	3.950.000	0	0	3.950.000	0
1.3.2.5.2.4.4	6	A.C. Split	3 2012	4,500,000	0	0	4.500.000	0	0	4.500.000	0
1.3.2.5.2.4.4	6	A.C. Split	6 2016	3,950,000	0	0	3.950.000	0	0	3.950.000	0
1.3.2.5.2.4.4	7	A.C. Split	3 2012	4,500,000	0	0	4.500.000	0	0	4.500.000	0
1.3.2.5.2.4.4	9	A.C. Split	11 2019	6,490,000	0	0	5.408.333	649.000	432.667	6.490.000	0
1.3.2.5.2.4.4	10	A.C. Split	11 2013	11,300,000	0	0	11.300.000	0	0	11.300.000	0
1.3.2.5.2.4.4	10	A.C. Split	11 2019	6,490,000	0	0	5.408.333	649.000	432.667	6.490.000	0
1.3.2.5.2.4.4	11	A.C. Split	11 2013	38,500,000	0	0	38.500.000	0	0	38.500.000	0
1.3.2.5.2.4.4	11	A.C. Split	11 2019	6,490,000	0	0	5.408.333	649.000	432.667	6.490.000	0
1.3.2.5.2.4.4	12	A.C. Split	11 2013	46,800,000	0	0	46.800.000	0	0	46.800.000	0
1.3.2.5.2.4.4	13	A.C. Split	6 2015	6,450,000	0	0	6.450.000	0	0	6.450.000	0
1.3.2.5.2.4.4	14	A.C. Split	6 2015	6,450,000	0	0	6.450.000	0	0	6.450.000	0
1.3.2.5.2.4.4	15	A.C. Split	12 2015	47,520,000	0	0	47.520.000	0	0	47.520.000	0
1.3.2.5.2.4.4	16	A.C. Split	12 2015	5,775,000	0	0	5.775.000	0	0	5.775.000	0
1.3.2.5.2.4.4	17	A.C. Split	12 2015	15,950,000	0	0	15.950.000	0	0	15.950.000	0
1.3.2.5.2.4.4	18	A.C. Split	12 2015	29,260,000	0	0	29.260.000	0	0	29.260.000	0
1.3.2.5.2.4.4	19	A.C. Split	5 2016	6,490,000	0	0	6.490.000	0	0	6.490.000	0
1.3.2.5.2.4.4	20	A.C. Split	6 2015	3,800,000	0	0	3.800.000	0	0	3.800.000	0
1.3.2.5.2.4.4	20	A.C. Split	5 2016	6,490,000	0	0	6.490.000	0	0	6.490.000	0
1.3.2.5.2.4.4	24	A.C. Split	12 2008	5,800,000	0	0	5.800.000	0	0	5.800.000	0
1.3.2.5.2.4.4	25	A.C. Split	7 2016	4,400,000	0	0	4.400.000	0	0	4.400.000	0
1.3.2.5.2.4.4	35	A.C. Split	4 2012	4,900,000	0	0	4.900.000	0	0	4.900.000	0
1.3.2.5.2.4.4	36	A.C. Split	5 2023	5,800,000	3	4	773.333	580.000	580.000	1.933.333	3,866,667
1.3.2.5.2.4.4	37	A.C. Split	5 2023	5,800,000	3	4	773.333	580.000	580.000	1.933.333	3,866,667
1.3.2.5.2.4.4	38	A.C. Split	12 2024	5,466,500	4	11	0	0	91.108	91.108	5,375,392
1.3.2.5.2.4.4	39	A.C. Split	12 2024	6,950,000	4	11	0	0	115.833	115.833	6,834,167
1.3.2.5.2.4.4	40	A.C. Split	12 2024	10,000,000	4	11	0	0	166.667	166.667	9,833,333



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.4.4	41	A.C. Split	12 2024	10,000,000	4	11	0	0	166.667	166.667	9,833,333
1.3.2.5.2.4.1	1	Lemari Es	8 2015	7,400,000	0	0	7.400.000	0	0	7.400.000	0
1.3.2.5.2.4.4	4	A.C. Split	12 2007	13,230,000	0	0	13.230.000	0	0	13.230.000	0
1.3.2.5.2.4.4	5	A.C. Split	8 2015	29,820,000	0	0	29.820.000	0	0	29.820.000	0
1.3.2.5.2.4.6	4	Kipas Angin	12 2003	8,975,000	0	0	8.975.000	0	0	8.975.000	0
1.3.2.5.2.5		ALAT DAPUR		1,380,000			1.380.000	0	0	1.380.000	0
1.3.2.5.2.5.2	2	Kompur Gas (Alat Dapur)	7 2013	1,380,000	0	0	1.380.000	0	0	1.380.000	0
1.3.2.5.2.6		ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)		517,685,550			497.368.650	650.100	963.433	498.982.183	18,703,367
1.3.2.5.2.6.2	1	Televisi	12 2024	15,300,000	4	11	0	0	255.000	255.000	15,045,000
1.3.2.5.2.6.5	1	Amplifier	12 1997	4,000,000	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0
1.3.2.5.2.6.5	2	Amplifier	12 2007	2,420,000	0	0	2.420.000	0	0	2.420.000	0
1.3.2.5.2.6.5	3	Amplifier	11 2009	5,808,000	0	0	5.808.000	0	0	5.808.000	0
1.3.2.5.2.6.7	17	Loudspeaker	12 2024	3,500,000	4	11	0	0	58.333	58.333	3,441,667
1.3.2.5.2.6.8	1	Sound System	10 2015	2,950,000	0	0	2.950.000	0	0	2.950.000	0
1.3.2.5.2.6.8	2	Sound System	11 2009	15,023,000	0	0	15.023.000	0	0	15.023.000	0
1.3.2.5.2.6.8	3	Sound System	12 2015	122,472,000	0	0	122.472.000	0	0	122.472.000	0
1.3.2.5.2.6.12	1	Wireless	12 2004	2,450,000	0	0	2.450.000	0	0	2.450.000	0
1.3.2.5.2.6.12	2	Wireless	12 2004	2,450,000	0	0	2.450.000	0	0	2.450.000	0
1.3.2.5.2.6.14	1	Microphone	12 2007	798,000	0	0	798.000	0	0	798.000	0
1.3.2.5.2.6.14	2	Microphone	12 2004	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.5.2.6.14	3	Microphone	12 2004	1,800,000	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000	0
1.3.2.5.2.6.14	4	Microphone	8 2017	750,000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
1.3.2.5.2.6.14	5	Microphone	8 2017	750,000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
1.3.2.5.2.6.14	6	Microphone	8 2017	750,000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
1.3.2.5.2.6.14	7	Microphone	8 2017	750,000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
1.3.2.5.2.6.14	8	Microphone	8 2017	750,000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
1.3.2.5.2.6.14	9	Microphone	8 2017	750,000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
1.3.2.5.2.6.17	1	Mic Conference	12 2004	12,900,000	0	0	12.900.000	0	0	12.900.000	0
1.3.2.5.2.6.17	2	Mic Conference	8 2017	725,000	0	0	725.000	0	0	725.000	0
1.3.2.5.2.6.17	3	Mic Conference	8 2017	725,000	0	0	725.000	0	0	725.000	0
1.3.2.5.2.6.17	4	Mic Conference	8 2017	725,000	0	0	725.000	0	0	725.000	0
1.3.2.5.2.6.17	5	Mic Conference	8 2017	725,000	0	0	725.000	0	0	725.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.6.17	6	Mic Conference	8 2017	725,000	0	0	725.000	0	0	725.000	0
1.3.2.5.2.6.17	7	Mic Conference	8 2017	725,000	0	0	725.000	0	0	725.000	0
1.3.2.5.2.6.17	8	Mic Conference	8 2017	725,000	0	0	725.000	0	0	725.000	0
1.3.2.5.2.6.21	1	Camera Video	4 2012	12,441,000	0	0	12.441.000	0	0	12.441.000	0
1.3.2.5.2.6.39	1	Mimbar/Podium	12 2004	1,975,000	0	0	1.975.000	0	0	1.975.000	0
1.3.2.5.2.6.48	1	Handy Cam	12 2007	7,500,000	0	0	7.500.000	0	0	7.500.000	0
1.3.2.5.2.6.77	6	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4 2012	11,715,000	0	0	11.715.000	0	0	11.715.000	0
1.3.2.5.2.6.77	7	Alat Rumah Tangga Lain-lain	7 2012	1,787,500	0	0	1.787.500	0	0	1.787.500	0
1.3.2.5.2.6.77	8	Alat Rumah Tangga Lain-lain	12 2015	74,958,000	0	0	74.958.000	0	0	74.958.000	0
1.3.2.5.2.6.77	9	Alat Rumah Tangga Lain-lain	5 2016	2,500,000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
1.3.2.5.2.6.77	11	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3 2020	6,501,000	0	2	4.984.100	650.100	650.100	6.284.300	216,700
1.3.2.5.2.6.2	2	Televisi	12 1997	2,250,000	0	0	2.250.000	0	0	2.250.000	0
1.3.2.5.2.6.2	3	Televisi	12 2004	6,789,000	0	0	6.789.000	0	0	6.789.000	0
1.3.2.5.2.6.2	4	Televisi	12 2007	4,975,000	0	0	4.975.000	0	0	4.975.000	0
1.3.2.5.2.6.2	5	Televisi	8 2015	4,977,500	0	0	4.977.500	0	0	4.977.500	0
1.3.2.5.2.6.5	1	Amplifier	12 2007	1,595,000	0	0	1.595.000	0	0	1.595.000	0
1.3.2.5.2.6.7	1	Loudspeaker	12 2005	1,155,000	0	0	1.155.000	0	0	1.155.000	0
1.3.2.5.2.6.7	2	Loudspeaker	12 2007	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.6.7	3	Loudspeaker	12 2007	2,190,000	0	0	2.190.000	0	0	2.190.000	0
1.3.2.5.2.6.8	1	Sound System	12 2003	15,527,500	0	0	15.527.500	0	0	15.527.500	0
1.3.2.5.2.6.8	2	Sound System	12 2005	18,760,500	0	0	18.760.500	0	0	18.760.500	0
1.3.2.5.2.6.8	3	Sound System	6 2017	22,950,000	0	0	22.950.000	0	0	22.950.000	0
1.3.2.5.2.6.12	1	Wireless	12 2005	3,390,750	0	0	3.390.750	0	0	3.390.750	0
1.3.2.5.2.6.23	1	Tustel	12 2007	7,150,000	0	0	7.150.000	0	0	7.150.000	0
1.3.2.5.2.6.36	1	Tangga Aluminium	12 2005	975,000	0	0	975.000	0	0	975.000	0
1.3.2.5.2.6.36	2	Tangga Aluminium	8 2015	4,977,500	0	0	4.977.500	0	0	4.977.500	0
1.3.2.5.2.6.38	1	Dispenser	12 2007	1,580,000	0	0	1.580.000	0	0	1.580.000	0
1.3.2.5.2.6.38	2	Dispenser	5 2009	1,660,000	0	0	1.660.000	0	0	1.660.000	0
1.3.2.5.2.6.38	3	Dispenser	5 2009	1,660,000	0	0	1.660.000	0	0	1.660.000	0
1.3.2.5.2.6.38	4	Dispenser	5 2009	1,660,000	0	0	1.660.000	0	0	1.660.000	0
1.3.2.5.2.6.39	1	Mimbar/Podium	12 2005	1,975,000	0	0	1.975.000	0	0	1.975.000	0
1.3.2.5.2.6.77	1	Alat Rumah Tangga Lain-lain	12 2005	9,850,000	0	0	9.850.000	0	0	9.850.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.6.77	2	Alat Rumah Tangga Lain-lain	12 2007	5,998,800	0	0	5.998.800	0	0	5.998.800	0
1.3.2.5.2.6.77	3	Alat Rumah Tangga Lain-lain	12 2007	4,530,000	0	0	4.530.000	0	0	4.530.000	0
1.3.2.5.2.6.77	6	Alat Rumah Tangga Lain-lain	11 2013	23,335,500	0	0	23.335.500	0	0	23.335.500	0
1.3.2.5.2.6.77	7	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6 2014	41,550,000	0	0	41.550.000	0	0	41.550.000	0
1.3.2.5.2.6.77	9	Alat Rumah Tangga Lain-lain	8 2015	1,900,000	0	0	1.900.000	0	0	1.900.000	0
1.3.2.5.2.7		ALAT PEMADAM KEBAKARAN		16,490,000			16.490.000	0	0	16.490.000	0
1.3.2.5.2.7.1	6	Alat Pemadam/Portable	12 2015	2,590,000	0	0	2.590.000	0	0	2.590.000	0
1.3.2.5.2.7.1	7	Alat Pemadam/Portable	12 2015	6,475,000	0	0	6.475.000	0	0	6.475.000	0
1.3.2.5.2.7.1	1	Alat Pemadam/Portable	12 2005	1,485,000	0	0	1.485.000	0	0	1.485.000	0
1.3.2.5.2.7.1	2	Alat Pemadam/Portable	12 2005	1,485,000	0	0	1.485.000	0	0	1.485.000	0
1.3.2.5.2.7.1	3	Alat Pemadam/Portable	12 2005	1,485,000	0	0	1.485.000	0	0	1.485.000	0
1.3.2.5.2.7.1	4	Alat Pemadam/Portable	12 2005	1,485,000	0	0	1.485.000	0	0	1.485.000	0
1.3.2.5.2.7.1	5	Alat Pemadam/Portable	12 2005	1,485,000	0	0	1.485.000	0	0	1.485.000	0
1.3.2.5.3		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		165,011,875			158.061.875	0	115.833	158.177.708	6,834,167
1.3.2.5.3.1		MEJA KERJA PEJABAT		34,715,750			34.715.750	0	0	34.715.750	0
1.3.2.5.3.1.5	1	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12 2005	4,974,750	0	0	4.974.750	0	0	4.974.750	0
1.3.2.5.3.1.5	2	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12 2005	4,974,750	0	0	4.974.750	0	0	4.974.750	0
1.3.2.5.3.1.5	3	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12 2005	4,974,750	0	0	4.974.750	0	0	4.974.750	0
1.3.2.5.3.1.5	4	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12 2005	4,974,750	0	0	4.974.750	0	0	4.974.750	0
1.3.2.5.3.1.5	6	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12 2005	4,974,750	0	0	4.974.750	0	0	4.974.750	0
1.3.2.5.3.1.6	1	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5 2016	9,842,000	0	0	9.842.000	0	0	9.842.000	0
1.3.2.5.3.3		KURSI KERJA PEJABAT		37,159,225			30.209.225	0	115.833	30.325.058	6,834,167
1.3.2.5.3.3.4	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 2012	3,804,000	0	0	3.804.000	0	0	3.804.000	0
1.3.2.5.3.3.4	2	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	5 2016	4,490,000	0	0	4.490.000	0	0	4.490.000	0
1.3.2.5.3.3.5	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12 2005	1,745,075	0	0	1.745.075	0	0	1.745.075	0
1.3.2.5.3.3.5	2	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12 2005	1,745,075	0	0	1.745.075	0	0	1.745.075	0
1.3.2.5.3.3.5	3	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12 2005	1,745,075	0	0	1.745.075	0	0	1.745.075	0
1.3.2.5.3.3.5	5	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 2016	4,155,000	0	0	4.155.000	0	0	4.155.000	0
1.3.2.5.3.3.5	6	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12 2024	6,950,000	4	11	0	0	115.833	115.833	6,834,167
1.3.2.5.3.3.6	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5 2016	2,695,000	0	0	2.695.000	0	0	2.695.000	0
1.3.2.5.3.3.6	2	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5 2016	2,695,000	0	0	2.695.000	0	0	2.695.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.3.3.8	1	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5 2016	635,000	0	0	635.000	0	0	635.000	0
1.3.2.5.3.3.8	2	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5 2016	635,000	0	0	635.000	0	0	635.000	0
1.3.2.5.3.3.8	3	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5 2016	635,000	0	0	635.000	0	0	635.000	0
1.3.2.5.3.3.8	4	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5 2016	635,000	0	0	635.000	0	0	635.000	0
1.3.2.5.3.3.8	5	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5 2016	635,000	0	0	635.000	0	0	635.000	0
1.3.2.5.3.3.8	1	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	12 2005	3,960,000	0	0	3.960.000	0	0	3.960.000	0
1.3.2.5.3.4		KURSI RAPAT PEJABAT		30,292,900			30.292.900	0	0	30.292.900	0
1.3.2.5.3.4.2	1	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	12 2005	3,940,200	0	0	3.940.200	0	0	3.940.200	0
1.3.2.5.3.4.7	1	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	12 2005	22,412,500	0	0	22.412.500	0	0	22.412.500	0
1.3.2.5.3.4.5	1	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	12 2005	3,940,200	0	0	3.940.200	0	0	3.940.200	0
1.3.2.5.3.7		LEMARI DAN ARSIP PEJABAT		62,844,000			62.844.000	0	0	62.844.000	0
1.3.2.5.3.7.7	1	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	12 2005	5,099,600	0	0	5.099.600	0	0	5.099.600	0
1.3.2.5.3.7.7	2	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	12 2005	5,099,600	0	0	5.099.600	0	0	5.099.600	0
1.3.2.5.3.7.7	3	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10 2009	9,812,500	0	0	9.812.500	0	0	9.812.500	0
1.3.2.5.3.7.7	4	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10 2009	9,812,500	0	0	9.812.500	0	0	9.812.500	0
1.3.2.5.3.7.6	1	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	12 2005	11,899,800	0	0	11.899.800	0	0	11.899.800	0
1.3.2.5.3.7.7	1	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	12 2009	7,040,000	0	0	7.040.000	0	0	7.040.000	0
1.3.2.5.3.7.7	2	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	12 2009	7,040,000	0	0	7.040.000	0	0	7.040.000	0
1.3.2.5.3.7.7	3	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	12 2009	7,040,000	0	0	7.040.000	0	0	7.040.000	0
1.3.2.6		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR									
1.3.2.6.1		ALAT STUDIO		263,069,000			152.788.000	360.000	1.832.016	154.980.016	108,088,984
1.3.2.6.1.1		PERALATAN STUDIO AUDIO		98,418,000			40.758.000	360.000	955.000	42.073.000	56,345,000
1.3.2.6.1.1.7	1	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	12 2024	49,800,000	4	11	0	0	830.000	830.000	48,970,000
1.3.2.6.1.1.36	1	Microphone/Wireless MIC	11 2013	13,700,000	0	0	13.700.000	0	0	13.700.000	0
1.3.2.6.1.1.48	1	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 2016	1,287,000	0	0	1.287.000	0	0	1.287.000	0
1.3.2.6.1.1.48	2	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 2016	1,287,000	0	0	1.287.000	0	0	1.287.000	0
1.3.2.6.1.1.48	3	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 2016	1,287,000	0	0	1.287.000	0	0	1.287.000	0
1.3.2.6.1.1.48	4	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 2016	1,287,000	0	0	1.287.000	0	0	1.287.000	0
1.3.2.6.1.1.48	5	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 2016	1,287,000	0	0	1.287.000	0	0	1.287.000	0
1.3.2.6.1.1.48	6	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 2016	1,287,000	0	0	1.287.000	0	0	1.287.000	0
1.3.2.6.1.1.48	7	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6 2018	1,848,000	0	0	1.848.000	0	0	1.848.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.6.1.1.48	8	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6 2018	1,848,000	0	0	1.848.000	0	0	1.848.000	0
1.3.2.6.1.1.48	9	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7 2019	1,200,000	0	0	1.080.000	120.000	0	1.200.000	0
1.3.2.6.1.1.48	10	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7 2019	1,200,000	0	0	1.080.000	120.000	0	1.200.000	0
1.3.2.6.1.1.48	11	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7 2019	1,200,000	0	0	1.080.000	120.000	0	1.200.000	0
1.3.2.6.1.1.48	12	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12 2024	1,500,000	4	11	0	0	25.000	25.000	1,475,000
1.3.2.6.1.1.48	13	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12 2024	1,500,000	4	11	0	0	25.000	25.000	1,475,000
1.3.2.6.1.1.48	14	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12 2024	1,500,000	4	11	0	0	25.000	25.000	1,475,000
1.3.2.6.1.1.48	15	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12 2024	1,500,000	4	11	0	0	25.000	25.000	1,475,000
1.3.2.6.1.1.48	16	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12 2024	1,500,000	4	11	0	0	25.000	25.000	1,475,000
1.3.2.6.1.1.72	1	Audio Cassette Recorder	3 2012	800,000	0	0	800.000	0	0	800.000	0
1.3.2.6.1.1.72	2	Audio Cassette Recorder	3 2012	800,000	0	0	800.000	0	0	800.000	0
1.3.2.6.1.1.36	1	Microphone/Wireless MIC	6 2014	10,800,000	0	0	10.800.000	0	0	10.800.000	0
1.3.2.6.1.2		PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM		164,651,000			112.030.000	0	877.016	112.907.016	51,743,984
1.3.2.6.1.2.60	3	Camera Film	3 2012	14,750,000	0	0	14.750.000	0	0	14.750.000	0
1.3.2.6.1.2.105	2	Layar Film/Projector	11 2013	19,750,000	0	0	19.750.000	0	0	19.750.000	0
1.3.2.6.1.2.105	3	Layar Film/Projector	12 2015	9,955,000	0	0	9.955.000	0	0	9.955.000	0
1.3.2.6.1.2.105	4	Layar Film/Projector	12 2015	9,955,000	0	0	9.955.000	0	0	9.955.000	0
1.3.2.6.1.2.105	5	Layar Film/Projector	5 2016	11,550,000	0	0	11.550.000	0	0	11.550.000	0
1.3.2.6.1.2.105	6	Layar Film/Projector	5 2016	11,550,000	0	0	11.550.000	0	0	11.550.000	0
1.3.2.6.1.2.126	1	Camera Digital	12 2024	26,321,000	4	11	0	0	438.683	438.683	25,882,317
1.3.2.6.1.2.126	2	Camera Digital	12 2024	26,300,000	4	11	0	0	438.333	438.333	25,861,667
1.3.2.6.1.2.105	1	Layar Film/Projector	8 2013	34,520,000	0	0	34.520.000	0	0	34.520.000	0
1.3.2.6.2		ALAT KOMUNIKASI		86,135,000			86.135.000	0	0	86.135.000	0
1.3.2.6.2.1		ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE		78,160,000			78.160.000	0	0	78.160.000	0
1.3.2.6.2.1.1	2	Telephone (PABX)	11 2009	34,950,000	0	0	34.950.000	0	0	34.950.000	0
1.3.2.6.2.1.10	2	Facsimile	3 2015	8,200,000	0	0	8.200.000	0	0	8.200.000	0
1.3.2.6.2.1.10	3	Facsimile	12 2015	6,545,000	0	0	6.545.000	0	0	6.545.000	0
1.3.2.6.2.1.1	1	Telephone (PABX)	12 2003	28,465,000	0	0	28.465.000	0	0	28.465.000	0
1.3.2.6.2.6		ALAT KOMUNIKASI SOSIAL		7,975,000			7.975.000	0	0	7.975.000	0
1.3.2.6.2.6.2	1	Wireless Amplifier	12 2009	7,975,000	0	0	7.975.000	0	0	7.975.000	0
1.3.2.8		ALAT LABORATORIUM									
1.3.2.8.1		UNIT ALAT LABORATORIUM		11,902,000			11.902.000	0	0	11.902.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.8.1.56	1	ALAT LABORATORIUM LAIN	12 2005	11,902,000			11.902.000	0	0	11.902.000	0
1.3.2.8.1.56.81		Meja Kerja		11,902,000	0	0	11.902.000	0	0	11.902.000	0
1.3.2.10		KOMPUTER									
1.3.2.10.1	2	KOMPUTER UNIT		841,775,800			556.795.360	15.664.625	23.423.792	595.883.777	245,892,023
1.3.2.10.1.1		KOMPUTER JARINGAN		69,805,000			0	0	1.454.271	1.454.271	68,350,729
1.3.2.10.1.1.4		Internet		69,805,000	3	11	0	0	1.454.271	1.454.271	68,350,729
1.3.2.10.1.2	11	PERSONAL KOMPUTER		771,970,800			556.795.360	15.664.625	21.969.521	594.429.506	177,541,294
1.3.2.10.1.2.1		P.C Unit		12,000,000	0	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0
1.3.2.10.1.2.1		P.C Unit		12,000,000	0	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0
1.3.2.10.1.2.1	12	P.C Unit	9 2009	12,000,000	0	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0
1.3.2.10.1.2.1	15	P.C Unit	11 2011	12,494,000	0	0	12.494.000	0	0	12.494.000	0
1.3.2.10.1.2.1	17	P.C Unit	11 2011	12,494,000	0	0	12.494.000	0	0	12.494.000	0
1.3.2.10.1.2.1	19	P.C Unit	4 2012	12,676,400	0	0	12.676.400	0	0	12.676.400	0
1.3.2.10.1.2.1	35	P.C Unit	7 2012	16,966,000	0	0	16.966.000	0	0	16.966.000	0
1.3.2.10.1.2.1	36	P.C Unit	7 2012	7,475,000	0	0	7.475.000	0	0	7.475.000	0
1.3.2.10.1.2.1	41	P.C Unit	4 2012	12,676,400	0	0	12.676.400	0	0	12.676.400	0
1.3.2.10.1.2.1	43	P.C Unit	11 2013	29,700,000	0	0	29.700.000	0	0	29.700.000	0
1.3.2.10.1.2.1	44	P.C Unit	10 2014	14,900,000	0	0	14.900.000	0	0	14.900.000	0
1.3.2.10.1.2.1	45	P.C Unit	9 2015	13,950,000	0	0	13.950.000	0	0	13.950.000	0
1.3.2.10.1.2.1	46	P.C Unit	12 2015	14,750,000	0	0	14.750.000	0	0	14.750.000	0
1.3.2.10.1.2.1	47	P.C Unit	12 2015	14,750,000	0	0	14.750.000	0	0	14.750.000	0
1.3.2.10.1.2.1	48	P.C Unit	3 2016	9,982,500	0	0	9.982.500	0	0	9.982.500	0
1.3.2.10.1.2.1	49	P.C Unit	3 2016	9,982,500	0	0	9.982.500	0	0	9.982.500	0
1.3.2.10.1.2.1	50	P.C Unit	3 2016	9,982,500	0	0	9.982.500	0	0	9.982.500	0
1.3.2.10.1.2.1	51	P.C Unit	3 2016	9,982,500	0	0	9.982.500	0	0	9.982.500	0
1.3.2.10.1.2.1	52	P.C Unit	3 2016	9,982,500	0	0	9.982.500	0	0	9.982.500	0
1.3.2.10.1.2.1	53	P.C Unit	6 2018	13,353,000	0	0	13.353.000	0	0	13.353.000	0
1.3.2.10.1.2.1	54	P.C Unit	6 2018	13,353,000	0	0	13.353.000	0	0	13.353.000	0
1.3.2.10.1.2.1	55	P.C Unit	7 2019	9,866,667	0	0	9.866.667	0	0	9.866.667	0
1.3.2.10.1.2.1	56	P.C Unit	7 2019	9,866,667	0	0	9.866.667	0	0	9.866.667	0
1.3.2.10.1.2.1	57	P.C Unit	7 2019	9,866,666	0	0	9.866.666	0	0	9.866.666	0
1.3.2.10.1.2.1	58	P.C Unit	7 2021	12,115,625	0	6	7.572.265	1.514.453	1.514.453	10.601.171	1,514,454
1.3.2.10.1.2.1	59	P.C Unit	7 2021	12,115,625	0	6	7.572.265	1.514.453	1.514.453	10.601.171	1,514,454



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.10.1.2.1	60	P.C Unit	7 2021	12,115,625	0	6	7.572.265	1.514.453	1.514.453	10.601.171	1,514,454
1.3.2.10.1.2.1	61	P.C Unit	7 2021	12,115,625	0	6	7.572.265	1.514.453	1.514.453	10.601.171	1,514,454
1.3.2.10.1.2.1	62	P.C Unit	4 2023	15,000,000	2	3	2.812.500	1.875.000	1.875.000	6.562.500	8,437,500
1.3.2.10.1.2.1	63	P.C Unit	6 2024	14,188,500	6	10	0	591.188	3.547.124	4.138.312	10,050,188
1.3.2.10.1.2.1	64	P.C Unit	6 2024	14,188,500	0	0	0	0	0	0	14,188,500
1.3.2.10.1.2.1	65	P.C Unit	12 2024	20,000,000	3	11	0	0	416.667	416.667	19,583,333
1.3.2.10.1.2.1	66	P.C Unit	12 2024	20,000,000	3	11	0	0	416.667	416.667	19,583,333
1.3.2.10.1.2.1	67	P.C Unit	12 2024	20,000,000	3	11	0	0	416.667	416.667	19,583,333
1.3.2.10.1.2.1	68	P.C Unit	12 2024	20,000,000	3	11	0	0	416.667	416.667	19,583,333
1.3.2.10.1.2.1	69	P.C Unit	12 2024	20,000,000	3	11	0	0	416.667	416.667	19,583,333
1.3.2.10.1.2.2	3	Lap Top	3 2010	19,800,000	0	0	19.800.000	0	0	19.800.000	0
1.3.2.10.1.2.2	4	Lap Top	3 2016	7,700,000	0	0	7.700.000	0	0	7.700.000	0
1.3.2.10.1.2.2	5	Lap Top	3 2016	7,700,000	0	0	7.700.000	0	0	7.700.000	0
1.3.2.10.1.2.2	6	Lap Top	3 2016	7,700,000	0	0	7.700.000	0	0	7.700.000	0
1.3.2.10.1.2.2	7	Lap Top	3 2016	7,700,000	0	0	7.700.000	0	0	7.700.000	0
1.3.2.10.1.2.2	8	Lap Top	7 2019	9,470,000	0	0	9.470.000	0	0	9.470.000	0
1.3.2.10.1.2.2	9	Lap Top	7 2021	13,600,000	0	6	8.500.000	1.700.000	1.700.000	11.900.000	1,700,000
1.3.2.10.1.2.2	10	Lap Top	7 2021	13,600,000	0	6	8.500.000	1.700.000	1.700.000	11.900.000	1,700,000
1.3.2.10.1.2.2	11	Lap Top	7 2021	13,600,000	0	6	8.500.000	1.700.000	1.700.000	11.900.000	1,700,000
1.3.2.10.1.2.2	12	Lap Top	6 2024	7,950,000	3	5	0	165.625	993.750	1.159.375	6,790,625
1.3.2.10.1.2.3	3	Note Book	5 2011	14,600,000	0	0	14.600.000	0	0	14.600.000	0
1.3.2.10.1.2.3	8	Note Book	5 2011	14,600,000	0	0	14.600.000	0	0	14.600.000	0
1.3.2.10.1.2.3	12	Note Book	4 2012	14,520,000	0	0	14.520.000	0	0	14.520.000	0
1.3.2.10.1.2.3	16	Note Book	9 2015	8,900,000	0	0	8.900.000	0	0	8.900.000	0
1.3.2.10.1.2.3	17	Note Book	12 2015	8,888,000	0	0	8.888.000	0	0	8.888.000	0
1.3.2.10.1.2.3	18	Note Book	12 2015	8,888,000	0	0	8.888.000	0	0	8.888.000	0
1.3.2.10.1.2.3	19	Note Book	12 2024	10,500,000	3	11	0	0	218.750	218.750	10,281,250
1.3.2.10.1.2.3	20	Note Book	12 2024	10,500,000	3	11	0	0	218.750	218.750	10,281,250
1.3.2.10.1.2.1	3	P.C Unit	7 2009	14,800,000	0	0	14.800.000	0	0	14.800.000	0
1.3.2.10.1.2.1	4	P.C Unit	12 2009	14,905,000	0	0	14.905.000	0	0	14.905.000	0
1.3.2.10.1.2.1	5	P.C Unit	7 2013	14,800,000	0	0	14.800.000	0	0	14.800.000	0
1.3.2.10.1.2.1	6	P.C Unit	6 2014	14,760,000	0	0	14.760.000	0	0	14.760.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.10.1.2.1	7	P.C Unit	4 2023	15,000,000	2	3	2.812.500	1.875.000	1.875.000	6.562.500	8,437,500
1.3.2.10.1.2.2	1	Lap Top	7 2009	12,600,000	0	0	12.600.000	0	0	12.600.000	0
1.3.2.10.2		PERALATAN KOMPUTER		110,244,500			78.632.345	2.437.220	2.877.590	83.947.155	26,297,345
1.3.2.10.2.3		PERALATAN PERSONAL KOMPUTER		107,244,500			78.632.345	2.437.220	2.815.090	83.884.655	23,359,845
1.3.2.10.2.3.3	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12 2007	2,146,375	0	0	2.146.375	0	0	2.146.375	0
1.3.2.10.2.3.3	2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12 2007	2,146,375	0	0	2.146.375	0	0	2.146.375	0
1.3.2.10.2.3.3	4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11 2011	2,406,000	0	0	2.406.000	0	0	2.406.000	0
1.3.2.10.2.3.3	5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11 2011	2,406,000	0	0	2.406.000	0	0	2.406.000	0
1.3.2.10.2.3.3	6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8 2011	7,350,000	0	0	7.350.000	0	0	7.350.000	0
1.3.2.10.2.3.3	7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8 2011	1,400,000	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000	0
1.3.2.10.2.3.3	9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4 2012	2,288,000	0	0	2.288.000	0	0	2.288.000	0
1.3.2.10.2.3.3	10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4 2012	2,288,000	0	0	2.288.000	0	0	2.288.000	0
1.3.2.10.2.3.3	11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4 2012	2,288,000	0	0	2.288.000	0	0	2.288.000	0
1.3.2.10.2.3.3	12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7 2012	2,420,000	0	0	2.420.000	0	0	2.420.000	0
1.3.2.10.2.3.3	13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3 2016	3,465,000	0	0	3.465.000	0	0	3.465.000	0
1.3.2.10.2.3.3	15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3 2016	4,125,000	0	0	4.125.000	0	0	4.125.000	0
1.3.2.10.2.3.3	16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3 2016	4,125,000	0	0	4.125.000	0	0	4.125.000	0
1.3.2.10.2.3.3	17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3 2016	4,125,000	0	0	4.125.000	0	0	4.125.000	0
1.3.2.10.2.3.3	18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3 2016	4,125,000	0	0	4.125.000	0	0	4.125.000	0
1.3.2.10.2.3.3	19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9 2017	4,164,000	0	0	4.164.000	0	0	4.164.000	0
1.3.2.10.2.3.3	20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6 2018	4,102,000	0	0	4.102.000	0	0	4.102.000	0
1.3.2.10.2.3.3	21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6 2018	4,102,000	0	0	4.102.000	0	0	4.102.000	0
1.3.2.10.2.3.3	22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7 2021	2,519,550	0	6	1.574.719	314.944	314.943	2.204.606	314,944
1.3.2.10.2.3.3	23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7 2021	2,519,550	0	6	1.574.719	314.944	314.943	2.204.606	314,944
1.3.2.10.2.3.3	24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7 2021	2,519,550	0	6	1.574.719	314.944	314.943	2.204.606	314,944
1.3.2.10.2.3.3	25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7 2021	2,519,550	0	6	1.574.719	314.944	314.943	2.204.606	314,944
1.3.2.10.2.3.3	26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7 2021	2,519,550	0	6	1.574.719	314.944	314.943	2.204.606	314,944
1.3.2.10.2.3.3	27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5 2023	3,450,000	2	4	575.000	431.250	431.250	1.437.500	2,012,500
1.3.2.10.2.3.3	28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12 2024	18,138,000	3	11	0	0	377.875	377.875	17,760,125
1.3.2.10.2.3.2	1	Monitor	7 2009	7,650,000	0	0	7.650.000	0	0	7.650.000	0
1.3.2.10.2.3.3	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7 2013	2,487,000	0	0	2.487.000	0	0	2.487.000	0
1.3.2.10.2.3.3	2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5 2023	3,450,000	2	4	575.000	431.250	431.250	1.437.500	2,012,500



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.10.2.4	1	PERALATAN JARINGAN	12 2024	3,000,000			0	0	62.500	62.500	2,937,500
1.3.2.10.2.4.23		Wireless Access Point		3,000,000	3	11	0	0	62.500	62.500	2,937,500
3		GEDUNG DAN BANGUNAN		8,697,575,714			2,355,667,393	88,460,631	88,460,631	2,532,588,655	6,164,987,059
1.3.3.1		BANGUNAN GEDUNG		8,639,015,714			2.332.145.793	87.875.031	87.875.031	2.507.895.855	6,131,119,859
1.3.3.1.1	2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	9 2014	6,612,133,300			1.511.854.090	67.273.079	67.273.079	1.646.400.248	4,965,733,052
1.3.3.1.1.1		BANGUNAN GEDUNG KANTOR		5,319,202,300	39	8	992.917.763	53.192.023	53.192.023	1.099.301.809	4,219,900,491
1.3.3.1.1.1.1		Bangunan Gedung Kantor Permanen		310,041,000	29	11	118.332.315	3.100.410	3.100.410	124.533.135	185,507,865
1.3.3.1.1.1.1		Bangunan Gedung Kantor Permanen		530,108,000	18	11	273.070.415	6.452.826	6.452.826	285.976.067	244,131,933
1.3.3.1.1.1.1		Bangunan Gedung Kantor Permanen		452,782,000	34	11	127.533.597	4.527.820	4.527.820	136.589.237	316,192,763
1.3.3.1.1.1.1		Bangunan Gedung Kantor Permanen		1,031,250,000			371.888.493	10.329.423	10.329.423	392.547.339	638,702,661
1.3.3.1.1.9		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN		1,031,250,000	30	11	371.888.493	10.329.423	10.329.423	392.547.339	638,702,661
1.3.3.1.1.9.1		Bangunan Gedung Pertemuan Permanen		949,040,260			447.704.327	9.806.607	9.806.607	467.317.541	481,722,719
1.3.3.1.1.10		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN		39,500,000	39	11	7.175.833	395.000	395.000	7.965.833	31,534,167
1.3.3.1.1.10.5		Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)		909,540,260	23	11	440.528.494	9.411.607	9.411.607	459.351.708	450,188,552
1.3.3.1.1.10.1	1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	4 2023	46,592,154	48	3	698.883	465.922	465.922	1.630.727	44,961,427
1.3.3.1.1.1.37		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA		46,592,154			698.883	465.922	465.922	1.630.727	44,961,427
1.3.3.1.1.1.37.1		Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya		58,560,000			23.521.600	585.600	585.600	24.692.800	33,867,200
1.3.3.1.2		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		58,560,000			23.521.600	585.600	585.600	24.692.800	33,867,200
1.3.3.1.2.5	1	ASRAMA	12 2003	58,560,000	28	11	23.521.600	585.600	585.600	24.692.800	33,867,200
1.3.3.1.2.5.1		Asrama Permanen		264,662,692			34,817,428	1,966,979	2,287,759	39,072,166	225,590,526
4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI									
1.3.4.2		BANGUNAN AIR		2,936,650			666.863	36.708	36.708	740.279	2,196,371
1.3.4.2.6	1	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	12 2014	2,936,650			666.863	36.708	36.708	740.279	2,196,371
1.3.4.2.6.3		BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU		2,936,650	29	11	666.863	36.708	36.708	740.279	2,196,371
1.3.4.2.6.3.3		Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain									
1.3.4.3		INSTALASI		115,481,042			0	0	320.781	320.781	115,160,261
1.3.4.3.1		INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU		115,481,042			0	0	320.781	320.781	115,160,261
1.3.4.3.1.2		INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR									



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.4.3.1.2.2	1	Instalasi Air Sumber / Mata Air Kapasitas Sedang	12 2024	115,481,042	29	11	0	0	320.781	320.781	115,160,261
1.3.4.3.6		INSTALASI GARDU LISTRIK		121,715,000			26.655.292	1.521.438	1.521.437	29.698.167	92,016,833
1.3.4.3.6.3		INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK		121,715,000			26.655.292	1.521.438	1.521.437	29.698.167	92,016,833
1.3.4.3.6.3.3	2	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Besar	9 2014	51,920,000	29	8	12.114.667	649.000	649.000	13.412.667	38,507,333
1.3.4.3.6.3.3	7	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Besar	9 2015	69,795,000	30	8	14.540.625	872.438	872.437	16.285.500	53,509,500
1.3.4.3.7		INSTALASI PERTAHANAN		24,530,000			7.495.273	408.833	408.833	8.312.939	16,217,061
1.3.4.3.7.1		INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT		24,530,000			7.495.273	408.833	408.833	8.312.939	16,217,061
1.3.4.3.7.1.4	3	Instalasi Komunikasi Elektronik (KOMLEK)	11 2014	24,530,000	19	10	7.495.273	408.833	408.833	8.312.939	16,217,061
5		ASET TETAP LAINNYA		11,573,000			0	0	0	0	11,573,000
1.3.5.1		BAHAN PERPUSTAKAAN									
1.3.5.1.1		BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		10,973,000			0	0	0	0	10,973,000
1.3.5.1.1.1		BUKU UMUM		9,393,000			0	0	0	0	9,393,000
1.3.5.1.1.1.5	1	Ilmu Perpustakaan	12 2003	9,393,000	0	0	0	0	0	0	9,393,000
1.3.5.1.1.4		BUKU ILMU SOSIAL		1,580,000			0	0	0	0	1,580,000
1.3.5.1.1.4.4	1	Ekonomi	12 2003	1,580,000	0	0	0	0	0	0	1,580,000
1.3.5.1.5		KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)		600,000			0	0	0	0	600,000
1.3.5.1.5.1		KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)		600,000			0	0	0	0	600,000
1.3.5.1.5.1.1	1	Karya Seni Asli, Lukisan Asli (Art Original)	12 1989	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
1.3.5.1.5.1.6	1	Karya Seni Lain-lain	12 1995	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
Jumlah Aset Tetap				14,824,395,381			7.582.184.240	130.014.698	135.038.963	7.847.237.901	6,977,157,480
Aset Tetap yang dihapuskan				99,356,400							
3		GEDUNG DAN BANGUNAN		99,356,400			0	0	0	0	99,356,400
1.3.3.1		BANGUNAN GEDUNG									
1.3.3.1.1		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		99,356,400			0	0	0	0	99,356,400
1.3.3.1.1.1		BANGUNAN GEDUNG KANTOR		99,356,400			0	0	0	0	99,356,400
1.3.3.1.1.1.1	4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	10 2024	99,356,400	0	0	0	0	0	0	99,356,400



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
Jumlah Aset Tetap yang dihapuskan				99,356,400			0	0	0	0	99,356,400
Jumlah				14,923,751,781			7.582.184.240	130.014.698	135.038.963	7.847.237.901	7,076,513,880

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025

Nomor SPM: 51.00/03.0/000004/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BALI

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Nama Unit SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Nama : Terlampir
No. Rekening Bank : 0000000000
Nama di Rekening Bank : Terlampir
Nama Bank - Cabang : Bank BPD BALI - Renon
NPWP : 0000000000000000
Dasar Pembayaran : 51.00/01.0/000001/2.17.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025

Untuk Keperluan:

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Kondisi Kerja PNS pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan UPTD. Diklat Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Bali untuk bulan Des. 2024

Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NOMOR SPD: 51.00/01.0/000001/2.17.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025		
2.17.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2.17.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp250.298.217,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp41.671.715,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp105.442.839,00
Jumlah		Rp397.412.771,00

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
1	PPH 21	040461741011908	Rp32.968.077,00
Jumlah			Rp32.968.077,00

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp397.412.771,00
Jumlah Potongan	Rp32.968.077,00
Jumlah Netto	Rp364.444.694,00
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp397.412.771,00

Uang Sejumlah: (Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah)

Jumlah SPP Diminta

Rp397.412.771,00

Nomor dan Tanggal SPP:

51.00/02.0/000004/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025, tanggal 09 Januari 2025

Denpasar, 09 Januari 2025
PENGUNA ANGGARAN



SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran

CATATAN HASIL REVIU (CHR)
LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI

 PEMERINTAH PROVINSI BALI INSPEKTORAT DAERAH	Disusun oleh/ Tanggal	A A Gde Agung Budayana / 11 Februari 2025	h
	Diteliti oleh/ Tanggal	Luh Nyoman Riani / 13 Februari 2025	
	Disetujui oleh/ Tanggal	Rai Devia Ayub / 13 Februari 2025	dr

CATATAN HASIL REVIU
LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

Sehubungan dengan penugasan Inspektur Daerah Provinsi Bali Nomor 31 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 untuk melaksanakan Reviu atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu (CHR) sebagai berikut:

Uraian Catatan Hasil Reviu	Indeks KKR

PENYELENGGARAAN AKUNTANSI:

Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berpedoman pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN:

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Berdasarkan hasil reviu **penelusuran angka** atas saldo akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yaitu:

Uraian	Onface LRA		Ket
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4
Pendapatan Asli Daerah	0	0	
Retribusi Daerah	0	0	
Lain-Lain PAD yang Sah	0	0	
Belanja Daerah	26,251,229,311.00	23,791,258,861.75	

KKR PA /
KKR-LRA

Belanja Operasi	25.490.528.961,00	23.137.155.320,06	
Belanja Pegawai	12.285.642.851,00	10.801.409.908,00	
Belanja Barang dan Jasa	13.179.886.100,00	12.310.745.412,06	
Belanja Subsidi	25.000.000,00	25.000.000,00	
Belanja Hibah	0	0	
Belanja Modal	760.700.350,00	654.103.541,69	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	530.444.200,00	468.817.500,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	230.256.150	185.286.041,69	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	

Berdasarkan hasil rewiu **penelusuran angka** atas realisasi Onface Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dengan Calk telah **sesuai** yaitu:

Uraian	Onface realisasi pada LRA dan CALK		Ket
	LRA (Rp)	CALK (Rp)	
1	2	3	4
Pendapatan Asli Daerah	0	0	
Retribusi Daerah	0	0	
Lain-Lain PAD yang Sah	0	0	
Belanja Daerah	26.251.229.311,00	26.251.229.311,00	
Belanja Operasi	25.490.528.961,00	25.490.528.961,00	
Belanja Pegawai	12.285.642.851,00	12.285.642.851,00	
Belanja Barang dan Jasa	13.179.886.100,00	13.179.886.100,00	
Belanja Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00	
Belanja Modal	0	0	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	760.700.350,00	760.700.350,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	530.444.200,00	530.444.200,00	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	230.256.150	230.256.150	

Rekomendasi:

B. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Berdasarkan hasil rewiu atas **penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**, telah sesuai sebagai berikut:

Uraian	CaLK (Rp)	Onface LO (Rp)	Ket
1	2	3	4
BEBAN	23.231.998.397,06	23.231.998.397,06	
BEBAN OPERASI	22.966.944.736,06	22.966.944.736,06	

KKR PA /
KKR-LO

Beban Pegawai	10.709.689.650,00	10.709.689.650,00	
Beban Barang dan Jasa	12.232.255.086,06	12.232.255.086,06	
Beban Subsidi	25.000.000,00	25.000.000,00	
Beban Hibah	0,00	0,00	
BEBAN PENYUSUTAN	265.053.661,00	265.053.661,00	
Beban Penyusutan	265.053.661,00	265.053.661,00	

Rekomendasi:

C. NERACA

Berdasarkan hasil revidi penelusuran angka atas saldo akun **Neraca** atas penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), terdapat ketidaksesuaian sebagai berikut:

1. Belum disajikan/ diungkap kelengkapan dokumen pendukung **Berita Acara Reklas Nomor : B.17.000.2.32/11/SET/DISKOP.UKM Tanggal 30 Januari 2025** pada akun : Jalan, Jaringan dan Irigasi terkait pengurangan aset yaitu :

Pengurangan tahun 2024 (reklas aasettetap tahun berjalan ke **Peralatan dan Mesin**) sebesar 69.805.000,00 pada Hal 63 Calk sesuai data berikut :

No	Uraian	Jumlah	
1	Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024	Rp.	
2	Saldo Awal Tahun 2024	Rp.	149.181.650,00
3	Penambahan Tahun 2024	Rp.	185.286.041,69
	a Belanja Modal		185.286.041,69
4	Pengurangan Tahun 2024 (Reklas Aset Tetap Tahun Berjalan ke Peralatan dan Mesin)	Rp.	69.805.000,00
	Saldo Akhir Jalan, Jaringan dan Irigasi: sd. 31 Desember 2024	Rp.	264.662.691,69

KKR PA /
KKR-NRC

2. Belum adanya pengungkapan nomor bukti penyetoran sisa kas sebesar Rp.605.613,00 ke Kas Daerah pada tanggal 17 Desember 2024 padaCaLK hal (65) Sbb:

Uang Muka Dari Kas Daerah

Rp.00,00

Tidak ada Uang Muka dari Kas Daerah karena sisa kas sebesar Rp.605.613,00 sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 17 Desember 2024 sehingga Kas pada Bendahara Pengeluaran Nihil.

3. Belum adanya Pengungkapan akun utang belanja pada Calk hal (65) dirinci besaran masing- masing hutang yaitu besaran utang yang dibayarkan bulan Januari 2025 :

➤ pembayaran listrik, telpon dan air yang pemakaiannya bulan Desember 2024 serta utang

- Pembayaran Utang Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Kondisi Kerja
- Pembayaran kekurangan BPJS Kesehatan 4% dari Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember 2024

Rekomendasi:

- Memastikan kembali pencatatan/penyajian atas saldo akun-akun Neraca dalam Lampiran/Dokumen pendukungnya.
- Melakukan pengungkapan/penyajian akun Neraca secara penuh dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Berdasarkan hasil reviu atas penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), telah sesuai penyajian saldo akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dalam CaLK (halaman 119), yaitu sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal CaLK (Rp)	Saldo Awal Onface Neraca (Rp)	Ket
1	2	3	4
Saldo Ekuitas Awal Tahun 2022	10.806.560.552,00	10.806.560.552,00	
RK – PPKD	23.691.902.461,75)	23.691.902.461,75)	
Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO)	(23.231.998.397,06)	(23.231.998.397,06)	
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	00	00	
Lain -Lain	00	00	
Gedung tempat kerja lainnya	00	00	
Ekuitas Akhir	11.266.464.616,69	11.266.464.616,69	

KKR PA /
KKR-LPE

Rekomendasi:

E. KETERHUBUNGAN ANTAR KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan hasil Prosedur Analitis (PA) keterhubungan antar komponen laporan keuangan terdapat beberapa selisih perhitungan, dengan uraian sebagai berikut;

KKR-PA

1. Pada uji keterhubungan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca terdapat selisih antara Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (LRA) dan saldo penambahan Aset Tetap Peralatan dan

Mesin (Neraca), dengan uraian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
1	2
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LRA)	468,817,500.00
Penambahan/(Penurunan)	
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)	5,850,583,975.00
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca)	5,311,961,475.00
Selisih	69,805,000.00

Selisih ini disebabkan karena ada belanja Instalasi Lain yang direklas ke peralatan dan mesin

Rekomendasi:

- Memastikan kembali pencatatan/penyajian atas saldo akun dalam Lampiran/Dokumen pendukungnya.
- Melakukan pengungkapan/penyajian akun secara penuh dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

F. PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN LAINNYA

Berdasarkan hasil reviu penyajian informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan, terdapat hal yang perlu mendapat pencermatan, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat penulisan / pencantuman dasar hukum pada laporan keuangan tidak sesuai Hirarki pada Hal (2) sbb

- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- h) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali No 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- i) Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

2. Terdapat informasi pencantuman dasar hukum belum lengkap hal (1) yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) ; **semestinya** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) ; Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang- undang sebagaimana mestinya .

Sbb:

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pelaporan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Rekomendasi:

Melakukan koreksi atau penyajian informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui

Berdasarkan pembahasan atas catatan-catatan yang ditemukan dalam Reviu atas laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, koreksi/perbaikan yang direkomendasikan telah disetujui.

Demikian Catatan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 kami sampaikan.

An. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi Bali
Sekretaris,



I Ketut Meniarta S.STP M.Si
NIP. [REDACTED]

Bali, 13 Februari 2025

An. Inspektur Daerah Provinsi Bali
Inspektur Pembantu Wilayah III,



I Wayan Badung Adiva
NIP. [REDACTED]